



UNIVERSITAS INDONESIA

**MOTIF KONVERGENSI IFRSs DI INDONESIA
DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBIJAKAN PERPAJAKAN**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains**

**RIZKI PIET DARMAWAN
NPM: 0806449254**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KEKHUSUSAN KAJIAN STRATEJIK INTELIJEN
JAKARTA
JANUARI 2011**

i

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta,



Rizki Piet Darmawan

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Rizki Piet Darmawan

NPM : 0806449254

Tanda Tangan :



Tanggal :

UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KEKHUSUSAN KAJIAN STRATEJIK INTELIJEN

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

Tesis yang diajukan oleh

Nama : Rizki Piet Darmawan
NPM : 0806449254
Program Studi : Kajian Stratejik Intelijen
Judul : Motif Konvergensi IFRSs Di Indonesia
dan Dampaknya Terhadap Kebijakan Perpajakan

Dapat diajukan untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Stratejik Intelijen Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Jakarta,

Pembimbing



DR. Dwi Martani

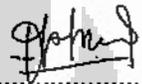
HALAMAN PENGESAHAN

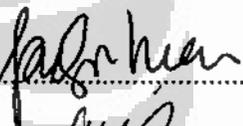
Tesis yang diajukan oleh

Nama : Rizki Piet Darmawan
NPM : 0806449254
Program Studi : Kajian Strategik Intelijen
Judul : Motif Konvergensi IFRSs Di Indonesia
dan Dampaknya Terhadap Kebijakan Perpajakan

ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Strategik Intelijen Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : DR. Dwi Martani (.....)

Penguji : Dra. F. Iriani Sophiaan Yudoyoko, M.Si. (.....)

Penguji : Samingun, Ak., M.Ak., CPA. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : ..7 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil aalamiin penulis panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan innayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Sains dalam bidang ilmu Strategik Intelijen pada Program Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Strategik Intelijen Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Tesis ini berjudul Motif Konvergensi IFRSs Di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Kebijakan Perpajakan, muncul sebagai *concern* penulis sebagai mahasiswa Kajian Strategik Intelijen sekaligus pegawai di Direktorat Jenderal Pajak terhadap paradigma baru dalam praktik akuntansi yang dapat berdampak kepada pemenuhan kewajiban perpajakan

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak, dari masa perkuliahan hingga masa penulisan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tesis ini, terutama kepada:

- 1) Ibu Dra. Fadjar Iriani Sophiaan Yudoyoko, M.Si., selaku Ketua Program Studi Kajian Strategik Intelijen Universitas Indonesia dan juga sebagai Ketua Tim Penguji tesis ini.
- 2) Ibu DR. Dwi Martani, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penulisan tesis ini.
- 3) Bapak Samingun, Ak., M.Ak., CPA., selaku dosen penguji yang telah memberikan koreksi, masukan dan perbaikan atas penulisan tesis ini sehingga tesis ini menjadi lebih baik dan terarah.
- 4) Bapak Edy Faisal, SE., MM., selaku Sekretaris Program Bidang Akademik Program Studi KSI UI yang selalu siap membantu mahasiswa dengan tangan terbuka.
- 5) Seluruh dosen di Program Studi KSI UI.

- 6) Bapak Drs. Moh. Tjiptarjo, M.A. selaku Direktur Jenderal Pajak dan segenap jajaran Direktorat Intelijen dan Penyidikan Pajak yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu strategik intelijen di UI.
- 7) Seluruh rekan-rekan di Sekretariat KSI UI terutama Mas Wing Wiryawan yang selalu siap direpoti penulis selama masa kuliah.
- 8) Seluruh rekan-rekan mahasiswa KSI UI angkatan VI, Mbak Nafis, Dedi, Dwi, Falih, Rudi, Sandy dan dr. Ido, yang telah bersama-sama berjuang selama masa kuliah. Terima kasih atas berbagai diskusi, masukan dan info materi kuliah yang terlewatkan.
- 9) Seluruh keluarga penulis, terutama almarhumah Ibunda tercinta yang harus dipanggil Yang Maha Kuasa saat penulis menjalani proses penulisan tesis. Ibunda telah memberikan banyak keajaiban lewat doa-doanya hingga penulis bisa menjalani pendidikan di KSI UI. Doa dan cinta dari hati kami akan selalu mengiringi dan menyertai Ibunda hingga akhir hayat.
- 10) Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu di halaman ini, yang telah membantu baik materiil berupa informasi maupun dukungan moril.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam tesis ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan, namun harapan penulis tesis ini memberikan manfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang berkenan membacanya. Akhimya penulis berharap semoga tesis ini dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi Kajian Strategik Intelijen di Universitas Indonesia.

Jakarta,

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Piet Darmawan
NPM : 0806449254
Program Studi : Kajian Strategik Intelijen
Program : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusice Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Motif Konvergensi IFRSs Di Indonesia
dan Dampaknya Terhadap Kebijakan Perpajakan**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal :

Yang menyatakan,



(Rizki Piet Darmawan)

ABSTRAK

Nama : Rizki Piet Darmawan
Program Studi: Pascasarjana Kajian Strategik Intelijen
Judul : Motif Konvergensi IFRSs Di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Kebijakan Perpajakan

Tesis ini membahas motif konvergensi IFRSs di Indonesia dan bagaimana dampaknya terhadap kebijakan perpajakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perekonomian dunia didominasi oleh sistem kapitalisme global yang bercirikan pergerakan modal uang yang bebas, lintas batas dan memberi peluang investasi portofolio lebih berkembang dari FDI. Kebutuhan untuk mengalirkan ataupun mendapatkan modal lintas batas akhirnya mendorong terwujudnya IFRSs sebagai standar akuntansi global. Konvergensi IFRSs di Indonesia merupakan sebuah kenyataan global yang tidak bisa dihindarkan dan bukan sebuah opsi karena status pelaku dalam lingkungan masyarakat ekonomi global sekaligus konsekuensi keanggotaan dalam organisasi internasional yang mendukung konvergensi. Kebijakan otoritas pajak untuk merespon konvergensi IFRSs seharusnya berkaitan dengan fungsi budgetair dan regulerend bagi perekonomian nasional.

Kata kunci:

IFRSs, kapitalisme global, investasi portofolio, FDI, pajak

ABSTRACT

Name : Rizki Piet Darmawan
Study Program : Graduate School of Strategic Intelligence Studies
Judul : IFRSs Convergence Motive in Indonesia
and Its Impact to Tax Policy

The concern of this study is about IFRSs convergence motive in Indonesia and its impact to tax policy. The study uses qualitative method research and descriptive design approach. The findings show that world economic system is dominated by global capitalism system that identic with the free movement of capital and give portfolio investment a chance to rise faster than foreign direct investment. A need to flow or get borderless capital finally encourage IFRSs as global accounting standard. IFRSs convergence in Indonesia is an unavoidable global reality. It was not an option because Indonesia is an actor in global economic society and its consequence as member of international organizations that support IFRSs convergence. Tax authority policy to respon IFRSs convergence should be related with budgetair and regulerend function for national economy.

Key words:

IFRSs, global capitalism, portfolio investment, FDI, tax

DAFTAR ISI

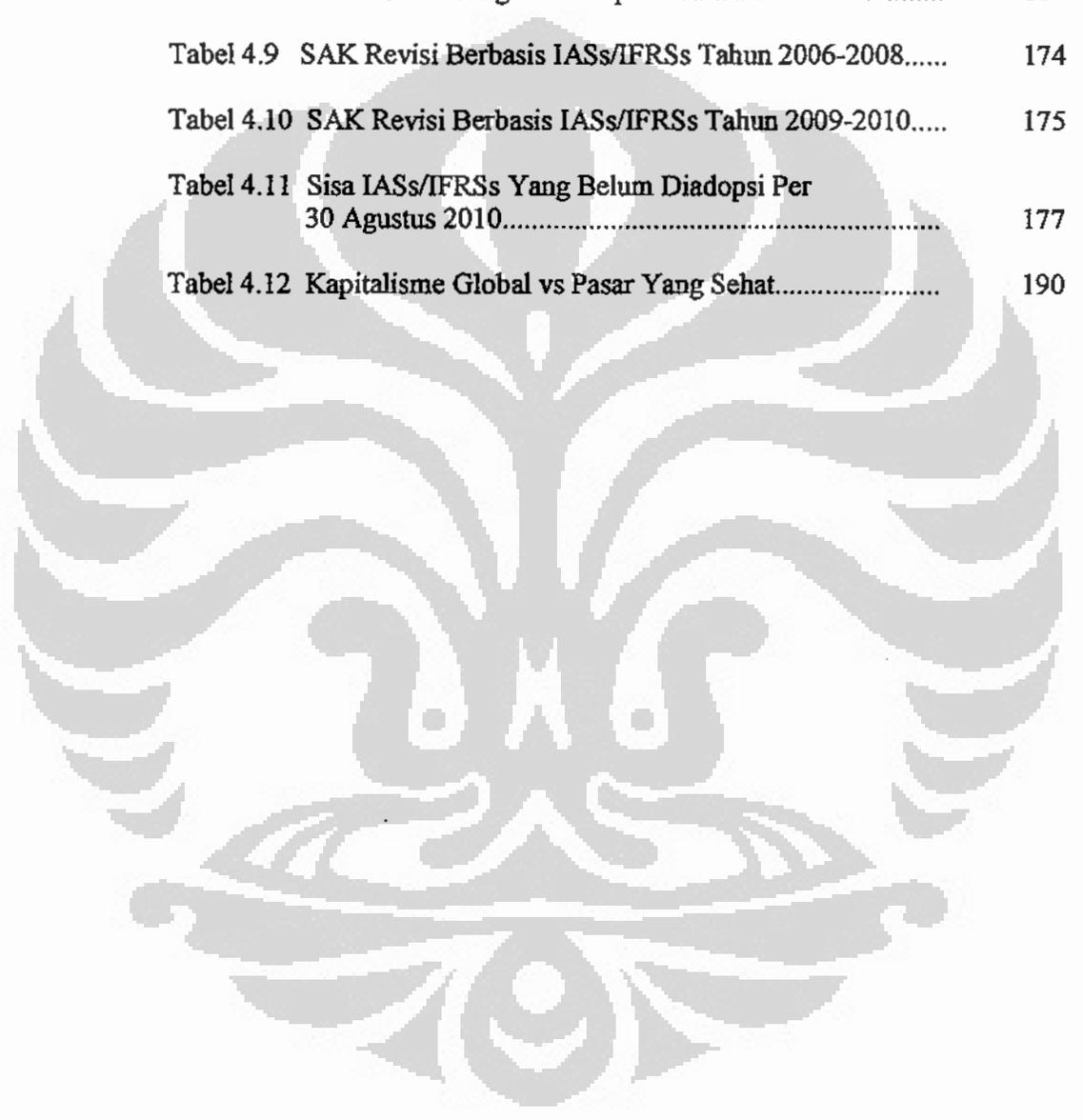
HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1.4 Kajian Pustaka.....	10
1.4.1 Globalisasi Ekonomi.....	10
1.4.1.1 Pendekatan Sistem Dunia.....	13
1.4.1.2 Pendekatan Budaya Global.....	14
1.4.1.3 Pendekatan Masyarakat Global.....	14
1.4.1.4 Pendekatan Kapitalisme Global.....	15
1.4.2 Ideologi Ekonomi Dunia.....	17
1.4.3 Investasi Global.....	19
1.4.4 Regulasi Akuntansi Keuangan.....	20
1.4.5 Harmonisasi, Konvergensi dan Adopsi Standar Akuntansi.....	23
1.4.6 Kebijakan Publik.....	27
1.4.7 Teori Intelijen.....	29
1.4.8 Kerangka Penelitian.....	32
1.5 Hipotesis Penelitian.....	37
1.6 Model Analisis.....	37
1.6.1 Skema Model Analisis.....	38
1.7 Metodologi Analisis Penelitian.....	39
1.8 Sistematika Penulisan.....	40
BAB 2 PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI DI DUNIA PRA KONVERGENSI IFRSs	
2.1 Struktur dan Sistem Perekonomian Dunia.....	41
2.2 Situasi dan Kondisi Perekonomian Dunia.....	58
2.3 Kelemahan Standar Akuntansi di Dunia Selama Ini.....	63
2.4 Sejarah Standar Akuntansi Global.....	68

BAB 3 PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI DI DUNIA ERA KONVERGENSI IFRSs	
3.1 Perkembangan IASB dan IFRSs.....	88
3.2 Pendorong Konvergensi IFRSs di Dunia.....	101
3.2.1 Ekonomi dan Keuangan.....	102
3.2.2 Politik dan Hukum.....	112
3.2.3 Lembaga Profesi Akuntan.....	118
3.3 Konvergensi IFRSs di Dunia, Kendala dan Manfaatnya.....	119
 BAB 4 KONVERGENSI IFRSs DI INDONESIA	
4.1 Kondisi Perekonomian di Indonesia.....	147
4.2 Sejarah Standar Akuntansi di Indonesia.....	159
4.3 Perkembangan SAK Berbasis IFRSs.....	172
4.4 Promotor Konvergensi IFRSs di Indonesia.....	179
4.5 Motif Konvergensi IFRSs di Indonesia.....	182
4.5.1 Perspektif Globalisasi Ekonomi: Pendekatan Kapitalisme Global.....	182
4.5.2 Teori Regulasi Akuntansi Keuangan: Perspektif Pro-Regulasi.....	200
4.6 Perspektif Intelijen Strategik.....	205
 BAB 5 ASPEK PERPAJAKAN DI INDONESIA	
5.1 Rekonsiliasi Fiskal.....	215
5.2 Perbedaan Ketentuan Perpajakan dan SAK Berbasis IFRSs.....	218
5.3 Respon Sementara DJP Terhadap Konvergensi IFRSs.....	228
5.4 Dampak Motif Konvergensi IFRSs di Indonesia Terhadap Kebijakan Perpajakan.....	234
 BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Simpulan.....	246
6.2 Saran.....	247
 GLOSSARY.....	250
 DAFTAR REFERENSI.....	253

DAFTAR TABEL

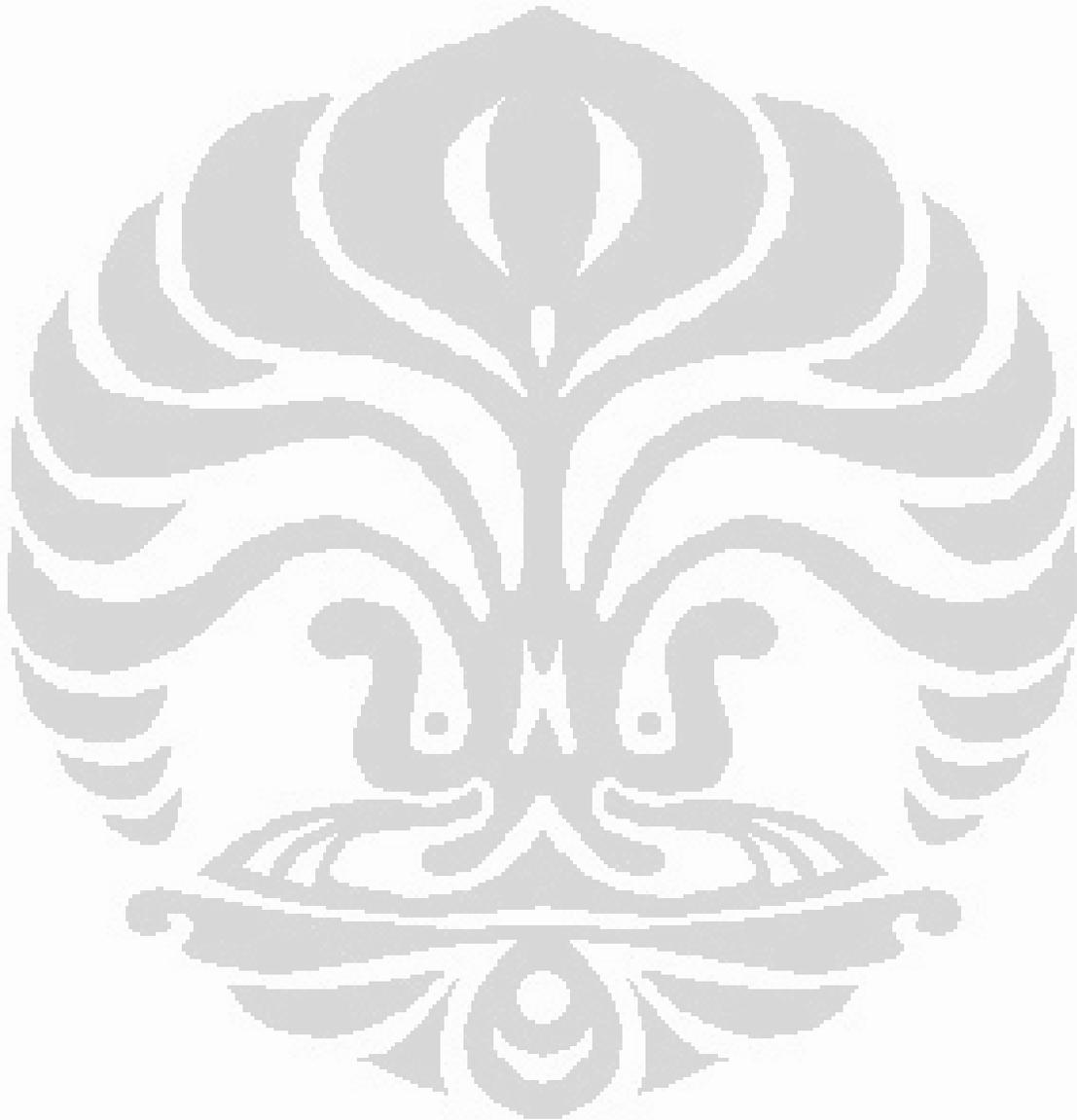
Tabel 1.1	Flow of Things.....	35
Tabel 3.1	Standar Akuntansi Internasional Yang Berlaku Saat IASB Berdiri.....	93
Tabel 3.2	Standar Akuntansi Internasional per 31 Agustus 2010....	95
Tabel 3.3	Daftar Publikasi Due-Process IASB Tahun 2009.....	99
Tabel 3.4	Perusahaan Finansial Dunia Beraset Diatas 1 Trilyun Dollar Amerika.....	103
Tabel 3.5	20 Perusahaan Non Finansial Beraset Terbesar Di Dunia.....	104
Tabel 3.6	Investasi Saham Keluar Terbesar Tahun 2005.....	106
Tabel 3.7	Investasi Fisik Keluar Terbesar Tahun 2006.....	107
Tabel 3.8	Negara Pengekspor Barang Terbesar Di Dunia Tahun 2006.....	111
Tabel 3.9	Status IFRSs Negara-negara G-20.....	116
Tabel 3.10	Chinese Accounting Standards.....	128
Tabel 3.11	Indian Accounting Standards Tahun 2001 – 2006.....	133
Tabel 3.12	Migrasi ke Financial Reporting Standards Malaysia.....	139
Tabel 3.13	Adopsi IASs ke SFAS.....	143
Tabel 3.14	Outstanding Exposure Draft Filipina.....	144
Tabel 4.1	Data Makroekonomi Indonesia.....	148
Tabel 4.2	Rasio FDI Terhadap Pembentukan Investasi Tetap.....	151
Tabel 4.3	Komposisi Kepemilikan Sekuritas per Juni 2008.....	154
Tabel 4.4	Penurunan Peringkat Penilaian Prospek Investasi di Indonesia Di Kalangan Pengusaha Jepang.....	155

Tabel 4.5 Pengelompokan Negara oleh UNCTAD Berdasarkan Kualitas Kinerja dan Potensi Investasi.....	156
Tabel 4.6 Perkembangan Peringkat Ekonomi Indonesia Dari 58 Negara Berdasarkan Penilaian Elemen-elemen Daya Saing.....	157
Tabel 4.7 Elemen Penentu Tingkat Kerawanan Eksternal.....	158
Tabel 4.8 Daftar SAK Yang Berlaku per 1 Januari 2007.....	167
Tabel 4.9 SAK Revisi Berbasis IASs/IFRSs Tahun 2006-2008.....	174
Tabel 4.10 SAK Revisi Berbasis IASs/IFRSs Tahun 2009-2010.....	175
Tabel 4.11 Sisa IASs/IFRSs Yang Belum Diadopsi Per 30 Agustus 2010.....	177
Tabel 4.12 Kapitalisme Global vs Pasar Yang Sehat.....	190



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Pergeseran Kekuatan Ekonomi.....	57
Gambar 5.1	Pengaruh Eksternal dan Motif Konvergensi IFRS Terhadap Kebijakan DJP.....	236



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Susunan IASCF Trustee per 31 Desember 2009
- Lampiran 2 Susunan Anggota IASB per 31 Desember 2009
- Lampiran 3 Susunan Anggota Interpretation Committee per 31 Desember 2009
- Lampiran 4 Susunan Anggota Advisory Council per 31 Desember 2009
- Lampiran 5 Daftar Donatur IASCF
- Lampiran 6 Tingkat Pemakaian IFRSs di Berbagai Yurisdiksi
- Lampiran 7 Daftar 50 Perusahaan Finansial Terbesar Dunia Tahun 2009
- Lampiran 8 Daftar 50 Perusahaan Non Finansial Terbesar Dunia Tahun 2009
- Lampiran 9 Daftar Investasi Saham Keluar Terbesar Negara OECD 2005
- Lampiran 10 Daftar Investasi Saham Keluar Terbesar Negara OECD 2006
- Lampiran 11 Jumlah Perusahaan Terdaftar Di Bursa Efek Dunia Tahun 2005
- Lampiran 12 Perdagangan Ekspor Barang Negara OECD Tahun 2006
- Lampiran 13 Tindakan Otoritas Pajak Dunia Menghadapi Konvergensi IFRSs
- Lampiran 14 Daftar Exposure Draft Cina Tahun 2005
- Lampiran 15 Indian Accounting Standards per Oktober 2000
- Lampiran 16 Kalender Adopsi IFRSs oleh MASB
- Lampiran 17 Proyeksi Distribusi PMA Tahunan 2007 – 2011
- Lampiran 18 Investasi Masuk dan Keluar Indonesia 1998 - 2008
- Lampiran 19 Rasio Stok Investasi Terhadap GDP
- Lampiran 20 Kondisi Sektor Keuangan Dunia Tahun 2009
- Lampiran 21 Urutan Daya Saing Investasi 58 Negara
- Lampiran 22 Skor Corporate Governance Sejumlah Negara Asia 2000 – 2003
- Lampiran 23 ED SAK Revisi Berbasis IASs/IFRSs Tahun 2010

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Kita hidup dalam masyarakat ekonomi global yang bercirikan perdagangan bebas dalam barang dan jasa bahkan terlebih oleh gerak modal (dalam rangka investasi atau hutang) yang bebas baik melalui *direct investment* maupun *portfolio investment*. Akibatnya, angka suku bunga, nilai tukar dan harga saham di berbagai negara sangat erat berkaitan dengan pasar uang global dan berpengaruh sangat kuat pada keadaan ekonomi di banyak negara. Modal uang menikmati posisi istimewa. Modal uang lebih bebas bergerak ketimbang faktor-faktor produksi yang lain dan bahkan lebih *mobile* daripada bentuk-bentuk modal yang lain. Globalisasi pasar uang telah mengurangi kemampuan negara-negara untuk menarik pajak dan mengatur modal karena modal ini dapat bergerak ke tempat lain, sehingga mengingat peran menentukan yang dimainkan modal uang internasional, situasi ini disebut sebagai sistem kapitalisme global (Soros, 2007).

Perlindungan kepentingan masyarakat umum biasanya menjadi tugas negara bangsa. Tetapi kekuasaan negara-negara bangsa telah menciut sementara pasar global internasional makin meluas. Bila modal yang bebas bergerak dan diatur dengan risiko kekayaan itu pergi, pemerintah harus menuruti tuntutan-tuntutannya, sering dengan mengorbankan pertimbangan-pertimbangan lain. Menurut Soros (2007), mengusir modal dapat berakibat lebih merugikan ketimbang penarikan pajak dan membuat peraturan-peraturan. Dalam beberapa cara hal ini merupakan perkembangan yang baik. Perusahaan-perusahaan swasta lebih mahir menciptakan kekayaan ketimbang negara dan persaingan bebas pada skala global telah menyebabkan akselerasi produktivitas. Sedangkan negara-negara sering menyalahgunakan kekuasaannya dan globalisasi justru menawarkan suatu derajat kebebasan individual, yang tidak mungkin diberikan oleh negara manapun.

Akuntansi harus memberikan respon terhadap kebutuhan masyarakat akan informasi yang terus berubah dan mencerminkan kondisi budaya, ekonomi,

hukum, sosial dan politik yang ada dalam lingkungan kegiatannya. Sejarah akuntansi dan para akuntan memperlihatkan perubahan secara terus menerus. Akuntansi memberikan informasi pengambilan keputusan kepada pasar sekuritas domestik dan internasional yang sangat besar. Menurut Kartikahadi (2010), dalam suatu sistem ekonomi pasar, mutlak diperlukan standar akuntansi keuangan yang dapat diandalkan agar pasar uang dan pasar modal dapat berkembang dengan sehat. Lambat laun akuntansi telah memperluas lingkungannya terhadap konsultasi manajemen dan menggabungkan teknologi informasi yang makin berkembang ke dalam sistem dan prosedurnya (Choi dan Meek, 2005).

Perubahan yang terus terjadi di lingkungan kegiatan akuntansi diimplementasikan para akuntan dunia dengan melakukan harmonisasi standar akuntansi. Arus dana telah melintas batas negara melalui pasar uang dan pasar modal secara deras. Tetapi sejumlah perusahaan yang berusaha memperoleh modal di luar pasar negara asal dan para investor yang berusaha untuk melakukan diversifikasi investasi secara internasional menghadapi masalah yang makin meningkat sebagai akibat dari perbedaan nasional dalam hal akuntansi, pengungkapan dan audit. Sebagai jawaban atas kondisi itu, upaya harmonisasi standar akuntansi semakin meningkat dilakukan. Upaya harmonisasi mengerucut pada usaha konvergensi memasuki milenium ketiga sejalan dengan restrukturisasi IASC (International Accounting Standard Committee) menjadi IASB (International Accounting Standard Board) yang bertujuan mengembangkan satu set standar akuntansi global dan berusaha mendorong konvergensi standar akuntansi nasional dan IFRSs (International Financial Reporting Standards) sebagai standar akuntansi global.

Menurut Kartikahadi (2010) di era globalisasi, program konvergensi IFRSs adalah suatu keharusan yang tak perlu diragukan. Perkembangan konvergensi menjadi relatif cepat dan dinamis di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Hal ini juga dikarenakan program IASB tersebut didukung banyak lembaga atau organisasi dunia maupun regional, seperti UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) dan IOSCO (International Organization of Securities Commission). Dipicu oleh krisis finansial global, pada

Universitas Indonesia

bulan Nopember 2008 di Amerika Serikat, negara-negara G-20 termasuk Indonesia membuat kesepakatan dalam *Declaration of Summit on Financial Markets and the World Economy* yang beberapa isinya mendorong terciptanya standar akuntansi global berkualitas tinggi dan mendorong kerja sama antara *accounting standard setters* dengan regulator dan pengawas. Akhirnya pada tanggal 23 Desember 2008, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam siaran persnya mendeklarasikan rencana Indonesia untuk melakukan konvergensi IFRSs dalam pengaturan standar akuntansi keuangan. Pengaturan perlakuan akuntansi yang konvergen dengan IFRSs akan diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Langkah IAI ini juga merupakan konsekuensi sebagai anggota International Federation of Accountants (IFAC), sebuah lembaga akuntan dunia yang sangat mendukung usaha IASB untuk menjadikan IFRSs sebagai standar akuntansi global. Meskipun demikian, menurut IAI rencana konvergensi IFRSs di Indonesia diputuskan setelah melalui pengkajian dan penelaahan yang mendalam dengan mempertimbangkan seluruh risiko dan manfaat konvergensi.

Di dunia, penggunaan IFRSs sebagai standar akuntansi keuangan dipelopori oleh negara-negara yang tergabung dalam the European Union (EU) atau Uni Eropa setelah pada bulan Juli 2002, the European Parliament and Council sebagai lembaga tertinggi Uni Eropa untuk kepentingan politik dan ekonomi, mengeluarkan *Regulation Act EC 1606/2002* yang menyatakan mulai tahun pelaporan keuangan yang diawali sejak tanggal 1 Januari 2005, seluruh perusahaan dari negara-negara anggota Uni Eropa yang sekuritasnya terdaftar di bursa efek di wilayah Uni Eropa diwajibkan membuat laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan IFRSs. Ibarat gelombang tsunami, penggunaan IFRSs sebagai standar akuntansi keuangan akhirnya menyebar ke seluruh dunia dengan tingkat dan jenis pemakaian yang berbeda-beda. Menurut data IASB yang dikutip IAI dalam siaran pers konvergensi IFRSs, saat ini terdapat 102 negara yang menerapkan IFRSs dengan tingkat kewajiban yang berbeda-beda, dengan rincian: 23 negara mengizinkan penggunaan IFRSs secara sukarela, 75 negara mewajibkan penggunaan IFRSs untuk seluruh perusahaan domestik dan 4 (empat) negara mewajibkan penggunaan IFRSs untuk perusahaan domestik tertentu.

Universitas Indonesia

Dalam menjelaskan manfaat dari pemakaian IFRSs sebagai standar akuntansi global, para pakar akuntansi dari dunia barat banyak berpijak pada sisi tujuan rasionalitas ekonomi. Mereka beragumen dengan menyajikan “*logical guide*” bahwa penggunaan IFRSs akan bermanfaat untuk mengurangi *cost of capital* (biaya modal), meningkatkan investasi fisik dan finansial global dan mengurangi biaya penyusunan laporan keuangan. IFRSs memberikan manfaat terhadap keterbandingan laporan keuangan dan peningkatan transparansi. Keefektifan pasar di era globalisasi tergantung pada ketepatan waktu dari informasi keuangan yang transparan, dapat dibandingkan dan relevan. *Stakeholder* di era kompetisi global tidak hanya ingin mengetahui informasi keuangan dari satu perusahaan saja, melainkan dari banyak perusahaan dari seluruh dunia, untuk tujuan *benchmarking*. Hal tersebut bisa dicapai jika perusahaan-perusahaan di dunia tidak memakai tata cara, bentuk dan prinsip pelaporan keuangan yang berbeda-beda. Menurut Hoesada (2010), paradigma konvergensi kepada IFRSs adalah tentang sebuah tatanan dunia baru dengan berbagai kemudahan berbisnis dan berinvestasi pada belahan dunia manapun dengan kemudahan lalu lintas dana produktif ke negara yang paling tepat mengelolanya. Pengadopsian IFRSs sebagai standar akuntansi global ditekankan sebagai proses teknik semata yang berbasis pada efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, dimana tidak ada politik dan sebuah kekuatan yang ikut berperan di dalamnya

Sebaliknya dari sisi ekonomi politik, pemakaian IFRSs sebagai standar akuntansi global dianggap membawa misi imperialisme di era globalisasi dari kekuatan ekonomi dan finansial tertentu dan mengeliminasi alasan rasionalitas ekonomi (Abeysekera, 2005). Globalisasi dianggap menghasilkan peningkatan konsentrasi dan monopoli berbagai sumber daya dan kekuatan ekonomi oleh perusahaan-perusahaan multinasional (MNCs) dan investor finansial global melalui *direct investment* atau *portfolio investment*. Terjadi globalisasi dalam kebijakan dan mekanisme pembuatan kebijakan nasional. Kebijakan-kebijakan nasional, yang meliputi bidang sosial, ekonomi, budaya dan teknologi, yang saat ini berada dalam yurisdiksi suatu pemerintah dan masyarakat dalam satu wilayah negara, bergeser menjadi di bawah pengaruh atau diproses oleh badan-badan internasional atau perusahaan besar serta pelaku ekonomi, keuangan internasional

Universitas Indonesia

(Konigsgruber, 2007). Imperialisme dalam hal ini diharmonisasikan melalui pengumpulan negara-negara imperialisme yang direpresentasikan dalam negara-negara anggota komite IASB dengan berusaha mengontrol pembuatan keputusan negara-negara lain dengan memandatkan standar akuntansi global. Implementasi IFRSs hanya akan memberi manfaat besar kepada negara-negara yang memiliki sistem budaya, legal dan ekonomi yang sama dengan negara-negara yang terlibat dalam penyusunan IFRSs dan tidak bagi negara-negara yang tidak memiliki kesamaan tersebut.

Indonesia mulai bersentuhan dengan standar akuntansi internasional pada saat IAI memilih *United States Generally Accepted Accounting Principles* (US GAAPs) sebagai kiblat dalam penyusunan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) pada tahun 1973. Tetapi pada tahun 1994 acuan pokok IAI beralih ke *International Accounting Standards* (IASs) yang dikeluarkan IASC saat menyusun Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai pengganti PAI. Menurut Rosser (1999), motif diadopsinya IASs ke dalam SAK pada saat itu adalah untuk menarik aliran modal asing masuk ke Indonesia pasca menurunnya dominasi ekspor minyak bumi sebagai sumber penggerak perekonomian negara. Sedangkan saat IAI mencanangkan proses konvergensi IFRSs, Basri (2009) mengungkapkan fakta baru mengenai terjadinya perubahan mendasar yang telah merombak bangunan ekonomi Indonesia, yaitu kemerosotan tingkat *direct investment* dan meningkatnya *portfolio investment* yang justru semakin mengokohkan sistem *financially driven capitalism* di Indonesia, sebuah sistem yang rentan mengalami krisis keuangan dan tidak bisa diandalkan untuk meningkatkan penerimaan devisa negara. IFRSs justru diadopsi untuk membuka peluang *fund raising* karena semakin mengglobalnya pasar modal.

Dalam usaha konvergensi IFRSs ke standar akuntansi nasional di seluruh dunia, aspek perpajakan muncul sebagai hambatan utama dalam menyatukan standar akuntansi dan penyajian laporan keuangan di dunia, selain sistem hukum (Purba, 2010). Di Indonesia, gesekan ini sudah muncul sebelum IAI mendeklarasikan secara resmi rencana konvergensi IFRSs dengan disahkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomer 16 (revisi 2007) Aset Tetap sebagai bagian dari proses konvergensi IFRSs. Ketentuan perpajakan,

Universitas Indonesia

dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan Nomer 79 Tahun 2008 (PMK 79/2008), dan PSAK 16 (2007) menerapkan prosedur yang sangat berbeda dalam revaluasi aktiva tetap. OECD melalui Committee on Fiscal Affairs (CFA) yang bertujuan mengurangi ketentuan perpajakan yang menghalangi arus perdagangan dan investasi, belum mengeluarkan sikap terhadap implikasi perpajakan yang muncul dari konvergensi IFRSs. Tetapi komite ini tetap “memprioritaskan” kepentingan pemodal internasional melalui persetujuan *code of conduct for multinational enterprises* yang ditujukan kepada lembaga penyusun standar akuntansi. Indonesia sendiri adalah negara yang ikut menandatangani OECD/United Nations (UN) Model Tax Convention dan aktif melakukan dialog dengan CFA dan OECD yang merupakan salah satu organisasi internasional yang mendukung usaha konvergensi standar akuntansi global.

Selama ini di Indonesia, perbedaan ketentuan dalam SAK dan undang-undang perpajakan dalam praktiknya disikapi dengan pendekatan *quasi-dependent system* (kuasi-dependen) dimana entitas melakukan pencatatan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK, sedangkan untuk keperluan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) mereka menyajikan laporan laba rugi fiskal berdasarkan hasil rekonsiliasi fiskal. Dengan dikeluarkannya beberapa PSAK revisi yang berafiliasi pada IFRSs, maka hal tersebut akan semakin menambah kerumitan dan kompleksitas rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan pada banyak perusahaan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas perpajakan di Indonesia akan dihadapkan pada pilihan kebijakan baru untuk mengadopsi sebagian atau seluruh IFRSs atau tetap pada *status quo*.

Tesis ini akan membahas motif konvergensi IFRSs di Indonesia lewat pendekatan ilmu intelijen dengan analisis motif berdasarkan pada teori regulasi akuntansi dan ekonomi politik yaitu pendekatan teori globalisasi ekonomi yang ditopang liberalisasi perdagangan dan finansial. Dari sudut pandang ilmu intelijen, fenomena penggunaan IFRSs di dunia yang segera melanda Indonesia pada tahun 2012 dapat dipandang sebagai sebuah ancaman bagi Indonesia berkaitan dengan kepentingan kekuatan modal dunia yang dapat melemahkan pembangunan ekonomi nasional dan bagi DJP hal ini berkaitan dengan perbedaan yang terjadi

Universitas Indonesia

antara IFRSs dengan undang-undang perpajakan yang dapat mengganggu upaya peningkatan penerimaan pajak. Dengan menganalisis bagaimana sebenarnya motif konvergensi IFRSs di Indonesia dan melihat kebijakan perpajakan terhadap konvergensi IFRSs di dunia, diharapkan tesis ini dapat mendapatkan antisipasi dan sensitivitas terhadap ancaman tersebut untuk kemudian menyediakan pilihan tindakan yang diimplementasikan dalam sebuah kebijakan atau tidak.

1.2 Perumusan Masalah

Manfaat adopsi/penggunaan IFRSs terhadap keterbandingan pelaporan keuangan dan peningkatan transparansi menjadi pertimbangan IAI untuk melakukan konvergensi. Bagi SAK, adopsi IFRSs dapat meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya penyusunan. Selain itu IAI juga menyatakan konvergensi IFRSs dapat mengurangi *cost of capital* dengan membuka peluang *fund raising* melalui pasar modal secara global dan menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan. Pada akhirnya penggunaan IFRSs akan meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan itu sendiri (Kurniawan, 2010). Argumen IAI dengan menyajikan “*logical guide*” ini umum digunakan di negara lain untuk mengedepankan dan meyakinkan manfaat yang bisa diperoleh dari adopsi IFRSs.

Tetapi beberapa peneliti akuntansi justru menyuarakan pendapatnya bahwa terdapat konspirasi ekonomi-politik yang sedang dimunculkan oleh pihak-pihak yang sedang merumuskan standar akuntansi yang diharapkan dapat berlaku secara global. Ambisi IASB untuk melakukan harmonisasi standar akuntansi dan pelaporan keuangan di dunia sangat dipengaruhi oleh keinginan melancarkan arus modal atau investasi dari para investor finansial global atau MNCs melalui *direct investment* atau *portfolio investment*. Proses akunting tidak hanya mengelola aliran modal yang melintasi batas, ruang dan waktu tetapi juga memunculkan keinginan praktik standarisasi akunting lintas batas yang bermuatan ekonomi-politik untuk kepentingan mereka sendiri.

Dalam tujuan dibentuknya IASB, pelaku pasar modal bahkan menjadi prioritas penerima manfaat dari dikembangkannya standar akuntansi global. Di sisi lain, sebagai negara berkembang, jumlah dan komposisi pelaku lokal pasar modal dan perusahaan nasional bertaraf multinasional di Indonesia, sebagai *main*

Universitas Indonesia

target keuntungan konvergensi IFRSs, termasuk kecil apabila dibandingkan dengan negara-negara maju.¹ Bagi Indonesia, untuk bisa mengatasi berbagai macam masalah: pengangguran, kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan kerawanan sosial, meningkatnya investasi riil/langsung sangat diharapkan untuk meningkat dibandingkan investasi portfolio yang rentan terhadap krisis keuangan. Dengan masih rendahnya peringkat elemen-elemen daya saing investasi Indonesia² dan kualitas kinerja dan potensi investasi Indonesia³, konvergensi IFRSs dikhawatirkan malah justru hanya akan semakin meningkatkan investasi portofolio yang lebih praktis dibandingkan investasi riil/langsung.

Dari sisi perpajakan, dampak konvergensi IFRSs di Indonesia yang diimplementasikan dalam penerapan PSAK revisi memunculkan beberapa perbedaan prinsip baru dalam pembukuan antara pajak dan perusahaan yang sebenarnya sebuah hal yang wajar. Bagi wajib pajak, perubahan dalam PSAK terbaru tersebut menimbulkan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban yang berbeda, dasar penilaian aset dan kewajiban yang berbeda serta berpotensi menambah atau mengurangi jumlah penghasilan kena pajak. DJP sebagai otoritas perpajakan di Indonesia sejauh ini masih bersikap *status quo* menyikapi dikeluarkannya beberapa PSAK baru yang terkonversi dengan IFRSs. Meskipun demikian mereka telah melakukan beberapa kajian dan analisis terhadap perbedaan prinsip antara PSAK terbaru dengan ketentuan perpajakan yang ada (Yunirwansyah, 2010). G-20 sendiri sudah bersepakat bahwa konvergensi standar akuntansi keuangan sebaiknya bersinergi diantaranya dengan peraturan perpajakan (Tumakaka, 2010). Pendekatan kuasi-dependen dalam pemenuhan kewajiban perpajakan Indonesia akan menyebabkan kebingungan dan semakin bertambah rumit dan kompleksnya rekonsiliasi fiskal yang dibuat wajib pajak sepanjang DJP masih bersikap *status quo* saat Indonesia resmi mengimplementasikan IFRSs pada tahun 2012. Sedangkan urusan pajak adalah

¹ Data perbandingan jumlah perusahaan yang terdaftar di bursa efek-bursa efek dunia dapat dilihat di Tabel 3.13

² Berdasarkan data International Institute for Management Development, elemen-elemen daya saing tersebut terdiri dari kinerja ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis dan kondisi infrastruktur.

³ Berdasarkan data UNCTAD mengenai pengelompokan negara berdasarkan kualitas kinerja dan potensi investasi, Indonesia masuk dalam kelompok paling payah bersama Bangladesh, India, Pakistan dan Sri Lanka.

salah satu komponen untuk menilai tingkat kemudahan berbisnis di Indonesia untuk menarik minat investor.⁴

Berdasarkan uraian diatas dirumuskan permasalahan dalam kerangka ilmu intelijen sebagai berikut:

Sebagai anggota IFAC dan bagian dari masyarakat global yang aktivitas ekonominya semakin tanpa batas (*borderless*), IAI mengumumkan pengaturan perlakuan akuntansi yang konvergen dengan IFRSs akan diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Tesis ini ingin segera mengetahui motif konvergensi IFRSs di Indonesia dan dampaknya terhadap kebijakan perpajakan dengan menganalisis:

- a. Seberapa besar perkembangan investasi global, *direct investment* dan *portfolio investment*, mendorong proses konvergensi IFRSs di dunia?
- b. Bagaimana proses konvergensi IFRSs di Indonesia dan siapakah pihak yang sebenarnya paling diuntungkan dari proses konvergensi IFRSs di Indonesia?
- c. Seberapa besar pengaruh motif konvergensi IFRSs di Indonesia terhadap kebijakan perpajakan yang mungkin dikeluarkan DJP?

untuk memprediksi apakah proses konvergensi IFRSs akan mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia dan output kebijakan DJP untuk meresponnya.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut diatas maka tesis ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan gambaran bagaimana sebenarnya struktur dan sistem perekonomian di dunia saat ini.
- b. Mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan ekonomi politik dilakukannya proses konvergensi IFRSs di dunia.
- c. Memberikan antisipasi dan sensitivitas ancaman/risiko yang muncul dari proses konvergensi IFRSs di Indonesia.

⁴ Dari data *Doing Business* yang dikeluarkan Word Bank, urusan pajak menjadi salah satu dari 11 (sebelas) komponen untuk menilai kemudahan berbisnis di 178 negara yang disurvei.

- d. Memberikan pilihan tindakan yang akan menjadi dasar pertimbangan bagi kebijakan perpajakan yang mungkin dikeluarkan DJP sebagai respon atas proses konvergensi IFRSs di Indonesia.

1.4 Kajian Pustaka

1.4.1 Globalisasi Ekonomi

Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang sering ditemukan dalam mendefinisikan globalisasi, yaitu kesalingterhubungan integrasi dan interdependensi (Friedman, 2002). Lodge (1991) mendefinisikan globalisasi sebagai suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungan. Dengan pengertian tersebut, maka dalam globalisasi bisa dikatakan bahwa masyarakat dunia hidup dalam suatu era dimana sebagian besar kehidupan mereka sangat ditentukan oleh proses-proses global.

Sedangkan menurut Amal (1992) globalisasi merupakan proses munculnya masyarakat global, yaitu suatu dunia yang terintegrasi secara fisik, dengan melampaui batas-batas negara, baik ideologis dan lembaga-lembaga politik dunia. Definisi tersebut lebih mirip dengan keyakinan kaum globalis yang memahami globalisasi sebagai terwujudnya sebuah ekonomi dunia yang terintegrasi. Bangsa-bangsa menurut pandangan ini, baik secara individual maupun secara kolektif, mendukung globalisasi dengan menghilangkan hambatan-hambatan terhadap perdagangan internasional, sehingga memudahkan arus perdagangan, investasi, mata uang dan informasi secara bebas melintasi batas-batas nasional.

Sedangkan dalam konsep interdependensi mencakup pengertian bahwa sistem ekonomi dunia, khususnya sistem moneter, saat ini sangat tergantung antara satu dengan yang lain (Winarno, 2009). Akibatnya, kebijakan-kebijakan pada skala nasional tidak dapat begitu saja mengabaikan peristiwa-peristiwa di tingkat global. Demikian juga sebaliknya peristiwa-peristiwa di tingkat nasional pada tataran tertentu akan berpengaruh pada ekonomi global. Krisis finansial

terjadi karena *interconnection* antara sistem keuangan satu negara dengan sistem keuangan negara lain.

Lairson dan Skidmore (1997) memusatkan perhatiannya pada globalisasi ekonomi yang diartikannya sebagai: *a process of deepening and tightening of interdependence among actors in the world economy such that the level and character of participation in international economic relations have increased in significant ways*. Ada 5 (lima) aktivitas ekonomi yang tercakup dalam globalisasi. Pertama, telah terjadi pertumbuhan yang pesat dari transaksi keuangan internasional. Kedua, adanya pertumbuhan tinggi volume perdagangan barang dan jasa, terutama antara perusahaan multinasional. Ketiga, adanya peningkatan *foreign direct investment* (FDI) pesat, yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Keempat, terbentuknya pasar global yang mengurangi segmentasi pasar melalui konvergensi harga pada skala global. Dan kelima, penyebaran teknologi ke seluruh dunia melalui sistem transportasi dan komunikasi yang mempersingkat jarak ruang dan waktu.

Hirst dan Thompson (2004) mengemukakan perlunya untuk membedakan 2 (dua) hal yaitu *international economy* yang mengandung makna bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah interaksi yang semakin intensif antara perekonomian nasional dengan kepentingannya masing-masing dan *a globalized economy* yang mengacu pada pembentukan pasar atau perekonomian global yang harus diperhitungkan oleh perekonomian nasional ketika merumuskan kebijakannya.

Khor (2002) menarik dua ciri utama dari globalisasi, yaitu: pertama, peningkatan konsentrasi dan monopoli berbagai sumber daya dan kekuatan ekonomi oleh MNCs maupun oleh perusahaan-perusahaan dan dana global dan kedua, yang khas dari globalisasi adalah "globalisasi" dalam kebijakan dan mekanisme pembuatan kebijakan nasional. Kebijakan-kebijakan nasional, yang meliputi bidang sosial, ekonomi, budaya dan teknologi, yang saat ini berada dalam yurisdiksi suatu pemerintah dan masyarakat dalam satu wilayah negara bergeser menjadi di bawah pengaruh atau diproses oleh badan-badan internasional atau perusahaan besar serta pelaku ekonomi, keuangan internasional. Ciri terakhir ini berkaitan erat dengan konsep interdependensi, integrasi dan kesalingterhubungan antar berbagai bidang yang tercakup dalam negara,

Universitas Indonesia

menurunnya peran negara dan semakin menguatnya kekuatan-kekuatan pendukung globalisasi.

Berkaitan dengan menurunnya peran negara, Ohmae (1995) menyatakan bahwa setidaknya ada 4 (empat) faktor yang menyebabkan peran negara semakin termarginalkan di era globalisasi, yaitu: *investment*, *industry*, *information technology* dan *individual consumers*. Faktor pertama, pasar modal di negara maju yang dibanjiri uang tunai untuk investasi. Seringkali terjadi peluang-peluang investasi secara besar-besaran tidak ada dalam wilayah geografis yang sama dimana keuangan tersebut berada, sehingga pasar modal mengembangkan berbagai mekanisme untuk mentransfer dana keuangan itu melintasi batas-batas nasional. Faktor kedua, industri yang mempunyai orientasi lebih global dibandingkan dengan satu dekade sebelumnya. Strategi MNCs tidak lagi dibentuk dan dikondisikan oleh alasan-alasan negara melainkan lebih pada keinginan dan kebutuhan untuk melayani pasar-pasar menarik dimana pun mereka berada dan dalam rangka membuka sumber-sumber dimana perusahaan tersebut beroperasi. Faktor ketiga, yaitu teknologi informasi ditambah dengan rendahnya biaya transportasi membuat MNCs dan aliran modal global semakin mudah bergerak sehingga membuat faktor ini menjadi katalis paling fundamental bagi proses globalisasi. Faktor keempat adalah para konsumen individual yang orientasinya semakin mengglobal dimana mereka semakin menginginkan produk-produk yang terbaik dan paling murah, tidak menjadi masalah bagi mereka darimana produk-produk tersebut berasal.

Seperti halnya dalam sosiologi, ada beberapa cara untuk mengkategorikan teori dan penelitian mengenai globalisasi. Salah satu pendekatan yang paling umum digunakan adalah untuk membandingkan penjelasan antara penyebab tunggal (*mono-causal*) dengan banyak penyebab (*multi-causal*) dari sebuah fenomena (Sklair, 1999). Pendekatan ini merupakan salah satu cara yang berguna untuk memecahkan masalah tersebut, tetapi mempunyai dua kelemahan mendasar. Pertama, pendekatan ini pada akhirnya meletakkan pemikir pada keseluruhan tipe-tipe penjelasan yang berbeda, misalnya, pemikir yang melihat globalisasi sebagai akibat dari pembangunan *material-technological forces* dan yang melihat globalisasi sebagai akibat kekuatan ideologis dan atau kekuatan budaya, dalam

Universitas Indonesia

satu lingkaran yang sama. Kedua, beberapa pemikir menghadirkan keseluruhan penjelasan *mono-causal* dari segala sesuatu. Hampir semua pemikir sebagai *mono-causal* berusaha menunjukkan relevansi dari sebuah keberagaman faktor-faktor seolah-olah cenderung untuk memprioritaskan beberapa faktor diatas faktor yang lain, sedangkan yang sebagai *multi-causal* tidak selalu dapat membuktikan bahwa segala sesuatu menyebabkan segala sesuatu yang lain.

Pendekatan lain adalah dengan jalan membandingkan fokus dari kajian-kajian mengenai globalisasi (Winarno, 2009). Dalam cara pendekatan ini, dapat ditemukan berbagai macam pendekatan, yaitu *the world-system approach* (pendekatan sistem dunia), *the global cultural approach* (pendekatan budaya global), *the global society approach* (pendekatan masyarakat global) dan *the global capitalism approach* (pendekatan kapitalisme global). Dalam studi-studi mengenai globalisasi, pendekatan kapitalisme global merupakan pendekatan yang paling produktif dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan yang lain.

1.4.1.1 Pendekatan Sistem Dunia

Pendekatan ini didasarkan pada perbedaan diantara peran inti negara, *semiperipheral* dan *peripheral* dalam pengertian perubahan-perubahan peran mereka dalam *international division of labour* yang didominasi oleh sistem kapitalisme dunia. Meskipun pendekatan sistem dunia merupakan salah satu pendekatan yang cukup berguna untuk mengkaji globalisasi, tetapi pendekatan ini tidak membuat perbedaan yang jelas dari dimensi global sebagai bagian dari fokus internasional yang selalu ditekankan. Bahkan kedua istilah ini, global dan internasional, digunakan untuk saling menggantikan.

Emanuel Wallerstein sebagai pencetus pendekatan sistem dunia bahkan jarang menggunakan kata globalisasi. Menurutnya, ilmu ekonomi merupakan model dari pembagian kerja yang membedakan negara-negara *semiperipheral* dengan negara *peripheral* (Winarno, 2009). Kelemahan dari pendekatan ini yaitu terlalu menekankan satu aspek dari proses globalisasi dan kurang memberi perhatian dimensi yang lain.

1.4.1.2 Pendekatan Budaya Global

Pendekatan ini berasal dari penelitian-penelitian dalam *globalization of culture* (globalisasi budaya). Pendekatan ini menfokuskan pada masalah-masalah yang berhubungan erat dengan homogenisasi budaya (Featherstone, 1994). Peneliti pendekatan ini cenderung memberi prioritas pada budaya dibandingkan dengan fenomena politik dan ekonomi. Hal ini berbeda dengan pendekatan sistem dunia yang lebih mempertajam penelitian-penelitian di bidang ekonomi.

Dalam pendekatan ini terdapat suatu *common interest* menyangkut pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana individu atau identitas nasional dapat bertahan dalam menghadapi munculnya budaya global. Dasar dari pendekatan ini adalah percepatan dalam bidang teknologi komunikasi dan penyebaran media massa (khususnya televisi) sehingga menciptakan apa yang disebut Marshal McLuhan sebagai *global village* (Winarno, 2009) Masalah dalam pendekatan ini adalah karena budaya global masih merupakan suatu hal yang problematis, apakah sebagai *reality*, *probability* atau sebagai sebuah *fantasy*?

1.4.1.3 Pendekatan Masyarakat Global

Menurut pendekatan ini, konsep masyarakat global telah menjadi gagasan yang dapat dipercaya hanya dalam jaman modern dan khususnya ilmu pengetahuan, teknologi, industri dan nilai-nilai universal yang semakin menciptakan sebuah dunia pada abad ini yang berbeda dari masa-masa sebelumnya. Hal ini menurut Giddens (1991) menciptakan *global awareness* atau kesadaran global. Ide mengenai *space time distanctiation* dan *time space compression* menggambarkan bagaimana proses globalisasi memampatkan, memperluas dan memperdalam ruang waktu untuk semua orang di dunia dan selanjutnya menciptakan kondisi bagi masyarakat global.

Pendekatan ini dikritik karena merupakan pendekatan yang agak provokatif ketika pendekatan ini secara relatif mudah untuk membuktikan secara empiris dimensi-dimensi obyektif dari globalisasi sambil melibatkan diri dalam mayoritas besar dari masyarakat dunia. Gagasan masyarakat global berdasarkan pada hubungan-hubungan subyektif bagi globalisasi adalah sangat spekulatif.

1.4.1.4 Pendekatan Kapitalisme Global

Pendekatan ini meletakkan kekuatan-kekuatan dominan global dalam struktur kapitalisme yang lebih mengglobal. Penulis-penulis yang termasuk dalam pendekatan ini adalah Ross dan Trachte (1990), Sklair (1995), McMichael (1996) dan Robinson (1996). Mereka berusaha menuju ke arah konsep globalisasi yang melibatkan lebih dari hubungan-hubungan negara dan penjelasan yang berpusat pada negara (*state centris*) dalam persaingan ekonomi nasional antara satu dengan yang lain.

Ross dan Trachte (1990) memfokuskan secara spesifik kapitalisme sebagai suatu sistem sosial yang dapat dianalisis dalam tiga tingkatan, yaitu: pertama, *the level of the internal logic of the system* yang diinspirasi dari pikiran-pikiran Karl Marx dan Adam Smith; kedua, *the structural level of historical development*; dan ketiga, *the level of specific formation or society*. Keduanya menjelaskan deindustrialisasi di *heartland* kapitalisme dan transformasi dari beberapa negara yang disebut sebagai negara Dunia Ketiga. Mereka juga berpendapat bahwa globalisasi dari sistem kapitalisme secara mendalam berhubungan dengan krisis pada tahun 1970-an dan setelahnya.

Pendekatan ini juga meneliti bahwa model sistem global didasarkan pada konsep praktik-praktik transnasional yang berasal dari aktor-aktor diluar negara dan lintas batas negara. MNCs adalah institusi yang paling penting dalam praktik transnasional ekonomi. Lenin (1999) dalam Chomsky (2008) mengaitkan antara imperialisme dengan perkembangan kapitalisme. Menurutnya, imperialisme adalah tahapan terkini yang tak terelakkan dalam logika perkembangan kapitalisme. Imperialisme lahir dalam suatu krisis kapitalisme di suatu negeri. Agar keluar dari krisis periodiknya, kapitalisme harus keluar untuk mencari pasar baru, mengekspansi batas-batas negara bangsa untuk mencari lahan, tenaga kerja dan bahan-bahan mentah untuk produksi kapitalis yang murah. Perkembangan dinamika kapitalisme global saat ini ditopang oleh suatu tatanan ekonomi yang otonom, yang hanya diatur oleh pasar dan MNCs (Hardt dan Negri, 2001). Tetapi Petras dan Veltmeyer (2005) lebih menekankan pentingnya peran negara-negara imperial menjadi tempat bergantung perusahaan-perusahaan multinasional dan kapitalisme global untuk menanggulangi krisis dan menjamin keuntungan mereka.

Universitas Indonesia

Beberapa ahli sejarah ekonomi, seperti Max Weber, Werner Sombart dan James Winjun, mengaitkan akuntansi dan kapitalisme (Belkaoui, 2000). Alasan yang dikemukakan adalah bahwa sistem pembukuan berpasangan merupakan sesuatu yang vital bagi perkembangan dan evolusi kapitalisme. Weber mengemukakan jika organisasi kapitalis modern tidak akan mungkin terwujud tanpa sistem pembukuan yang rasional yang memisahkan kepentingan bisnis dan pribadi. Sedangkan Sobert mengajukan tesis bahwa kapitalisme dan akuntansi saling terkait erat. Kapitalisme tidak akan berjalan tanpa sistem pembukuan, sebaliknya sistem pembukuan tidak akan diperlukan jika kapitalisme tidak menggunakannya sebagai alat ekspansi dalam memperbesar laba. Winjun menyimpulkan bahwa sistem pembukuan berpasangan memiliki kemampuan membuat kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dengan mengungkapkan kesuksesan atau kegagalan sebuah entitas selama periode waktu tertentu. Selanjutnya Winjun menyebutkan 4 (empat) alasan untuk menjelaskan peran pembukuan berpasangan dalam ekspansi ekonomi yang terjadi setelah abad pertengahan:

- a. Pembukuan berpasangan menyumbangkan sikap baru dalam kehidupan ekonomi, dimana tujuan lama perusahaan digantikan oleh tujuan kapitalistik untuk memperoleh *profit*.
- b. Penggunaan sistem akun secara terpadu yang saling terkait memungkinkan pengusaha mengejar *profit* secara rasional. Kondisi ekonomi dapat segera ditentukan dan rencana yang rasional untuk kegiatan di masa datang dapat dikembangkan.
- c. Pembukuan yang sistematis menghasilkan keteraturan dalam akun dan organisasi perusahaan.
- d. Sistem pembukuan berpasangan memungkinkan pemisahan kepemilikan dan manajemen sehingga mendorong pertumbuhan *joint company* yang besar. Teknik pembukuan berpasangan yang terstandarisasi membuat komunikasi dapat dipahami oleh banyak pihak, tidak hanya oleh manajemen saja.

Dalam sistem kapitalisme global yang bercirikan semakin mengalirnya arus lalu lintas modal lintas batas, informasi akuntansi memiliki peranan yang

Universitas Indonesia

sangat penting. Menurut Akisik dan Pfeiffer (2009) dan hasil penelitian CFO Research Services pada tahun 2008, selain melihat tingkat suku bunga yang ditawarkan, investor akan sangat berpegang pada kualitas dan isi laporan keuangan sebelum mereka melakukan investasi, terutama dalam investasi portofolio. Hal ini berkaitan dengan penilaian mereka terhadap risiko investasi.

1.4.2 Ideologi Ekonomi Dunia

Manusia hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang secara keseluruhan membentuk sistem, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi atau kaitan atau hubungan, dari unsur-unsur yang lebih kecil membentuk suatu satuan yang lebih besar dan kompleks sifatnya. Dengan demikian sistem ekonomi adalah interaksi dari unit-unit ekonomi yang kecil (para konsumen dan produsen) ke dalam unit ekonomi yang lebih besar, di suatu wilayah tertentu (Deliarnov, 2009). Dalam suatu sistem ekonomi tercakup nilai-nilai, kebiasaan, adat istiadat, hukum, norma-norma, aturan-aturan berikut kesepakatan tujuan bersama serta otoritas dan kekuasaan untuk mengerahkan sumber daya yang ada untuk tujuan bersama.

Sistem perekonomian yang dianut suatu negara tergantung dari ideologi atau aliran pandangan ekonomi, yang pada gilirannya juga dipengaruhi oleh seperangkat nilai yang dianut oleh bangsa atau kelompok masyarakat. Ideologi atau aliran pemikiran ekonomi yang dipakai ditentukan oleh kondisi lingkungan masyarakat. Kondisi tersebut dapat kebetulan berbeda dari suatu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lain, bahkan untuk kelompok masyarakat yang sama bisa pula berbeda dari waktu ke waktu.

Gilpin (2001) mengidentifikasi bahwa setidaknya ada 3 (tiga) ideologi yang berkaitan secara alamiah dan berfungsi dalam ekonomi politik internasional, yaitu liberalisme, marxisme dan merkantilisme. Sejak tahun 1990-an, relevansi dari ketiga ideologi sebenarnya berubah secara dramatis. Perubahan ini diakibatkan oleh keruntuhan sistem ekonomi komunis Uni Soviet dan semakin terbukanya pasar Cina dikarenakan negara komunis tersebut melangkah ke arah pengelolaan ekonomi kapital. Perubahan ini membuat relevansi marxisme sebagai ideologi yang dapat digunakan untuk mengelola ekonomi dunia dan domestik

menurun, sementara disisi lain kemenangan kaum Kanan Baru di Amerika Serikat dan Inggris Raya membuat paham liberal semakin besar pengaruhnya dalam mengelola ekonomi nasional maupun internasional. Ideologi marxisme saat ini lebih merupakan alat yang dapat digunakan untuk melakukan analisis dan kritik terhadap kapitalisme.

Ideologi merkantilisme atau secara lebih khusus disebut ekonomi nasionalisme terdiri dari elemen analitik dan normatif. Elemen analitiknya adalah dalam rangka mengenali *the anarchic nature of international affairs*, keunggulan negara dan kepentingan-kepentingan mereka dalam hubungan internasional dan arti penting kekuatan dalam hubungan antarbangsa. Namun demikian, menurut Gilpin, merkantilis juga terdiri dari elemen normatif yaitu berisi komitmen dan resep-resep kebijakan yang dihubungkan dengan ekonomi nasional.

Diluar ketiga ideologi tersebut diatas, Gilpin menawarkan perspektif lain yang dapat dikatakan sebagai jalan tengah antara liberal dan merkantilis. Gilpin menyebut perspektif yang dia tawarkan tersebut sebagai perspektif realisme yang berpusat pada negara (*state-centric realism*). Pada satu sisi lain, Gilpin menerima ekonomi nasionalis atau yang sering dia sebut sebagai pendapatan yang berpusat pada negara, sebagai perspektif analitik. Tetapi dia menilai komitmen normatif dari kebijakan ekonomi nasional. Sebaliknya Gilpin mempunyai komitmen terhadap liberalisme ekonomi yang mendorong terjadinya perdagangan bebas melintasi batas-batas negara dan penghilangan hambatan-hambatan perdagangan, meskipun dalam kondisi tertentu dia mendukung kebijakan-kebijakan nasional seperti proteksi perdagangan. Dengan demikian, perspektif yang ditawarkan Gilpin tetap berkomitmen pada liberalisasi perdagangan dan jasa, tetapi dengan tetap meyakini bahwa peran negara tetap menjadi pelaku yang krusial dalam proses tersebut.

Gilpin menunjukkan bukti mengenai kuatnya peran negara dalam pembangunan ekonomi. Salah satu yang ditunjukkan adalah munculnya regionalisme ekonomi di kawasan Eropa atau hubungan tripartit antara Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Dalam beberapa tahun belakangan, Uni Eropa telah menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan dalam perdagangan internasional. Disinyalir menurunnya pengaruh Amerika Serikat dalam ekonomi internasional

Universitas Indonesia

dalam beberapa tahun terakhir adalah semakin kuatnya posisi ekonomi Uni Eropa. Munculnya regionalisme merupakan wujud eksistensi negara yang bersepakat untuk bersama-sama dalam menghadapi globalisasi ekonomi.

1.4.3 Investasi Global

Praktik investasi global di dunia secara garis besar didominasi oleh dua tipe investasi, yaitu *direct investment* (investasi langsung) dan *portfolio investment* (investasi portofolio). UNCTAD (2008) mendefinisikan investasi langsung sebagai investasi dalam bentuk hubungan jangka panjang dan merefleksikan adanya kepentingan dan pengendalian oleh warganegara asing pada sebuah entitas di negara lain. Investasi ini berimplikasi pada tingkat pengaruh yang signifikan dari investor kepada manajemen perusahaan. *Direct investment* dapat diwujudkan dalam bentuk *equity capital*, *reinvested earnings* dan *other direct investment capital* yaitu transaksi *inter-company*. Sedangkan investasi portofolio merupakan investasi dalam bentuk *equity securities* dan *debt securities* seperti obligasi, *notes*, instrumen pasar uang dan derivatif keuangan.

OECD (2005) memperjelas perbedaan antara investasi langsung dan investasi portofolio. Menurut OECD apabila transaksi investasi menghasilkan suara dalam rapat pemegang saham dengan persentase 10 (sepuluh) persen maka transaksi investasi tersebut disebut *direct investment*. Sebaliknya apabila transaksi hanya menghasilkan suara dalam rapat pemegang saham dibawah 10 (sepuluh) persen maka transaksi investasi tersebut diklasifikasikan sebagai *portfolio investment*. Bagi Evans (2001) investasi portofolio berbeda dari investasi langsung karena investasi ini lebih diharapkan untuk meningkatkan likuiditas dan efisiensi pasar modal di negara tujuan daripada investasi langsung yang didefinisikan sebagai investasi fisik yang banyak dilakukan MNCs di negara-negara berkembang. Fenomena ini dijelaskan oleh Akisik dan Pfeiffer (2009) dimana investasi fisik banyak dilakukan di negara-negara berkembang dikarenakan mereka belum mempunyai pasar modal efisien, praktik akuntansi yang transparan dan lemahnya tingkat *corporate governance*, sehingga investasi dalam bentuk portofolio di negara-negara berkembang belum mendapat kepercayaan penuh.

Dalam dekade terakhir ini, investasi dalam aset finansial melonjak drastis, sementara akumulasi aset fisik cenderung menurun. Investasi finansial telah menggantikan investasi fisik. Dunia semakin menuju ke era hegemoni finansial, karena investasi yang terus berkembang adalah investasi finansial. Hegemoni finansial terjadi akibat bertemunya tiga proses berikut ini: (1) globalisasi pasar finansial, (2) deregulasi pasar domestik dan (3) inovasi produk-produk finansial pada level perusahaan (Prasetyantoko, 2008). Proses hegemoni finansial ini tidak bisa dipisahkan dengan revolusi di tingkat mikro, yaitu perusahaan. Dalam sistem korporasi modern, terjadi pemisahan antara hak kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Para pemilik modal mendelegasikan pengelolaan perusahaan kepada kaum manajerial atau eksekutif yang memang memiliki kompetensi dalam hal manajerial. Menurut Korten (2002), semakin terpusatnya kekuasaan yang semakin hebat di tangan korporasi global dan lembaga-lembaga keuangan telah melucuti pemerintah, baik yang demokratis maupun yang tidak, dari kemampuannya untuk menempatkan prioritas ekonomi, sosial dan lingkungan dalam kerangka kepentingan umum yang lebih luas.

1.4.4 Regulasi Akuntansi Keuangan

Akuntansi dapat didefinisikan dengan menjabarkan 3 (tiga) karakteristik esensial dalam akuntansi, yaitu: (1) identifikasi, pengukuran dan pengkomunikasian laporan keuangan dari (2) sebuah entitas ekonomi kepada (3) pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan disajikan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan seharusnya netral, obyektif dan bebas dari bias, diarahkan pada kebutuhan umum pengguna untuk membuat keputusan berdasarkan informasi keuangan. Tetapi menurut Solomon (1978, 1983) hampir tidak mungkin laporan keuangan bersifat netral, obyektif dan tidak bias dikarenakan terdapat faktor ekonomi, politik dan sosial yang sangat kuat mempengaruhi proses pembuatan standar akuntansi keuangan. Usaha *standard setters* untuk mengembangkan standar akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi, netral dan obyektif hanya akan

Universitas Indonesia

menjadi sebuah ide karena besarnya pengaruh eksternal tersebut. Sedangkan Albrecht (2010) menyebut teori *zero-sum game* untuk menjelaskan manfaat standar akuntansi keuangan hanya diperoleh satu pihak diantara entitas dan *stakeholder*. Manfaat yang diterima *stakeholder* pun tidak akan dinikmati semua pengguna laporan keuangan. *Accounting standard setter* sendiri adalah badan politik dan sebagai konsekuensinya regulasi yang mereka keluarkan adalah sebuah keputusan politik tetapi berdampak ekonomi bagi entitas dan *stakeholder* (Solomon, 1983; Albrecht, 2010).

Pengaruh eksternal dalam regulasi akuntansi keuangan dilihat dalam cara yang agak berbeda tapi sama oleh Scott, Deegan dan Unerman serta Wolk, Dodd dan Rozycki. Scott (2000) membaginya ke dalam isu ekonomi dan politik. Sedangkan Deegan dan Unerman (2006) membaginya dalam perspektif *free market* dan *pro-regulation* serta Wolk, Dodd dan Rozycki (2007) membedakan pelaporan keuangan dalam perspektif *unregulated* dan *regulated*. Isu ekonomi mirip dengan perspektif *free market* dan *unregulated* dimana mereka beranggapan regulator tidak diperlukan untuk menentukan jumlah informasi yang seharusnya tersaji bagi *stakeholder* karena pasar yang paling tepat untuk menentukan jumlah informasi yang tersedia berdasarkan motif untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Istilah *laissez faire* seringkali digunakan dalam perspektif *free market* dan *unregulated* untuk menekankan istilah pasar bebas, pasar yang tidak diatur dan ide bahwa badan standar akuntansi atau negara seharusnya tidak dapat mengintervensi. Menurut Belkaoui (2000) adanya hubungan keagenan antara manajemen dan *shareholder* membuat laporan keuangan akan disajikan sukarela oleh manajemen dengan andal untuk kepentingan kompensasi dan berkompetisi dengan perusahaan lain.

Isu politik mirip dengan perspektif *pro-regulation* dan *regulated* karena keduanya mendukung keberadaan regulator untuk menyusun standar akuntansi keuangan yang bisa mengakomodir berbagai kepentingan *stakeholder*. Hanya saja dalam penjelasan teorinya terdapat perbedaan. Scott melihat dari sisi non negara dengan menyebutnya *public interest theory* untuk menjelaskan keberadaan badan standar atas permintaan publik dan *interest group theory* untuk menjelaskan keberadaan badan standar atas keinginan beberapa kelompok kepentingan yang

akan selalu berusaha mempengaruhi regulasi akuntansi keuangan. Wolk, Dodd dan Rozycki melihatnya dari sudut melindungi kepentingan publik dan sosial dari *market failures* dan *free market* serta keinginan untuk menciptakan *fairness in the market* antara mereka yang memiliki informasi dan mereka yang tidak. Sedangkan Deegan dan Unerman melihat dari sisi negara dan non negara. *Public interest theory* untuk menerangkan keberadaan badan standar atas permintaan publik atau non negara. Sedangkan *capture theory* menerangkan keberadaan badan standar karena keinginan dari negara itu sendiri untuk memecahkan masalah *information asymmetries* yang dapat berujung *profit skimming*, tetapi kemudian bias karena masuknya kelompok-kelompok kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan entitasnya.

Capture theory sebagaimana disebut Deegan dan Unerman dalam teori regulasi diatas, oleh Wolk, Dodd dan Rozycki diklasifikasikan sebagai *regulatory behaviour* yang dibedakan menjadi *capture theory* dan *life-cycle theory*. Menurut *capture theory*, peraturan yang awalnya ditujukan untuk kelompok tertentu akhirnya masuk dalam proses *regulatory* untuk mempromosikan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Sedangkan menurut *life-cycle theory*, pada awalnya proses *regulatory* ditujukan untuk kepentingan publik tetapi kemudian proses ini lambat laun berubah menjadi instrumen untuk melindungi kelompok yang diatur.

Gaffikin (2005) selain menjelaskan teori regulasi sebagaimana disebut Scott, Deegan dan Unerman, menambahkan teori institusional berbasis proses dan struktur organisasi dan teori politik ekonomi berbasis pemakaian sistem ekonomi untuk lebih memahami karakter regulasi akuntansi keuangan, apakah untuk melindungi kepentingan publik atau hanya untuk melayani kepentingan kelompok tertentu. Menurut Di Maggio dan Powell (1983) dan Donaldson (1995) dalam teori institusional, organisasi terbentuk oleh lingkungan institusional yang ada di sekitar mereka. Ide-ide yang berpengaruh kemudian diinstitutionalkan dan dianggap sah dan diterima sebagai cara berpikir organisasi tersebut. Proses legitimasi sering dilakukan oleh organisasi melalui tekanan negara-negara dan pernyataan-pernyataan. Sedangkan teori politik ekonomi menurut Tinker (1984) berdasar pada kapitalisme karena sistem tersebut merupakan sistem sosial dimana didalamnya terdapat hubungan antara dunia politik dan ekonomi dengan asumsi

bahwa dunia politik dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi. Regulasi akuntansi diperlukan untuk meyakinkan kelangsungan hidup dari kapitalisme. Beberapa regulasi akan dikeluarkan untuk melindungi kepentingan dari sekelompok pemodal dan tuntutan dari proses akumulasi modal.

1.4.5 Harmonisasi, Konvergensi dan Adopsi Standar Akuntansi

Standar-standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang digunakan pada setiap negara belum tentu sama. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mengacu pada sistem politik, hukum dan pajak yang dianut oleh suatu negara. Mueller (1967) mengidentifikasi 4 (empat) elemen yang mempengaruhi standar akuntansi nasional yaitu: (1) pembangunan ekonomi negara; (2) kompleksitas bisnis; (3) pendekatan politik; dan (4) sistem hukum termasuk hukum pajak. Wahrisch (2001) mengidentifikasi 5 (lima) faktor yang berpengaruh yaitu: (1) faktor budaya; (2) faktor politik/hukum termasuk faktor pajak; (3) faktor ekonomi; (4) faktor pendidikan; dan (5) faktor pasar modal. Sedangkan Purba (2010), mencoba mengelaborasi faktor-faktor yang disebutkan Mueller dan Wahrisch dengan menambahkan beberapa faktor yaitu: nilai-nilai budaya korporasi; peraturan yang terkait dengan kepemilikan korporasi; dan teknologi. Dari beberapa faktor diatas, sistem perpajakan dan hukum menjadi dua faktor utama yang membedakan standar-standar akuntansi dan pelaporan keuangan di setiap negara.

Untuk membangun sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang seragam dibutuhkan standar akuntansi keuangan yang dapat diterima secara internasional atau global. Harmonisasi atas standar-standar akuntansi dan pelaporan keuangan di seluruh dunia harus dilakukan sebelum membuat sebuah standar akuntansi keuangan global (Purba, 2010). Manfaat utama dari harmonisasi standar akuntansi dan pelaporan keuangan adalah adanya pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan yang berasal dari berbagai negara. Menurut Wilson (1969), Sadjiarto (1999) dan Choi (2005), harmonisasi standar akuntansi adalah lawan dari standarisasi, yang berarti proses untuk meningkatkan kesesuaian praktik-praktik akuntansi melalui rekonsiliasi beberapa pandangan yang berbeda dan penentuan batasan seberapa jauh praktik

akuntansi dapat beragam. Tanpa paksaan untuk menghilangkan standar akuntansi nasional dengan tetap mengakomodasi beberapa perbedaan. Standarisasi sendiri berarti penetapan standar akuntansi dari satu negara yang harus diikuti oleh negara-negara lainnya dengan tidak mengakomodasi perbedaan antarnegara.

Program harmonisasi yang dicanangkan oleh IASC sejak tahun 1973 dimaksudkan untuk menyelaraskan pengaturan akuntansi di berbagai negara (Daeli, 2009). Harmonisasi standar akuntansi nasional saat itu berarti: mengembangkan standar IASC yang dapat menjadi model dasar bagi *national standard setters* dalam menyusun standar akuntansi, tidak perlu menghapus metode akuntansi yang masih dapat diterima untuk beberapa jenis transaksi tertentu, mengembangkan standar yang tidak menimbulkan konflik dengan banyak standar akuntansi nasional dan standar dibuat lebih deskriptif daripada preskriptif sehingga dapat diterima dalam praktik akuntansi (Pacter 2005). Dalam praktiknya harmonisasi oleh IASC dilakukan dengan membandingkan standar akuntansi keuangan di beberapa negara sebagai bahan untuk menyusun sebuah standar akuntansi internasional. Program ini juga tidak mengharuskan adanya kesamaan pengaturan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi usaha entitas karena harmonisasi standar akuntansi lebih bersifat fleksibel dan terbuka.

Perubahan besar terjadi pada tahun 2001 saat IASC melakukan restrukturisasi kelembagaan dengan dibentuknya IASC Foundation (IASCF) yang membawahi IASB dan International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC). IASB mengeluarkan IFRSs sebagai standar akuntansi dan pelaporan keuangan baru yang diberlakukan di samping IASs yang sudah ada, sekaligus diusahakan menjadi *global accounting standards* bagi seluruh entitas di dunia. Dalam salah satu tujuannya, pembentukan IASB ini dimaksudkan untuk mendorong konvergensi antara standar akuntansi nasional dan IFRSs untuk mendapatkan solusi praktik akuntansi berkualitas tinggi. Merriam-Webster's Dictionary mendefinisikan konsep umum konvergensi sebagai tindakan mengumpulkan dan khususnya pemindahan ke arah kesatuan dan keseragaman. Greenstein dan Tarun Khanna (1997) mendefinisikan konvergensi dalam term yaitu substitusi dan komplementer. Substitusi ketika salah satu produk dapat menggantikan produk yang lain, dan disebut komplementer ketika kedua produk

Universitas Indonesia

akan bekerja jika digunakan secara bersamaan. Istilah konvergensi yang muncul sebagai tujuan pembentukan IASB menurut Cristea dan Lutilsky (2005) dan Pacter (2005) disebut sebagai sinonim perpanjangan dari harmonisasi dengan tujuan untuk segera menyatukan IFRSs dan IASs dengan standar akuntansi nasional serta menyatukan IFRSs dan IASs dengan US GAAP. Konsep konvergensi diajukan untuk mempercepat penggunaan IFRSs sebagai standar akuntansi global karena dinilai merupakan standar akuntansi terbaik dan memiliki kualitas tinggi. IFAC bekerja sama dengan IASB kemudian mencanangkan program konvergensi yang artinya seluruh negara anggota IFAC, termasuk IAI, diwajibkan untuk menggunakan IFRSs sebagai acuan pencatatan transaksi sepanjang IFRSs sudah mengatur standar akuntansi untuk transaksi tersebut (Daeli, 2009). Meskipun demikian, dalam praktiknya, penyimpangan dari IFRSs dalam rangka untuk mengakomodasi *national regulatory framework* diperbolehkan bagi setiap negara yang mengadopsi IFRSs.

Menurut Kartikahadi (2010), konvergensi (kata benda) berasal dari kata dalam bahasa Inggris "*converge*" yang merupakan kata kerja yang menurut Oxford Advanced Learner's Dictionary (Oxford University Press, 1995) berarti "*to become similar or the same*". Konvergensi ke IFRSs kemudian diartikan sebagai membuat standar akuntansi suatu negara menjadi serupa atau sama dengan IFRSs yang menurutnya dapat mencakup 2 (dua) pengertian, yaitu mengharmonisasikan atau mengadopsi penuh. Membuat harmonis, berarti bila dapat dibuat sama, mengapa harus dibuat lain. Sedangkan adopsi penuh, berarti menerima penuh 100 persen apa adanya agar tak ada lagi perbedaan. Karena standar akuntansi keuangan tak lepas dari faktor hukum, sosial, ekonomi dan budaya suatu negara, maka pengertian konvergensi menurut Kartikahadi lebih masuk akal untuk harmonisasi dengan IFRSs dibandingkan dengan adopsi penuh IFRSs. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan konvergensi IFRSs di tiap negara yang tampak berlainan.

Hal berbeda disampaikan Don dan Thomas (1995) dan Karapinar, Ayikoglu dan Bayirli (2007) dimana menurut mereka harmonisasi dalam akuntansi berarti penerapan beberapa metode untuk praktik akuntansi untuk keperluan pengintegrasian diantara praktik akuntansi yang ada. Harmonisasi dapat

Universitas Indonesia

dibagi menjadi 2 (dua) yaitu *the legal harmonization (de jure or formal harmonization)* dan *the material harmonization (de facto harmonization)*. Jika praktik akuntansi dipengaruhi oleh regulasi-regulasi maka disebut harmonisasi legal, jika tidak disebut sebagai harmonisasi material. Proses harmonisasi akan tergantung pada harmonisasi standar akuntansi nasional dari negara yang menjadi pemimpin lembaga penyusun standar akuntansi yang menjadi acuan. Sedangkan lembaga penyusun standar yang mengikuti akan berusaha melakukan harmonisasi standar akuntansi mereka dengan standar akuntansi dari lembaga yang menjadi pemimpin. Harmonisasi menurut mereka mensyaratkan minimal adanya seorang *leader* dan seorang *follower*, dalam bentuk negara atau organisasi. Hal tersebut yang membedakan konsep harmonisasi dan konvergensi karena menurut mereka dalam proses konvergensi tidak ada yang disebut *leader*. Konvergensi sendiri didefinisikan sebagai penyusunan standar akuntansi terbaik dan berkualitas tinggi oleh 2 (dua) lembaga penyusun standar yang setara. Kedua penyusun standar tersebut sebelumnya telah mencapai kesepakatan untuk mewujudkan standar internasional tunggal untuk mencapai seperangkat standar berkualitas tinggi. Kolaborasi antara IASB dan FASB menjadi satu-satunya kegiatan yang pantas disebut sebagai proses konvergensi, dimana masing-masing menguji dan merevisi standar mereka untuk mendapatkan standar terbaik.

Pengadopsian IFRSs dari setiap negara dapat dibagi menjadi 5 (lima) tingkat (Media Akuntansi, 2005), yaitu: (1) *full adoption*, negara mengadopsi seluruh IFRSs/IASs dan menerjemahkannya dalam bahasa lokal kata demi kata; (2) *adapted*, negara mengadopsi seluruh IFRSs tetapi disesuaikan dengan kondisi di suatu negara; (3) *piecemeal*, negara mengadopsi sebagian IFRSs, memilih standar dan paragraf tertentu saja; (4) *referenced*, IFRSs digunakan sebagai referensi, standar nasional yang diterapkan negara hanya mengacu pada standar IFRSs tertentu dengan bahasa dan paragraf yang disusun sendiri oleh badan standar nasional; (5) *not adoption at all*, negara tidak mengadopsi IFRSs sama sekali. Sedangkan berdasarkan program konvergensi yang telah dikeluarkan IAI, proses konvergensi dibagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap adopsi, tahap persiapan untuk menyiapkan seluruh infrastruktur pendukung untuk implementasi PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRSs dan tahap implementasi yang

merupakan penerapan PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRSs bagi perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik (Purba, 2010). Kata adopsi berasal dari "*adoption*" yang berarti "*the decision to start using something such as an idea, a plan or a name*" (Oxford University Press, 1995). Dengan demikian, adopsi IFRSs dapat diartikan sebagai dimulainya penggunaan standar akuntansi berbasis IFRSs dalam praktik akuntansi di suatu negara. Tanggal efektif berlakunya sebuah standar akuntansi yang konvergen dengan IFRSs dapat dianggap sebagai dimulainya proses pengadopsian IFRSs di suatu negara.

1.4.6 Kebijakan Publik

Kebijakan publik dibaca hanya dalam lingkaran otoritas negara saja, persoalan yang muncul selama ini disebabkan oleh kompetensi aparat yang tidak memadai atau juga karena pilihan agenda *setting* yang kurang tepat. Dalam hal ini kebijakan publik hanya dilihat dari negara saja dan tidak memberikan ruang kepada ranah atau aktor lain yang juga terlibat di dalam suatu kebijakan (P. Santoso, 2004). Sebuah proses kebijakan merupakan sebuah proses yang multilinear dan kompleks. Atau dengan kata lain, kompleksitas sosok arena kebijakan (masyarakat dan negara) turut mewarnai proses kebijakan yang ada. Hal tersebut sangat memungkinkan terjadi karena sebuah proses kebijakan selalu lahir dan besar pada ruang dan waktu yang tak kosong (A. Santoso, 1992). Anderson, Holt dan Winston (1979) dalam Tarigan (2006) menyebut 3 (tiga) sifat kebijakan, yaitu *rational*, *incremental* dan *emergence*. Sifat rasional tergantung kepada kemampuan pembuat kebijakan untuk memilih alternatif yang dianggap memberikan hasil optimal sedangkan *inkremental* menandakan lingkungan sangat mempengaruhi kebijakan sehingga pembuat kebijakan diharapkan secara kontinyu memformulasikan kembali masalah sesuai dengan informasi terbaru.

Menurut Mallarangeng (2002) dalam Syeirazi (2009) terbentuknya produk kebijakan publik dapat dijelaskan dalam teori koalisi politik dan kepentingan ekonomi; teori ekonomi relatif negara; dan teori pilihan rasional. Menurut teori koalisi politik dan kepentingan ekonomi, kebijakan ekonomi politik terbentuk karena tekanan kelompok-kelompok ekonomi yang memiliki kekuatan politik

untuk mempengaruhi lahirnya sebuah kebijakan publik. Semakin besar konsentrasi aset yang dimiliki suatu kelompok ekonomi, semakin besar pula peluang mereka mempengaruhi lahirnya sebuah kebijakan. Asumsi teori itu terletak pada premis bahwa lahirnya sebuah produk kebijakan ekonomi-politik sebenarnya tidak berada di tangan politikus dan para penyusun kebijakan publik, tetapi di bawah kendali kelompok-kelompok ekonomi yang berhasil memaksa politikus dan teknokrat memayungi kepentingan bisnis mereka dalam sebuah produk kebijakan.

Menurut teori ekonomi relatif negara lahirnya sebuah produk kebijakan adalah pantulan dari kepentingan negara sebagai pelaku di arena publik yang memiliki sifat dan pilihan sendiri. Lahirnya sebuah kebijakan adalah hasil dari upaya negara untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkannya. Negara dalam perspektif ini bukan sekedar arena tempat kekuatan-kekuatan sosial ekonomi saling bersaing, tetapi juga aktor yang memiliki otonomi dan logika sendiri. Teori ini menyanggah asumsi teori koalisi dan kepentingan ekonomi yang menganggap negara hanya sekedar alat kepentingan sosial dan ekonomi yang bersaing dalam masyarakat. Lebih dari sekedar alat, negara adalah badan organis yang memiliki logika dan kepentingan sendiri.

Sedangkan teori pilihan rasional bertolak dari asumsi dasar bahwa setiap masyarakat terdiri dari individu-individu yang bertindak untuk mencapai dan memaksimalkan kepentingan sendiri. Para pengusaha bertindak menumpuk laba, begitu pula para politikus dan birokrat yang bekerja memperbesar kekuasaan masing-masing. Menurut teori pilihan rasional, kebijakan publik adalah hasil interaksi politik diantara para pelaku rasional yang bekerja memaksimalkan keuntungan pribadi. Dengan demikian, politik adalah panggung tempat semua pihak saling bersaing mengeruk berbagai sumber yang ada. Kelebihan teori ini terletak pada penjelasannya bahwa negara tidak diisi institusi yang diisi oleh kaum birokrat, politikus dan teknokrat yang bebas dari motif dan kepentingan pribadi.

Bridgman dan Davis (2004), Dye (2006) dan Edward III dan Sharkansky (1984) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah keputusan apa yang dikatakan/dilakukan atau tidak dikatakan/dilakukan yang dipilih oleh pemerintah.

Universitas Indonesia

Apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah termasuk dalam kebijakan publik karena hal tersebut dapat memberikan efek yang sama besarnya ke masyarakat jika dibandingkan dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Efek tersebut bisa positif ataupun negatif. Keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu dapat berbuah positif atau negatif, sebaliknya keputusan untuk tidak melakukan sesuatu juga dapat menghasilkan hal positif atau negatif, tergantung dari kemampuan pengambil kebijakan untuk memilih alternatif yang dianggap memberikan hasil optimal disamping adanya pengaruh dari lingkungan.

1.4.7 Teori Intelijen

Intelijen merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang disamping mencari data dan informasi tentang masalah-masalah yang sedang dihadapi, juga harus bisa memprediksi atau membuat perkiraan mengenai kejadian, kegiatan atau masalah yang mungkin terjadi di masa mendatang, untuk kemudian disajikan kepada *user* sebagai bahan untuk mengambil suatu keputusan/tindakan atau perumusan kebijaksanaan (Hatmodjo, 2003; Saronto, 2008). Dalam hal ini intelijen memiliki peran sebagai mata dan telinga dari pimpinan dan organisasi melalui penyelenggaraan kegiatan deteksi dini dan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi organisasi, kemudian memberikan peringatan atau pelaporan secara cepat dan tepat (akurat) serta menyusun suatu analisis, prediksi dan rekomendasi yang bermanfaat bagi organisasi.

Secara spesifik intelijen stratejik berarti produk yang mempengaruhi pembuat keputusan tinggi, bisa berupa informasi dan prediksi yang pada hakekatnya merupakan *early warnings* atau peringatan dini untuk mencegah ancaman yang bersifat *strategic surprises* atau pendadakan stratejik (Johnson, 2003). Pendadakan stratejik merupakan bentuk penyerangan dimana objek yang diserang tidak sadar akan diserang dengan kekuatan secara besar-besaran (Byman, 2005). Pendadakan stratejik biasanya tidak bisa terdeteksi oleh sistem sehingga sangat menyulitkan untuk dilakukan langkah-langka untuk mengantisipasinya.

Menurut aktifitasnya, intelijen memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu penyelidikan, pengamanan dan pengaman (Hatmodjo, 2003). Dalam mengantisipasi

Universitas Indonesia

pendadakan strategik, fungsi intelijen harus dapat berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan target dari pendadakan tersebut akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap suatu sistem yang sudah ada. Fungsi penyelidikan dalam intelijen dapat berfungsi sebagai *research* awal untuk mengetahui sensitifitas potensi pendadakan strategik tersebut. Data dan informasi yang didapat baik terbuka dan tertutup dipentingkan untuk menganalisis langkah-langkah antisipasi yang akan digunakan pada fungsi intelijen selanjutnya. Hasil dari penyelidikan termasuk analisa intelijen sebagai bahan pendukung dalam pembuatan kebijakan oleh *user*, ditujukan untuk memprediksi jangka pendek atau menengah dengan beberapa skenario untuk mengatasi permasalahan yang mungkin ditimbulkan dari suatu ancaman.

Informasi strategik adalah informasi yang diperlukan untuk bersaing dan/atau mengalahkan musuh. Informasi ini sama kritisnya bagi lembaga intelijen maupun lembaga bisnis. Intelijen berhadapan dengan musuh-musuh negara sedangkan lembaga bisnis bersaing dengan sesama pebisnis. Intelijen membutuhkan informasi berkaitan dengan kepentingan nasional, pebisnis membutuhkan informasi pasar, produk dan konsumen. Kreatifitas mengolah informasi menjadi lebih penting dari teknologi informasi. Fungsi pengumpulan informasi, analisis informasi, dan pengambilan keputusan harus diemban oleh lembaga-lembaga terpisah. Pengambil keputusan didukung oleh departemen atau kementerian dan komunitas intelijen dalam mengumpulkan informasi, menganalisis, dan melaksanakan kebijakan. Maka informasi intelijen tidak boleh dengan sendirinya menetapkan kebijakan, tetapi harus memberikan pilihan-pilihan kebijakan. Bentuk informasi intelijen yang tepat pada akhirnya akan berkontribusi pada pengambilan keputusan yang tepat.

Menurut Keegan (2004) sebagaimana dikutip Wulan dalam Widjajanto (2006) dalam dimensi informasi, intelijen memiliki 3 (tiga) jenis produk intelijen yang kesemuanya berupa informasi, yaitu *basic intelligence*, *current intelligence* dan *intelligence estimates*. Keegan memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana *basic intelligence* sangat berguna membantu Great Alexander menaklukkan Turki. Produk ini meliputi informasi mendasar dalam sebuah situasi. Misalnya, informasi mengenai infrastruktur suatu daerah yang akan

diserang serta informasi mengenai keadaan cuaca di daerah tersebut. *Current intelligence* pada umumnya berupa informasi yang dapat menjawab pertanyaan apa, bagaimana, di mana serta kapan. John Keegan memberikan contoh sebuah sistem di India secara efektif mampu memberikan informasi-informasi dasar mengenai lawan pada saat Inggris masuk ke India. Dalam kategori ini, informasi utama yang diperlukan sangat dipengaruhi oleh prioritas pembuat kebijakan yang seharusnya terkait erat dengan prioritas *national interest*. Bila ditelaah lebih lanjut, kategori ini akan menjadi sangat dinamis dan dipengaruhi oleh perubahan kepentingan serta tujuan jangka pendek. Misalnya kepentingan Amerika Serikat yang berbeda secara signifikan antara *national security strategy pra 9/11* dan *post 9/11*. Sedangkan *intelligence estimates* merupakan informasi intelijen yang menyediakan berbagai alternatif pilihan kebijakan yang diperlukan oleh pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. Secara kualitas, *intelligence estimates* bersifat sebagai *fixed* karena pada dasarnya kualitas intelijen haruslah selalu akurat, aktual dan faktual. Tetapi jika dilihat dari ragamnya, maka *intelligence estimates* merupakan sebuah variabel. Ragam informasi yang harus dicari pada era *Cold War* (perang dingin) tidak sama dengan ragam informasi yang harus dicari pada masa *Post-Cold War*.

Berakhirnya perang dingin di abad 20 telah menyebabkan adanya perubahan mendasar dalam definisi keamanan nasional. Saat ini keamanan nasional suatu negara lebih banyak dilihat dalam aspek kekuatan ekonomi daripada kapabilitas militernya. Lebih jauh lagi, tantangan terhadap perekonomian negara timbul seiring dengan semakin kuatnya paradigma globalisasi. Dalam ekonomi global tidak ada lagi perbedaan atau jarak dalam hubungan ekonomi domestik dan internasional. Dengan semakin cepatnya perputaran roda persaingan dalam lingkup nasional maupun internasional, proses inovasi dan peningkatan daya saing perlu dipercepat pula. Negara menjadi dipaksa beradaptasi untuk mencari cara baru tentang bagaimana bereaksi terhadap tren ekonomi global yang dapat merusak keamanan nasional dan peran intelijen akan menjadi semakin luas dan berat untuk menghadapi tantangan tersebut (Quiggin, 2007).

Di era globalisasi, lingkungan keamanan internasional menjadi semakin kompleks dan tidak menentu. Ancaman yang datang semakin bersifat asimetrik,

baik itu dalam bidang politik, ekonomi, keamanan, budaya atau teknologi. Menurut Quiggin (2007) untuk menghadapi hal ini, intelijen harus mampu mengidentifikasi dan membedakan, apa yang namanya ancaman (*threats*), risiko (*risks*) dan kerentanan (*vulnerability*).

Ancaman yaitu potensi dari individu atau kelompok untuk melakukan aksi atau tindakan yang menyerang sisi kerentanan atau kerapuhan yang dimiliki. Tetapi tindakan ini tidak secara otomatis menghasilkan dampak yang sangat berbahaya bagi pihak yang diserang. Ancaman oleh Quiggin ditekankan disini sebagai sebuah *possibility* (kemungkinan) adanya suatu aksi.

Sedangkan risiko didefinisikan sebagai kemungkinan dampak berbahaya yang dihasilkan dari aksi atau tindakan yang menyerang sisi kerentanan atau kerapuhan yang dimiliki. Disini penilaian risiko yang layak sangat dibutuhkan dan sangat berarti bagi pembuat kebijakan untuk mengambil aksi atau tindakan yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi risiko tersebut.

Isu-isu *vulnerability* (kerentanan) akan selalu datang bersamaan dengan ancaman dan risiko. Kerentanan sendiri adalah kelemahan atau kekurangan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Kerentanan ada karena dihasilkan oleh perbuatan orang atau kelompok seperti kelemahan program *software* yang membuat *hacker* mudah menyerang. Tetapi kerentanan juga ada karena faktor alami atau bawaan seperti kondisi negara Indonesia yang berbentuk maritim dan terdiri dari banyak kepulauan yang menyebabkan kita rentan terhadap penyelundupan.

1.4.8 Kerangka Penelitian

Beberapa pihak, baik lembaga penelitian, para profesional maupun akademisi, terbagi pendapatnya atas pelaksanaan konvergensi standar akuntansi nasional di banyak negara dengan standar akuntansi internasional dan implikasi dari harmonisasi global tersebut terhadap regulasi akuntansi. Beberapa kajian meneliti aktifitas regulatori dari IASB sebagai "*global standard setting body*" pada sisi institusional dan implikasi ekonomi politik dari berkembangnya standar yang IASB keluarkan menjadi seperangkat peraturan akuntansi yang diwajibkan (Larson dan Kenny, 1998; Zeff, 2002; dan Kwok dan Sharp, 2005). Beberapa

kajian penelitian lainnya menganalisis perbedaan antara IFRSs dan standar akuntansi domestik pada beberapa negara pada sisi kepatuhan dan implementasinya. Kajian tersebut juga mempertimbangkan dampak potensial dari konvergensi standar akuntansi, baik di negara yang bersangkutan maupun secara global.

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan beberapa perbedaan utama antara US GAAP dan standar IASB (Bloomer, 1999; Street dan Gray, 1999; Pacter, 2002; Leuz, 2003; Tarca, 2004; dan Ampofo dan Sellani, 2005). Penelitian yang hampir mirip juga dilakukan di Australia oleh Collet (2001) dan Jones dan Wolinzer (2003), China oleh Chen (1999) dan Tang (2000) serta Mesir oleh Abd-Elsalam dan Weetman (2003). Sebagian besar peneliti lainnya fokus pada proses konvergensi di Uni Eropa dan negara-negara Eropa lainnya (Thorell dan Whittington, 1994; Hoarau, 1995; Canibano dan Mora, 2000; Aisbitt dan Nobes, 2001; Alexander dan Archer, 2001; Haller, 2002; Robers, 2002; Alexander dan Schwencke, 2003; Evans, 2003; Homollee, 2003; Walton, 2003; Larson dan Street, 2004; dan Street dan Larson, 2004). Sedangkan beberapa peneliti fokus pada isu konvergensi dalam konteks transisi ekonomi, terutama yang berasal dari Eropa Timur yaitu Bailey (1995), Dutia (1995), De Bruin (2000), Daniel (2001), King (2001) dan Kosmala-McLulich (2003).

Street (2002) melakukan kajian multinasional mengenai proses konvergensi standar akuntansi berdasarkan dua kali survei yang dilakukannya terhadap praktik pelaporan keuangan di 59 dan 62 negara di dunia yang didukung oleh beberapa kantor akuntan besar dalam kaitannya dengan penggunaan standar akuntansi internasional. Dua survei tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan utama antara standar pelaporan akuntansi lokal dengan standar yang dikeluarkan IASB. Street menganalisa survei tersebut dalam rangka untuk menilai perkembangan dan hambatan untuk melakukan konvergensi di beberapa negara.

Ding (2005) meneliti peran budaya sebagai sebuah faktor utama yang menjelaskan perbedaan antara GAAP nasional dengan standar akuntansi internasional di 52 negara. Ding melakukan survei terhadap standar akuntansi lokal di beberapa negara yang dibandingkannya dengan standar internasional yang disponsori oleh kantor-kantor akuntan besar di dunia. Penelitian yang sama juga

Universitas Indonesia

telah dilakukan Nobes (2001). Penelitian lain yang hampir serupa tapi khusus di wilayah Eropa dilakukan oleh Larson dan Street (2004). Kemudian Stenka dan Omrod (2007) menggunakan survei beberapa kantor akuntan besar pada tahun 2002 terhadap praktik pelaporan keuangan di 17 negara Eropa untuk menganalisis dampak pengadopsian IFRSs terhadap akuntansi perusahaan grup di Inggris Raya. Sedangkan Zeff (1998) dan Choi (2002) meringkas dan menguji perbedaan antara US GAAP, UK GAAP dan standar dari IASB. Beberapa penelitian juga mempertanyakan relevansi standar akuntansi internasional terhadap ekonomi domestik terutama yang terjadi di negara-negara berkembang (Larson, 1993; Larson dan Kenny, 1996, 1998; Points dan Cunningham, 1998; Woolley, 1998; dan Mir dan Rahaman, 2005).

Graham dan Neu (2003) berpendapat bahwa akuntansi termasuk di dalamnya IFRSs, dalam implementasi riilnya digunakan untuk melayani dua kepentingan, kompleksitas internal organisasi dan praktik sosial lebih luas. Mekanisme seperti itu berdampak pada penyebaran perubahan akuntansi, berupa teknologi akuntansi, hubungannya dengan kepentingan organisasi menjadi organisasi supranasional atau transnasional. Penyesuaian teknologi akuntansi dalam praktik organisasi supranasional melayani tujuan yang sama dengan organisasi konvensional, tetapi berbeda mekanismenya yaitu melakukan aktivitas yang dinamakan "aliran lintas batas melampaui ruang dan waktu" (*cross-border flows beyond time and space*), seperti aliran modal, produk, informasi, kebijakan dan orang.

Akuntansi mengalir lintas batas melampaui ruang dan waktu menciptakan bentuk sesuai perbedaan sosial yang melampaui simbol dan mitos. Perbedaan sosial berkaitan dengan asimetri kekayaan (*wealth*) dan kekuasaan (*power*) yang eksis di berbagai wilayah secara internasional. Hasil teknologi akuntansi dalam organisasi supranasional membantu menciptakan dan menyeimbangkan kondisi ketidakstabilan antara pusat dan pinggiran, antara *non-majority world* dan *majority world*. Graham dan Neu melihat bahwa teknologi dan praktik akuntansi yang dijalankan MNCs ternyata bukan hanya melakukan tata kelola aliran lintas batas melampaui ruang dan waktu saja, tetapi mereka menyodorkan "praktik standarisasi" lintas batas. Lebih jauh, desakan standarisasi ternyata bermuatan

ekonomi politik untuk kepentingan MNCs mempergunakan berbagai institusinya.

Salah satu kepentingan IFRSs dapat dilihat dari dampaknya setelah diterapkan adalah untuk kepentingan kepastian aliran atau arus kas perusahaan “bermain monopoli” di berbagai *flows of things* (lihat Tabel 1.1). Ujung-ujungnya adalah dijalankannya “permainan monopoli” dengan laporan arus kas sebagai alat bantu pemetaan kekuatan keuangan perusahaan untuk mengantisipasi “dadu mesin” dari bursa saham yang disebut *Electronically Operated Global Casino* atau dalam bahasa Castells disebut sebagai *Automaton* (Capra, 2003). *Automaton* menurut Castells adalah ciptaan inti ekonomi hasil proses globalisasi keuangan yang secara tegas mengatur kehidupan manusia. Bukan robot-robot yang menghilangkan lapangan kerja atau komputer-komputer pemerintah, tetapi mesin-mesin globalisasi berbentuk transaksi keuangan elektroniklah yang mengambil alih dunia manusia. Logika automaton bukanlah aturan-aturan pasar tradisional, dinamika aliran keuangan yang digerakkannya saat ini di luar kendali-kendali pemerintahan negara, perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga keuangan. Akan tetapi pada keluwesan dan ketepatan teknologi informasi dan komunikasi baru, regulasi ekonomi global yang efektif secara teknis menjadi masuk akal.

Tabel 1.1
Flows of Things

Flow of Things	Organisasi yang terlibat	Contoh
Capitals	Pasar Finansial Internasional	Perdagangan sekuritas dan valuta asing
	IASB	Konvergensi standar akuntansi nasional ke IFRSs
	International Monetary Fund (IMF)	Liberalisasi pasar, mata uang
Products	World Trade Organization (WTO)	Barang dan jasa
Information	OECD	Indikator kinerja
	W3C, NSF	Standar internet
Policies	IMF, World Bank	Penyesuaian pinjaman

Universitas Indonesia

People	Pemerintah negara-negara	Kebijakan imigrasi
	OECD	Migrasi tenaga kerja

Sumber: Graham dan Neu (2003) yang telah diolah kembali oleh Mulawarman (2009)

Penelitian ini pada dasarnya ingin memperlihatkan bahwa fenomena konvergensi IFRSs yang merebak ke seluruh dunia bukan disebabkan oleh kualitas standar akuntansi global itu sendiri tetapi dikarenakan lemahnya posisi negara yang bersangkutan, termasuk Indonesia, menghadapi pihak eksternal yaitu lingkungan masyarakat global dan kepentingan investor global serta MNCs yang menginginkan keseragaman praktik akuntansi dan penyajian pelaporan keuangan di dunia. Berdasarkan lemahnya posisi Indonesia dalam proses konvergensi IFRSs, penelitian ini mencoba memprediksi bagaimana pengaruhnya terhadap kebijakan yang mungkin dikeluarkan DJP dalam rangka merespon implikasi-implikasi perpajakan yang timbul dari konvergensi IFRSs.

Untuk membedakan hasil penelitian atau tulisan pengamat akuntansi dunia mengenai pengaruh konvergensi IFRSs di negara-negara berkembang yang sebagian besar menekankan pertimbangan rasional ekonomi dari pembuat kebijakan akuntansi, maka penelitian ini mencoba lebih banyak menggunakan teori ekonomi politik melalui perspektif globalisasi ekonomi dan teori regulasi akuntansi keuangan dalam perspektif *pro-regulation* untuk menjelaskan bagaimana latar belakang dan proses konvergensi IFRSs di dunia berdampak besar kepada motif keikutsertaan Indonesia dalam fenomena tersebut. Selanjutnya untuk menjelaskan dampak dari besarnya pengaruh eksternal kepada motif konvergensi IFRSs di Indonesia terhadap kebijakan perpajakan yang mungkin dikeluarkan otoritas perpajakan, digunakan beberapa teori kebijakan publik yaitu teori koalisi politik dan kepentingan ekonomi, teori ekonomi relatif negara dan teori pilihan rasional. Sedangkan teori intelijen disini digunakan dalam konteks untuk memandang proses konvergensi IFRSs di Indonesia sebagai sebuah ancaman/risiko dan sekaligus untuk menyediakan pilihan tindakan yang dapat diimplementasikan dalam sebuah kebijakan perpajakan.

Ada beberapa pertimbangan kenapa penulis mengambil pendekatan ini, yaitu :

Universitas Indonesia

- a. Keputusan pemakaian standar akuntansi keuangan secara inheren adalah keputusan politik;
- b. Proses konvergensi IFRSs di dunia terkait erat dengan struktur dan sistem perekonomian dunia serta situasi dan kondisi yang mengikuti;
- c. Idealnya seharusnya konvergensi IFRSs di dunia karena dorongan netralitas dan keseragaman standar akuntansi dan penyajian laporan keuangan dan bukannya terkait dengan pembentukan proses kontrol oleh kepentingan tertentu;
- d. Konvergensi IFRSs di Indonesia selain menjadikan laporan keuangan menjadi lebih transparan, relevan, dapat diandalkan, dapat dimengerti dan diterima secara global, seharusnya juga mendukung pembangunan ekonomi Indonesia.
- e. Kebijakan pajak sebagai kebijakan publik dari pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara.
- f. Mengantisipasi sebuah situasi yang kemungkinan akan dihadapi sebagai implikasi perpajakan dari proses konvergensi IFRSs.

1.5 Hipotesis Penelitian

Dengan berpegang kepada latar belakang dan perumusan masalah yang diungkapkan diatas, maka penelitian ini dilandasi oleh hipotesis penelitian:

- a. Bahwa dalam era globalisasi ekonomi yang ditopang liberalisasi perdagangan dan finansial, kepentingan investasi global dalam konvergensi IFRSs di dunia diduga memainkan peran yang sangat besar.
- b. Peran investasi global yang sangat besar dalam konvergensi IFRSs di dunia diduga menjadi motif konvergensi IFRSs di Indonesia.
- c. Motif konvergensi IFRSs di Indonesia diduga akan berpengaruh besar terhadap output kebijakan perpajakan di Indonesia.

1.6 Model Analisis

Untuk dapat mencapai tujuan membuktikan hipotesis tersebut diatas maka digunakan alat bantu model analisis dan skemanya sebagai berikut:

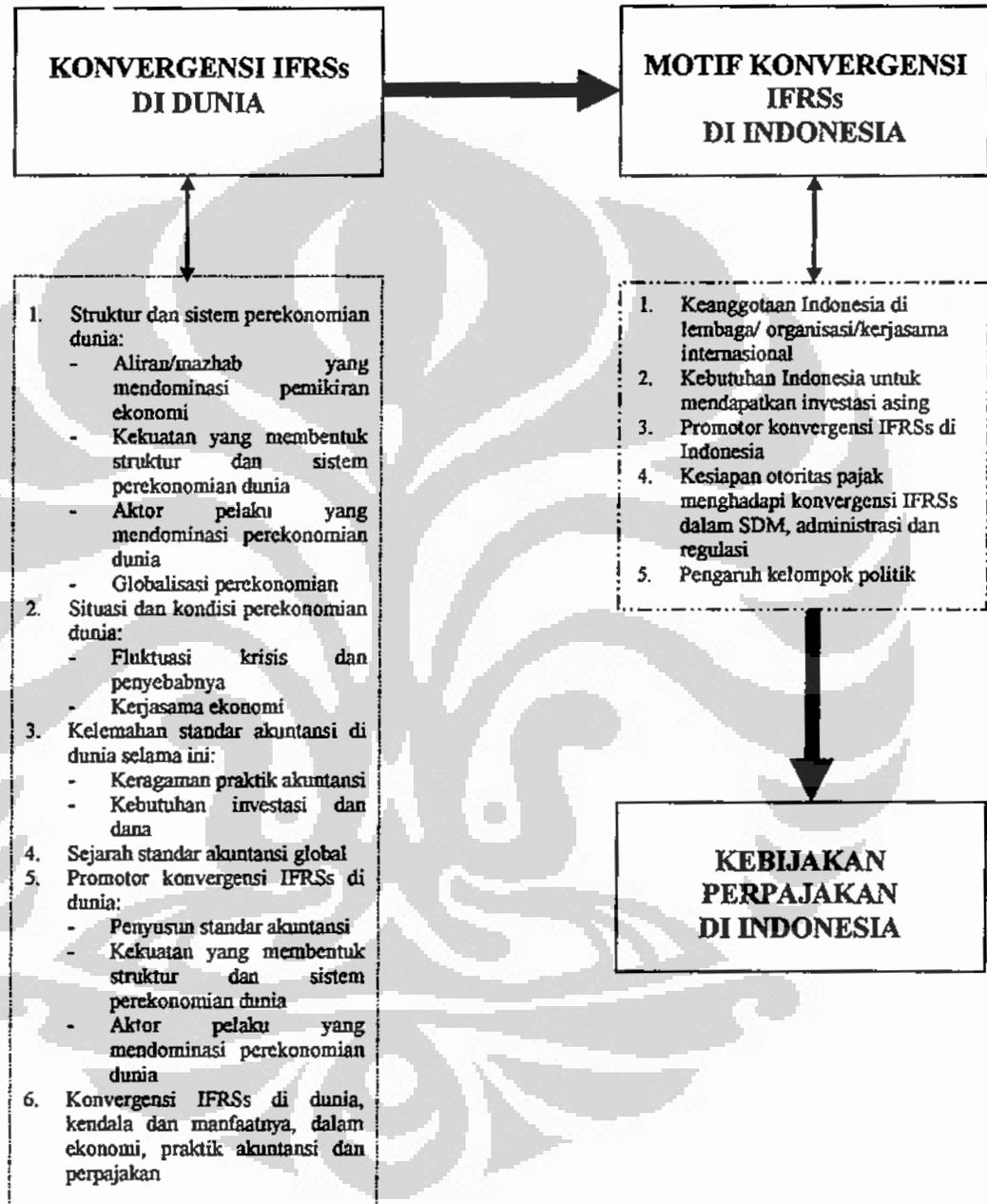
Variabel bebas adalah: konvergensi IFRSs di dunia.

Variabel terikat terdiri dari:

Universitas Indonesia

- a. motif konvergensi IFRSs di Indonesia
- b. kebijakan perpajakan di Indonesia.

1.6.1 Skema Model Analisis:



1.7 Metodologi Analisis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Kemudian untuk pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (termasuk penelitian perbandingan historis) dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan *key informan* yang terkait dengan penelitian ini, terutama pihak-pihak dari IAI dan DJP.

Data kualitatif merupakan data empiris, merekam peristiwa nyata, merekam pernyataan orang (termasuk bahasa isyarat), mengamati tingkah laku tertentu, mempelajari dokumen tertulis atau mempelajari gambar visual. Untuk mendapatkan data tersebut, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Penelitian lapangan melalui wawancara dan informasi langsung

Wawancara dan informasi langsung dilakukan pada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan konvergensi IFRSs di Indonesia terutama dari IAI, Bappepam dan para pejabat di lingkungan DJP berkaitan dengan kebijakan perpajakan dan hubungan kerjasama dengan organisasi internasional. Metode wawancara dilakukan dengan tanya jawab atau mendengarkan penjelasan atau keterangan secara langsung dengan beberapa responden yang dianggap kompeten menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga akan diperoleh lebih banyak keterangan yang diperlukan.

b. Penelitian kepustakaan

Pengumpulan data ini dilakukan dengan mempelajari berbagai bahan bacaan berupa buku-buku, standar akuntansi keuangan, peraturan perundang-undangan, studi-studi terdahulu, dan mencari sumber dari literatur-literatur atau data lain yang relevan dengan penelitian ini. Sumber penelitian kepustakaan bisa didapatkan secara fisik maupun *softcopy* terutama dari internet. Metode ini juga berguna untuk mendapatkan data kuantitatif berupa tabel-tabel statistik yang telah diolah pihak lain. Penulis banyak bergantung pada hasil penelitian dan tulisan beberapa ahli dan pengamat akuntansi yang dikumpulkan dari jurnal penelitian, buku dan pangkalan data online.

Universitas Indonesia

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pemahaman isi penelitian, diuraikan permasalahan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, hipotesis penelitian, model analisis, metodologi analisis penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Perkembangan Standar Akuntansi Di Dunia Pra Konvergensi IFRSs

Bab ini ingin menjelaskan latar belakang dan motif dilakukannya konvergensi IFRSs di dunia yang terdiri dari struktur dan sistem perekonomian dunia, situasi dan kondisi perekonomian dunia, kelemahan standar akuntansi di dunia selama ini dan sejarah standar akuntansi global.

Bab III : Perkembangan Standar Akuntansi Di Dunia Era Konvergensi IFRSs

Bab ini menggambarkan perkembangan IASB dan IFRSs, pendorong konvergensi IFRSs di dunia dan konvergensi IFRSs di dunia, kendala dan manfaatnya, termasuk kebijakan perpajakan yang diterapkan.

Bab IV : Konvergensi IFRSs Di Indonesia

Bab ini menggambarkan kondisi perekonomian di Indonesia, sejarah standar akuntansi di Indonesia, perkembangan SAK berbasis IFRSs, promotor konvergensi IFRSs di Indonesia dan menganalisis motif konvergensi IFRSs di Indonesia.

Bab V : Aspek Perpajakan Di Indonesia

Bab ini menggambarkan rekonsiliasi fiskal, perbedaan ketentuan perpajakan dan SAK berbasis IFRSs, respon sementara DJP terhadap konvergensi IFRSs dan menganalisis dampak motif konvergensi IFRSs di Indonesia terhadap kebijakan perpajakan.

Bab VI : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan penutup dari bab-bab sebelumnya yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dan dapat dijadikan sarana untuk penelitian lebih lanjut.

Universitas Indonesia

BAB 2 PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI DI DUNIA PRA KONVERGENSI IFRS_s

2.1 Struktur dan Sistem Perekonomian Dunia

Cara melalui mana kesejahteraan penduduk dunia diciptakan, telah menjadi perdebatan yang cukup menarik hingga saat ini. Perdebatan tersebut melahirkan sosialisme-komunisme pada satu sisi dan liberalisme-kapitalisme pada sisi yang lain. Akhir dari perdebatan ini melahirkan dua blok kekuatan ekonomi dan politik yang saling berhadap-hadapan, yaitu blok Uni Soviet yang mendasarkan pada komunisme dan Amerika Serikat beserta sekutunya yang mendasarkan diri pada kapitalisme. Era ini kemudian sering disebut sebagai *Cold War* atau era Perang Dingin.

Perang Dingin telah berakhir dan kini perdebatan-perdebatan di tingkat internasional tidak lagi menyangkut bagaimana meredakan ketegangan antara kedua blok tersebut, melainkan lebih pada dimensi-dimensi global, terutama di bidang perdagangan, lingkungan hidup, kemiskinan dan keamanan dunia. Akhir Perang Dingin telah mengubah peta ekonomi politik global. Dengan berakhirnya Perang Dingin, prioritas-prioritas nasional mengalami perubahan dan sekutu-sekutu Barat meletakkan kepentingan ekonomi nasional mereka sendiri sebagai prioritas tinggi. Di Amerika Serikat, pergeseran itu tampak nyata dengan menekankan keamanan ekonomi menggantikan keamanan militer (Gilpin, 2001). Pandangan ini jelas sangat berbeda dengan pandangan negara adidaya ini dalam masa Perang Dingin dimana kebijakan-kebijakan pemerintah lebih diorientasikan kepada usaha menjaga keamanan teritorial melalui keunggulan senjata. Selain itu, akhir Perang Dingin juga telah membuat dunia terbagi menjadi multipolar. Hal ini akan menjadi semakin sulit untuk mengelola keamanan dunia dan tentu juga menyangkut politik dan ekonomi.

Sekarang ini, perdebatan menyangkut cara yang efektif untuk mengelola ekonomi negara-bangsa dalam lingkup yang lebih sempit dan dunia dalam lingkup yang lebih luas tidak lagi antara sosialisme dan kapitalisme tetapi lebih menyangkut peran negara dalam aktivitas ekonomi. Perdebatan ini melahirkan

paham Keynesianisme pada satu sisi dan liberalisme di sisi yang lain. Bagi kaum Keynesian, negara diperlukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi sementara bagi kalangan liberal atau yang kemudian sering disebut sebagai kaum Kanan Baru, campur tangan negara hanya akan menimbulkan distorsi dan membuat ekonomi dunia tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien (Winarno, 2009). Oleh karena itu, mereka lebih menyerahkan mekanisme tersebut kepada pasar dan berusaha keras agar negara dikeluarkan dari pasar.

Sejarah mengenai pengaturan perdagangan dan pengaturan ekonomi dunia telah dimulai sejak lama, yakni pada periode pascaperang. Selama masa pasca-Perang Dunia II, pemerintahan-pemerintahan yang didominasi oleh negara-negara maju mengembangkan dan menyelenggarakan seperangkat aturan, lembaga dan prosedur yang mengatur aspek-aspek penting dalam hubungannya dengan ekonomi internasional (Spero, 1981). Selama hampir dua dekade, orde ini sering disebut sebagai *the Bretton Woods System*, efektif dalam mengontrol konflik dan dalam rangka meraih tujuan-tujuan bersama yang telah dibuat oleh negara-negara. Dasar politik bagi *the Bretton Woods System* ini ditemukan dalam koinsidensi tiga kondisi, yaitu konsentrasi kekuasaan dalam sejumlah kecil negara, adanya sekelompok kepentingan bersama dari negara-negara tersebut dan kehadiran kekuatan dominan yang rela menjalankan peran kepemimpinan (Kindleberger, 1973).

Keberhasilan sistem ini dalam mengelola ekonomi dan perdagangan karena selain kondisi sebagaimana tersebut diatas, sistem ini tidak mendapatkan tantangan dari negara-negara komunis yang lebih cenderung memisahkan diri dari sistem ekonomi internasional, negara-negara yang kurang berkembang dan Jepang. Kondisi pascaperang telah membuat Jepang lemah secara ekonomi sehingga masih berada dalam kondisi sebagai negara berkembang dan berada diluar manajemen *the Bretton Woods System*. Konsentrasi kekuasaan ini memudahkan sistem berjalan melalui pembatasan aktor-aktor negara yang persetujuannya diperlukan untuk menetapkan aturan, lembaga dan prosedur, serta untuk menjalankan manajemen dari sistem tersebut.

Kemudian sistem dimudahkan oleh tingkat kesepakatan yang tinggi diantara negara-negara anggota menyangkut tujuan dan alat dalam mengelola

Universitas Indonesia

ekonomi internasional. Dasar dari persetujuan ini ada dalam kapitalisme dan liberalisme. Meskipun diantara negara-negara tersebut mempunyai perbedaan menyangkut tipe-tipe kapitalisme yang mereka jalankan, namun di kalangan negara-negara tersebut cenderung menyukai sistem liberal, yang menyandarkan diri pada pasar bebas dengan meminimalkan hambatan-hambatan perdagangan dan modal (Ohmae, 1995). Dengan demikian, periode *the Bretton Woods System* ini merupakan salah satu dari usaha-usaha beberapa negara untuk menciptakan seperangkat aturan dalam rangka mengelola ekonomi internasional. Meskipun implementasi sistem liberal berbeda dari satu negara ke negara lain, namun semuanya sepakat bahwa sistem yang terbuka akan memaksimalkan kemakmuran ekonomi. Bahkan, dikalangan mereka percaya bahwa sebuah sistem ekonomi yang terbuka akan memberikan kemungkinan bagi terciptanya perdamaian.

Meskipun mereka percaya bahwa ekonomi liberal lebih disukai, tetapi mereka juga setuju bahwa sistem ekonomi internasional liberal ini membutuhkan intervensi pemerintah. Ini tentunya berbeda dengan perkembangan berikutnya dimana peran pemerintah berusaha untuk secara serius dimarjinalkan. Periode pascaperang dimana stabilitas, pengangguran dan pertumbuhan menjadi subyek yang penting dari kebijakan publik sehingga intervensi negara dapat diterima.

Kepentingan bersama dalam kerjasama ekonomi semakin diperkuat oleh pecahnya Perang Dingin pada akhir 1940-an. Pada masa itu, kerjasama ekonomi diperlukan dalam menghadapi musuh bersama, dalam hal ini blok ekonomi Uni Soviet. Kerjasama ekonomi tidak hanya ditujukan dalam rangka membangun kembali Eropa, suatu langkah sengaja yang dilakukan Amerika Serikat untuk mengembangkan ekonomi pasar bebasnya, tetapi juga demi keamanan politik dan militer mereka (Sugiono, 1999). Inilah yang mendorong negara-negara tersebut rela untuk berbagi beban karena masalah-masalah keamanan. Selain itu, faktor tersebut juga menjadi pendorong bagi munculnya Amerika Serikat untuk menjadi pemimpin sistem tersebut. Bagi Amerika Serikat, *the Bretton Woods System* diharapkan dapat menjadi benteng Amerika Serikat dari ancaman Uni Soviet (Gilpin, 2001).

Akhirnya sistem tersebut dapat berjalan karena adanya kekuatan dominan Amerika Serikat yang tidak mengalami kehancuran akibat perang sehingga dapat

Universitas Indonesia

dan secara sukarela menjalankan peran kepemimpinan, disamping Jepang dan negara-negara Eropa Barat menerima kepemimpinan tersebut. Namun demikian, meskipun sistem ini dianggap dapat berjalan efektif pada masa itu dalam menyelesaikan konflik-konflik perdagangan yang muncul diantara negara-negara anggota, menjelang tahun 1970-an, *the Bretton Woods System* dalam keadaan kacau dan terancam. Pada bulan Agustus 1971, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon tampil di depan publik, dan secara sepihak tanpa berkonsultasi dengan para penandatangan *the Bretton Woods System*, memutuskan untuk menunda tukar-menukar penuh dolar dengan emas dan kemudian mendevaluasikannya. Ini sekaligus menandai era berakhirnya *the Bretton Woods System*. Faktor yang menjadi penyebab keruntuhan sistem tersebut adalah karena adanya penentangan terhadap kekuasaan, melemahnya kepemimpinan dan memudarnya konsensus (Winarno, 2009).

Meskipun negara-negara maju masih memegang peran dominan dalam kekuasaan ekonomi dan politik, namun negara-negara diluar *the Bretton Woods System* tersebut, yang sebagian besar negara-negara berkembang, mulai menentang hak mereka untuk mengelola sistem. Selama sistem ini berlangsung, negara-negara Dunia Ketiga tidak puas karena sistem ini menentukan ekonomi mereka, dalam kenyataannya mereka disingkirkan dari pengaturan sistem dan mereka mulai merasa bahwa telah terjadi ketidakadilan dalam pembagian kekayaan. Tantangan kedua berasal dari negara-negara komunis. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, negara-negara komunis dipelopori Cina yang pada awalnya mengisolasi diri akhirnya ikut berpartisipasi dalam ekonomi internasional. Partisipasi ini ternyata mengacaukan ekonomi internasional pada waktu itu.

Kemunduran *the Bretton Woods System* saat itu juga dikarenakan pergeseran kekuatan yang berlangsung secara internal. Program *Marshall Plan* telah membuahkan hasil dimana perekonomian negara-negara Eropa berkembang pesat dan pada tahun 1960-an negara-negara Eropa membentuk European Economic Community atau di Indonesia dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). MEE menjadi blok ekonomi yang menyaingi ekonomi Amerika Serikat dan menjadi kekuatan politik potensial. Di sisi lain, Jepang juga telah tumbuh menjadi negara yang mempunyai kekuatan ekonomi yang fantastis.

Universitas Indonesia

Akhirnya perubahan-perubahan tersebut, terutama terjadinya pergeseran kekuatan internal, telah mendorong semakin menurunnya kemampuan kepemimpinan Amerika Serikat sehingga *the Bretton Woods System* menjadi semakin tidak efektif dan kemudian bubar.

Runtuhnya *the Bretton Woods System* sebagai tatanan ekonomi internasional terbatas membuat dunia tidak lagi mempunyai aturan baku untuk mengelola ekonomi internasional. Resesi ekonomi dunia yang berlangsung besar-besaran pada periode tahun 1970-an telah mendorong negara-negara di dunia untuk mengedepankan kepentingan nasionalnya masing-masing dan lebih cenderung mengembangkan kebijakan *merkantilis* yang berusaha mencari kekayaan dari surplus perdagangan luar negeri. Sedangkan usaha-usaha untuk menyusun kembali pengaturan ekonomi internasional tidak pernah berhasil.

Perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi yang sangat maju dan murah merupakan salah satu faktor pendorong bagi globalisasi. Barangkali, tanpa adanya perkembangan ini globalisasi yang berlangsung dalam skala masif tidak akan pernah terjadi. Ini karena globalisasi mempunyai ciri tersendiri, yaitu integrasi, jaringan dan interdependensi. Dunia menjadi tempat untuk menjalin hubungan, baik antara perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan negara, negara dengan negara maupun antar individu. Selain itu globalisasi juga mempunyai ciri lain yaitu jaringan. Globalisasi mendorong terjadinya integrasi dan dengan demikian, setiap individu, perusahaan dan bangsa-bangsa akan terhubung satu dengan yang lain, untuk mencapai seluruh dunia dengan lebih jauh, lebih cepat, lebih murah daripada yang pernah ada sebelumnya. Akhirnya dari variabel integrasi dan jaringan tersebut lantas menciptakan saling ketergantungan (*interdependensi*).

Namun diluar itu semua, gagasan dibalik globalisasi dan liberalisasi perdagangan dan investasi tidak dapat dilepaskan dari kemenangan ideologis yang berada dibalik peristiwa tersebut, yaitu kemenangan kelompok Kanan Baru di Amerika Serikat dan negara-negara kapitalis utama lainnya di Eropa. Pada dasarnya, tatanan ekonomi internasional pasca Perang Dunia II muncul sebagai produk dari persaingan seugit antara dua orientasi kebijakan yang bertentangan, yaitu antara kelompok yang berorientasi internasionalisme liberal yang

Universitas Indonesia

menghendaki sebuah perekonomian dunia yang terbuka dan kelompok kapitalisme internasional yang menuntut lebih banyak peran aktif negara dalam mencapai tujuan-tujuan sosial (Sugiono, 2009). Kelompok pertama lebih sering dikenal sebagai pendukung liberalisme ekonomi, sedangkan kelompok kedua lebih dikenal sebagai pendukung merkantilisme ekonomi.

Bagi kelompok pertama, teori keunggulan komparatif yang diperkenalkan ahli ekonomi neoklasik Adam Smith dan David Ricardo masih relevan hingga saat ini. Teori ini menyatakan bahwa penghapusan penghalang pergerakan bebas barang akan memungkinkan terjadinya spesialisasi nasional dan pemanfaatan secara optimal faktor-faktor produksi dunia yang langka. Pada akhirnya akan memungkinkan pola-pola perdagangan internasional ditentukan oleh keuntungan komparatif yaitu harga. Dilaksanakannya prinsip keuntungan komparatif memastikan sebuah negara pada akhirnya akan meraih efisiensi ekonomi dan kesejahteraan yang lebih besar lewat partisipasi perdagangan luar negeri, bukannya lewat proteksi perdagangan (Gilpin, 2001). Hal ini menjadi landasan utama utama mengapa para pendukung aliran ini sangat antipati terhadap bentuk-bentuk proteksionisme perdagangan.

Dalam usaha memenangkan pertarungan ideologisnya, kelompok Kanan Baru menyerang kebijakan-kebijakan yang bersandar pada Keynesian. Kelompok ini menyerang fondasi kebijakan Keynesian dengan mengambil momentum krisis ekonomi akibat inflasi yang tidak dapat diatas oleh kebijakan Keynesian. Pada tahun 1973, dengan disponsori negara-negara Arab sebagai produsen minyak utama dunia, terbentuk sebuah kartel bernama OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) yang menyebabkan harga minyak melambung tinggi. Karena harga minyak terus melambung tinggi maka hal ini mendorong kenaikan harga-harga dan upah-upah. Akibat lebih jauh adalah mendorong terjadinya resesi ekonomi, pengangguran dan inflasi yang melambung hingga mencapai angka 20 persen di seluruh negara serta ketidakmampuan negara-negara Dunia Ketiga membayar hutang-hutangnya. Di sisi lain, kebijakan Keynesian yang telah banyak digunakan oleh negara-negara selama lebih kurang tiga puluh tahun tidak mampu mengatasi masalah-masalah tersebut, terutama menyangkut tingginya inflasi. Bahkan kelompok-kelompok penentang kebijakan tersebut, yang

Universitas Indonesia

diidentifikasi sebagai kelompok Kanan Baru, melihat inflasi sebagai akibat kebijakan yang berstandar pada Keynesianisme.

Salah seorang pelopor dari kelompok ini adalah Milton Friedman yang berasal dari golongan monetaris. Secara garis besar kritik kelompok Kanan Baru dalam menghadapi kebijakan yang bersandar pada aliran Keynesian dapat dibagi dalam tiga pokok pikiran. Pertama, pada intervensi negara. Bagi kalangan yang bersandar pada tradisi Keynesian, kapitalisme mempunyai cacat bawaan, yakni kurangnya permintaan (*demand*). Oleh karena itu agar kapitalisme dapat berkembang maka pemerintah harus terlibat aktif dalam meningkatkan *demand* melalui belanja publik. Bentuk kebijakan ini biasanya berupa peningkatan upah pekerja. Namun, dalam pandangan kaum Kanan Baru, intervensi negara yang mendalam dalam ekonomi merupakan rintangan yang serius bagi kemajuan perekonomian. Asumsinya, mekanisme pasar bekerja pada basis harga yang oleh para pendukung pasar dianggap sebagai tanda-tanda pasar. Dalam pandangan Ture (1985) di Sugiono (1999), penerapan kebijakan ekonomi Keynesianisme yang dicirikan dengan tingginya kehadiran negara dianggap mengganggu tanda-tanda tersebut, sehingga menghalangi ekonomi pasar untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Kalangan ini menyatakan bahwa akibat-akibat terlalu banyaknya campur tangan negara sebagai akibat diberlakukannya kebijakan Keynesianisme, dunia terjebak dalam krisis yang berkepanjangan pada tahun 1970-an.

Para intelektual Kanan Baru memandang, inflasi sebagai produk dari ekspansi uang yang kemudian dijadikan ekonomi Keynesian untuk menghasilkan boom ekonomi pascaperang dan untuk memelihara komitmennya pada *full employment* (Sugiono, 1999). Mereka kemudian menyatakan bahwa peningkatan belanja publik Keynesian dianggap menciptakan terlalu banyak *demand* dan karenanya menjadi sebab timbulnya inflasi yang meluas. Dalam menghadapi masalah ini, mereka berpendapat bahwa inflasi merupakan masalah moneter sehingga harus diatasi dengan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. Inflasi dalam pandangan mereka merupakan pertanda suplai uang yang berlebihan dan tingginya tingkat upah sehingga pemerintah harus mengurangi suplai uang dan menekan upah yang pada awalnya ditujukan untuk merangsang *demand* selama

Universitas Indonesia

masa resesi ekonomi. Dengan demikian kebijakan yang oleh para pendukung Keynesian dianggap sebagai solusi terhadap masalah yang *inherent* dalam kapitalisme, bagi kelompok Kanan Baru dianggap sebagai akar timbulnya masalah.

Konsisten dengan pandangan-pandangannya, kelompok Kanan Baru kemudian menggugat program-program kesejahteraan dan *welfare state* yang ditawarkan oleh kebijakan Keynesian. Mereka beranggapan bahwa redistribusi pendapatan sebagai suatu bentuk ketidakadilan. Dalam pandangan mereka, para penerima santunan kesejahteraan sebagai pemalas, oportunistis dan bahkan parasit sosial karena memperoleh uang dari anggaran pemerintah dan tidak menganggap kerja sebagai salah satu nilai tertinggi dalam masyarakat dan sebagai sumber kekayaan riil (Sugiono, 1999). Oleh karena itu mereka cenderung melihat negara kesejahteraan sebagai bentuk ketidakadilan.

Namun demikian, serangan terhadap pijakan moral dan politik yang dilancarkan kelompok Kanan Baru terhadap model Keynesian ini juga mulai mendapat kritik. Gilpin (2002) justru melihat bahwa ketiadaan jaminan terhadap kelompok-kelompok yang kalah dalam persaingan ekonomi politik global akan menimbulkan hambatan bagi penyebaran liberalisme dan perdagangan bebas. Ini karena ketimpangan dalam distribusi pendapatan akan semakin mendorong terjadinya penentangan terhadap globalisasi dan liberalisme perdagangan. Fakta diselenggarakannya konferensi World Social Forum di Porto Alegre, Brasil setidaknya membuktikan pendapat tersebut. Semakin lebarnya *inequality* dalam pendapatan dan ketidaksetaraan standar hidup akan semakin mendorong kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan tertindas secara ekonomi untuk bergerak ke arah melawan globalisasi. Hal ini membuat globalisasi ekonomi semakin sulit diterapkan di negara-negara miskin akibat resistensi internal.

Setelah melakukan kritik terhadap pondasi kebijakan ekonomi Keynesian beserta konsep moral dan politiknya, kelompok Kanan Baru menekankan arti penting pasar bagi penciptaan kesejahteraan umat manusia. Bahkan diantara mereka ada yang mempunyai pandangan bahwa hanya dengan pasar bebaslah kesejahteraan dan perdamaian akan dapat diwujudkan. Di bawah mekanisme pasar dan dibimbing oleh apa yang disebut sebagai "tanda-tanda pasar" setiap

Universitas Indonesia

individu akan memanfaatkan sumber dayanya secara efisien. Oleh karena itu mengikuti alur pikir Adam Smith dan David Ricardo, kaum intelektual Kanan Baru menyatakan bahwa jika dibiarkan mengejar tujuan-tujuannya sendiri dan tanpa diniatkan secara sengaja untuk melayani kepentingan masyarakat, individu tidak hanya akan memberi manfaat bagi diri mereka sendiri, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Intervensi pemerintah sebaiknya dianggap mengganggu mekanisme ini meskipun intervensi tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Ini karena dalam pandangan mereka, intervensi pemerintah hanya akan mengacaukan apa yang mereka sebut sebagai “tanda-tanda pasar”, akibatnya akan menyesatkan individu dan menjatuhkan mereka dari berperilaku rasional dan efisien. Pengagungan pasar yang teramat berlebihan ini sebenarnya menyimpang atau dalam pandangan Korten (1997) sebagai pengkhianatan terhadap gagasan-gagasan Adam Smith dan David Ricardo yang merupakan pelopor teori liberalisme klasik.

Sementara itu, era kebijakan yang bersandar pada ideologi Kanan Baru atau neoliberal dimulai oleh dua pendukung utamanya yaitu Presiden Amerika Ronald Reagan dan Perdana Menteri Inggris Raya Margaret Thatcher. Ronald Reagan merupakan tokoh politik dari aliran Kanan Baru yang dengan antusias memperjuangkan pasar dan mengambil jalan yang berseberangan dengan negara intervensionis. Ronald Reagan mengambil jalan sesuai dengan pandangan-pandangan pada ekonom Kanan Baru seperti Milton Friedman dan Friedrich Hayek. Kedua pemimpin pemerintahan tersebut sama-sama sebagai pendukung pasar bebas, meskipun keduanya tidak selalu sepakat dalam mengambil bentuk-bentuk kebijakan publik. Thatcher lebih memakai moneterisme yang menekankan kontrol ketat atas *money supply*, sedangkan pemerintahan Reagan didominasi oleh ekonom-ekonom yang menganut *supply side*, yang menyarankan pemotongan pajak guna memberikan insentif sebesar-besarnya bagi produksi. Namun demikian, sebagaimana keyakinan kaum Kanan Baru lainnya yang menolak kesejahteraan dan belanja publik, maka kebijakan yang diambil kedua pemimpin ini konsisten dengan keyakinan tersebut, yakni memangkas belanja publik dan menurunkan laju inflasi. Kebijakan ini menjadi ciri khas dari para penganut ideologi Kanan Baru (Winarno, 2009).

Universitas Indonesia

Selain itu, baik Reagan maupun Thatcher sama-sama meyakini teori "*trickle down effect*" yang mengklaim bahwa jika si kaya akan mendapatkan insentif seperti pajak rendah maka mereka akan terdorong untuk bertindak selaku *entrepreneur*, dan dengan demikian akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Atau, jika industri layanan publik dialihkan ke swasta maka industri-industri tersebut akan dikelola dengan lebih efisien dan mampu lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan. Situasi ini akan mengurangi beban pemerintah untuk membayar biaya kesejahteraan. Kebijakan-kebijakan ekonomi lebih ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kue pembangunan akan semakin besar untuk dibagi merata ke seluruh masyarakat. Untuk itu di Inggris Raya berbagai kebijakan ditempuh untuk menciptakan budaya yang menghargai perusahaan dan inovasi. Tarif pajak perseorangan dan perusahaan diturunkan, pengawasan harga, dividen dan kontrol kurs mata uang asing dihapuskan tanpa memperhatikan akibat pada kerentanan negara. Selain itu, pengawasan terhadap telekomunikasi, penyiaran, transportasi dan periklanan ditiadakan.

Hasil dari kebijakan-kebijakan Reagan dan Thatcher memang mempunyai dampak yang signifikan dalam menghadapi krisis saat itu, terutama dalam meningkatkan standar hidup. Amerika Serikat hingga saat ini merupakan salah satu negara yang mempunyai standar hidup yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Sementara itu, insentif-insentif berupa pajak yang rendah bagi perusahaan juga telah mendorong peningkatan dalam skala besar-besaran terhadap perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang kemudian menjadi MNCs yang mendominasi pasar dunia (Winarno, 2009). Dengan mengacu pada pencapaian-pencapaian tersebut, Friedman mengatakan bahwa baik Reagan dan Thatcher adalah pemimpin-pemimpin yang berhasil memberikan sangkar emas bagi negaranya.

Setelah era Reagan dan Thatcher, dominasi gagasan-gagasan Kanan Baru dapat dilihat dalam banyak manifestasi kebijakan dalam lembaga-lembaga internasional dan gagasan-gagasan yang tersebar dalam forum-forum ilmiah maupun media massa. Setelah mereka mendapatkan kemenangan dari perseteruan ideologisnya dengan pendukung Keynesian, kelompok ini kemudian memperjuangkan bagaimana mendorong liberalisme dan perdagangan bebas

Universitas Indonesia

dunia. Didukung oleh para pengambil kebijakan di lembaga-lembaga dunia seperti WTO, IMF dan World Bank serta para pengambil kebijakan publik di negara-negara maju, pemikiran-pemikiran kelompok ini menjadi dominan dalam usahanya menciptakan liberalisasi perdagangan dan investasi di seluruh dunia. Mereka menekankan arti penting pasar bebas dan berusaha memarjinalkan peran negara dalam proses-proses ekonomi. Bentuk-bentuk dari usaha ini dapat dilihat dari hasil-hasil pembicaraan tingkat tinggi para pengambil kebijakan publik, meskipun tetap harus diberi catatan bahwa pembicaraan-pembicaraan tersebut menyisakan banyak masalah karena sulitnya mencari kata sepakat mengenai bentuk pasar bebas yang diinginkan. Namun hasil-hasil pembicaraan tadi yang sering dikenal sebagai *around*, telah mampu mengurangi hambatan perdagangan tarif secara signifikan dan ini sekaligus menjadi tanda semakin kuatnya desakan ke arah pemberlakuan pasar bebas dunia. Dibentuknya organisasi perdagangan dunia atau WTO yang mengatur banyak sekali aspek-aspek perdagangan juga menjadi wujud kemenangan ideologi Kanan Baru dalam mendesak agenda pasar bebas.

Selain itu, lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Amerika Serikat dan Eropa juga menjadi media bagi proses sosialisasi ideologi Kanan Baru (Petras dan Veltmeyer, 2002). Melalui lembaga-lembaga inilah para ahli dari negara-negara Dunia Ketiga belajar ekonomi kepada "mahaguru" mereka di negara-negara Barat untuk akhirnya diterapkan di negara masing-masing. Selain itu, pemerintahan Amerika Serikat juga mendukung pembangunan-pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga tersebut yang ditujukan untuk melakukan dominasi dan penyebaran gagasan-gagasan Kanan Baru yang mengagungkan pasar bebas dan mencegah peran aktif negara dalam perekonomian (Sugiono, 1999).

Dampak lanjutan dari perjuangan kelompok Kanan Baru adalah nyata, yaitu hampir semua negara di dunia mengambil jalan ke arah kapitalisme dan pasar bebas. Mereka melakukan deregulasi pasar dan memprivatisasi perusahaan-perusahaan negara. Dan seperti ditegaskan oleh Gilpin (2001), di negara-negara berkembang, deregulasi, privatisasi dan berbagai reformasi lainnya telah mengurangi peran negara dalam ekonomi dan membuat banyak negara menyerukan kejayaan kapitalisme dan gagasan-gagasan yang bersandar

kepadanya. Cina sendiri meskipun sistem politiknya masih memegang teguh sosialisme tetapi secara ekonomi menganut liberalisasi. Hal ini sebagai dampak reformasi ekonomi yang dideklarasikan Deng Xiaoping pada tahun 1993 yang mengubah sistem ekonomi dari *the iron rice bowl* menjadi *system socialist market economy* yang menekankan pada orientasi pasar (Sudjijono, 2008). Reformasi ini berkaitan dengan ambisi Cina menjadi sebuah negara yang kuat baik secara politik maupun ekonomi.

Di lembaga seperti IMF, paradigma pasar bebas juga mendominasi program-program restrukturisasi IMF dalam membantu negara-negara yang berjuang keluar dari krisis finansial. Program-program restrukturisasi IMF lebih mencerminkan pandangan-pandangan aliran Kanan Baru dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan yang bersandar pada Keynesian. Biasanya mereka mendesak program-program privatisasi perusahaan-perusahaan negara dan mengurangi belanja publik melalui pengurangan subsidi. Sebuah strategi kebijakan yang menjadi prinsip utama gagasan-gagasan aliran Kanan Baru. Para pengkritik IMF mengatakan bahwa melalui "*structural adjustment program*" semua kebijakan yang dikeluarkan oleh IMF dimaksudkan sebagai pelicin jalan sehingga memudahkan MNCs dan memberikan perlindungan terhadap mereka untuk beroperasi, baik dalam perdagangan maupun berinvestasi.

Lembaga-lembaga seperti General Agreement on Tariff and Trade (GATT) dan WTO merupakan salah satu instrumen melalui mana sistem ekonomi dunia yang bersandar pada pasar hendak didesakkan. Melalui mekanisme GATT yang kemudian berubah menjadi WTO, secara intensif negara-negara maju yang didominasi oleh gagasan-gagasan aliran Kanan Baru mendesak agenda liberalisasi dan perdagangan bebas (Chomsky, 1997). Seperti diketahui GATT bekerja dengan menggunakan tiga prinsip utama, yaitu non-diskriminasi, penghapusan hambatan perdagangan dan konsultasi di negara-negara anggota untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul (Salvatore, 1993). Penyelesaian masalah dan kesepakatan dalam GATT banyak menyisakan kelemahan yang mendasar. Dalam rangka mengatasi masalah-masalah tersebut negara-negara industri maju mendesak *Uruguay Around* yang menghasilkan *Marakesh Accord*. Beberapa hal terpenting yang dihasilkan dalam putaran ini

Universitas Indonesia

yaitu kesepakatan soal investasi langsung asing dan didirikannya WTO yang diharapkan dapat memecahkan masalah perdagangan internasional.

Noreena Heertz (2003) mencatat 300 pemilik perusahaan teratas mengontrol lebih dari seperempat dari seluruh aset produktif di dunia. Sebanyak 200 perusahaan papan atas dunia menguasai 28 persen perekonomian global. Terdapat 500 perusahaan yang mengontrol 70 persen perdagangan dunia dan 1000 perusahaan papan atas dunia menguasai 80 persen industri dunia. Dalam catatan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa), jumlah MNCs mencapai lebih dari 45.000 dengan mayoritas terkonsentrasi di Amerika Serikat (179), Uni Eropa (148) dan Jepang (107).

Menurut Hirst dan Thompson (1996) selama beberapa dekade terakhir, terutama sejak tahun 1980-an, MNCs menjadi aktor-aktor utama disamping negara dalam percaturan ekonomi politik internasional. Diperkirakan pada tahun 1990-an terdapat kurang lebih 37 ribu MNCs yang mengendalikan sekitar 170 ribu organisasi yang terafiliasi. Dari semua perusahaan tersebut, 24 ribu (70 persen) bermarkas di dalam negeri di 14 (empatbelas) negara maju anggota OECD.

Michael Lim (2007) dari UNCTAD mengatakan saat ini terdapat lebih dari 60 ribu MNCs dengan tidak kurang 800 ribu afiliasi asing. Perdagangan MNCs mendominasi 2/3 nilai ekspor dunia dan 1/3 perdagangan dunia adalah perdagangan antar perusahaan. MNCs umumnya mendominasi penelitian dan pengembangan industri dunia dan melalui investasinya mereka adalah sumber finansial eksternal terbesar bagi negara-negara berkembang.

Ada beberapa faktor yang menjadi daya dorong ekspansi perusahaan-perusahaan tersebut dalam skala global. Strange (2000) melihat adanya perubahan fundamental dalam ekonomi politik internasional yang diakibatkan oleh revolusi di bidang teknologi komunikasi dan semakin mudahnya biaya transportasi yang mendorong terjadinya kecenderungan seluruh dunia. Ditambah dengan mobilitas modal, akhirnya membuat perusahaan-perusahaan melakukan perencanaan melakukan kegiatan dalam skala global.

Faktor-faktor yang tidak kalah penting adalah keuntungan yang dijanjikan oleh pasar-pasar di luar negeri karena semakin terbukanya pasar global.

Universitas Indonesia

Terbukanya pasar-pasar global ini juga didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun 1950-an hingga 1960-an. Steiner (1994) mencatat bahwa pertumbuhan produk nasional kotor atau *gross national product* (GNP) dunia yang eksplosif, telah semakin membuka pasar-pasar global. Perdagangan barang-barang, baik dalam bentuk ekspor maupun impor, yang berlangsung dalam skala yang lebih luas telah merefleksikan adanya permintaan baru untuk barang-barang yang berasal dari konsumen-konsumen kaya.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah semakin tingginya tingkat kompetisi yang berlangsung dalam pasar global tersebut. Hal ini karena terbukanya pasar global akan semakin mengundang pemain-pemain baru dalam pasar tersebut sehingga akan membuka kompetisi yang semakin sengit. Sehingga dalam rangka memenangkan kompetisi tersebut mereka melakukan ekspansi ke luar negeri untuk menyaingi perusahaan sejenis. Selain itu dalam rangka menyikapi perubahan-perubahan pasar global, perusahaan-perusahaan mulai melakukan perubahan dalam strategi produksinya. Jika sebelumnya melakukan integrasi secara horizontal yaitu melalui sistem manufaktur produksi massal produk-produk berstandar, sistem pembagian kerja yang tegas dan manufaktur berlokasi tunggal, maka kemudian MNCs berubah ke arah integrasi vertikal (Winarno, 2009). Kecenderungan ini mendorong proses integrasi berlangsung dalam skala global. Strategi lain adalah melalui pembentukan persekutuan-persekutuan korporasi baik melalui pemberian subkontrak, lisensi, patungan dan kesepakatan antar perusahaan.

Adalah sebuah realitas yang tidak bisa dipungkiri bahwa akhir-akhir ini, dinamika ekonomi banyak dipengaruhi atau ditentukan oleh fluktuasi pasar finansial termasuk krisis moneter yang melanda Asia Tenggara di tahun 1997 dan krisis finansial global di tahun 2008. Hal ini dikarenakan dalam dekade terakhir ini, investasi dalam aset finansial melonjak drastis, sementara akumulasi aset fisik cenderung menurun. Investasi finansial telah menggantikan investasi fisik. Dunia semakin menuju era hegemoni finansial karena investasi yang terus berkembang adalah investasi finansial, yaitu aktivitas mentransfer sejumlah likuiditas oleh investor entitas perusahaan atau individu kepada entitas perusahaan lainnya baik dalam bentuk *direct investment* maupun *portfolio investment* (Akisik dan Pfeiffer,

2009). Transfer sendiri bisa saja terjadi dari perusahaan yang memiliki kinerja buruk kepada perusahaan lain dengan kinerja yang lebih baik karena *asymmetric information*.

Hegemoni finansial ini terjadi akibat bertemunya tiga proses, yaitu: (1) globalisasi pasar finansial, (2) deregulasi pasar domestik, dan (3) inovasi produk-produk finansial pada level perusahaan (Prasetyantoko, 2008). Ketiga faktor tersebut saling bersinergi dan menghasilkan sebuah sistem dimana inovasi finansial terjadi dengan begitu cepat dan akhirnya menjadi sebuah tatanan dominan. Ibaratnya sektor finansial menjadi bintang diantara sektor-sektor lainnya, karena terbukti mampu memberikan tingkat keuntungan yang paling tinggi, apalagi di tengah-tengah kemandegan ekonomi riil. Proses hegemoni finansial juga tidak bisa dipisahkan dengan revolusi di tingkat mikro yaitu perusahaan. Dalam sistem korporasi modern, terjadi pemisahan antara hak kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Para pemilik modal mendelegasikan pengelolaan perusahaan kepada kaum manajerial atau eksekutif yang memang memiliki kompetensi dalam hal manajerial. Pemisahan kepemilikan dan pengurusan perusahaan sering disebut sebagai era kapitalisme manajerial, dimana kaum eksekutif menjadi kelompok dominan baru (Prasetyantoko, 2008).

Dinamika pasar finansial didorong dalam rangka meningkatkan kemakmuran yang maksimal bagi para pemilik modal. Dalam pasar finansial terutama pasar modal dan pasar utang, nilai perusahaan bisa dilipatgandakan dan bisa jadi tanpa harus menambah kapasitas produksinya melalui investasi fisik. Menurut Lazonick dan O'Sullivan (2000) dalam situasi dimana pasar finansial berkembang dengan sangat cepat, ada perubahan strategi perusahaan yang kadang kala terpaksa harus ditempuh. Pada masa sebelumnya, umumnya strategi perusahaan adalah menggunakan laba untuk diinvestasikan kembali atau dikenal dengan strategi "*retain to invest*", tetapi sekarang kecenderungannya perusahaan lebih memilih menyederhanakan struktur usaha dengan semakin memperbesar proporsi pemberian dividen pada para pemegang saham.

Kondisi sebagaimana tersebut diatas disebut Boyer (2005) sebagai proses akumulasi yang lebih didorong oleh faktor finansial ketimbang oleh investasi fisik. Krisis menjadi begitu sering muncul dalam mutasi yang semakin rumit dan

Universitas Indonesia

dalam skala yang makin besar seiring dengan bergeraknya pendulum perekonomian ke arah ekonomi finansial. Rezim finansial telah mendorong terjadinya finansialisasi yang berarti semakin besarnya pertumbuhan dan perkembangan sektor finansial. Menurut Dumenil dan Levy (2002), dominasi sektor finansial dalam perekonomian global berawal dari fenomena penurunan produktivitas kapital. Ketika Amerika Serikat mengalami krisis pada tahun 1970-an yang ditandai dengan tingginya harga minyak serta peningkatan signifikan suku bunga The Fed, sektor riil mengalami penyempitan ruang gerak. Para pemilik modal kemudian berpikir tentang bagaimana memecahkan masalah dari menurunnya produktivitas di sektor riil yang solusinya diperoleh dengan cara memperluas investasi di pasar finansial.

Sejak tahun 1980-an, di seluruh dunia terjadi gejala besar yang bernama liberalisasi di sektor finansial di tingkat global dan deregulasi di tingkat nasional. Sementara itu para pelaku ekonomi leluasa mengembangkan produk-produk finansial yang beraneka ragam. Tujuannya adalah memberikan kesempatan pada pemilik modal untuk secara lebih leluasa memperoleh laba dari peningkatan produktivitas kapital yang dimilikinya. Globalisasi yang ditopang oleh liberalisasi dan deregulasi di sektor finansial digerakkan oleh para pemilik modal yang dengan kekuatannya mampu mempengaruhi berbagai regulasi dan sistem, sehingga memberi ruang gerak yang lebih besar pada mereka untuk memperoleh keuntungan dari peningkatan kinerja kapital yang mereka miliki.

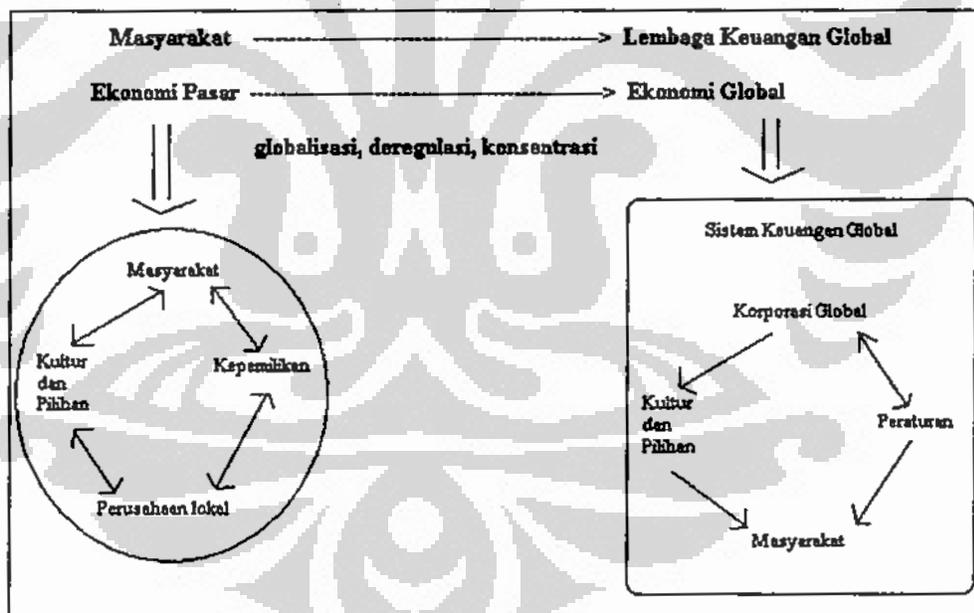
Perkembangan sektor finansial menandakan ekonomi global tidak hanya dicirikan oleh perdagangan bebas atas barang dan jasa tetapi lebih oleh pergerakan modal yang bebas. Tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang dan indeks harga saham antar negara saling berkaitan erat dan pasar finansial global berpengaruh sangat besar pada kondisi ekonomi. Untuk peran menentukan yang dimainkan oleh modal uang internasional pada kesejahteraan masing-masing negara, Soros (2000) menyebutnya *global capitalists system* (sistem kapitalisme global). Dalam sistem ini, pergerakan dalam nilai tukar, suku bunga dan harga-harga saham di berbagai negara sangat erat berkaitan.

Ciri pembeda kapitalisme global adalah gerakan modal yang bebas. Menurut Soros (2000) perdagangan internasional di bidang barang dan jasa saja

Universitas Indonesia

belum cukup menciptakan ekonomi global. Faktor-faktor produksi pun harus dapat saling dipertukarkan. Tanah dan sumber-sumber daya alam lainnya tidak bergerak dan penduduk tidak mudah bergerak, sehingga mobilitas modal, informasi dan kewirausahaannya yang berperan dalam integrasi ekonomi. Oleh karena modal finansial lebih *mobile* daripada investasi fisik, maka modal finansial tersebut menempati posisi yang istimewa. Modal finansial dapat menghindari negara-negara yang pajak atau peraturannya terlalu berat. Begitu sebuah pabrik dibangun, sulit memindahkannya. Maka dapat dimengerti, MNCs menikmati fleksibilitas dalam penentuan harga transfer dan dapat melakukan tekanan-tekanan pada saat mereka membuat keputusan investasi modal. Tetapi fleksibilitas itu tidak sebanding dengan kebebasan memilih yang dinikmati oleh para investor portofolio internasional. Hal ini mampu menarik modal ke pusat-pusat finansial dan mengalokasikannya melalui pasar finansial. Itulah sebabnya mengapa dua dekade terakhir pengaruh pasar finansial melesat di dunia.

Gambar 2.1
Peta Pergeseran Kekuatan Ekonomi



Sumber: Diolah dari Korten (2002) dan Soros (2007)

Gambar 2.1 memberikan sketsa kasar dari apa yang terjadi pada saat kapitalisme mengkonsolidasikan genggamannya terhadap sebuah ekonomi pasar

Universitas Indonesia

dengan memindahkan kekuasaan dan garis-garis pertanggung-jawaban dari masyarakat kepada badan-badan keuangan global yang bersifat impersonal dan terasing. Dalam suatu ekonomi pasar yang berfungsi yang terdiri dari perusahaan-perusahaan berskala lokal, maka kekuasaan itu tersebar secara meluas di dalam kalangan masyarakat setempat yang terlibat dalam menghasilkan nilai-nilai budaya yang membentuk masyarakat itu sendiri, membuat keputusan tentang pembelian, menentukan peraturan sendiri melalui pemerintah yang mereka pilih secara demokratis dan langsung ikut serta dalam kepemilikan perusahaan setempat. Sebaliknya apa yang dibebaskan oleh deregulasi dan globalisasi ekonomi itu bukanlah pasar, akan tetapi lebih banyak menguntungkan lembaga-lembaga kapitalisme global. Pada saat kendala-kendala regulasi dan tapal batas nasional telah dihilangkan, maka pasar uang bergabung menjadi satu sistem perdagangan elektronik yang tunggal, dan perusahaan-perusahaan global mengkonsolidasikan dan mengkonsentrasikan kekuatan mereka melalui merger, akuisisi dan aliansi strategis yang berada di luar jangkauan negara manapun. Tabungan banyak ditarik menuju pengumpulan dana investasi yang dikelola oleh profesional badan keuangan dengan pertanggungjawaban penuh untuk memaksimalkan hasil-hasil keuangan yang sebanding dengan risiko. Kekuasaan untuk melaksanakan hak kepemilikan pun berpindah tangan kepada badan-badan keuangan global.

2.2 Situasi dan Kondisi Perekonomian Dunia

Sejarah menunjukkan saat sistem finansial semakin besar, maka risiko terjadinya gejolak dan krisis juga semakin tinggi, sehingga bisa dikatakan bahwa sektor finansial menjadi pemicu paling efektif untuk memunculkan gejolak dan krisis. Meskipun begitu, sumber dari krisis tidak selalu harus dimulai dari suatu masalah di pasar finansial itu sendiri. Jika krisis masih terisolasi pada sektor finansial saja, maka bisa dikatakan situasi belum sampai menjalar pada krisis ekonomi. Tetapi saat gejolak di sektor finansial telah mengganggu kinerja makro ekonomi seperti inflasi yang parah, pertumbuhan yang melambat dan lain sebagainya, maka kondisi tersebut boleh dikatakan telah merembet pada situasi

krisis ekonomi. Krisis finansial umumnya ditandai dengan terjadinya depresiasi nilai tukar yang tajam (Kaminsky, Lizondo, dan Reinhart, 1998).

Secara garis besar, dinamika pasar finansial yang mudah sekali merembet pada krisis nilai tukar memunculkan situasi yang disebut *vulnerability* atau kerawanan. Dornbusch (1997) mengartikan kerawanan adalah bahwa ketika ada sesuatu yang tidak baik, maka akan segera menyebar secara cepat sehingga hal-hal lain bergerak ke arah yang buruk pula. Kondisi finansial dan nilai tukar sangat berpotensi menciptakan kerawanan dalam perekonomian.

Sejak beberapa dekade terakhir ini, fakta terjadinya resesi dan krisis ekonomi serta instabilitas finansial sudah menjadi sajian sehari-hari sehingga begitu akrab di telinga dan mata kita. Jika kita membaca surat kabar atau mendengarkan berita, hampir pasti menjumpai isu, berita dan masalah seputar fluktuasi pasar saham dan pasar finansial lainnya, yaitu pasar uang dan pasar hutang (obligasi). Bagi para investor di pasar finansial, berita tersebut menjadi hal yang sangat berharga karena akan menentukan arah kebijakan investasi terkait modal yang ditanamkan di berbagai instrumen keuangan.

Tidak semua krisis ekonomi dan instabilitas finansial hanya monopoli para investor di pasar finansial. Setiap masalah yang terjadi pada pasar finansial akan selalu berdampak pada perekonomian secara umum, yang akhirnya mempengaruhi masyarakat luas. Dalam kasus fluktuasi yang bersifat ringan, kebijakan pemerintah melalui berbagai instrumen kebijakannya bisa meredamnya. Demikian juga bank sentral yang salah satu tugasnya meredam berbagai gejolak di pasar finansial agar tidak berdampak langsung pada keberlangsungan perekonomian yang pada akhirnya akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Pada tahun 1982, Meksiko mengalami krisis akibat bangkrutnya perbankan yang dibebani hutang luar negeri. Pada tahun 1993, Finlandia yang dikenal sebagai salah satu negeri dengan kualitas ekonomi paling baik diantara negara-negara maju di dunia, mengalami guncangan dalam sistem nilai tukar mereka. Gejala krisis di era tahun 1990-an menunjukkan ciri yang semakin ganas. Pada tahun 1994, giliran Meksiko yang terkena krisis nilai tukar. Mula-mula pemerintah Meksiko mengumumkan devaluasi mata uang peso terhadap dollar Amerika Serikat sebesar 15 persen. Akan tetapi akibat respon panik para pelaku

Universitas Indonesia

pasar yang menggambarkan ketidakpercayaan pelaku pasar pada kinerja pemerintah dan bank sentral menangani gejolak nilai tukar, pada tahun 1995 mata uang Meksiko terdepresiasi sebesar 100 persen.

Sejarah terus bergerak menuju pada era keganasan krisis. Tanggal 2 Juli 1997 adalah hari yang bersejarah bagi bangsa Asia krena pada tanggal tersebut Thailand mengumumkan kebijakan nilai tukar mengambang bagi mata uang bath mereka. Pada tahun 1998, bath terdepresiasi sebesar 113 persen. Mengambangnya nilai tukar bath menjadi momentum bagi keruntuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Krisis segera menyebar ke Indonesia, Malaysia, Filipina dan Korea Selatan. Indonesia menderita depresiasi mata uang paling serius.

Gejolak krisis tak berhenti di kawasan Asia saja. Pada tanggal 18 Agustus 1998, giliran pemerintah Rusia yang mengumumkan kebangkrutannya pada pasar obligasi domestik. Antara bulan Juli 1998 hingga Januari 1999, mata uang Rusia mengalami depresiasi sebesar 262 persen. Sementara itu pada bulan September 1998, merupakan momentum bagi bangkrutnya para manajer investasi dengan ambruknya Long Term Capital Management, sebuah lembaga investasi paling besar di dunia pada waktu itu. Pada bulan Januari 1999, giliran Brasil yang harus mendevaluasi mata uangnya serta menerapkan sistem nilai tukar mengambang di bulan Februari 1999. Antara awal bulan Januari hingga akhir Februari 1999, Brasil mengalami depresiasi sebesar 70 persen atas mata uangnya. Pada bulan Desember 2001, Presiden Argentina mengumumkan kondisi negaranya yang hampir bangkrut. Sementara pada bulan Februari 2002, Turki juga harus mengambangkan mata uangnya.

Tidak ada satu pun kawasan di dunia yang terhindar dari kejaran krisis. Krisis telah menjalar dari mulai kawasan Amerika Latin, Asia, Eropa, Mediterania dan kembali lagi ke Amerika Latin. Krisis terjadi secara berulang-ulang, terus-menerus, jalar-menjalar. Krisis sudah terjadi sepanjang peradaban manusia itu sendiri. Krisis sudah menyerang kawasan Eropa pada periode 1636-1637 yang dikenal sebagai *Tulip Mania*. Pada waktu itu bunga tulip identik dengan identitas dan kelas sosial. Orang yang berhasil memiliki bunga tulip akan dianggap memiliki kelas sosial yang tinggi. Maka, orang berebut untuk memiliki tulip sebagai bagian dari usaha untuk mendudukkan diri pada struktur masyarakat.

Universitas Indonesia

Suatu ketika pasokan bunga tulip merosot dan tiba-tiba berubah menjadi barang yang sangat langka sehingga harganya membumbung tinggi.

Setelah *Tulip Mania*, ada beberapa krisis lainnya seperti *The Mississippi* dan *South Seas Bubble* pada tahun 1720. Krisis itu disebabkan oleh perilaku mania dari para pengelola perusahaan dalam mengakses hutang. Akibatnya perusahaan terbebani dengan sangat serius sebelum akhirnya dinyatakan tidak mampu membayar. Kemudian krisis hebat terjadi pada tahun 1929 yang menyerang bursa saham di Amerika Serikat dan dikenal dengan sebutan *Black Tuesday* karena keruntuhan bursa saham yang terjadi pada hari Selasa tersebut diyakini sangat signifikan sehingga berdampak pada kerugian luar biasa bagi para pelaku pasar. Hari itu menjadi "Selasa yang muram" bagi sebagian besar pelaku pasar di Amerika Serikat.

Sejarah terus berulang dan krisis terus terjadi hingga saat ini. Krisis memang tidak pernah berulang secara sama persis tetapi penggerak utamanya tetaplah sama dan krisis finansial global tahun 2008 yang berawal dari Amerika Serikat memiliki gejala yang mirip dengan kejadian di tahun 1929. Dua kejadian datang bersamaan mengawali gejala munculnya krisis, pertama, kepanikan di pasar finansial dan kedua, lonjakan harga minyak. Pada tahun 2008, dampak krisis kredit perumahan di Amerika Serikat telah merembet ke berbagai sektor sehingga meningkatkan kepanikan dari para pelaku ekonomi, terutama di pasar finansial. Kepanikan ini sekaligus menyumbang pada peningkatan ketidakpastian global. Selain itu, saat itu harga minyak terus menerus mencetak rekor tertinggi hingga menembus harga 110 dollar Amerika per barrel.

Bagi perekonomian Amerika Serikat, krisis *subprime mortgage* harus dibayar sangat mahal. Pertama, untuk merelaksasi pasar finansial yang mengalami kontraksi, bank sentral Amerika Serikat secara beruntun menurunkan tingkat suku bunganya. Penurunan suku bunga itu sendiri telah mendorong pelemahan nilai tukar rupiah di Indonesia terhadap beberapa mata uang kuat dunia seperti poundsterling, euro, dollar Kanada, yen dan lain-lain. Terhadap euro menyusul tren penurunan suku bunga The Fed, dollar Amerika mencapai titik terendahnya. Kedua, The Fed terpaksa mengucurkan dana segar untuk menyelamatkan aset-aset perusahaan yang sedang bermasalah seperti Bear Stearns. Langkah ini semacam

Universitas Indonesia

mendanai lembaga penjaminan melalui kebijakan *bailout guarantee* yang disalurkan kepada perusahaan swasta. Selain Bear Stearns, krisis kredit perumahan juga menyeret beberapa perusahaan besar lainnya seperti Merrill Lynch, Morgan Stanley dan Citigroup dalam kerugian yang amat besar.

Krisis *subprime mortgage* kemudian menjalar ke pasar kredit yang kemudian mempengaruhi terjadinya krisis likuiditas di pasar finansial antar bank. Korbannya tidak terbatas hanya perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat saja tetapi juga sampai di Eropa dan Jepang, termasuk bursa saham di beberapa negara di dunia mengalami penurunan indeks cukup tajam. Hal ini dikarenakan banyak perusahaan menjadikan *subprime mortgage* sebagai jaminan atau aset utama (*underlying asset*) untuk surat-surat hutang.

Selain krisis sebagaimana diuraikan diatas, situasi dan kondisi ekonomi dunia juga diwarnai oleh kecenderungan setiap negara untuk menciptakan jaringan-jaring yang mentransformasikan dan mengintegrasikan negara ke dalam hubungan-hubungan eksternal melalui forum-forum kerjasama ekonomi. Disini fungsi negara berubah dari formulasi kebijakan nasional ke administrasi kebijakan yang harus diterapkan sebagai konsekuensi kesatuan pemahaman dan kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan melalui institusi supranasional (Winarno, 2009).

Negara-negara menjadi komponen yang terintegrasikan didalamnya. Integrasi negara ini merupakan upaya negara untuk menanggapi intensitas ekonomi politik yang semakin masif di dunia. Tidak hanya di negara-negara maju seperti di Eropa dengan the EU dan Amerika Utara dengan NAFTA (North America Free Trade Area), wilayah lain seperti negara-negara di Asia Tenggara dan Cina sepakat membentuk CAFTA (China ASEAN Free Trade Area) atau negara-negara di Amerika Tengah dan Amerika Latin yang membentuk CACM (Central American Common Market), LAFTA (Latin American Free Trade Area) atau CARICOM (Caribbean Community and Common Market). Dalam skala wilayah yang lebih besar terbentuk kerjasama ekonomi antarbangsa APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) yang anggotanya meliputi negara-negara di wilayah timur Asia, Australia dan Amerika. Kesepakatan-kesepakatan tersebut diatas menjadi salah satu faktor pendorong berkembangnya MNCs.

Universitas Indonesia

Terbentuknya organisasi-organisasi kerjasama perdagangan tersebut semakin mengukuhkan langkah *Washington Concensus* untuk meliberalisasi hambatan-hambatan perdagangan dan menggiatkan FDI. Tercermin kuatnya paradigma pasar dalam mendesak agendanya dalam mengelola ekonomi dunia. Kerjasama tersebut ibarat aktor yang menciptakan aturan main global dan proses produksi global untuk diterapkan di tingkat domestik negara-negara anggota. Liberalisasi perdagangan dan globalisasi ekonomi melalui penurunan hambatan tarif perdagangan dan berbagai macam kebijakan yang mengarah kepada liberalisasi pada akhirnya telah menjadi ciri khas perekonomian abad ini.

2.3 Kelemahan Standar Akuntansi Di Dunia Selama Ini

Laporan keuangan merupakan bahasa bisnis bagi kalangan bisnis dan profesi akuntansi untuk menggambarkan fungsi suatu laporan keuangan dalam bisnis. Sebab melalui laporan keuangan yang berkualitas baik, pesan yang disampaikan oleh penyusun laporan keuangan mengenai kondisi usaha entitas dapat dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Laporan keuangan sebagai bahasa, diharapkan akan lebih efektif apabila bahasa yang digunakan menggunakan kaidah pengaturan bahasa yang sama diantara entitas satu dan entitas lainnya dan dalam lingkup yang lebih luas, antara negara yang satu dengan negara yang lain. Kaidah ini dalam profesi akuntansi sering disebut sebagai prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Selama ini penyusunan laporan keuangan oleh manajemen didasarkan pada standar akuntansi yang berlaku di suatu negara. Setiap negara mempunyai standar akuntansi sendiri, tidak sama dengan di negara lain atau ada kesamaan bila masuk dalam kelompok dominasi akuntansi dominasi tertentu. Dari perspektif internasional, laporan keuangan yang dihasilkan oleh berbagai negara dengan standar akuntansi yang berbeda-beda tersebut penuh dengan keberbedaan. Perbedaan misalnya terdapat dalam bahasa, istilah-istilah, klasifikasi dan pengukuran-pengukuran yang digunakan.

Kondisi sebagaimana tersebut diatas menyebabkan laporan keuangan masing-masing negara tidak dapat digunakan sebagai informasi yang dapat diperbandingkan satu sama lain. Misalnya kata *asset* di bahasa Perancis

dikonotasikan sebagai *active*. Istilah *reserve* dan *provisions* seperti juga *depreciation* dan *amortization* dapat diartikan lain di negara yang berbeda. Kata *turnover* diartikan berbeda di Inggris Raya dan Amerika Serikat. Kosakata istilah akuntansi sarat dengan perbedaan arti dan konotasi dari satu bahasa ke bahasa lain. Klasifikasi penambahan hutang jangka panjang di Amerika Serikat dengan dollar termasuk sumber dana dalam laporan arus kas sedangkan di Norwegia dengan mata uang krona tidak demikian. Sebab itu akuntansi hanya berfungsi sebagai penyedia informasi di negara masing-masing, sedangkan di negara lain tidak. Keadaan demikian disebut sebagai *accounting snag* (Zebua, 2008).

Menurut Choi (2005) pengembangan dan keragaman akuntansi yang berbeda di masing-masing negara tersebut dipengaruhi oleh 8 (delapan) faktor yaitu sumber finansial, sistem hukum, perpajakan, hubungan ekonomi dan politik, inflasi, tingkat pembangunan ekonomi, tingkat pendidikan dan budaya. Sumber finansial dicirikan dengan negara yang entitasnya lebih banyak memperoleh sumber finansial dari pasar modal atau tidak. Sistem hukum dibedakan dari dasar orientasi hukumnya yaitu *code law* atau *common law*. Di negara *common law*, pengaturan akuntansi tidak dianggap sebagai hukum tetapi sebagai standar atau rekomendasi. Perpajakan ditentukan dari tingkat kemandirian standar akuntansi suatu negara terhadap peraturan perpajakan, *dependent*, *independent* atau *quasi-dependent*. Hubungan ekonomi dan politik dicirikan dari keterbukaan atau tertutupan sistem yang dianut negara baik ekonomi atau politik. Inflasi, pembangunan ekonomi dan pendidikan ditandai dengan tinggi rendahnya tingkat inflasi, pembangunan ekonomi dan pendidikan suatu negara. Sedangkan budaya dilihat dari nilai dan sikap yang diterapkan oleh suatu bangsa.

Sebelum Perang Dunia II pengaruh akuntansi Inggris Raya mendominasi akuntansi negara-negara yang berbahasa Inggris. Pengaruh Perancis-Jerman menembus negara-negara *code law* seperti Belgia, Jepang, Swedia dan Swiss. Dewasa ini Amerika Serikat merupakan kekuatan yang gemilang dalam akuntansi global karena hasil riset publikasi akuntansi dan lulusan perguruan tinggi yang mempunyai konsentrasi akuntansi lebih baik dari negara lain. Banyak perusahaan, terutama di Jepang disamping membuat laporan keuangannya berdasarkan IASs, juga membuatnya berdasarkan US GAAP. Namun karena negara-negara lain tidak

Universitas Indonesia

ingin mengadopsi IASs maupun US GAAP, maka keragaman praktik-praktik akuntansi berlanjut ke seluruh dunia sampai sebelum keputusan harmonisasi IFRSs diwujudkan.

Perbedaan standar tersebut berpengaruh pada pengukuran aset dan kewajiban. Konsep aset tidak sama di semua negara. Yang mana yang dimasukkan aset dan yang mana yang tidak. Di Amerika Selatan, aset termasuk kerugian-kerugian yang timbul karena mempunyai hutang dalam satuan valuta asing. Di beberapa negara Eropa dan juga di Amerika Selatan tidak ada penyisihan bagi semua kewajiban dan kerugian yang telah diketahui. Perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat memberikan biaya kesehatan kepada para bekas karyawannya yang tidak tertutupi oleh *medicare* secara sukarela dan tidak dibukukan sebagai kewajiban.

Demikian juga halnya dengan penentuan modal dan laba periodik. Di semua negara yang berbahasa non Inggris, penyesuaian modal dibukukan langsung sebagai keuntungan atau kerugian luar biasa. Di Amerika Serikat semua transaksi, kecuali investasi pemegang saham, donasi modal, penambahan modal dan penyesuaian fungsional atas valuta asing, mengalir melalui laporan laba rugi. Hasil operasi diukur dengan *cut off* tahunan yang jelas. Di Swedia, lamanya daur bisnis dianggap sebagai periode yang terbaik untuk mengukur dan melaporkan hasil kegiatan bisnis.

Di Amerika Serikat, pencatatan akuntansi menggunakan metode akrual. Metode LIFO (*last in-first out*), FIFO (*first in-first out*) dan *average* diterapkan secara luas dalam menilai persediaan. Ada dua metode yang digunakan dalam penggabungan usaha, yaitu metode *pooling of interest* dan metode pembelian. *Goodwill* dalam pembelian perusahaan diperlakukan sebagai aset dan diamortisasi dalam masa paling lama 40 tahun. *Treasury stock* karena perolehan kembali saham sendiri diperbolehkan. Saham ini dapat diperjualbelikan atau dibatalkan (*constructively retired*). Keuntungan atau kerugian yang timbul karena transaksi penyelesaian hutang (*defeasance of debt*) dibukukan sebagai pos luar biasa (*extraordinary items*). Perubahan kebijakan akuntansi (*accounting changes*) diberlakukan mundur (*retroactive*) dan pengaruh perubahan dari awal periode perubahan dimasukkan ke dalam penghasilan komprehensif pada laporan

Universitas Indonesia

perubahan keuangan perubahan akuntansi, posisinya dibawah bagian pos luar biasa.

Sedangkan di Australia, *pooling of interest* justru dilarang, tidak boleh digunakan untuk penggabungan usaha di Australia. Demikian juga halnya dengan metode LIFO dilarang digunakan dalam pengukuran nilai persediaan. Membeli saham sendiri tidak diperbolehkan sehingga dalam akuntansi perusahaan tidak dikenal yang namanya *treasury stock*. Menilai kembali aset non-lancar diperbolehkan dan tambahan nilainya dibukukan langsung ke *revaluation reserve*. *Goodwill* diamortisasi berdasarkan masa manfaat tetapi tidak boleh lebih dari 20 tahun. Keuntungan atau kerugian yang timbul karena transaksi penyelesaian hutang dibukukan sebagai pos biasa (*ordinary*). Perubahan kebijakan akuntansi tidak diberlakukan mundur atau tidak diperlakukan sebagai penyesuaian laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Penyesuaian dilakukan pada saldo laba periode akuntansi paling baru yang dilaporkan.

Laporan keuangan di Belanda menerapkan basis *historical cost* dan *current value*. Ada anggapan bahwa asumsi kontinuitas perusahaan (*going concern*) paling baik dilaksanakan jika didukung dengan penggunaan konsep *current value*. Persediaan dinilai berdasarkan nilai yang terendah, nilai pasar atau nilai perolehan (*the lower of cost* atau *market value*). LIFO diperbolehkan dan amortisasi *goodwill* dilakukan paling lama dalam masa 10 tahun, walaupun dalam praktiknya banyak perusahaan besar yang mengamortisasi *goodwill* dalam masa 5 tahun. *Financial lease* dikapitalisasi di Belanda.

Di Inggris Raya semua aset dinilai berdasarkan *historical cost* dan *current cost* ataupun campuran keduanya. Revaluasi nilai tanah dan bangunan berdasarkan harga pasar diperbolehkan. Beban penyusutan dan amortisasi dihitung berdasarkan dasar pengukuran yang digunakan untuk aset utama. Metode *the lower of cost or net realizable value* digunakan secara luas. LIFO dalam penilaian persediaan tidak diperbolehkan. Metode *pooling of interest* jarang digunakan dan *goodwill* dihapuskan pada saat terjadi. Biaya penelitian dan pengembangan dihapuskan pada tahun terjadinya dan biaya pengembangan boleh ditunda dalam keadaan tertentu. *Financial lease* juga dikapitalisasi di Inggris Raya.

Pengukuran akuntansi dan pelaporan keuangan di Jepang berbeda secara substansial dengan di negara manapun. *Earning per share* perusahaan Jepang jika dihitung berdasarkan US GAAP lebih rendah 58 persen. Akuntansi berbasis biaya historis, beban depresiasi didasarkan pada basis pajak dan *goodwill* diamortisasi dalam masa 5 tahun. Secara umum perusahaan Jepang nampak kurang likuid, kurang *solvent*, kurang efisien dan kurang *profitable* dibanding dengan mitra dagangnya di Amerika Serikat. Rasio hutang (*debt ratio*) rata-rata perusahaan Jepang 2,032 dibanding dengan hanya 0,541 untuk rata-rata perusahaan Amerika Serikat adalah hal yang wajar (Choi, 2008). Dari perspektif Jepang, rasio hutang yang tinggi jarang dianggap sebagai suatu tanda bahaya. Laporan keuangan di Jepang tidak merefleksikan pengakuan apapun atas perubahan daya beli unit mata uang.

Akuntansi Jerman menggunakan prinsip *historical cost*. Sistem akuntansi berkaitan langsung dengan aturan-aturan perpajakan. *Goodwill* diamortisasi dalam masa tidak lebih dari 15 tahun. Persediaan dinilai pada *lower of cost* atau *net realizable value*. FIFO dan LIFO juga diperbolehkan. *Financial leases* tidak dikapitalisasi. Pelaporan keuangan mempunyai nilai informasi yang terbatas karena aturan-aturan akuntansi pajak mendominasi sebagian besar akuntansi keuangan.

Dalam akuntansi Perancis juga digunakan prinsip *historical cost* tetapi revaluasi atas nilai berjalan (*current value*) dimungkinkan untuk properti, pabrik, peralatan dan investasi jangka panjang. Keuntungan dan kerugian revaluasi menjadi subyek PPh. Persediaan harus dinilai berdasarkan *the lower of cost or net realizable value*. FIFO atau *moving average* digunakan dalam menilai persediaan. Metode *pooling of interest* tidak dikenal dalam akuntansi Perancis. Demikian juga LIFO dan kapitalisasi sewa guna usaha tidak dikenal dalam akuntansi Perancis. Beban bunga proyek konstruksi besar boleh dikapitalisasi tetapi untuk tujuan pajak harus langsung dianggap biaya. Pelaporan keuangan di Perancis sejak tahun 1977 mengharuskan perusahaan yang mempunyai 300 atau lebih karyawan untuk mempublikasikan neraca sosial. Dalam neraca ini harus dijelaskan mengenai persoalan-persoalan tenaga kerja, pelatihan, hubungan industri, kesehatan dan

kondisi keselamatan, tingkat upah, kondisi lingkungan kerja yang relevan dan manfaat-manfaat lainnya.

Di era liberalisasi finansial, keragaman standar akuntansi ini menimbulkan hambatan bagi perusahaan-perusahaan di dunia untuk *listing* di bursa efek negara lain. Perusahaan harus menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi versi negara tempat mereka akan melakukan *listing*. Hal ini terjadi pada PT Telkom saat melakukan *listing* di New York Stock Exchange dimana mereka harus menyesuaikan terlebih dahulu laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan PSAK ke dalam US GAAP. Hal ini dimaksudkan agar kepentingan investor dan kepercayaan masyarakat Amerika Serikat meningkat terhadap laporan keuangan yang diterbitkan meskipun dampaknya akan menambah waktu dan biaya untuk penyesuaian tersebut. Perusahaan dari negara yang standar akuntansi keuangannya berbasis pajak seperti Jerman biasanya akan mengalami perubahan (penurunan) kinerja perusahaan setelah laporan keuangan mereka disajikan berdasarkan standar akuntansi negara lain terutama Amerika Serikat dan Inggris Raya sebagai pusat finansial global. Pada tahun 1993, Daimler-Benz perusahaan Jerman bahkan harus mengeluarkan biaya 69 juta dollar Amerika untuk menyiapkan laporan keuangan berbasis US GAAP dalam rangka proses *listing*. 15 – 20 juta dollar Amerika rutin dikeluarkan untuk rekonsiliasi US GAAP setiap tahunnya. Tetapi sebagai bentuk komitmen pada rencana konvergensi IFRSs, SEC (Securities Exchange Commission) sebagai otoritas pengawas pasar modal di Amerika Serikat telah memberikan opsi kepada *foreign issuers* atau emiten asing untuk menyusun laporan keuangannya menggunakan IFRSs pada tahun 2009 dan tidak wajib melakukan rekonsiliasi dengan US GAAP.

2.4 Sejarah Standar Akuntansi Global

Pada awalnya gagasan akuntansi menyebar dari satu negara ke negara lain melalui penaklukan dan perdagangan. Akuntansi kuno pertama kali ditemukan di Timur Tengah dan kemudian berkembang di jaman kekaisaran Romawi lewat penakiukannya. Tata buku berpasangan yang ditemukan Luca Paciolo di Italia pada akhir abad ke-15 secara bertahap menyebar ke seluruh Eropa melalui proses

renaissance dan kemudian ke seluruh dunia. Dua organisasi akuntan bahkan telah berdiri sejak abad ke-19 di Inggris Raya dan Amerika Serikat, yaitu the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) pada tahun 1880 di London, Inggris Raya dan the American Association of Public Accountants (AAPA) di Amerika Serikat pada tahun 1887. Dua lembaga ini nantinya menjadi motor terbentuknya IASC pada tahun 1973. Kolonialisme kerajaan Inggris Raya berhasil mengeksport akuntan dan konsep akuntansinya ke seluruh wilayah pendudukannya. Sebelum Perang Dunia II pengaruh akuntansi Inggris Raya telah mendominasi praktik akuntansi di negara-negara yang berbahasa Inggris dan wilayah koloninya. Sedangkan pengaruh Perancis dan Jerman menembus negara-negara *code law* seperti Belgia, Jepang, Swedia dan Swiss. Pendudukan Jerman dalam Perang Dunia II mempengaruhi Perancis untuk mengadopsi sistem akuntansinya dalam *plan comptable general* atau kode akuntansi nasional pada bulan September 1947.

Munculnya Amerika Serikat sebagai negara adidaya baru menggantikan Inggris Raya, dalam hal politik, militer ataupun perekonomian, membuat praktik akuntansi di negara tersebut kemudian sangat mempengaruhi praktik akuntansi di berbagai negara. Amerika Serikat menjadi pelopor penyusunan standar akuntansi setelah the Securities Exchange Act of 1934 memberikan mandat kepada badan baru yang dibentuk sebagai respon atas peristiwa *Great Depression*, SEC, untuk membentuk badan penyusun standar akuntansi dan mengembangkan prinsip akuntansi. SEC menantang AAPA yang telah berubah nama menjadi AIA (the American Institute of Accountants) untuk menyediakan dukungan substansial bagi prinsip akuntansi yang dapat diterima. Sebagai respon atas hal tersebut AIA membentuk the Committee on Accounting Procedure (CAP) yang menerbitkan 51 Accounting Research Bulletins (ARBs) dalam rentang waktu tahun 1936 – 1959.

Pada tahun 1953, CAP sukses menghasilkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang disebut dengan GAAPs yang kemudian secara cepat diadopsi banyak negara Eropa Barat dengan beberapa modifikasi termasuk Inggris Raya, Jerman atau Perancis. GAAPs akhirnya berpengaruh besar dalam pengembangan praktik akuntansi di banyak negara termasuk Indonesia. Tahun 1959, APB akhirnya digantikan oleh the Accounting Principles Board

Universitas Indonesia

(APB) yang memproduksi 31 Accounting Principles Board Opinions (APBOs) dalam jangka waktu tahun 1959 – 1973. Standarisasi praktik akuntansi yang digerakkan lembaga profesi akuntan saat itu menjadi fenomena yang berkembang pesat di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat pasca berakhirnya Perang Dunia II.

Keinginan untuk mengembalikan perekonomian dunia yang hancur pasca Perang Dunia II membawa delegasi dari 44 negara ke Bretton Woods di negara bagian New Hampshire, Amerika Serikat untuk mendirikan sebuah kerangka perekonomian global pasca perang pada bulan Juli 1944. Kerangka tersebut adalah untuk menciptakan sistem moneter internasional yang stabil dan kooperatif yang akan mendorong terwujudnya kedaulatan nasional dan mencegah terjadinya krisis keuangan di masa mendatang. Pertemuan dalam rangka the United Nations Monetary and Financial Conference tersebut akhirnya memilih sebuah sistem yang didasarkan pada pergerakan bebas barang dengan dollar Amerika sebagai mata uang internasional karena nilainya sebanding dengan emas. Selanjutnya 3 (tiga) lembaga pengelola dibentuk dengan tujuan mengawasi dan mengkoordinasikan perekonomian global, yaitu: IMF, IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) yang kemudian berubah menjadi World Bank dan GATT yang kemudian berubah menjadi WTO. Era baru dimulai dimana orientasi untuk mengglobal, bidang keuangan dan perdagangan, menjadi lebih jelas dibanding sebelumnya. Perkembangan ini melahirkan banyak MNCs yang kemudian menjadi klien bagi beberapa kantor akuntan besar dari Amerika Serikat dan Inggris Raya. Wilayah operasi MNCs yang menjangkau banyak negara di dunia mulai menciptakan obsesi keseragaman bahasa akuntansi di dunia.

Tahun 1957, Jerman, Perancis, Italia, Belanda, Belgia dan Luksemburg menandatangani the Treaty of Rome yang melahirkan the European Economic Community (tahun 1967 melalui the Merger Treaty berubah menjadi the European Community), cikal bakal dari the EU atau Uni Eropa. Organisasi ini bekerja sama dengan Groupe d'Etudes, sebuah organisasi akuntan profesional di Eropa, untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam praktik akuntansi di Eropa. Pada bulan Februari 1967, pembicaraan ketua lembaga-lembaga profesional akuntan yang berasal dari Amerika Serikat, Inggris dan Kanada untuk

Universitas Indonesia

mendiskusikan kolaborasi harmonisasi standar akuntansi dan auditing melahirkan the Accounting International Study Group (AISG) yang bersamaan waktunya dengan diselenggarakannya World Congress of Accountants (WCA) di Paris, Perancis. Kongres itu sendiri merupakan pertemuan para akuntan profesional sedunia yang sudah diadakan sejak tahun 1904 dan rutin dilakukan setiap 4-5 tahun sejak tahun 1952. Tahun 2010 kongres diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia. AISG sendiri beranggotakan perwakilan dari lembaga-lembaga profesional akuntan yang berasal dari Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Wales, Skotlandia dan Irlandia. Tahun 1967 juga menjadi tahun terbentuknya cikal bakal organisasi dunia untuk profesi akuntan yaitu the International Working Party yang kemudian menjadi International Coordination Committee of The Accountancy Profession (ICCAP) pada tahun 1972 dan berubah menjadi IFAC pada tahun 1977.

Pada WCA tahun 1972 di Sidney, Australia, para perwakilan AISG memutuskan untuk keluar dari kongres tersebut dan dengan melobi *standar setters* dari negara maju lain mereka membahas proposal pembentukan sebuah lembaga yang mampu menjalankan program harmonisasi standar akuntansi untuk menyelaraskan pencatatan dan pelaporan akuntansi. Akhirnya organisasi-organisasi profesional akuntan sebagaimana tersebut dibawah bersepakat untuk membentuk IASC pada tanggal 29 Juni 1973 di London, Inggris Raya, yaitu:

- a. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) dari Amerika Serikat.
- b. Canadian Institute of Chartered Accountants dari Kanada.
- c. Institute of Chartered Accountants in England and Wales, Institute of Chartered Accountants of Scotland, Association of Certified Accountants, Institute of Cost and Management Accountants dan the Institute of Municipal Treasurers and Accountants dari Inggris Raya.
- d. Institute of Chartered Accountants in Ireland dari Irlandia.
- e. Nederlands Instituut van Registeraccountants dari Belanda.
- f. Ordre des Experts Comptable et des Comptables Agrees dari Perancis.
- g. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland dan the Wirtschaftsprüferkammer dari Jerman.

Universitas Indonesia

- h. Institute of Chartered Accountants in Australia dan Australian Society of Certified Practising Accountants dari Australia.
- i. Nihon Kouninkaikeshi Kyoukai dari Jepang.
- j. Instituto Mexicano de Contadores Publicos dari Meksiko.

Pada tahun yang sama dengan pembentukan IASC, peran AICPA melalui APB dalam penyusunan GAAPs di Amerika Serikat berakhir setelah tanggung jawab tersebut dialihkan ke badan baru bernama the United States Financial Accounting Standards Board (FASB) yang menghasilkan SFASs (Statements of Financial Accounting Standards). Pada tahun tersebut juga, Inggris Raya, Irlandia dan Denmark bergabung dengan Jerman, Perancis, Belanda, Italia, Belgia dan Luksemburg dalam the European Community.

Dalam jangka waktu satu dekade setelah pendiriannya pada tahun 1973, lembaga-lembaga profesional akuntansi dari beberapa negara memutuskan untuk ikut bergabung dengan IASC, terutama dari negara-negara bekas koloni Inggris Raya, diantaranya yaitu: The National Council of Chartered Accountants (Afrika Selatan), The Institute of Chartered Accountants of Nigeria (Nigeria), The New Zealand Society of Accountants (Selandia Baru), The National Federation of Certified Public Accountants Associations of the Republic of China (Cina), The Institute of Chartered Accountants of India (India), The Institute of Chartered Accountants of Pakistan dan the Pakistan Institute of Industrial Accountants (Pakistan), The Malaysian Association of Certified Public Accountants (Malaysia), The Singapore Society of Accountants (Singapura), The Hong Kong Society of Accountants (Hong Kong), The Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (Italia). Data pada awal tahun 2001 sebelum IASC melakukan restrukturisasi organisasi menunjukkan bahwa 153 lembaga profesional akuntan dari 112 negara telah menjadi anggota IASC pada saat itu. Pada periode awal pendiriannya, IASC terus berusaha menjajaki kesamaan standar nasional melalui penciptaan dan mempromosikan standar-standar akuntansi internasional termasuk pembentukan Consultative Group pada tahun 1981 yang terdiri lembaga-lembaga internasional seperti IOSCO, IMF, Bank Dunia, Uni Eropa dan IFAC. Anggota IFAC sendiri akhirnya secara otomatis menjadi anggota IASC dan sejak tahun

1983 kedua lembaga semakin intensif bekerjasama dalam penyusunan standar internasional untuk akuntansi keuangan.

Sementara IAI sebagai organisasi profesi akuntan di Indonesia yang didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 baru mulai aktif dalam keanggotaan IFAC sejak tahun 1987. Kemudian pada tahun 1994, IAI mengadopsi IASs yang dikeluarkan IASC dan dituangkan dalam PSAK yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995. Langkah ini merupakan hasil penandatanganan *statement of membership* oleh IAI yang menetapkan kewajiban Indonesia sebagai anggota IFAC untuk mendukung aktivitas IASC.

Resesi ekonomi dunia yang berlangsung besar-besaran pada periode tahun 1970-an telah mendorong negara-negara di dunia untuk mengedepankan kepentingan nasionalnya masing-masing dan lebih cenderung mengembangkan kebijakan *merkantilis* yang berusaha mencari kekayaan dari surplus perdagangan luar negeri. Sedangkan usaha-usaha untuk menyusun kembali pengaturan ekonomi internasional tidak pernah berhasil pasca runtuhnya the Bretton Woods System pada bulan Agustus 1971. Tetapi keruntuhan the Bretton Woods System justru mewujudkan akselerasi globalisasi ekonomi yang pesat yang dimotori negara-negara *anglo-saxon* yang memiliki model ekonomi politik *market-oriented capitalism*. Perkembangan ini menimbulkan integrasi ekonomi sebagai akibat perdagangan internasional dan arus modal yang terus menerus mengalami perkembangan yang kemudian menjadi motivator utama bagi harmonisasi standar-standar akuntansi nasional.

Usaha IASC untuk mempromosikan harmonisasi standar akuntansi di periode awal berdirinya didukung oleh The European Community dengan mengeluarkan 4th Directives pada tahun 1978 dan 7th Directives pada tahun 1983 yang merupakan pedoman harmonisasi dan mewajibkan negara-negara anggotanya menggabungkannya standar akuntansinya ke dalam hukum nasional masing-masing. Usaha melakukan harmonisasi standar akuntansi mengalami kesulitan karena dalam perkembangannya negara-negara di dunia memiliki keanekaragaman praktik akuntansi dan penyajian laporan keuangan berdasarkan sistem hukum, politik perpajakan, budaya korporasi, atau kondisi sosial ekonomi yang mereka miliki. Selain itu, keinginan dari masing-masing negara anggota

Universitas Indonesia

IASC untuk meletakkan kepentingan ekonomi nasional mereka sendiri sebagai prioritas tinggi menghalangi keinginan IASC untuk mewajibkan negara anggotanya memiliki kesamaan pengaturan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi usaha entitas. Posisi IASs sendiri sebagai produk IASC hanya merupakan alternatif standar yang dapat dipilih oleh anggotanya. Negara anggota IASC boleh menerapkan IASs atau menerapkan standar akuntansi lokalnya untuk mencatat dan melaporkan suatu transaksi walaupun secara teknis ada perbedaan jika dibandingkan dengan IASs. Keinginan untuk mencari sumber dana di pasar modal global bahkan membuat beberapa MNCs dari Jerman dan Jepang menggunakan standar akuntansi yang dikeluarkan *standard setter* dari Amerika Serikat (FASB).

Menurut Gray (1988) nilai-nilai sosial yang dianut suatu negara akan menentukan *accounting value* (*professionalism* atau *statutory control*, *uniformity* atau *flexibility*, *conservatism* atau *optimism*, *secrecy* atau *transparency*) yang dipegang teguh dalam praktik akuntansi dan berkonsekuensi institusional (sistem hukum, kepemilikan korporasi, pasar modal, asosiasi profesional, pendidikan, agama) sehingga membuat perbedaan dalam karakteristik dan otoritas untuk sistem akuntansi termasuk dalam hal pengukuran dan pengungkapan. Prinsip profesionalisme dan keseragaman akuntansi dapat digunakan ke otoritas dan pelaksanaan dari karakteristik sistem akuntansi. Prinsip konservatisme atau kehati-hatian dapat diterapkan dalam pengukuran aset dan laba. Sedangkan prinsip kerahasiaan dan transparansi digunakan dengan mengacu kepada sifat dan luasnya informasi yang akan disampaikan. Nilai-nilai sosial sendiri terbentuk dari interaksi pengaruh ekologi (*geographic*, *economic*, *demographic*, *genetic/hygienic*, *historical*, *technological*, *urbanization*) dan pengaruh eksternal (*forces of nature*, *trade*, *investment*, *conquest*).

Berikut ini adalah pengklasifikasian praktik-praktik akuntansi di dunia yang dilakukan oleh para peneliti akuntansi di dunia atau berdasarkan sistem hukum dan pajak yang berlaku:

- a. Berdasarkan hasil riset Radebaugh dan Gray (Purba, 2010), sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara-negara di dunia di bagi dalam 5 (lima) kelompok, yaitu sistem akuntansi: (1) *Anglo Saxon*, (2) *Germanic*, (3) *Nordic*,

Universitas Indonesia

(4) *Latin* dan (5) *Asian*. Pengklasifikasian tersebut didasarkan pada nilai-nilai budaya korporasi, sistem hukum dan politik serta sistem perpajakan.

- *Anglo Saxon Accounting* diterapkan di Amerika Serikat, Inggris Raya dan negara-negara yang mempunyai hubungan kuat dengan Amerika Serikat dan Inggris Raya. Sistem akuntansinya cenderung kurang konservatif, lebih moderat dan lebih transparan dibandingkan dengan *Germanic*, *Latin* dan *Asia*. Di Amerika Serikat, akuntansi memfokuskan terhadap perusahaan besar dan kepentingan para investor. Pasar finansial mempunyai pengaruh yang dominan terhadap regulasi akuntansi di negara ini. Sedangkan di Inggris Raya, praktik akuntansi lebih mengutamakan pemberian informasi kepada para investor. Pasar finansial di negara ini juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik akuntansi tetapi tidak mendominasi proses peraturan akuntansi. Dan di Australia, pengaruh Inggris Raya dapat dilihat pada struktur akuntansi negara tersebut. Praktik akuntansi di Australia lebih terfokus pada kebutuhan informasi untuk investor daripada kebutuhan pajak untuk negara.
- *Germanic Accounting* digunakan di Jerman, Austria, Swiss dan Israel dan memberikan pengaruh di Perancis, Jepang dan negara-negara bekas koloni Perancis di Afrika. Dalam beberapa hal kelompok negara-negara *Germanic* secara signifikan berbeda dengan kelompok negara-negara *Anglo Saxon* dan *Nordic* karena *Germanic Accounting* cenderung relatif konservatif dan lebih rahasia. Pengaruh hukum perusahaan dan pajak sangat tinggi di negara-negara *Germanic*. Di Jerman, tradisi akuntansi memberikan preferensi kepada informasi yang dibutuhkan oleh kreditor dan petugas pajak. Hukum perusahaan memberikan pengaruh utama pada praktik akuntansi. Sistem hukum di negara tersebut sangat tersusun rapi karena didasari oleh sistem hukum Romawi. Profesi akuntan sendiri relatif kecil di Jerman. Hal yang sama juga terjadi di Swiss dimana praktik akuntansinya didominasi oleh hukum perusahaan dan regulasi pajak yang mengatur profesi akuntan. Sistem akuntansi yang digunakan di negara Swiss adalah yang terkonservatif dan paling rahasia di seluruh dunia.

- *Nordic Accounting* diterapkan di Belanda, Denmark, Swedia, Finlandia dan Norwegia. *Nordic Accounting* memiliki kesamaan dengan *Anglo Saxon Accounting* meskipun ada pengaruh penting dari *Germanic Accounting* dalam hal pajak. Hampir mirip *Anglo Saxon Accounting*, *Nordic Accounting* cenderung kurang konservatif dan lebih transparan dibandingkan negara-negara *Germanic*, *Latin* dan *Asia*. Praktik akuntansi di Belanda sama dalam segala hal seperti negara-negara *Anglo Saxon*. Hukum perusahaan dan profesi akuntan memiliki pengaruh yang besar meskipun jumlah perusahaan yang terdaftar di bursa saham relatif sedikit. Di Swedia, tradisi akuntansi memberikan preferensi atas informasi yang dibutuhkan oleh kreditor, pemerintah dan otoritas pajak. Bursa saham negara ini telah berkembang menjadi penting dan merupakan titik potensial yang penting untuk negara-negara *Nordic*.
- *Latin Accounting* digunakan di Perancis, Belgia, Italia, Spanyol, Portugal, Meksiko, Argentina, Brasil, Chili, Kolombia, Peru dan Uruguay. Kelompok ini sama seperti kelompok *Germanic* dalam hal hukum perusahaan dan pajak. Dibanding kelompok negara-negara *Anglo Saxon Accounting*, *Latin Accounting* cenderung relatif lebih konservatif dan rahasia. Di Perancis, hukum perusahaan dan pajak juga memiliki pengaruh kuat pada akuntansi. Dibanding negara-negara *Anglo Saxon*, profesi akuntan dan pasar saham di Perancis relatif kecil. Kepentingan pemerintah dan petugas pajak juga lebih diutamakan daripada kepentingan pemegang saham di Italia. Pengaruh *the Civil Code* (hukum perusahaan) dan regulasi pajak pada akuntansi di Italia juga memiliki kesamaan dengan Perancis, Spanyol dan Belgia sehingga dalam praktiknya, akuntansi di negara tersebut dapat dibandingkan dengan negara-negara tetangganya.
- *Asian Accounting* banyak digunakan di negara-negara Asia dimana sistem akuntansinya berbeda dengan kelompok negara-negara lainnya. *Asian Accounting* cenderung relatif lebih konservatif dan rahasia jika dibandingkan dengan *Anglo Saxon Accounting*. Tradisi akuntansi di Jepang memberikan preferensi kepada informasi yang dibutuhkan oleh kreditor dan petugas pajak. Pemerintah memiliki pengaruh besar terhadap

sistem akuntansi di Jepang dalam segala aspek dan profesi akuntannya sendiri relatif kecil dan kurang memberikan pengaruh dalam proses penyusunan standar akuntansi. Dalam rangka pencarian sumber dana, banyak perusahaan Jepang mempersiapkan laporan keuangan tambahan dalam bahasa Inggris yang ditujukan untuk *information user* di luar negeri.

- b. Di dunia ada dua landasan yang menjadi dasar orientasi sistem hukum, yaitu: *code (civil) law* dan *common (case) law*. *Code law* berasal terutama dari *Roman Law* dan *Code Napoleon*. *Code law* disebut juga legalistik (undang-undang dan hukum perdata) dan *common law* disebut non legalistik (hukum kebiasaan). Di negara-negara yang berorientasi pada hukum undang-undang, peraturan-peraturan akuntansi menyatu pada hukum nasional yang cenderung preskriptif dan prosedural. Di negara-negara yang berorientasi pada hukum kebiasaan, peraturan akuntansi dibuat oleh organisasi profesional sektor swasta sehingga mereka lebih adaptif dan inovatif. *Common law* banyak dianut oleh kelompok negara-negara Anglo-Saxon dan bekas koloni Inggris Raya di Asia dan Afrika sedangkan *code law* banyak dianut kelompok negara-negara *Germanic*, *Latin* dan *Nordic*.
- c. Berdasarkan kuat dan lemahnya hubungan antara standar akuntansi dengan undang-undang perpajakan di suatu negara, maka bisa dibedakan menjadi (*quasi dependent system* dan *independent system*. Dalam *dependent system*, pembukuan diselenggarakan berdasarkan ketentuan perpajakan dan/atau penyajian laporan keuangan yang disajikan dipengaruhi oleh ketentuan perpajakan yang berlaku. Sedangkan dalam *independent system*, penyajian laporan keuangan lepas dari pengaruh ketentuan perpajakan termasuk bebas untuk menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip dan metode akuntansi. Negara-negara (*quasi dependent system* diantaranya yaitu Inggris Raya, Spanyol, Luksemburg, Swedia, Jerman, Italia, Portugal, Swiss, Belgia, Finlandia, Perancis, Australia dan negara-negara *independent system* diantaranya yaitu Belanda, Polandia, Ceko, Denmark, Norwegia dan Irlandia.
- d. Penelitian yang dilakukan Mueller (1968) mengklasifikasikan praktik-praktik akuntansi di dunia berdasarkan lingkungan bisnis di tempat mereka beroperasi

ke dalam 10 (sepuluh) kelompok, yaitu: (1) Amerika Serikat/Kanada/Belanda, (2) Negara-negara Persemakmuran Inggris Raya, (3) Jerman/Jepang, (4) Negara-negara Eropa daratan, (5) Negara-negara Skandinavia, (6) Israel/Meksiko, (7) Negara-negara Amerika Selatan, (8) Negara-negara berkembang Timur Jauh/Dekat, (9) Negara-negara Afrika (kecuali Afrika Selatan) dan (10) Negara-negara Komunis.

- e. Berdasarkan hasil survei Pricewaterhouse (1975) terhadap sistem pengukuran dan penyajian akuntansi, pengelompokan dibedakan ke dalam 5 (lima) model, yaitu: (1) *British Commonwealth Model*: Inggris Raya, Australia, Bahamas, Fiji, Iran, Irlandia, Jamaika, Malaysia, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Rhodesia, Singapura, Afrika Selatan dan Trinidad; (2) *Latin American Model*: Argentina, Bolivia, Brasil, Kolombia, Ethiopia, Yunani, India, Italia, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Spanyol dan Uruguay; (3) *Northern and Central European Model*: Belgia, Denmark, Perancis, Jerman, Norwegia, Swedia, Swiss dan Zaire; (4) *United States Model*: Amerika Serikat, Bermuda, Kanada, Jepang, Meksiko, Filipina dan Venezuela; dan (5) Chili.
- f. Sedangkan hasil penelitian Nair dan Frank (1975) membagi praktik-praktik akuntansi yang digunakan di berbagai negara ke dalam 7 kelompok, yaitu: (1) Bolivia, Brasil, Chili, Kolombia, Paraguay, Uruguay, Perancis, Spanyol, Belgia, Yunani, Zaire, (2) Australia, Selandia Baru, Fiji, Singapura, Malaysia, Afrika Selatan, Ethiopia, Kenya, Nigeria, Trinidad, (3) Amerika Serikat, Meksiko, Panama, Venezuela, Bahamas, Jepang, Filipina, Jerman Barat, (4) Inggris Raya, Belanda, Kanada, Bermuda, Jamaica, Eire, Rhodesia, (5) Argentina, Peru, India, Pakistan, Iran, (6) Denmark, Norwegia, Swedia dan (7) Swiss. Pembagian ini didasarkan pada penggunaan metode statistik ke *database* prinsip-prinsip dan praktik-praktik akuntansi di seluruh dunia.
- g. American Accounting Association (1976) mengklasifikasikan pola akuntansi dunia dalam 5 (lima) *zones of influence*. Pembagian zona berdasarkan pada sumber-sumber sejarah, kebudayaan dan sosial ekonomi yang dianggap telah mempengaruhi prinsip akuntansi pengukuran dan pelaporan di daerah dan

negara yang berbeda, yaitu zona: (1) Amerika Serikat, (2) Inggris Raya, (3) Jerman/Belanda, (4) Prancis/Spanyol/Portugal dan (5) Komunis.

- h. Penelitian Hofstede (1980) membagi praktik akuntansi berdasarkan *culture areas* atau wilayah kebudayaannya menjadi 10 (sepuluh) kelompok, yaitu: (1) *More developed Latin*: Spanyol, Italia, Perancis, Belgia, Brasil, Argentina; (2) *Less developed Latin*: Kolombia, Ekuador, Meksiko, Venezuela, Kosta Rika, Chili, Guatemala, Panama, Peru, Portugal, El Salvador, Uruguay; (3) *More developed Asian*: Jepang; (4) *Less developed Asian*: Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, India, Pakistan, Taiwan; (5) *Near Eastern*: Negara-negara Arab, Iran, Turki, Yunani, Yugoslavia; (6) *African*: Afrika Timur, Afrika Barat; (7) *Asian colonial*: Hong Kong, Singapura; (8) *Germanic*: Jerman, Austria, Swiss dan Israel; (9) *Anglo*: Amerika Serikat, Inggris Raya, Kanada, Irlandia, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan; dan (10) *Nordic*: Belanda, Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia.
- i. Nobes (1983) memperluas pendekatan pada pengembangan akuntansi di negara-negara maju dengan sistem ekonomi berorientasi pasar (*market-oriented economic system*) yang pernah dianalisis oleh Gerhard Mueller pada tahun 1967, menjadi:
- *Macro-uniform*, dengan proposisi kepentingan publik akan terlayani lebih baik jika akuntansi perusahaan berhubungan erat dengan kebijakan ekonomi nasional dan akuntansi distandarisasi dan digunakan sebagai alat pengawasan administratif oleh pemerintah, terdiri dari:
 - a) *Government, economics*, dilakukan di Swedia.
 - b) *Continental: government, tax, legal: Law-based* dilakukan di Jepang dan Jerman dan *Tax-based* dilakukan di Spanyol, Perancis, Belgia dan Italia.
 - *Micro-based*, pengembangan akuntansi dengan prinsip perusahaan adalah fokus aktivitas bisnis dan harus dipertahankan hidupnya untuk optimisasi perekonomian, terdiri dari:
 - a) *Business practice, pragmatic, British origin*: pengaruh Amerika Serikat dilakukan di Amerika Serikat sendiri dan Kanada, sedangkan

Universitas Indonesia

pengaruh Inggris Raya dilakukan di Inggris Raya, Irlandia, Australia dan Selandia Baru.

b) *Business economics, theory*, dilakukan di Belanda.

j. Terakhir, Nobes dan Parker (2002) mengelompokkan praktik akuntansi di dunia berdasarkan sistem akuntansi *uniform accounting plans* dan *standard based accounting*, yaitu:

- *Uniform accounting plans*, terbagi ke dalam model akuntansi:

a) *Soviet Union*, digunakan di Cina, Mongolia, Rusia dan Uzbekistan.

b) *Continental European*, digunakan di Belgia, Jerman, Italia, Spanyol, Swedia, Swiss, Perancis, Kamboja, Vietnam dan Venezuela.

c) *Latin American*, digunakan di Argentina, Bolivia, Chili, Kolombia, Paraguay, Uruguay, Peru dan Ethiopia.

- *Standard based accounting*, terbagi ke dalam model akuntansi:

a) *British Commonwealth*, digunakan di Inggris Raya, Irlandia, Belanda, Australia, Selandia Baru, Fiji, Papua Nugini, India, Pakistan, Bahamas, Jamaika, Kenya dan lain-lain.

b) *United States*, digunakan di Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Panama, Jepang dan Filipina.

Berkaitan dengan perubahan dan pengembangan nilai dan sistem akuntansi di dunia berkaitan dengan globalisasi ekonomi, Gray (1988) mengembangkan sebuah model analisis untuk mengelaborasi proses perubahan akuntansi yang terjadi di dunia. Menurut Gray, kekuatan perubahan nilai dan sistem akuntansi berasal dari lingkungan global yaitu adanya tekanan internasional untuk melakukan perubahan, termasuk didalamnya adalah ketergantungan politik dan ekonomi, FDI, strategi MNCs, teknologi baru, pasar finansial global, meluasnya bisnis dan jasa keuangan serta organisasi regulator internasional. Tekanan internasional ini juga akan berkonsekuensi institusional lokal baik langsung dan tidak langsung, seperti terhadap sistem hukum, pasar modal atau asosiasi profesional. Lembaga-lembaga seperti IMF, OECD, UNCTAD, WTO, IOSCO,

Universitas Indonesia

IASB atau IFAC disebut Gray berperan dalam pengembangan lingkungan bisnis berskala global.

Mengacu pada pendekatan Nobes (1983), pemakaian standar akuntansi pada tahun 1998 di negara-negara maju dibedakan menjadi 2 (dua) *class*, yaitu:

a. *Class A* berarti *strong equity*, terdiri dari:

- Standard Dutch, banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan Belanda.
- UK GAAP, banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan Inggris Raya dan Irlandia.
- IAS GAAP, banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan berakuntabilitas publik Singapura dan perusahaan Bayer (Jerman), Nestle (Swiss) serta Nokia (Finlandia).
- US GAAP, banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar modal Amerika Serikat dan beberapa perusahaan Jepang.

b. *Class B* berarti *weak equity*, terdiri dari:

- Standard Belgian, banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan Belgia.
- Standard French, banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan kecil dan menengah Perancis.
- Standard German, banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan kecil dan menengah Jerman dan perusahaan-perusahaan kecil Austria.
- Standard Italian, banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan non publik Italia.
- Standard Japanese, banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan Jepang.

Sedangkan Solas (2008) memuat survei penggunaan standar akuntansi oleh negara-negara di dunia pada tahun 1999 dengan pembagian:

a. IASs digunakan langsung:

- sebagai standar nasional dan penjelasan material ditambahkan, digunakan di Kroasia, Cyprus, Kuwait, Latvia, Malta dan lain-lain.
- sebagai standar nasional, tetapi standar nasional sendiri dikembangkan untuk permasalahan yang tidak diatur oleh IASs dan penjelasan material ditambahkan, digunakan di Malaysia dan Papua Nugini.

Universitas Indonesia

- sebagai standar nasional, tetapi dalam beberapa kasus, dimodifikasi untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi lokal, digunakan di Albania, Bangladesh, Barbados, Kolombia, Jamaika, Yordania, Kenya, Polandia, Uruguay, Zambia dan lain-lain.

b. Standar nasional berbasis IASs:

- Standar nasional dikembangkan secara terpisah tetapi berdasarkan dan mengacu pada relevansi IASs. Standar nasional secara umum hanya menyediakan penjelasan tambahan, digunakan di Cina, Iran, Filipina, Slovenia, Tunisia dan Uzbekistan.
- Standar nasional dikembangkan secara terpisah tetapi berdasarkan dan mengacu pada relevansi IASs dalam banyak kasus. Tetapi beberapa standar mungkin menyediakan lebih banyak atau lebih sedikit pilihan dibanding IASs, digunakan di Brasil, Ceko, Turki, Perancis, India, Irlandia, Lithuania, Mauritius, Meksiko, Namibia, Belanda, Norwegia, Portugal dan lain-lain.
- Standar nasional dikembangkan secara terpisah tetapi berdasarkan dan mengacu pada relevansi IASs dalam banyak kasus. Setiap standar memasukkan pernyataan yang membandingkan standar nasional dengan IASs, digunakan di Australia, Denmark, Hong Kong, Italia, Selandia Baru, Swedia dan lain-lain.

c. IASs digunakan secara informal:

- Standar nasional mungkin tidak ada atau ada, tetapi IASs yang secara tidak formal diadopsi, biasanya digunakan dalam pelaporan sektor swasta, digunakan di Botswana, Rumania, Vietnam, Kamboja dan Lesotho.

d. Standar nasional independen yang pengembangannya terpisah dari IASs, digunakan di Amerika Serikat, Inggris Raya, Jerman, Kanada, Spanyol, Belgia, Austria, Finlandia, Luksemburg, Jepang dan Korea Selatan.

Berdasarkan hasil survei tersebut diatas maka usaha IASC untuk mempromosikan IASs ke seluruh dunia pada akhirnya bisa dikatakan cukup berhasil. Hal ini tidak lepas dari kerjasama yang mereka lakukan dengan Uni Eropa, IOSCO sebagai badan pasar modal dunia, IFAC sebagai organisasi akuntan dunia, Bank for International Settlement (Basel Accord) sebagai lembaga yang mengatur perbankan dunia dan IMF, World Bank serta WTO sebagai organisasi-organisasi dibawah UN atau PBB. Meskipun demikian keseragaman bahasa dalam akuntansi belum tercapai karena banyak negara menggunakan IASs dalam berbagai variasi yang disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Keseragaman bahasa juga belum tercapai karena banyak negara maju berpengaruh seperti Amerika Serikat, Inggris Raya, Jerman, Kanada dan Jepang mengembangkan standar akuntansinya sendiri terlepas dari pengaruh IASs. Peran Amerika Serikat sebagai pusat gravitasi perekonomian dunia sekaligus tempat pasar finansial global terbesar menyebabkan banyak MNCs dari Eropa dan Jepang menggunakan standar versi FASB sebagai dasar dalam penyajian laporan keuangannya. Selain itu peran Amerika Serikat sebagai salah satu pusat pengembangan ilmu akuntansi di dunia mendorong beberapa negara berkembang untuk mengacu pada beberapa SFASs yang dikeluarkan FASB saat IASs tidak memenuhi kebutuhan akuntansi negara yang bersangkutan, seperti yang terdapat dalam beberapa PSAK Indonesia.

Pada tahun 1990-an, negara-negara Eropa seperti Italia, Belgia, Perancis dan Jerman mulai mengizinkan perusahaan mereka untuk menggunakan IASs dalam pelaporan keuangan domestik. Selanjutnya pada bulan Juli 1995, IASC dan IOSCO yang bekerja mendaftarkan saham perusahaan asing pada bursa efek nasional mencapai persetujuan untuk semakin bekerjasama mendorong tercapainya harmonisasi standar akuntansi. Bulan Mei 2000, IOSCO telah menyetujui IASs sebagai standar akuntansi yang digunakan entitas yang terdaftar di bursa efek dunia. Terbentuknya the EU pada tahun 1993 membuat IASC semakin fokus untuk mendapatkan kekuatan otoritas sebagai *accounting regulator* dengan cara membantu memfasilitasi MNCs Eropa yang selama ini "menderita" dengan rekonsiliasi US GAAP dengan SEC saat melakukan listing di Bursa Efek New York (Sawani, 2005). Tahun 1995, Uni Eropa mengadopsi pendekatan baru

Universitas Indonesia

dalam harmonisasi akuntansi yang memungkinkan penggunaan IASs oleh perusahaan Uni Eropa yang *listed* dalam pasar modal internasional. SEC sendiri pada tahun 1996 menyatakan dukungannya terhadap IASC untuk mengembangkan standar akuntansi yang dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan yang dapat digunakan dalam penawaran surat berharga lintas batas negara.

Lembaga-lembaga penyusun standar akuntansi dan pelaporan keuangan dari beberapa negara yang mendirikan IASC dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pelaporan keuangan pada tanggal 1 April 2001 melakukan restrukturisasi kelembagaan terhadap IASC dengan membentuk IASCF yang membawahi IASB sebagai lembaga penyusun standar akuntansi internasional yang baru yaitu IFRSs yang diusahakan menjadi *global accounting standards* bagi seluruh entitas di dunia, IFRSs Interpretations Committee yang melakukan interpretasi atas standar akuntansi yang dikeluarkan IASB dan IFRSs Advisory Council yang bertugas memberikan nasihat dan masukan kepada IASB. IASCF yang terdiri dari 22 anggota mendapat dukungan dana dari firma-firma akuntan publik besar, institusi keuangan swasta, perusahaan-perusahaan, bank-bank sentral negara maju, bank pembangunan, perusahaan-perusahaan keuangan swasta dan organisasi-organisasi profesi yang berasal dari seluruh dunia. Saat ini semua anggota IASB (14 orang) berasal dari negara-negara industri maju yang sebagian besar berasal dari Asia Timur, Eropa Barat, Amerika Utara dan Australia. Terbentuknya IASB ini sekaligus pertanda peningkatan status harmonisasi standar akuntansi nasional di dunia menjadi konvergensi standar akuntansi nasional dan IFRSs untuk menghasilkan seperangkat standar akuntansi global berkualitas tinggi yang dapat membantu pelaku pasar modal di seluruh dunia dan pengguna laporan keuangan lainnya dalam membuat keputusan ekonomi.

Usaha menjadikan IFRSs sebagai standar akuntansi global mendapatkan titik balik setelah pada bulan Juli 2002, the European Parliament and Council sebagai lembaga tertinggi Uni Eropa untuk kepentingan politik dan ekonomi, mengeluarkan *Regulation Act EC 1606/2002* yang menyatakan untuk tahun pelaporan yang dimulai 1 Januari 2005, seluruh perusahaan dari negara anggota

Universitas Indonesia

Uni Eropa yang sekuritasnya terdaftar di the EU *exchange* diharuskan membuat laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan IFRSs. 25 negara anggota Uni Eropa dan Liechtenstein, Norwegia serta Islandia kemudian mengadopsi semua IASs/IFRSs, kecuali satu standar yaitu IAS 39 mengenai pengukuran dan pengakuan instrumen keuangan, yang mengalami modifikasi. Beberapa negara Eropa melakukan beberapa variasi dalam pelaksanaan konvergensi, dengan langsung melakukan adopsi penuh IFRSs untuk semua perusahaan atau khusus perusahaan *go public* baik menggunakan bahasa Inggris maupun diterjemahkan ke bahasa lokal atau melakukan konvergensi secara bertahap dengan tetap mengizinkan perusahaan yang ingin langsung mengadopsi penuh IFRSs. Misalnya Austria yang hanya mewajibkan perusahaan berakuntabilitas publik untuk menerapkan IFRSs, berbeda dengan Cyprus yang mewajibkan seluruh perusahaan menerapkan IFRSs dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Selain wilayah Eropa, dua negara lain, Australia dan Afrika Selatan juga mengadopsi IFRSs mulai tahun pelaporan 2005.

Saat itu terdapat sekitar 7.000 perusahaan berakuntabilitas publik di 25 negara anggota Uni Eropa yang harus menerapkan IFRSs (Purba, 2010). Sejak saat itu IASB mencanangkan program konvergensi yang mewajibkan anggotanya untuk menggunakan IFRSs sebagai acuan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi (Daeli, 2009). Setelah sebagian besar Eropa, Australia dan Afrika Selatan mengadopsi IFRSs, IASB terus mendorong penggunaan dan penerapan standar akuntansi global dengan mempromosikan keuntungan pemakaian IFRSs sebagai standar akuntansi, secara garis besar yaitu: lebih melindungi kepentingan *stakeholders* dari *accounting fraud*, memudahkan menarik investor atau kreditor ke perusahaan dan menurunkan *cost of financial reporting* dan *cost of capital*. Akselerasi konvergensi IFRSs ke seluruh dunia dilakukan IASB melalui kerjasama dengan berbagai organisasi dunia seperti PBB, Bank Dunia, OECD, WTO, IOSCO dan kelompok negara-negara G-20. IASB berharap pada tahun 2011, jumlah negara yang mengadopsi IFRSs termasuk melakukan proses konvergensi telah mencapai 150 negara.

Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi terbesar di dunia mendapat "perlakuan khusus" dari IASB dengan mengadakan pendekatan untuk melakukan

kerjasama bilateral dengan FASB. Usaha membawa konvergensi IFRSs ke Amerika Serikat terutama dengan tujuan meringankan perusahaan-perusahaan Eropa yang terdaftar di bursa efek negara Paman Sam mencapai langkah besar setelah pada bulan September 2002, FASB sebagai lembaga penyusun standar akuntansi di Amerika Serikat dan IASB menandatangani Norwalk Agreement yang berisi komitmen untuk mengembangkan standar akuntansi dan pelaporan keuangan berkualitas tinggi dan tidak bertentangan satu sama lain. Bulan Oktober 2005, kemajuan kembali tercapai di Amerika Serikat setelah SEC sebagai badan pengawas pasar modal sekaligus pendorong utama pengembangan standar akuntansi di negara adidaya tersebut memberikan opsi kepada emiten asing untuk menyusun laporan keuangannya berdasarkan IFRSs pada tahun 2009. Di Amerika Serikat adopsi penuh terhadap IFRSs direncanakan dilakukan mulai tahun 2016.

Di Eropa, *Regulation Act EC 1606/2002* yang dikeluarkan the European Parliament and Council, melahirkan 3 (tiga) lembaga yang menentukan pemberlakuan IFRSs yang dikeluarkan IASB di Uni Eropa (Konigsgruber, 2007). Lembaga-lembaga tersebut yaitu EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), SARG (Standards Advice Review Group) dan ARC (The Accounting Regulatory Committee). EFRAG merepresentasikan sektor swasta yang didanai oleh kelompok-kelompok bisnis, akuntan dan auditor, bank dan kelompok lain yang berkepentingan terhadap penyajian laporan keuangan. EFRAG memiliki TEG (Technical Expert Group) yang langsung mereview dan memberikan saran kepada SARG setiap IASB mengeluarkan standar baru. SARG merepresentasikan kepentingan the European Commission yang terdiri dari ahli-ahli akuntan independen yang dipilih oleh komisi. Kelompok ini menilai saran dari TEG dan kemudian menyerahkan hasil penilaian tersebut kepada komisi. ARC merepresentasikan pemerintahan negara-negara anggota Uni Eropa yang berhak merekomendasikan adopsi atau penolakan terhadap pemberlakuan standar baru yang sudah dinilai oleh SARG. Rekomendasi untuk adopsi diserahkan ARC ke the European Parliament and Council untuk dilakukan penilaian akhir atau keputusan final pemberlakuan standar baru di Uni Eropa.

Di kawasan Asia Tenggara, Singapura dan Filipina menjadi pioner pengadopsian IFRSs dalam standar akuntansi nasionalnya. Financial Reporting

Universitas Indonesia

Standards (FRSs) di Singapura dan Philippines Financial Reporting Standards (PFRSs) di Filipina adalah IFRSs yang diadopsi secara lokal atau *adapted* dimana kedua negara Asia Tenggara tersebut mengadopsi seluruh IFRSs tetapi disesuaikan dengan kondisi di suatu negara dengan beberapa perbedaan/pegecualian dari IFRSs yang dikeluarkan IASB. Baik FRSs dan PFRSs diberlakukan untuk semua perusahaan pada tingkatan laporan konsolidasi, terpisah dan individu. Sedangkan di Thailand, standar akuntansinya sudah mengacu kepada IASs/IFRSs yang dikeluarkan IASB tetapi baru pada versi sampai dengan tahun 2005 dengan beberapa pengecualian. Thailand mengatakan keinginannya untuk *full convergence* dengan IFRSs tetapi belum menentukan waktu secara resmi. Sementara Malaysia mereorganisasi badan standar akuntansinya dengan membentuk Malaysian Accounting Standards Board (MASB) dan mengumumkan jadwal *full convergence* dengan IFRSs di tahun 2012. Tetapi Malaysia saat ini telah mengizinkan perusahaan asing yang terdaftar di Bursa Malaysia untuk menggunakan IFRSs di tingkatan laporan keuangan konsolidasi dan terpisah. Di Vietnam, standar akuntansi keuangannya yaitu Vietnamese Accounting Standards (VASs), masih mengadopsi IASs versi lama. IFRSs baru diwajibkan untuk bank-bank berstatus BUMN. VASs berbasis IFRSs sedang dalam proses penyusunan tetapi saat *full convergence* belum diumumkan secara resmi. Indonesia sendiri mirip dengan Malaysia dimana penerapan PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRSs bagi perusahaan berakuntabilitas publik diwajibkan sejak tanggal 1 Januari 2012. Perbedaannya, Indonesia belum mengizinkan perusahaan asing yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menggunakan IFRSs. Saat ini proses konvergensi IFRSs di Indonesia masih berlangsung sesuai jadwal tahap adopsi konvergensi IAI dari tahun 2008 – 2010.

BAB 3 PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI DI DUNIA ERA KONVERGENSI IFRSs

3.1 Perkembangan IASB dan IFRSs

Dewan IASC pada bulan Nopember 1999 secara bulat menyetujui suatu resolusi yang mendukung usulan struktur baru yang intinya adalah: (1) IASC akan didirikan sebagai sebuah organisasi independen; (2) organisasi tersebut akan terdiri dari dua badan utama yaitu perwalian dan dewan serta komite interpretasi tetap dan dewan penasehat standar; dan (3) perwalian akan menunjuk anggota dewan melakukan pengawasan dan mengumpulkan dana yang diperlukan, sedangkan dewan memiliki tanggung jawab tunggal untuk penentuan standar akuntansi. IASC akhirnya terestrukturisasi pada tahun 2001 dengan membentuk IASCF sebagai badan wali yang membawahi IASB sebagai lembaga/dewan penyusun standar akuntansi internasional, IFRSs Interpretation Committee sebagai komite yang melakukan interpretasi atas standar akuntansi yang dikeluarkan IASB dan IFRSs Advisory Council sebagai dewan yang bertugas memberikan nasihat dan masukan kepada IASB. Struktur baru ini bertujuan agar IASB dapat bersikap netral dan independen terhadap kepentingan-kepentingan berbagai pihak. Kondisi tersebut untuk mendorong standar-standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang dikeluarkan dapat diterima secara global.

Dengan direstrukturisasinya IASC menjadi IASB sebagai badan penyusun standar akuntansi, misi pembuat standar berubah dari harmonisasi menjadi konvergensi ke standar akuntansi global. Tujuannya jelas satu standar akuntansi global. Artinya satu set berarti standar yang sama kata per kata di setiap negara dan dengan tepat diterjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa lain sehingga perbedaan tidak terjadi saat proses penerjemahan. Tujuan lengkap IASB sebagai tersebut dalam *Preface to IFRSs* (revisi Oktober 2007) adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan, untuk kepentingan publik, satu set standar akuntansi global berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diterapkan yang mewajibkan informasi yang berkualitas tinggi, transparan dan dapat dibandingkan dalam laporan keuangan dan pelaporan keuangan lainnya untuk membantu para

pelaku di berbagai pasar modal di dunia dan pengguna informasi lainnya dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi.

- b. Mendorong penggunaan dan penerapan standar-standar tersebut.
- c. Memenuhi kebutuhan standar akuntansi dan pelaporan keuangan bagi perusahaan-perusahaan menengah dan kecil.
- d. Mendorong konvergensi standar akuntansi nasional dan IFRSs yang menghasilkan solusi berkualitas tinggi.

IASCF terdiri dari 22 anggota (*trustee*) yang berwenang menunjuk dan mengangkat anggota IASB, IFRSs Interpretation Committee dan IFRSs Advisory Council. Sampai dengan periode yang berakhir 31 Desember 2009 komposisi IASCF *trustee* telah mewakili kelima benua. Meskipun demikian suara perwakilan negara-negara maju masih mendominasi komposisi keanggotaan IASCF. 27,27 persen anggota IASCF berasal dari Amerika Utara (Amerika Serikat dan Kanada), 31,82 persen berasal dari negara-negara maju Eropa Barat, 22,73 persen berasal dari Asia yang dimotori Jepang, Cina dan India, dan sisanya sebesar 18,18 persen tersebar merata sebagai perwakilan negara-negara di benua Australia, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur. Mereka memiliki beragam latar belakang yaitu mantan pejabat pemerintah, eksekutif perusahaan finansial atau perusahaan multinasional dan dari lembaga profesi akuntan nasional atau kantor akuntan publik dunia.

Apabila kita menggabungkan komposisi Amerika Utara dan Eropa Barat dengan Jepang dan Australia maka kekuatan suara negara-negara maju dalam keanggotaan IASCF mencapai sebesar 72,73 persen. Sedangkan sisanya diisi negara-negara kekuatan ekonomi baru seperti Brasil, India, Cina, Afrika Selatan dan Polandia. Kondisi ini menggambarkan kekuatan negara-negara maju dalam menentukan anggota IASB, IFRSs Interpretation Committee dan IFRSs Advisory Council. IASCF memiliki Dewan Monitoring yang bertugas untuk meyakinkan bahwa IASCF melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam IASCF *constitution*. Dewan ini memiliki anggota dari berbagai organisasi dunia yaitu: European Commission: Internal Market and Services Directorate General, Financial Services Agency of Japan, IOSCO: Technical Committee dan Emerging

Universitas Indonesia

Markets Committee, SEC serta satu pengamat yang berasal dari Basel Committee on Banking Supervision. Daftar lengkap susunan IASCF *trustee* per 31 Desember 2009 dapat dilihat di Lampiran 1.

Sedangkan IASB memiliki 15 anggota dengan pengalaman praktik akuntansi dan pelaporan keuangan yang bervariasi dari seluruh dunia, baik sebagai eksekutif perusahaan finansial, perusahaan multinasional, kantor akuntan publik dunia atau keanggotaannya dalam badan penyusun standar lain dan perannya saat sebagai pejabat bank sentral. Pemilihan anggota IASB tidak harus mewakili seluruh benua, namun diusahakan tidak hanya berasal dari segelintir konstituen atau kawasan geografis tertentu. Tetapi hal tersebut tidak terlihat dalam keanggotaan IASB terbaru. 60 persen anggota IASB berasal dari Amerika Serikat dan negara-negara maju di Eropa Barat. Apabila anggota dari Jepang dan Australia digabungkan, maka negara-negara maju memiliki kekuatan suara dalam IASB sebesar 73,33 persen. Sisa sebesar 26,67 persen tersebar merata di negara-negara kekuatan ekonomi baru yaitu Brasil, India, Cina dan Afrika Selatan. Situasinya sangat mirip dengan IASCF *trustee* yang menentukan keanggotaan IASB. Menurut Purba (2010) masuknya wakil Cina sebagai anggota IASB adalah usaha untuk merangkul Cina sebagai upaya untuk mempercepat proses konvergensi global IFRSs. IASB juga didukung oleh direktur, staf teknis dan non teknis yang berasal dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Australia, Cina, Malaysia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Spanyol, Hongkong, Irlandia, Jerman dan Inggris. Daftar lengkap susunan anggota IASB per 31 Desember 2009 dapat dilihat di Lampiran 2.

Anggota IFRSs Interpretation Committee juga ditunjuk dan diangkat oleh IASCF *trustee*. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, komposisi IFRSs Interpretation Committee terdiri dari 1 *non-voting chairman* yang berasal dari IASB, 14 anggota, dan para pengamat yang berasal dari European Commission dan IOSCO. Komposisi keanggotaan komisi interpretasi ini sangat didominasi oleh negara-negara maju dengan total persentase sebesar 92,86 persen dimana 28,57 persen berasal dari Amerika Utara, 42,86 persen berasal dari Eropa Barat dan 21,43 persen berasal dari Asia Pasifik (Jepang, Australia dan Selandia Baru). Afrika Selatan adalah satu-satunya negara berkembang yang masuk keanggotaan.

Universitas Indonesia

Daftar lengkap susunan anggota IFRSs Interpretation Committee per 31 Desember 2009 dapat dilihat di Lampiran 3.

IFRSs Advisory Council berisi perwakilan dari berbagai lembaga atau organisasi internasional dari berbagai negara. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan nasihat atau masukan kepada IASB tentang praktik akuntansi yang terjadi di berbagai belahan dunia. Advisory Council memiliki 48 anggota (termasuk *chairman* dan *vice-chairman*) dan rutin mengadakan pertemuan sebanyak tiga kali dalam setahun. Jepang, Cina, India, Korea Selatan dan Singapura adalah sedikit dari negara-negara Asia yang memiliki 'keistimewaan' mewakili perwakilan langsung di IFRSs Advisory Council. Dewan penasihat memiliki beberapa pengamat yang berasal dari beberapa lembaga internasional yaitu European Commission, Japan Financial Services Agency dan US SEC. Daftar lengkap susunan anggota IFRSs Advisory Council per 31 Desember 2009 dapat dilihat di Lampiran 4.

Standar akuntansi dan pelaporan keuangan beserta interpretasinya disusun melalui suatu *due process* yang formal dimana antara IASB dan IFRSs Interpretation Committee melalui *due process* yang berbeda. *Due process* yang harus dilalui IASB yaitu:

- a. IASB meminta stafnya untuk mengidentifikasi dan mengangkat isu-isu yang harus mendapat perhatian IASB dan melakukan *public meeting* untuk memutuskan apakah akan melakukan proyek baru atas isu-isu tersebut dan melakukan konsultasi dengan IFRSs Advisory Council atas prioritas apa yang harus dilakukan.
- b. IASB memutuskan apakah akan menangani proyek itu sendiri atau melakukannya dengan organisasi *standard setter* lain dan mengeluarkan *discussion paper* sebagai publikasi yang pertama atas isu tersebut dan jika tidak dikeluarkan *discussion paper*, IASB harus menjelaskan alasannya.
- c. Penyusunan dan publikasi atas ED IFRSs dilakukan dengan melampirkan hasil konsultasi dengan IFRSs Advisory Council, *working group*, organisasi *standard setter* lain dan komentar dari sesi-sesi sosialisasi.
- d. Jika kesepakatan atas draft IFRSs tidak tercapai, dimana harus mendapat persetujuan minimal dari 9 (sembilan) anggota IASB atau 60 persen suara,

Universitas Indonesia

maka IFRSs tidak akan dikeluarkan. Tetapi jika mencapai kesepakatan, maka IASB mengeluarkan draft IFRSs beserta dengan *dissenting opinion* dari anggota IASB jika ada, untuk dikomentari oleh masyarakat.

- e. IASB melakukan review atas komentar-komentar yang diperoleh dari masyarakat dan melakukan kunjungan lapangan, *public hearing* dan *round-table meeting*.
- f. Jika persetujuan atas draft IFRSs tidak tercapai, IFRSs tidak dikeluarkan. Sebaliknya apabila ada persetujuan atas draft IFRSs dari minimal 9 (sembilan) anggota IASB atau 60 persen suara maka dilakukan pengesahan atas draft IFRSs oleh IASB.

Sedangkan *due process* yang harus dilalui IFRSs Interpretation Committee dalam mengeluarkan interpretasinya atas IFRSs adalah sebagai berikut:

- a. Komite Agenda mengevaluasi isu-isu yang diajukan oleh para konstituen untuk diagendakan dan publikasi draft agenda dan menunggu tanggapan dari masyarakat.
- b. Komite Agenda memutuskan apakah perlu menambahkan isu yang disampaikan konstituen ke dalam agenda dengan mempertimbangkan komentar masyarakat.
- c. Staf IASB menyusun ikhtisar isu-isu untuk dipelajari para anggota IFRSs Interpretation Committee.
- d. Jika konsesus IFRSs Interpretation Committee atas draft interpretasi tidak tercapai maka tidak dikeluarkan interpretasi. Sebaliknya apabila konsesus tercapai maka draft interpretasi dikeluarkan oleh IFRSs Interpretation Committee untuk mendapat komentar dari masyarakat.
- e. IFRSs Interpretation Committee mempertimbangkan komentar masyarakat dalam melakukan finalisasi draft interpretasi.
- f. Jika konsesus IFRSs Interpretation Committee atas draft interpretasi kemudian tidak tercapai maka interpretasi tidak dikeluarkan dan apabila dicapai kesepakatan atas draft interpretasi maka kemudian dilakukan pengesahan oleh IASB setelah mendapat persetujuan dari sedikitnya 9 (sembilan) anggota IASB atau 60 persen suara.

Universitas Indonesia

Saat IASB berdiri, terdapat 33 IASs yang merupakan produk dari IASC sebelum restrukturisasi. Standar-standar tersebut masih berlaku sepanjang IASB belum melakukan amandemen terhadapnya.

Tabel 3.1
Standar Akuntansi Internasional
Yang Berlaku Saat IASB Berdiri

Standar	Tanggal Efektif	Nama Standar
IAS 1	1 Juli 1998	Presentation of Financial Statements
IAS 2	1 Januari 1995	Inventories
IAS 7	1 Januari 1979	Statement of Cash Flows
IAS 8	1 Januari 1979	Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
IAS 10	1 Januari 2000	Events After the Reporting Period
IAS 11	1 Januari 1980	Construction Contracts
IAS 12	1 Januari 1998	Income Taxes
IAS 14	1 Juli 1998	Segment Reporting
IAS 15	1 Januari 1983	Information Reflecting the Effects of Changing Prices
IAS 16	1 Januari 1983	Property, Plant and Equipment
IAS 17	1 Januari 1999	Leases
IAS 18	1 Januari 1984	Revenue
IAS 19	1 Januari 1985	Employee Benefits
IAS 20	1 Januari 1984	Accounting for Government Grants and Disclosure of Government
IAS 21	1 Januari 1985	The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
IAS 22	1 Januari 1985	Business Combinations
IAS 23	1 Januari 1986	Borrowing Costs
IAS 24	1 Januari 1986	Related Party Disclosures
IAS 26	1 Januari 1988	Accounting and Reporting by Retirement

Universitas Indonesia

		Benefit Plans
IAS 27	1 Januari 1990	Consolidated and Separate Financial Statements
IAS 28	1 Januari 1990	Investments in Associates
IAS 29	1 Januari 1990	Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
IAS 30	1 Januari 1991	Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions
IAS 31	1 Januari 1992	Interests In Joint Ventures
IAS 32	1 Januari 1996	Financial Instruments: Presentation – Disclosure provisions
IAS 33	1 Januari 1998	Earnings Per Share
IAS 34	1 Januari 1999	Interim Financial Reporting
IAS 35	1 Januari 1999	Discontinuing Operations
IAS 36	1 Juli 1999	Impairment of Assets
IAS 37	1 Juli 1999	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
IAS 38	1 Juli 1999	Intangible Assets
IAS 39	1 Januari 2001	Financial Instruments: Recognition and Measurement
IAS 40	1 Januari 2001	Investment Property

Sumber: Choi dan Meek (2005)

Tahun 2001, IASB langsung mengumumkan program dan rencananya ke depan untuk segera mewujudkan tujuan konvergensi IFRSs yang merupakan perpanjangan dari tujuan harmonisasi yang sebelumnya diusung IASC. Tidak membutuhkan waktu lama bagi IASB untuk segera menggulirkan konvergensi IFRSs ke seluruh dunia karena pada tahun 2002, parlemen Eropa menyetujui proposal Komisi Eropa bahwa seluruh perusahaan Uni Eropa yang sahamnya tercatat harus mengikuti standar IASB yang dimulai selambat-lambatnya pada tahun 2005 untuk laporan keuangan konsolidasi. Pada tahun yang sama juga, IASB dan FASB menandatangani *Norwalk Agreement* yang berisi komitmen untuk mengembangkan standar akuntansi dan pelaporan keuangan berkualitas tinggi dan tidak bertentangan satu sama lain. Tahun 2003 IASB mengeluarkan

Universitas Indonesia

standar baru pertamanya yaitu IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards. Di tahun tersebut, Australia, Selandia Baru dan Afrika Selatan menyusul Uni Eropa untuk menyatakan komitmennya mengadopsi IFRSs. IASB juga mulai melakukan diskusi-diskusi dan pertemuan yang dilakukan melalui internet. Hingga tanggal 31 Agustus 2010, IASB telah mengeluarkan beberapa IFRSs sebagai amandemen atas IFRSs/IASs yang merupakan hasil dari buah diskusi dengan *standard setter* lainnya terutama FASB.

Tabel 3.2
Standar Akuntansi Internasional
per 31 Agustus 2010

Standar	Tanggal Efektif	Nama Standar
IFRS 1 A	1 Juli 2009	First-time Adoption of International Financial Reporting Standards
IFRS 2 A	1 Januari 2009	Share-based Payment
IFRS 3 A	1 Juli 2009	Business Combinations
IFRS 4 A	1 Januari 2009	Insurance Contracts
IFRS 5 A	1 Januari 2009	Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
IFRS 6 A	1 Januari 2009	Exploration for and Evaluation of Mineral Assets
IFRS 7 A	1 Juli 2009	Financial Instruments: Disclosures
IFRS 8 A	1 Januari 2009	Operating Segments
IFRS 9 A		Financial Instruments
IAS 1 A	1 Januari 2009	Presentation of Financial Statements
IAS 2 A	1 Januari 2009	Inventories
IAS 7 A	1 Juli 2009	Statement of Cash Flows
IAS 8 A	1 Januari 2009	Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
IAS 10 A	1 Juli 2009	Events After the Reporting Period
IAS 11 A	1 Januari 2009	Construction Contracts

Universitas Indonesia

IAS 12 A	1 Juli 2009	Income Taxes
IAS 16 A	1 Juli 2009	Property, Plant and Equipment
IAS 17 A	1 Januari 2009	Leases
IAS 18 A	1 Januari 2009	Revenue
IAS 19 A	1 Januari 2009	Employee Benefits
IAS 20 A	1 Januari 2009	Accounting for Government Grants and Disclosure of Government
IAS 21 A	1 Juli 2009	The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
IAS 23 A	1 Januari 2009	Borrowing Costs
IAS 24 A	1 Januari 2009	Related Party Disclosures
IAS 26 R	1 Januari 1995	Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
IAS 27 A	1 Juli 2009	Consolidated and Separate Financial Statements
IAS 28 A	1 Juli 2009	Investments in Associates
IAS 29 A	1 Januari 2009	Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
IAS 31 A	1 Juli 2009	Interests In Joint Ventures
IAS 32 A	1 Juli 2009	Financial Instruments: Presentation
IAS 33 A	1 Juli 2009	Earnings Per Share
IAS 34 A	1 Juli 2009	Interim Financial Reporting
IAS 36 A	1 Juli 2009	Impairment of Assets
IAS 37 A	1 Juli 2009	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
IAS 38 A	1 Juli 2009	Intangible Assets
IAS 39 A	1 Juli 2009	Financial Instruments: Recognition and Measurement
IAS 40 A	1 Januari 2009	Investment Property
IAS 41 A	1 Januari 2009	Agriculture

Sumber: diolah dari <http://www.iasb.org> dengan tanggal efektif sebagai efektif berlakunya amandemen/reformat terakhir

Standar-standar baru, termasuk hasil amandemen, yang dikeluarkan IASB memiliki karakteristik baru yang mengubah pola berpikir para praktisi akunting selama ini. Karakteristik-karakteristik tersebut yaitu:

- a. Lebih bersifat *principle-based* dibandingkan *ruled-based* dengan banyak menekankan pada interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip akuntansi. Laporan keuangan harus memenuhi keempat karakteristik kualitatif yaitu dapat dipahami, relevansi, keandalan dan daya banding. Hal ini menyebabkan IFRSs/IASs hanya mengatur prinsip-prinsip utama saja dan tidak memiliki standar yang spesifik, detail dan kompleks. Sedangkan hal-hal kecil cukup diatur dengan interpretasi dan aturan pokoknya. Dampaknya IFRSs menjadi lebih supel dan menyeluruh meskipun *professional judgement* yang kuat menjadi sangat diperlukan untuk menyimpulkan permasalahan akuntansi. Di Amerika Serikat, praktik akuntansi yang *ruled-based* memberikan motivasi bagi para pelaku kejahatan korporasi untuk melakukan *aggressive accounting* dan *creative accounting* dengan cara mencari celah yang ada di standar akuntansi dan pelaporan keuangan seperti pada kasus Enron, Adelphia dan Worldcom.
- b. Penilaian pada substansi transaksi (*substance over form*) dan evaluasi apakah laporan keuangan mencerminkan realitas ekonomi. Penyajian harus lebih mengutamakan hakikat ekonomi dibanding hakikat formal. Misalnya yang terkait dengan *embedded lease* (sewa melekat) dimana entitas harus melakukan evaluasi atas suatu kontrak/perjanjian sewa. Prinsip ini secara langsung bertentangan dengan prinsip *form over substance* yang dianut peraturan pajak.
- c. Lebih banyak menggunakan *fair value* (nilai wajar) dibanding *historical cost* (biaya historis) untuk basis pengukuran. IASB lebih menekankan sisi relevansi dalam laporan keuangan yang lebih dibutuhkan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan mengasumsikan semua negara memiliki pasar aktif yang dapat mendukung verifikasi nilai wajar. Penggunaan nilai wajar ini dapat menyebabkan keterkaitan dengan dengan profesi lain seperti appraisal, aktuaris, analis dan lain-lain. Tren penggunaan nilai wajar oleh IASB/IASB sebenarnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Apabila di tahun 1980-an

Universitas Indonesia

jumlah standar akuntansi keuangan yang menggunakan nilai wajar hanya 9 (sembilan) standar, maka pada awal tahun 2007, jumlah IASs dan IFRSs yang mengadopsi nilai wajar meningkat menjadi 22 standar (Purba, 2010). Kecenderungan ini semakin meninggalkan biaya historis sebagai basis pengukuran dan penilaian yang selama ini lazim digunakan.

- d. Mengedepankan transparansi dalam pengungkapan laporan keuangan. Hal ini menyebabkan terjadi perubahan signifikan dalam penyajian laporan keuangan dimana perubahan modal entitas yang berasal dari transaksi pemilik dipisahkan dengan perubahan lainnya. Sesuai IAS 1 Presentation of Financial Statements, laporan keuangan menjadi terdiri dari 5 (lima) elemen yaitu: Laporan posisi keuangan; Laporan laba komprehensif; Laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan semua perubahan ekuitas dan perubahan-perubahan yang muncul dari transaksi-transaksi dengan pihak pemegang saham dalam kapasitas mereka sebagai pemilik perusahaan; Laporan arus kas; Catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi terkait dengan kebijakan akuntansi yang signifikan dan catatan-catatan penjelasan; dan Laporan posisi keuangan pada periode komperatif paling awal apabila suatu entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau melakukan penyajian kembali secara retrospektif atau apabila dilakukan reklasifikasi atas akun-akun yang ada pada laporan keuangan.

Selama tahun 2009, pekerjaan IASB fokus pada isu-isu yang berkaitan dengan krisis finansial global dan meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama dengan FASB dalam mengamandemen standar akuntansi. Fokus terhadap krisis finansial global merupakan amanat dari kesepakatan G-20 yang tertuang dalam *Declaration of Summit on Financial Markets and the World Economy* di bulan Nopember 2008, dimana negara-negara G-20 berkomitmen mendorong peningkatan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan termasuk pihak-pihak yang terlibat didalamnya dan menghasilkan *Action Plan to Implement Principles for Reform* dimana muatannya hampir 50 persen terkait dengan isu-isu akuntansi dan auditing. G-20 menekankan pentingnya perbaikan transparansi akuntansi yang berkaitan dengan item-item *off balance sheet*. IASB merespon

dengan mengeluarkan beberapa proposal yang terkait dengan *off balance sheet* (konsolidasi di bulan Desember 2008 dan *derecognition* di bulan Maret 2009).

Pada pertemuan bulan April 2009, G-20 meminta badan penyusun standar akuntansi untuk mengurangi kompleksitas standar akuntansi untuk instrumen keuangan, sesuatu yang sebenarnya sudah direncanakan oleh IASB untuk dilakukan. Permintaan G-20 ini semakin mendorong IASB untuk mempercepat langkah penanganan terhadap instrumen keuangan. Langkah ini diwujudkan IASB dalam 3 (tiga) fase proyek yaitu *classification and measurement*, *impairment* dan *hedge accounting*. Di sisi lain IASB tetap berkomitmen untuk tetap sejalan dengan FASB dalam penyusunan proposal-proposal baru. Secara lengkap dokumen *due-process* yang dipublikasikan IASB selama tahun 2009 dapat dilihat pada tabel dibawah yang mayoritas merupakan perwujudan dari permintaan G-20 dan komitmen IASB terhadap perjanjian dengan FASB.

Tabel 3.3
Daftar Publikasi Due-Process IASB
Selama Tahun 2009

Bulan Publikasi	Uraian Publikasi
Exposure drafts	
Januari	Post-implemmentation Revisions to IFRIC Interpretations
Maret	Income Tax
Maret	Derecognition
Mei	Prepayments of a Minimum Funding Requirement
Mei	Fair Value Measurement
Juni	Management Commentary
Juli	Financial Instruments: Classification and Measurement
Juli	Rate-regulated Activities
Agustus	Classification of Right Issues
Agustus	Discount Rate for Employee Benefits
Agustus	Improvements to IFRSs
Nopember	Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment

Universitas Indonesia

Nopember	Limited Exemption from Comparative IFRS 7 Disclosures for First-time Adopters
IFRSs dan amandemen IFRSs	
Maret	Improving Disclosures about Financial Instruments
Maret	Embedded Derivatives
April	Improvements to IFRSs
Juni	Group Cash-settled Share-based Payment Transactions
Juli	IFRS for SMEs
Juli	Additional Exemptions for First-time Adopters
Oktober	Classification of Right Issues
Nopember	IAS 24 Related Party Disclosures
Nopember	IFRS 9 Financial Instruments: Classification and Measurement
Nopember	Prepayments of a Minimum Funding Requirement
Discussion Paper	
Maret	Leases – Preliminary views, joint IASB/FASB DP
Draft Interpretation	
Agustus	D25 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments
Interpretations	
Januari	IFRIC 18 Transfer of Assets from Customers
Nopember	IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments

Sumber: IASCF Annual Report 2009

Dalam menjalankan kegiatannya, IASCF mendapat dukungan dana berupa donasi yang mengalir dari berbagai negara dan kantor-kantor akuntan besar dunia dengan total donasi per tanggal 31 Desember 2009 mencapai hampir sekitar 16,6 juta poundsterling. Banyak MNCs yang juga menjadi donatur IASCF dimana dana tersebut secara resmi mereka alirkan melalui perwakilan negaranya masing-masing. Sumber donasi IASCF dapat dibedakan menjadi institusi negara sebesar

Universitas Indonesia

64,61 persen dan institusi non negara 35,39 persen. Untuk institusi negara, 7 (tujuh) negara mendominasi total donasi dengan persentase 74,11 persen. Rinciannya, 17,23 persen donasi institusi negara berasal dari Amerika Serikat, 16,21 persen dari Jepang, 11,53 persen dari Jerman, 8,29 persen dari Perancis, 7,47 persen dari Inggris Raya, 7 persen dari Cina dan 6,38 persen dari Italia. Khusus untuk negara-negara maju, total donasi mereka ke IASCF mencapai sekitar hampir 87 persen dari total donasi institusi negara. Sedangkan untuk institusi non negara, 4 (empat) kantor akuntan besar dunia yaitu Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG dan Pricewaterhouse Coopers mendominasi sumber donasi sebesar 90,14 persen dari total donasi institusi non negara. Dengan demikian dari total donasi IASCF terdapat 7 (tujuh) negara dan 4 (empat) kantor akuntan besar dunia yang mendominasi sumber donasi dengan persentase hampir 80 persen dari total donasi yang masuk ke IASCF. Daftar lengkap donatur IASCF dapat dilihat di Lampiran 5.

3.2 Pendorong Konvergensi IFRSs Di Dunia

IASB sebagai lembaga yang menyusun IFRSs *automatically* menjadi promotor utama konvergensi IFRSs di dunia. Hal tersebut telah menjadi tujuan organisasi yang ingin mengembangkan dan mendorong penggunaan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan. Lembaga ini terus mendorong penggunaan IFRSs dengan mempromosikan manfaatnya untuk lebih melindungi kepentingan *stakeholders* dari kejahatan akuntansi, memudahkan menarik investor atau kreditor ke perusahaan dan menurunkan biaya penyajian pelaporan keuangan dan biaya modal (Abeysekera, 2005). Berdasarkan data tahun 2010, saat ini terdapat 123 yurisdiksi yang telah menerapkan IFRSs dengan berbagai tingkat keharusan yang berbeda-beda. Untuk perusahaan berakuntabilitas publik, sebanyak 26 yurisdiksi mengizinkan penggunaan IFRSs secara sukarela, 91 yurisdiksi mewajibkan penggunaan IFRSs untuk semua perusahaan, dan 6 yurisdiksi mewajibkan penggunaan IFRSs untuk perusahaan tertentu. Sedangkan untuk perusahaan non-publik, 43 yurisdiksi mengizinkan penggunaan IFRSs untuk semua atau beberapa perusahaan, 26 yurisdiksi mewajibkan penggunaan IFRSs untuk beberapa

perusahaan dan 25 yurisdiksi mewajibkan penggunaan IFRSs untuk semua perusahaan. Tahun 2011 diperkirakan jumlah yang mengadopsi IFRSs bertambah hingga mencapai 150 yurisdiksi. Daftar lengkap tingkat pemakaian IFRSs di berbagai yurisdiksi dapat dilihat di Lampiran 6. Uraian beserta data-data tersebut dibawah akan menjelaskan berbagai pendorong yang menyebabkan kegiatan konvergensi IFRSs semakin berkembang pesat dan tak tertahankan terjadi di seluruh dunia.

3.2.1 Ekonomi dan Keuangan

Tingginya ekspansi dari aktivitas finansial internasional dalam dua dekade terakhir telah menjadi perhatian dalam kehidupan ekonomi internasional. Statistik *balance of payments* mengindikasikan bahwa transaksi lintas batas dalam *debts* dan *equities* diantara negara-negara kelompok G-7 berkembang dari kurang lebih 10 persen dari GDP (*gross domestic product*) di tahun 1980 menjadi lebih dari 140 persen pada tahun 1995 (Simmons, 2001). Pasar modal dan hutang internasional telah mencapai situasi yang cukup mengejutkan dimana sejak akhir tahun 1997 tercatat jumlah portofolio untuk *equity* dan sekuritas hutang jangka panjang mencapai nominal 5,2 trilyun dollar Amerika. Arus modal masuk ke negara-negara berkembang tumbuh pesat dari 57 milyar dollar Amerika pada tahun 1990 menjadi diatas 286 milyar dollar Amerika di tahun 1997 sebelum krisis moneter melanda Asia Tenggara. Peredaran rata-rata harian transaksi valuta asing melesat dari angka 590 milyar dollar Amerika pada tahun 1989 menjadi 1,5 trilyun dollar Amerika pada tahun 1998. Pada tahun 1998 tercatat perdagangan transaksi derivatif dari 71 bank utama dan perusahaan sekuritas ternama di dunia, omsetnya mencapai 130 trilyun dollar Amerika. Bahkan arus modal internasional sejak tahun 2006 diperkirakan minimal mengalami peningkatan 1,4 trilyun dollar Amerika per tahunnya (Akisik & Pfeiffer, 2009).

UNCTAD dalam World Investment Report 2009 mencatat 50 perusahaan finansial terbesar di dunia berdasarkan jumlah afiliasi mereka di seluruh dunia. Apabila dilihat dari jumlah aset yang mereka miliki maka tabel berikut memuat daftar perusahaan finansial dunia yang memiliki aset diatas 1 trilyun dollar Amerika.

Tabel 3.4
Perusahaan Finansial Dunia
Beraset Diatas 1 Trilyun Dollar Amerika

Nama Perusahaan	Negara Asal	Nilai Aset (jutaan USD)	Jumlah Negara Afiliasi
Royal Bank of Scotland	Inggris Raya	3.511.187	32
Deutsche Bank AG	Jerman	3.150.820	36
Barclays PLC	Inggris Raya	3.001.433	41
BNP Paribas	Perancis	2.969.315	48
HSBC Holdings PLC	Inggris Raya	2.527.465	54
Credit Agricole SA	Perancis	2.365.122	39
Mitsubishi Financial	UFJ Jepang	2.200.818	19
JP Morgan Chase & Co.	Amerika Serikat	2.175.052	27
Citigroup Inc	Amerika Serikat	1.938.470	75
UBS AG	Swiss	1.926.209	35
ING Groep NV	Belanda	1.905.097	38
Mizuho Financial Group	Jepang	1.691.286	14
Societe Generale	Perancis	1.616.599	53
Banco Santander SA	Spanyol	1.501.619	30
Unicredito Italiano Spa	Italia	1.495.868	34
Allianz SE	Jerman	1.367.062	52
Credit Suisse Group AG	Swiss	1.118.881	31

Sumber: Diolah dari UNCTAD's World Investment Report 2009

Dari 50 perusahaan finansial terbesar di dunia berdasarkan jumlah afiliasi di seluruh dunia yang tercatat di World Investment Report 2009, 72 persen berasal dari Eropa, 22 persen dari Amerika Utara dan 6 persen berasal dari Jepang. Perusahaan finansial menjadi salah satu media investor atau perusahaan untuk melakukan *portfolio investment* atau mendapatkan pembiayaan. Daftar lengkap 50

Universitas Indonesia

perusahaan finansial terbesar dunia versi UNCTAD World Investment Report 2009 bisa dilihat di Lampiran 7.

Jumlah aset yang dimiliki perusahaan-perusahaan finansial terbesar di dunia tersebut ternyata jauh melebihi jumlah aset yang dimiliki perusahaan-perusahaan non finansial terbesar di dunia berdasarkan nilai asetnya di luar negeri yang juga dipublikasikan UNCTAD dalam World Investment Report 2009. Tabel dibawah memuat daftar 20 perusahaan non finansial terbesar di dunia berdasarkan jumlah total aset yang dimiliki.

Tabel 3.5
20 Perusahaan Non Finansial
Beraset Terbesar Di Dunia

Nama Perusahaan	Negara Asal	Industri	Jumlah Aset (jutaan USD)
General Electric	Amerika Serikat	electrical & electronic equipment	795.337
Deutsche Post AG	Jerman	transport & storage	346.630
Toyota Motor Corporation	Jepang	motor vehicles	284.722
Ford Motor Company	Amerika Serikat	motor vehicles	276.459
Electricite De France	Perancis	electricity, gas & water	274.031
Royal Dutch/Shell Group	Belanda/ Inggris Raya	petroleum xploration/ ref/distribution	269.470
Vodafone Group Plc	Inggris Raya	telecommunications	254.948
ExxonMobil	Amerika Serikat	petroleum xploration/ ref/distribution	242.082

Universitas Indonesia

British Petroleum Company	Inggris Raya	petroleum exploration/ ref/distribution	236.076
Volkswagen Group	Jerman	motor vehicles	213.981
EON AG	Jerman	electricity, gas & water	202.111
DaimlerChrysler AG	Jerman/ Amerika Serikat	motor vehicles	198.872
China National Petroleum Corporation	Cina	petroleum exploration/ ref/distribution	191.185
CITIC Group	Cina	diversified	180.945
ConocoPhillips	Amerika Serikat	petroleum exploration/ ref/distribution	177.757
Deutsche Telecom AG	Jerman	telecommunications	177.630
Total	Perancis	petroleum exploration/ ref/distribution	167.144
Wal-Mart Stores	Amerika Serikat	retail	163.514
Telefonica SA	Spanyol	telecommunications	155.856
Eni Group	Italia	petroleum exploration/ ref/distribution	149.360

Sumber: Diolah dari UNCTAD's World Investment Report 2009

Dari 100 perusahaan non finansial terbesar di dunia berdasarkan nilai asetnya di luar negeri yang tercatat di World Investment Report 2009, 70 persen berasal dari 5 (lima) negara yaitu Amerika Serikat, Inggris Raya, Perancis, Jerman dan Jepang dan 20 persen berasal dari negara-negara Eropa diluar 3 (tiga) negara yang telah disebutkan. Perusahaan non finansial merupakan lokomotif didesaknya

Universitas Indonesia

liberalisasi perdagangan di dunia sekaligus menjadi penggerak perekonomian di negara-negara berkembang. Daftar lengkap 50 perusahaan non finansial terbesar dunia versi UNCTAD World Investment Report 2009 bisa dilihat di Lampiran 8.

Dominasi negara-negara Amerika Utara dan Eropa juga terlihat dalam kegiatan investasi saham dunia. Berikut adalah tabel yang menggambarkan investasi saham keluar yang dilakukan negara-negara anggota OECD.

Tabel 3.6
Investasi Saham Keluar Terbesar
Tahun 2005

Negara Anggota OECD	Investasi Saham			
	Keluar		Masuk	
	Nilai (jutaan USD)	% total OECD	Nilai (jutaan USD)	% total OECD
Amerika Serikat	2.453.933	27,75	1.874.263	25,91
Inggris Raya	1.228.326	13,89	831.357	11,49
Perancis	882.287	9,98	627.931	8,68
Jerman	801.351	9,06	660.428	9,13
Belanda	629.941	7,12	447.121	6,18
Swiss	426.195	4,82	168.989	2,34
Kanada	394.681	4,46	350.030	4,84
Jepang	386.581	4,37	100.899	1,39
Spanyol	372.944	4,22	371.451	5,14
Italia	293.475	3,32	224.079	3,10
Negara G-7	6.440.634	72,83	4.668.987	64,55
Total OECD	8.843.821	100,00	7.233.187	100,00

Sumber: Diolah dari <http://www.oecd.org/daf/investment>

Dominasi Amerika Serikat, Inggris Raya, Perancis dan Jerman dalam daftar perusahaan multinasional besar versi World Investment Report 2009 yang dipublikasi UNCTAD juga terlihat dalam daftar negara yang terbanyak melakukan investasi saham keluar. Bukan suatu kebetulan apabila dari total investasi saham keluar yang dilakukan negara-negara anggota OECD, ternyata 80,13 persen diantaranya dilakukan oleh negara-negara pendiri IASC dengan nilai

Universitas Indonesia

total diatas 7,08 trilyun dollar Amerika. Daftar lengkap investasi saham keluar pada tahun 2005 oleh negara-negara OECD bisa dilihat di Lampiran 9.

Tabel 3.7
Investasi Fisik Keluar Terbesar
Tahun 2006

Negara Anggota OECD	Investasi Fisik			
	Keluar		Masuk	
	Nilai (jutaan USD)	% total OECD	Nilai (jutaan USD)	% total OECD
Amerika Serikat	248.856	22,05	183.571	19,36
Perancis	115.101	10,20	139.566	14,72
Spainyol	89.728	7,95	20.027	2,11
Luksemburg	81.552	7,23	97.013	10,23
Swiss	81.547	7,23	25.101	2,65
Inggris Raya	79.470	7,04	139.566	14,72
Jerman	79.466	7,04	42.891	4,52
Belgia	62.587	5,55	71.519	7,54
Jepang	50.244	4,45	(6.503)	(0,69)
Kanada	42.134	3,73	66.605	7,02
Negara G-7	657.331	58,26	582.283	61,41
Negara Uni Eropa	638.901	56,62	537.482	56,68
Total OECD	1.128.349	100,00	948.191	100

Sumber: Diolah dari <http://www.oecd.org/daf/investment>

Dari total investasi fisik (FDI) keluar yang dilakukan negara-negara anggota OECD, 60,87 persen diantaranya dilakukan oleh negara-negara pendiri IASC dengan nilai total diatas 686,8 milyar dollar Amerika. Daftar lengkap investasi fisik keluar pada tahun 2006 oleh negara-negara OECD dapat dilihat di Lampiran 10.

Seiring perkembangan globalisasi finansial, terjadi pergeseran tren investasi luar negeri dari *direct investments* ke *portfolio investments*. Di Amerika Serikat sebagai negara *superpower* ekonomi, dari total investasi luar negeri yang

Universitas Indonesia

dilakukan pada tahun 2005, 68 persen dilakukan dalam bentuk investasi portofolio dan 32 persen dilakukan dalam bentuk investasi langsung (Akisik & Pfeiffer, 2009). Investasi portofolio terbagi dalam *equity securities* dan *debt/bonds securities*. Menurut Evans (2002), *portfolio investments* mempunyai beberapa kelebihan dibanding *direct investments*. Pertama, *portfolio investments* diharapkan mampu meningkatkan likuiditas dan efisiensi pasar modal di sebuah negara yang dapat memudahkan sebuah perusahaan mendapatkan dana pinjaman untuk membiayai investasi mereka pada *lower cost*. Likuiditas dan efisiensi pasar modal akan menguntungkan investor atau *lenders* untuk memperluas kesempatan investasi mereka. Kedua, *portfolio investments* memacu disiplin dan pengetahuan dalam pasar modal dan meningkatkan tingkat akuntansi dalam penyajian dan transparansi informasi keuangan. Ketiga, *portfolio investments* memacu perbaikan dalam *corporate governance* yang dapat meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangan bagi investor.

Berdasarkan penelitian Akisik dan Pfeiffer (2009) negara-negara maju menjadi tujuan dan pilihan utama *portfolio investments* karena tingginya tingkat efisiensi pasar modal dan transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan. Sedangkan negara-negara berkembang menjadi tujuan dan pilihan utama *foreign direct investment* karena tingginya tingkat *assymmetric information* apabila melakukan investasi portofolio dan rendahnya tingkat efisiensi pasar modal dan transparansi laporan keuangan serta ketidakpercayaan terhadap *corporate governance* di negara berkembang.

Makin terintegrasinya pasar finansial tersebut diiringi dengan adanya peningkatan dalam jumlah perusahaan yang terdaftar pada berbagai bursa efek di dunia. Amerika Serikat, Kanada, India, Jepang dan Inggris Raya adalah negara-negara yang memiliki bursa efek dengan jumlah perusahaan terdaftar terbesar. Sedangkan NASDAQ, New York Stock Exchange, London Stock Exchange, Euronext dan Luxembourg Stock Exchange adalah nama-nama bursa efek yang paling banyak menarik perusahaan-perusahaan asing untuk *listing* disana. Daftar lengkap yang memuat jumlah perusahaan terdaftar di bursa efek dunia pada tahun 2005 dapat dilihat di Lampiran 11.

Selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun, kapitalisasi pasar modal dunia telah bertambah lebih dari dua kali lipat hingga mendekati angka sekitar 40 trilyun dollar Amerika (Choi dan Meek, 2005). Wilayah Amerika meningkat dari 11,931 trilyun dollar Amerika pada tahun 2002 menjadi 19,458 trilyun dollar Amerika pada tahun 2005. Wilayah Eropa-Afrika-Timur Tengah meningkat dari 6,465 trilyun dollar Amerika menjadi 12,206 trilyun dollar Amerika. Sedangkan wilayah Asia melonjak dari 4,437 trilyun dollar Amerika menjadi 9,310 trilyun dollar Amerika. World Federation of Exchanges melaporkan bahwa meskipun jumlah perusahaan domestik yang terdaftar di beberapa tempat meningkat dan di tempat lain justru menurun dalam paruh pertama dekade ini, tetapi rata-rata volume perdagangan tahunan dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar telah melonjak secara signifikan. Hal ini disebabkan adanya merger dan akuisisi yang telah merampingkan beberapa perusahaan yang terdaftar di bursa.

Perilaku investor yang semula hanya berinvestasi di negaranya masing-masing mulai berubah. Keinginan para investor untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari berbagai peluang investasi membuat mereka memburu investasi paling menarik di berbagai bursa dunia. Sedangkan perusahaan yang mengeluarkan sekuritas terus melakukan *listing* lintas negara untuk memperluas pemegang saham, meningkatkan kesadaran terhadap produk sekuritas mereka dan membangun kesadaran masyarakat terhadap perusahaan itu sendiri, khususnya negara-negara dimana perusahaan memiliki operasi yang signifikan atau pelanggan utama.

Aktivitas investasi lintas batas dan pasar modal dunia yang berkembang semakin cepat memberi arti bahwa akuntansi menjadi semakin penting dari masa sebelumnya bagi semua pihak yang berhubungan dengan aktivitas investasi dan pasar modal. Akuntansi memainkan peranan penting dalam berfungsinya pasar modal yang efisien. Para kreditor, investor, analisis keuangan, regulator dan bursa efek memerlukan informasi mengenai kinerja keuangan, posisi keuangan dan prospek masa depan dari suatu perusahaan yang mencari pendanaan. Aktivitas global ini mempengaruhi pilihan akuntansi dan pengungkapan yang dilakukan perusahaan nasional atau internasional untuk melakukan harmonisasi pengukuran akuntansi, pengungkapan dan praktik audit di seluruh dunia. Hal ini menjadi

Universitas Indonesia

pertimbangan dari IOSCO sebagai badan dari regulator pasar modal yang ada di lebih dari 100 negara untuk mendukung harmonisasi dan kemudian konvergensi IFRSs di dunia sejak bulan Juli 1995. Selain masuk menjadi anggota Monitoring Board IASCF, IOSCO membentuk komite teknis yang bekerja sama dengan IASB untuk memberi masukan terhadap proyek-proyek IASB. Komite teknis ini memusatkan perhatian pada pengungkapan dan akuntansi internasional untuk memfasilitasi proses yang dapat digunakan para penerbit saham dunia untuk memperoleh modal dengan cara yang paling efektif dan efisien pada seluruh pasar modal dimana terdapat permintaan investor.

Sementara itu arus perdagangan di dunia semakin meningkat seiring dengan banyak dibentuknya organisasi kerjasama ekonomi yang bersifat regional di berbagai belahan dunia untuk mengurangi berbagai hambatan perdagangan. Peningkatan ini diikuti dengan perilaku semakin teregionalisasinya negara yang menjadi tujuan ekspor ataupun asal impor. Indonesia misalnya, dari data UNCTAD Handbook Statistic 2008 mengalami pergeseran orientasi perdagangan. Pada tahun 2006, wilayah Asia Selatan, Asia Timur (diluar Jepang) dan Asia Tenggara telah mendapatkan porsi 45,2 persen (tahun 1990 sebesar 25,4 persen) dari total nilai ekspor dan 63,9 persen (tahun 1990 sebesar 27,1 persen) dari total nilai impor Indonesia. Kondisi ini menggantikan posisi Amerika Serikat, Eropa Barat dan Jepang yang sangat dominan di tahun 1990 dengan porsi 68,1 persen (tahun 2006 menjadi 43,3 persen) dari total nilai ekspor dan 58,3 persen (tahun 2006 menjadi 20,4 persen) dari total nilai impor Indonesia. Perdagangan minyak bumi, otomotif, telekomunikasi dan komputer mendominasi nilai perdagangan dunia pada tahun 2006. Kecuali minyak bumi, semua komoditi utama perdagangan dunia tersebut didominasi oleh negara-negara maju di dunia. Berikut adalah tabel yang memuat daftar negara-negara OECD yang mempunyai nilai ekspor terbesar di dunia pada tahun 2006.

Tabel 3.8
Negara Pengekspor Barang Terbesar Di Dunia
Tahun 2006

Negara Anggota OECD	Perdagangan Barang-barang			
	Ekspor		Impor	
	Nilai (milyaran USD)	% total OECD	Nilai (milyaran USD)	% total OECD
Jerman	1.125,8	15,00	919,0	10,96
Amerika Serikat	1.037,0	13,82	1.919,0	22,90
Jepang	646,7	8,62	579,1	6,91
Perancis	479,0	6,38	529,9	6,32
Inggris Raya	444,4	5,92	606,4	7,23
Italia	400,6	5,34	405,7	4,84
Kanada	388,0	5,17	349,9	4,17
Belanda	370,3	4,93	331,5	3,96
Belgia	369,2	4,92	353,7	4,22
Korea Selatan	325,5	4,34	309,4	3,69
Negara G-7	4.521,5	60,24	5.309,0	63,34
Negara Uni Eropa	4.033,9	53,74	4.120,2	49,16
Total OECD	7.505,9	100	8.381,7	100

Sumber: Diolah dari <http://www.oecd.org/daf/investment>

Dari total perdagangan ekspor barang yang dilakukan negara-negara anggota OECD, 66,26 persen diantaranya dilakukan oleh negara-negara pendiri IASC dengan nilai total diatas 4,97 trilyun dollar Amerika. Daftar lengkap perdagangan ekspor barang pada tahun 2006 oleh negara-negara OECD dapat dilihat di Lampiran 12.

Dari uraian diatas terlihat bahwa liberalisasi perdagangan dan finansial menciptakan saling ketergantungan ekonomis yang terus berkembang diantara negara-negara di dunia dengan ciri pertumbuhan transaksi keuangan dan perdagangan internasional yang cepat terutama di antara perusahaan-perusahaan multinasional, gelombang investasi asing (baik *direct investment* maupun *portfolio investment*) yang mendapat dukungan luas dan timbulnya pasar

Universitas Indonesia

global yang semakin meningkatkan arus barang, orang, jasa, dan permodalan (investasi) antarnegara menjadi berlipat ganda. Secara inheren, perubahan lingkungan ekonomi dunia ini menghasilkan kebutuhan akan kemudahan sumber dana atau tempat berinvestasi sebagai cara untuk terus mempertahankan kelangsungan hidup usahanya.

Untuk mempertahankan keberadaannya di ekonomi global tersebut, perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan multinasional dan perusahaan di negara-negara maju, membutuhkan adanya pasar modal, dimana di tempat ini para investor dan peminjam di seluruh dunia dapat melakukan transaksi keuangan yang didasari hasil analisis fundamental terhadap laporan keuangan. Kebutuhan standar akuntansi global muncul di situasi ini saat transaksi lewat batas negara tumbuh meledak saat jumlah perusahaan yang mencari modal dan investor yang ingin mendapatkan *financial return* di pasar global terus bertambah. Investor, analisis keuangan, pembuat peraturan dan pasar modal, semuanya membutuhkan informasi akuntansi tentang kinerja keuangan, posisi dan prospek masa depan perusahaan yang mencari pembiayaan. Kebutuhan ini menjadi pendorong pengembangan praktek akuntansi yang berujung pada standar akuntansi global yang tunggal (IFRSs). Kebutuhan itu pula yang membuat beberapa organisasi internasional seperti OECD, APEC, WTO, IMF dan World Bank mendukung harmonisasi standar akuntansi dan pelaporan keuangan dan berharap IFRSs dapat berperan dalam membangun stabilitas aliran modal internasional.

3.2.2 Politik dan Hukum

Tidak bisa dipungkiri Uni Eropa adalah lokomotif utama konvergensi IFRSs di dunia. *Regulation 1606/2002* yang dikeluarkan parlemen Uni Eropa dan European Council menjadi tonggak pengadopsian IFRSs di negara-negara anggota Uni Eropa mulai tahun 2005. European Council adalah lembaga tertinggi Uni Eropa yang memberikan arah politik dan ekonomi negara-negara Uni Eropa. Langkah Uni Eropa ini bisa dimengerti karena saat didirikan pada tahun 1957 melalui Traktat Roma, tujuannya adalah untuk mengharmonisasikan sistem hukum dan ekonomi negara-negara anggotanya. Program IASB untuk mewujudkan standar akuntansi global yang tunggal dan berkualitas tinggi sejalan

Universitas Indonesia

dengan tujuan Uni Eropa yang juga ingin mencapai integrasi pasar keuangan Eropa. Apalagi Eropa adalah wilayah pasar ekuitas terbesar di dunia dalam hal kapitalisasi pasar dan volume perdagangan (Choi dan Meek, 2005). Privatisasi yang dilakukan terhadap banyak perusahaan besar milik pemerintah telah membuat pasar ekuitas Eropa menjadi lebih penting dan menarik investor non-institusional.

European Union *directives* menjadi sumber hukum yang mengikat bagi negara-negara anggota Uni Eropa sehingga diwajibkan untuk digabungkan ke dalam hukum nasional masing-masing negara anggota. Uni Eropa telah mengeluarkan program harmonisasi hukum perusahaan yang mencakup seluruh aspek hukum perusahaan dan memiliki pengaruh langsung terhadap akuntansi. 4th *directive* dan 7th *directive* adalah *directives* yang memiliki substantif paling penting bagi akuntansi karena membawa penyeragaman pelaporan keuangan di seluruh negara Uni Eropa sekaligus mempengaruhi praktik akuntansi di negara-negara Eropa yang bukan anggota Uni Eropa. 4th *directive* dikeluarkan tahun 1978 merupakan satu set peraturan akuntansi yang luas dan komprehensif dalam kerangka dasar Uni Eropa. Ketentuan ini berlaku bagi akun masing-masing perusahaan dan mencakup aturan bentuk laporan keuangan, ketentuan pengungkapan dan aturan penilaian. 4th *directive* mewajibkan laporan keuangan diaudit dengan tujuan untuk memastikan perusahaan-perusahaan Eropa mengungkap informasi yang dapat dibandingkan dan setara dalam laporan keuangannya. 7th *directive* dikeluarkan tahun 1983 merupakan peraturan yang membahas permasalahan laporan keuangan konsolidasi. 7th *directive* mewajibkan konsolidasi bagi kelompok usaha yang besarnya di atas ukuran tertentu, menentukan pengungkapan dalam catatan dan laporan keuangan dan mewajibkan dilakukannya audit. Saat dikeluarkan, praktik laporan konsolidasi di berbagai negara Eropa sangat beragam.

Tahun 1995 Uni Eropa mengadopsi pendekatan "*New Accounting Strategy*" untuk membantu perusahaan-perusahaan negara Uni Eropa yang sedang berupaya melakukan pencatatan di Amerika Serikat dan pasar modal lainnya di dunia agar tetap bertahan dalam kerangka dasar akuntansi Uni Eropa. Selain itu strategi ini menekankan agar Uni Eropa memprekuat komitmennya terhadap

Universitas Indonesia

proses penentuan standar internasional yang menawarkan solusi paling efisien dan cepat untuk masalah-masalah yang dihadapi perusahaan-perusahaan negara Uni Eropa yang beroperasi dalam skala internasional.

Tahun 2000, diajukan proposal aturan kepada parlemen Uni Eropa dan *European Council* dimana seluruh perusahaan Uni Eropa yang tercatat dalam pasar modal termasuk bank dan perusahaan asuransi akan diwajibkan menyusun laporan keuangan konsolidasi berdasarkan standar akuntansi yang dikeluarkan IASC yaitu IASs. Proposal ini dirancang untuk mendorong perdagangan lintas batas dalam jasa keuangan dan dengan demikian menciptakan pasar yang benar-benar terintegrasi, dengan membantu pembuatan informasi keuangan yang lebih transparan dan dapat dibandingkan dengan mudah. Proposal ini sebagaimana telah disebutkan di atas akhirnya disetujui dengan dikeluarkannya *Regulation 1606/2002*.

Agar dapat mengikat secara hukum, IFRSs/IASs harus diadopsi oleh Uni Eropa melalui mekanisme pemeriksaan dan pengesahan. Akhirnya lahir 3 (tiga) lembaga yang menentukan pemberlakuan IFRSs yang dikeluarkan IASB di Uni Eropa. Lembaga-lembaga tersebut yaitu EFRAG, SARG dan ARC. EFRAG merepresentasikan sektor swasta yang didanai oleh kelompok-kelompok bisnis, akuntan dan auditor, bank dan kelompok lain yang berkepentingan terhadap penyajian laporan keuangan. EFRAG memiliki TEG yang langsung mereview dan memberikan saran kepada SARG setiap IASB mengeluarkan standar baru. SARG merepresentasikan kepentingan *European Commission* (lembaga eksekutif Uni Eropa) yang terdiri dari ahli-ahli akuntan independen yang dipilih oleh komisi. Kelompok ini menilai saran dari TEG dan kemudian menyerahkan hasil penilaian tersebut kepada komisi. ARC merepresentasikan pemerintahan negara-negara anggota Uni Eropa yang berhak merekomendasikan adopsi atau penolakan terhadap pemberlakuan standar baru yang sudah dinilai oleh SARG. Rekomendasi untuk adopsi diserahkan ARC ke parlemen Uni Eropa dan *European Council* untuk dilakukan penilaian akhir atau keputusan final pemberlakuan standar baru di Uni Eropa. Pengesahan IFRSs/IASs oleh Uni Eropa dimulai pada tahun 2003 melalui adopsi seluruh standar dan interpretasi yang dianggap berlaku oleh IASB, kecuali IAS 32 dan IAS 39 yang direvisi. *4th directive* dan *7th directive*

Universitas Indonesia

diamandemen pada tahun 2003 untuk menghapus ketidakkonsistenan antara *directive* lama dengan IFRSs/IASs.

Selain Uni Eropa, kekuatan politik lain yang menjadi pendorong konvergensi IFRSs di dunia adalah kelompok negara-negara yang tergabung dalam G-20. Kelompok kerjasama ini terdiri dari negara-negara maju yaitu: Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Inggris Raya, Jerman, Perancis, Italia, Australia, Jepang dan negara-negara berkembang yang mewakili regional yaitu: Rusia (Eropa Timur), Meksiko (Amerika Tengah), Argentina, Brasil (Amerika Selatan), Cina, India, Indonesia (Asia Pasifik), Arab Saudi (Timur Tengah) dan Afrika Selatan (Afrika). Jika dilihat dari nilai GNP (*gross national product*), kekuatan ekonomi negara-negara G-20 adalah 85 persen dari total GNP dunia. G-20 dibentuk sebagai media kerjasama dan konsultasi yang berkaitan dengan sistem finansial internasional yang bertujuan untuk menjaga kestabilan keuangan internasional. Selain sebagai media pertemuan para pemimpin negara-negara G-20, forum ini juga mempertemukan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara anggota.

Krisis finansial global yang bermula dari krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat pada akhir tahun 2007 menimbulkan keprihatinan bagi G-20 dan menjadi agenda utama dalam pertemuan pertama mereka yang diadakan di Washington DC, Amerika Serikat pada bulan Nopember 2008. Dalam pertemuan ini Uni Eropa membawa misi transparansi laporan keuangan, standar regulasi global, pengawasan praktik lintas batas dan manajemen krisis untuk menghindari konflik kepentingan dan menciptakan *early warning system*, untuk menumbuhkan kepercayaan diantara para penabung dan investor di setiap negara. Usulan Inggris Raya hampir sama dengan Uni Eropa yaitu berupaya untuk meningkatkan transparansi dalam standar akuntansi yang disetujui dan diakui secara internasional.

Pertemuan ini akhirnya menghasilkan *Declaration of Summit on Financial Markets and the World Economy* yang diantaranya berkomitmen untuk mendorong peningkatan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan termasuk pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Komitmen ini diimplementasikan dengan dikeluarkannya *Action Plan to Implement Principles*

Universitas Indonesia

for Reform (rencana kegiatan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip reformasi pasar keuangan) yang muatannya hampir 50 persen terkait dengan isu-isu akuntansi dan auditing. Dalam rencana kegiatan ini negara-negara G-20 bersepakat untuk mematuhi ketentuan Financial Sector Assessment Program (FSAP) yang merupakan *joint program* IMF dan World Bank untuk menilai stabilitas dan pengembangan sistem keuangan suatu negara dengan fokus pada kepatuhan terhadap peraturan serta mendorong tercapainya stabilitas ekonomi makro dan stabilitas sistem keuangan domestik dan internasional. Selain itu G-20 meminta badan-badan utama penyusun standar akuntansi untuk meningkatkan kerjasamanya dalam menciptakan seperangkat standar akuntansi global berkualitas tinggi sekaligus meminta regulator, pengawas, badan penyusun standar di masing-masing negara untuk saling bekerjasama dengan sektor swasta untuk memastikan penggunaan standar akuntansi global berkualitas tinggi tersebut (IFRSs). Meskipun tidak diikat secara hukum tetapi kesepakatan ini direspon oleh negara-negara anggota G-20 dalam berbagai variasi.

Tabel 3.9
Status IFRSs Negara-negara G-20

Negara	Status IFRSs untuk Perusahaan Berakuntabilitas Publik
Amerika Serikat	Dijijinkan untuk <i>foreign issuer</i> sejak 2007; target untuk konvergen substansial dengan IFRSs adalah tahun 2011 dan keputusan mengenai keputusan adopsi untuk perusahaan Amerika diharapkan terjadi di tahun 2011
Kanada	Diwajibkan untuk semua perusahaan berakuntabilitas publik mulai Januari 2011 dan diijinkan untuk entitas sektor swasta termasuk organisasi nirlaba
Uni Eropa	Diwajibkan untuk menggunakan IFRSs yang diadopsi Uni Eropa bagi perusahaan berakuntabilitas publik yang terdaftar di negara-negara anggota Uni Eropa sejak 2005
Inggris Raya	Diwajibkan oleh proses adopsi dan implementasi Uni Eropa sejak 2005
Jerman	Diwajibkan oleh proses adopsi dan implementasi Uni Eropa

Universitas Indonesia

	sejak 2005
Perancis	Diwajibkan oleh proses adopsi dan implementasi Uni Eropa sejak 2005
Italia	Diwajibkan oleh proses adopsi dan implementasi Uni Eropa sejak 2005
Australia	Diwajibkan untuk semua pelaporan entitas sektor swasta dan sebagai dasar untuk pelaporan sektor publik sejak 2005
Jepang	Diijinkan mulai 2010 untuk beberapa perusahaan internasional, keputusan untuk mewajibkan adopsi IFRSs pada tahun 2016 diharapkan terjadi sekitar tahun 2012
Rusia	Diwajibkan untuk institusi perbankan dan beberapa <i>securities issuer</i> , diijinkan untuk perusahaan lainnya
Meksiko	Diwajibkan mulai 2012
Argentina	Diwajibkan untuk tahun fiskal yang dimulai per tanggal 1 Januari 2012
Brasil	Diwajibkan untuk laporan keuangan konsolidasi bank dan perusahaan berakuntabilitas publik mulai 31 Desember 2010 dan untuk laporan individu perusahaan secara progresif diterapkan sejak Januari 2008
Cina	Secara substansial standar nasionalnya konvergen dengan IFRSs
India	Proses konvergensi IFRSs akan dimulai per tanggal 1 April 2011
Indonesia	Proses konvergensi IFRSs sedang berlangsung dan ditargetkan akan berstatus <i>full compliance</i> pada tahun 2012
Arab Saudi	Baru diwajibkan untuk dan perusahaan asuransi yang terdaftar di bursa efek Saudi
Afrika Selatan	Diwajibkan untuk perusahaan berakuntabilitas publik sejak 2005

Sumber: diolah dari berbagai sumber

3.2.3 Lembaga Profesi Akuntan

Lembaga profesi akuntan memiliki peranan penting karena lembaga ini, seperti ICAEW di Inggris Raya dan AICPA di Amerika Serikat, jauh lebih dahulu hadir dibandingkan badan penyusun standar independen dan bahkan di banyak negara, penyusun standar akuntansi merupakan bagian dari lembaga profesi akuntan seperti Indonesia dimana DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) merupakan bagian dari IAI. Pengembangan prinsip dan standar akuntansi di dunia berawal dari interaksi lembaga-lembaga profesi akuntan terutama sejak diadakannya 1st WCA pada tahun 1904 di St. Louis, Amerika Serikat yang diikuti oleh beberapa organisasi akuntan dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Dari lembaga-lembaga profesi akuntan ini kemudian dilahirkan 2 (dua) badan penyusun standar akuntansi paling berpengaruh di dunia saat ini yaitu IASB dan FASB.

WCA, terakhir pada tahun 2010 diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia, menjadi embrio pembentukan IFAC sebagai organisasi profesi akuntan tingkat dunia. Saat ini, IFAC memiliki 159 organisasi anggota yang berasal dari 124 negara atau yurisdiksi yang merepresentasikan kurang lebih 2,5 juta akuntan di seluruh dunia yang bekerja di berbagai sektor, termasuk IAI dari Indonesia. Organisasi ini sebenarnya sudah berdiri pada tahun 1967 dengan nama the International Working Party yang kemudian berubah menjadi ICCAP pada tahun 1972 dan terakhir menjadi IFAC pada tahun 1977. Saat berubah nama menjadi IFAC, organisasi ini mempublikasikan tujuannya untuk mendukung perkembangan profesi akuntan dengan harmonisasi standar sehingga akuntan dapat memberikan jasa berkualitas tinggi secara konsisten demi kepentingan umum.

IFAC merupakan pendukung utama IFRSs yang dikeluarkan IASB dan masuk dalam struktur IFRSs Advisory Council. Dukungan ini diimplementasikan dalam *Statement of Membership Obligation* 7 IFRSs yang dikeluarkan pada tahun 2004 dan diterapkan untuk semua anggota IFAC. *Statement* tersebut mewajibkan kepada seluruh anggota IFAC untuk mendukung proyek IFRSs dari IASB termasuk melakukan konvergensi standar akuntansi nasional kepada IFRSs. Kewajiban ini tak pelak memaksa organisasi akuntan nasional di seluruh dunia

Universitas Indonesia

untuk mulai merencanakan adopsi IFRSs ke dalam standar akuntansi nasional mereka dan tentunya termasuk IAI di Indonesia. Tapi terlepas dari itu semua, IFAC sebenarnya menjadi organisasi paling berpengaruh dalam penyusunan standar akuntansi global dan memainkan peranan penting dalam proses konvergensi antara IASB dan FASB karena para akuntan yang menjadi anggota dalam IASB atau FASB, baik sebagai penyusun standar, interpretasi maupun penasehat, praktis adalah anggota IFAC sebagai satu-satunya organisasi tingkat dunia yang diakui untuk profesi akuntan.

3.3 Konvergensi IFRs Di Dunia, Kendala dan Manfaatnya

Standar dan praktik akuntansi di setiap negara merupakan hasil dari interaksi yang kompleks di antara banyak faktor yaitu sumber pendanaan, sistem hukum, perpajakan, sistem politik dan ekonomi, inflasi, tingkat perkembangan ekonomi, tingkat pendidikan dan budaya. Dapat diduga akan terjadinya banyak perbedaan praktik akuntansi antar negara. Faktor-faktor tersebut selain menjadi pendukung perkembangan akuntansi di suatu negara juga menjadi kendala yang menghambat penerapan IFRSs sebagai standar akuntansi dan pelaporan keuangan di dunia hingga saat ini.

Dalam sumber pendanaan, negara-negara dengan pasar modal kuat fokus untuk membantu analisis investor sehingga pengungkapan harus dilakukan lengkap. Sedangkan negara-negara dengan sistem berbasis kredit fokus pada perlindungan kreditor melalui pengukuran akuntansi yang konservatif. Dari sistem hukum, di negara-negara berorientasi *common law*, aturan akuntansi diterapkan oleh organisasi profesional sektor swasta yang memungkinkan aturan akuntansi menjadi lebih adaptif dan inovatif. Sebaliknya di negara-negara berorientasi *code law*, aturan akuntansi cenderung terpaku pada bentuk formal dan aturan-aturan tersebut digabung dalam hukum nasional dan cenderung sangat lengkap dan meliputi banyak prosedur. Tingkat perkembangan ekonomi dan tingkat pendidikan mempengaruhi jenis transaksi dan kemampuan untuk memahami standar akuntansi. Transaksi yang terjadi di negara maju belum tentu juga terjadi di negara berkembang. Suatu standar akuntansi yang mudah dipahami di negara maju belum tentu akan dipahami di negara terbelakang.

Universitas Indonesia

Sebagai wilayah pertama yang memutuskan mengadopsi IFRSs, proses tersebut mengalami beberapa kendala dalam prakteknya di negara-negara Uni Eropa karena adanya beberapa perbedaan dengan standar akuntansi yang digunakan sebelumnya. Berikut adalah beberapa kendala pengadopsian IFRSs yang dihadapi oleh 4 (empat) negara anggota Uni Eropa yaitu: Belanda sebagai negara yang standar akuntansinya independen terhadap pajak, Inggris Raya sebagai negara pengguna sistem keuangan, perpajakan dan hukum *Anglo-Saxon* yang menjadi dasar pengembangan IFRSs, Jerman sebagai negara yang standar akuntansinya *tax-based* dan Republik Ceko sebagai perwakilan negara Eropa Timur.

Di Belanda, terdapat kesulitan penerapan IFRSs dalam hal:

- a. Menyesuaikan format penyajian laporan keuangan yang sebelumnya meliputi: neraca, laporan laba, catatan, laporan direktur dan informasi lain yang dianggap perlu;
- b. *Goodwill* yang timbul dari akuisisi, dimana menurut IFRSs harus dikapitalisasi dan diuji *impairment* sedangkan praktek sebelumnya harus dikapitalisasi dan diamortisasi;
- c. Penilaian persediaan, dimana IFRSs melarang penggunaan metode LIFO yang sebelumnya diizinkan;
- d. Pencadangan untuk *income smoothing* tidak diperbolehkan di IFRSs sedangkan praktek di Belanda sebelumnya diperkenankan.

Sedangkan Inggris Raya sebagai negara tempat IASB bermarkas juga mengalami kesulitan penerapan IFRSs dalam hal:

- a. Menyesuaikan format penyajian laporan keuangan yang sebelumnya meliputi: laporan direktur, akun laba dan rugi dan neraca, laporan arus kas, laporan total keuntungan dan kerugian yang diakui, catatan yang direferensikan dalam laporan keuangan dan laporan auditor;
- b. *Goodwill* yang timbul dari akuisisi, dimana menurut IFRSs harus dikapitalisasi dan diuji *impairment* sedangkan praktek sebelumnya harus dikapitalisasi dan diamortisasi;

- c. Pencadangan untuk *income smoothing* tidak diperbolehkan di IFRSs sedangkan praktek di Inggris Raya sebelumnya diperkenankan.

Kemudian Jerman sebagai salah satu negara pendiri IASC memiliki kendala pengadopsian IFRSs dalam hal:

- a. Menyesuaikan format penyajian laporan keuangan yang sebelumnya meliputi: neraca, laporan penghasilan, catatan, laporan manajemen dan laporan auditor;
- b. *Goodwill* yang timbul dari akuisisi, dimana menurut IFRSs harus dikapitalisasi dan diuji *impairment* sedangkan praktek sebelumnya harus dikapitalisasi dan diamortisasi;
- c. Penilaian aset di IFRSs menggunakan biaya historis dan nilai wajar sedangkan sebelumnya Jerman hanya memperkenankan biaya historis;
- d. Penyusutan aset tetap di IFRSs berdasarkan manfaat ekonomik yang berbeda dengan praktek sebelumnya yang bersifat *tax based*;
- e. Penilaian persediaan, dimana IFRSs melarang penggunaan metode LIFO yang sebelumnya diizinkan;
- f. *Financial lease* dalam praktek sebelumnya tidak dikapitalisasi sedangkan IFRSs mengharuskan dikapitalisasi;
- g. *Deffered tax* menurut IFRSs harus diakrualkan sedangkan praktek pajak tangguhan sebelumnya di Jerman tidak diakrualkan;
- h. Pencadangan untuk *income smoothing* tidak diperbolehkan di IFRS sedangkan praktek di Jerman sebelumnya diperkenankan.

Republik Ceko sebagai anggota Uni Eropa dari Eropa Timur memiliki beberapa kendala pengadopsian IFRSs dalam hal:

- a. Menyesuaikan format penyajian laporan keuangan yang sebelumnya meliputi: neraca, perhitungan laba dan rugi dan catatan;
- b. *Goodwill* yang timbul dari akuisisi, dimana menurut IFRSs harus dikapitalisasi dan diuji *impairment* sedangkan praktek sebelumnya harus dikapitalisasi dan diamortisasi;
- c. Penilaian aset di IFRSs menggunakan biaya historis dan nilai wajar sedangkan sebelumnya Ceko hanya memperkenankan biaya historis;

Universitas Indonesia

- d. *Financial lease* dalam praktek sebelumnya tidak dikapitalisasi sedangkan IFRSs mengharuskan dikapitalisasi;
- e. Pencadangan untuk *income smoothing* tidak diperbolehkan di IFRSs sedangkan praktek di Ceko sebelumnya diperkenankan.

Penelitian yang dilakukan oleh Daske, Hail, Leuz dan Verdi (2007), Daske (2009), Stenka dan Ormrod (2007) dan Paglietti (2009) menghasilkan kesimpulan bahwa pengadopsian IFRSs di Uni Eropa berhasil meningkatkan nilai perdagangan barang dan investasi asing di negara-negara Uni Eropa. Sebaliknya hasil penelitian Farcoque, Yarram dan Khandaker (2009) justru menyimpulkan pengadopsian IFRSs tidak meningkatkan FDI tetapi hanya memperbaiki tata kelola perusahaan di negara-negara yang mengadopsi IFRSs. Apabila memperhatikan data ekspor dan FDI dari negara-negara yang mengadopsi penuh IFRSs tanpa modifikasi, maka untuk ekspor dari tahun 1999 hingga 2007 mengalami peningkatan tetapi sebaliknya nilai FDI justru merosot drastis dalam periode tersebut. Negara-negara di wilayah Skandinavia dan Inggris Raya juga mengalami hal yang sama. Analisis penelitian menyatakan transparansi dari laporan keuangan berbasis IFRSs mengakibatkan investor-investor tertentu memindahkan investasinya dalam bentuk investasi portofolio.

Pada tahun 2008, CFO Research Services (divisi grup media The Economist) bekerja sama dengan ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) mempublikasikan hasil riset terhadap 126 perusahaan dari berbagai negara Eropa mengenai keputusan Uni Eropa untuk mengadopsi IFRSs. 65 persen perusahaan berstatus perusahaan multinasional dan 63 persen merupakan perusahaan *go public*. 95 persen perusahaan memutuskan untuk mengadopsi IFRSs dan 78 persen responden menyatakan IFRSs sangat atau akan bermanfaat bagi perusahaan mereka. Terdapat 4 (empat) manfaat utama pengadopsian IFRSs menurut responden yang berasal dari para eksekutif perusahaan-perusahaan Eropa tersebut, yaitu:

- a. Meningkatkan kredibilitas dan daya banding laporan keuangan;
- b. Memudahkan perusahaan untuk beroperasi secara global;

- c. Meningkatkan konsistensi koordinasi diantara pembuat kebijakan, otoritas pasar modal dan para pemodal;
- d. Memudahkan perusahaan mendapatkan kredit bank dan dana dari pasar modal dengan biaya rendah.

Sebaliknya terdapat beberapa *critical issue* yang mengemuka selain manfaat yang diperoleh perusahaan dari penerapan IFRSs. Terdapat 4 (empat) *critical issue* yang paling sering disebut responden dan harus diperhatikan penyusun standar akuntansi global yaitu:

- a. Transisi dari pendekatan *rules-based* ke *principal-based*;
- b. Penyajian laporan keuangan, termasuk dalam hal perencanaan analisis dan peramalan kondisi keuangan (sistem pengukuran kinerja baru);
- c. Penilaian nilai wajar;
- d. Konsolidasi posisi keuangan entitas.

Selain di wilayah Eropa, CFO Research Services juga melakukan riset di wilayah lain yang sebagian besar masih melakukan proses konvergensi IFRSs yaitu Amerika Serikat, Asia Pasifik dan India. Di wilayah-wilayah tersebut, sebagian negaranya sedang melakukan proses konvergensi IFRSs, termasuk Indonesia. Berbeda dengan Eropa, selain 3 (tiga) isu kritis pertama, di 3 (tiga) wilayah lainnya tersebut faktor keunikan kondisi dan sensitifitas budaya dari masing-masing negara justru lebih menjadi *critical issue* bagi responden dalam proses konvergensi IFRSs dibanding konsolidasi posisi keuangan entitas di wilayah Eropa.

Sedangkan mengenai manfaat yang diperoleh dari penerapan IFRSs, responden di Amerika Serikat lebih memilih pengurangan *compliance cost* sebagai manfaat utama yang diperoleh daripada kemudahan perusahaan untuk mendapatkan kredit bank dan dana dari pasar modal dengan biaya rendah. Sedangkan di India, menurut responden, peningkatkan konsistensi koordinasi diantara pembuat kebijakan, otoritas pasar modal dan para pemodal, justru tidak masuk dalam manfaat utama yang diperoleh dari penerapan IFRSs. Sayangnya di

Asia Pasifik meskipun 94 persen responden menyatakan sudah/akan mengadopsi IFRSs, tidak ada hasil survei mengenai manfaat penerapan IFRSs.

Dengan demikian apabila melihat hasil riset dari semua wilayah, hanya terdapat 3 (tiga) *critical issue* utama, yaitu: transisi dari pendekatan *rules-based* ke *principal-based*; penyajian laporan keuangan dengan sistem pengukuran kinerja baru; dan penilaian harga pasar serta 2 (dua) manfaat utama, yaitu: meningkatkan kredibilitas dan daya banding laporan keuangan dan memudahkan perusahaan untuk beroperasi secara global.

Sementara itu implikasi perpajakan dari konvergensi IFRSs mendapat reaksi beragam dari masing-masing otoritas pajak. Hal ini tergantung dari sistem atau pendekatan yang digunakan dalam pelaporan pajak, apakah independen, kuasi-dependen atau dependen. Negara-negara yang menganut sistem independen, menerima dampak terkecil dari konvergensi IFRSs karena akun-akun pajak disiapkan terpisah atau independen dari akun-akun IFRSs. Sedangkan negara-negara yang menganut sistem kuasi-dependen dan terutama dependen menerima dampak terbesar dari konvergensi IFRSs karena basis penghitungan laba kena pajak adalah laporan keuangan berdasarkan IFRSs yang dilakukan rekonsiliasi fiskal atau tidak sama sekali.

Bagi entitas di negara-negara yang menggunakan pendekatan dependen dan kuasi-dependen, konvergensi IFRSs akan sangat mempengaruhi *tax-cash* mereka karena bertambah dan berubahnya karakteristik perbedaan prinsip antara pajak dan akuntansi. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat pada kasus sewa pembiayaan, penilaian dan pengklasifikasian (penyusutan) aset tetap, penilaian persediaan, properti investasi dan instrumen keuangan. Tingkat implikasi perpajakan dari konvergensi IFRSs pada entitas di masing-masing negara, akhirnya akan tergantung dari sejauh mana IFRSs akan diakomodir tiap otoritas perpajakan dalam kebijakan perpajakan. Meskipun sudah melakukan langkah-langkah evaluasi, diskusi atau pertemuan dengan penyusun standar akuntansi setempat, sejauh ini masih banyak otoritas pajak yang mengambil sikap "*status quo*" atau belum ada kebijakan yang dikeluarkan untuk mengakomodir perbedaan antara pajak dengan IFRSs.

Otoritas perpajakan di negara-negara di Amerika Utara kecuali Amerika Serikat dan Kanada masih belum menyatakan sikapnya atau melakukan kegiatan (persiapan) untuk merespon IFRSs. Otoritas pajak di Kanada menjadi yang terdepan di kawasan ini setelah membentuk komite penasehat yang anggotanya berasal dari regulator, industri dan perwakilan lembaga akuntan untuk mempertimbangkan dampak dari mengadopsi IFRSs. IRS (Inland Revenue Service) di Amerika Serikat sendiri baru sebatas memberikan petunjuk pengaruh adopsi IFRSs terhadap posisi pajak entitas. Di kawasan Amerika Selatan, otoritas pajak di Chili menjadi satu-satunya pihak yang secara tegas menyatakan bahwa adopsi IFRSs untuk penyajian laporan keuangan tidak berdampak langsung terhadap pajak penghasilan dan wajib pajak akan diharuskan menganalisa dan mengeliminasi penyesuaian IFRSs dalam menghitung laba kena pajak. Untuk Afrika, amandemen terhadap undang-undang perusahaan dalam kaitannya dengan adopsi IFRSs membuat otoritas perpajakan di Afrika Selatan bertindak aktif untuk mengantisipasi dampaknya terhadap pajak entitas. Di kawasan Oceania, Australia yang menggunakan pendekatan independen, menyatakan bahwa laba kena pajak tetap dihitung didasarkan atas hukum pajak meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa IFRSs akan berpengaruh pada beberapa penghitungan yang menggunakan standar akuntansi. Sedangkan otoritas pajak di negara-negara Asia dan Eropa memiliki keragaman respon terhadap IFRSs dari yang bersikap *status quo* (mayoritas) hingga yang melakukan amandemen undang-undang perpajakan atau penyesuaian terhadap beberapa ketentuan perpajakan seperti yang dilakukan Korea Selatan, Spanyol, Swiss, Irlandia dan Inggris Raya. Daftar lengkap tindakan otoritas pajak dunia menghadapi konvergensi IFRSs dapat dilihat di Lampiran 13.

Berikut ini digambarkan riwayat konvergensi IFRSs di 4 (empat) negara yaitu Cina, India, Malaysia dan Filipina. Pemilihan keempat negara tersebut dikarenakan akan digunakan sebagai pembanding situasi yang sama di Indonesia pada bab selanjutnya. Pertimbangannya adalah keempat negara dan Indonesia memiliki "status" sama sebagai negara berkembang. Cina dan India sebagai negara berkembang terdepan di dunia dengan perekonomiannya yang sedang menggeliat cepat (Sudjijono, 2008). Sedangkan sebagai sesama negara Asia

Universitas Indonesia

Tenggara, Malaysia memiliki kedekatan rumpun dengan Indonesia dan praktik akuntansinya sangat dipengaruhi oleh Inggris dan Filipina merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang paling cepat mengadopsi IFRSs meskipun praktik akuntansi sebelumnya sangat dipengaruhi oleh Amerika Serikat.

Cina

Economic Intelligence Unit (EIU) memperkirakan bahwa pada tahun 2020, Asia akan menyumbang 43 persen perekonomian dunia, naik 35 persen dari tahun 2005. Pada tahun 2020, EIU juga memperkirakan bahwa berdasarkan paritas daya beli, Cina akan menjadi perekonomian terbesar di dunia dengan PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 29.590 milyar dolar Amerika, sementara Amerika Serikat akan berada di posisi kedua dengan PDB 28.830 milyar dollar Amerika. Peta perekonomian dunia sedang berubah dan Cina menjadi poros dari perubahan tersebut.

Pertumbuhan ekonomi Cina yang pesat ini berawal dari akhir tahun 1970-an saat Deng Xiaoping memperkenalkan pemikiran baru tentang sosialisme, mengembangkan sosialisme berkarakteristik Cina dan mereformasi sistem ekonomi Cina dari sistem ekonomi yang terpusat menjadi sistem ekonomi yang lebih berorientasi pasar meskipun masih dalam kendali partai komunis. Reformasi ini mengizinkan perluasan berbagai perusahaan skala kecil dalam bidang jasa dan manufaktur kecil dan menerapkan sistem ekonomi terbuka untuk meningkatkan perdagangan dan penanaman modal asing. Tetapi negara masih tetap mengendalikan dan memiliki komoditas dan industri strategis.

Di Cina, Departemen Keuangan dengan diawasi oleh Dewan Pemerintah adalah pihak yang merumuskan standar akuntansi dan proses audit. Sampai dengan awal tahun 90-an, Cina menggunakan lebih dari 40 regulasi sistem akuntansi yang berbeda, bermacam-macam industri dan tipe kepemilikan, yang berujung pada ketidakseragaman praktek akuntansi. Tahun 1992, Departemen Keuangan mengeluarkan Accounting Standards for Business Enterprise (ASBE) dengan tujuan untuk menyeragamkan praktek akuntansi domestik dan menyeragamkan praktek akuntansi di Cina dengan praktek internasional sehingga sejalan dengan orientasi ekonomi pasar. Departemen Keuangan terus melakukan

Universitas Indonesia

revisi terhadap ASBE hingga suatu standar akuntansi yang spesifik dapat diterapkan untuk semua perusahaan yang beroperasi di Cina.

The China Accounting Standards Committee (CASC) kemudian didirikan pada tahun 1998 sebagai lembaga berwenang dalam Departemen Keuangan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar akuntansi Cina (Chinese Accounting Standards atau CASs) dan memusatkan pengembangan tersebut dengan IFRSs dari IASB. Dalam pengembangan standar akuntansi ini, CASC mendapat bantuan dari World Bank dan Deloitte Touche Tohmatsu. Selama tahun 2005, CASC berhasil mengeluarkan 21 ED kepada masyarakat. Daftar lengkap *exposure draft* yang dikeluarkan CASC selama tahun 2005 dapat dilihat di Lampiran 14.

Pada tahun 2005 juga mulai efektif berlaku Accounting System for Small Enterprises (ASSE) untuk perusahaan kecil. Yang termasuk definisi perusahaan kecil disini yaitu: (1) tidak mendapatkan dana dari publik, (2) kegiatan usahanya kecil yang dapat dilihat dari jumlah pegawai, volume penjualan atau total aset, (3) perusahaan tidak berbentuk *sole proprietorship* atau *partnership*, dan (4) bukan merupakan institusi keuangan.

Langkah Cina semakin mengarah ke konvergensi IFRSs setelah perwakilan CASC dan IASB bertemu di Beijing pada bulan Nopember 2005 dan menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut:

- a. Cina menyatakan bahwa konvergensi adalah salah satu tujuan dari program penyusunan standar akuntansi.
- b. Cina menegaskan bahwa perusahaan yang menggunakan CASs dalam pembukuannya seharusnya menghasilkan laporan keuangan yang sama dengan perusahaan yang menggunakan IFRSs.
- c. IASB memahami dan menerima jika konvergensi ke IFRSs akan membutuhkan waktu dan bagaimana cara untuk konvergensi adalah hak Cina untuk menentukan sendiri langkahnya.
- d. Pengembangan standar akuntansi di Cina dilakukan dengan tujuan untuk mencapai konvergensi standar akuntansi ke IFRSs.
- e. IASB memuji dan mendukung perkembangan luar biasa dari proses konvergensi IFRSs di Cina.

Universitas Indonesia

- f. CASC dan IASB merumuskan jalan spesifik untuk saling membantu dan bekerja sama di masa depan dalam pengembangan standar akuntansi.

Tahun 2006, Departemen Keuangan Cina berhasil mengeluarkan sebuah basic standard dan 38 ASBE baru yang secara substansi sama dengan standar akuntansi internasional meskipun erdapat beberapa pengecualian atau modifikasi untuk menyesuaikan dengan keunikan kondisi dan lingkungan Cina. ASBE lama sendiri masih tetap berlaku bagi perusahaan yang tidak diwajibkan untuk menggunakan ASBE baru dan perusahaan yang tidak memilih untuk mengadopsi ASBE baru.

Tabel 3.10
Chinese Accounting Standards

Chinese Accounting Standards / New Accounting Standards for Business Enterprises		Ekuivalen IFRSs
Nomer	Nama	
1	Inventories	IAS 2
2	Long-term Equity Investments	IAS 27, 28, 31
3	Investment Properties	IAS 40
4	Fixed Assets	IAS 16
5	Biological Assets	IAS 41
6	Intangible Assets	IAS 38
7	Exchange of Non-monetary Assets	diatur di IAS 16, 38
8	Impairment of Assets	IAS 36
9	Employee Benefits	IAS 19
10	Enterprise Annuity Fund	IAS 26
11	Share-based Payment	IFRS 2
12	Debt Restructurings	diatur di IAS 39
13	Contingencies	IAS 37
14	Revenue	IAS 18
15	Construction Contracts	IAS 11
16	Government Grants	IAS 20

Universitas Indonesia

17	Borrowing Costs	IAS 23
18	Income Taxes	IAS 12
19	Foreign Currency Translation	IAS 21
20	Business Combinations	IFRS 3
21	Leases	IAS 17
22	Recognition and Measurement of Financial Instruments	IAS 39
23	Transfer of Financial Assets	IAS 39
24	Hedging	IAS 39
25	Direct Insurance Contracts	IFRS 4
26	Re-insurance Contracts	IFRS 4
27	Extraction of Petroleum and Natural Gas	IFRS 6
28	Changes in Accounting Policies and Estimates and Correction of Errors	IAS 8
29	Events Occurring after the Balance Sheet Date	IAS 10
30	Presentation of Financial Statements	IAS 11
31	Cash Flow Statements	IAS 7
32	Interim Financial Reporting	IAS 34
33	Consolidated Financial Statements	IAS 27
34	Earnings per Share	IAS 33
35	Segment Reporting	IAS 14
36	Related Party Disclosure	IAS 24
37	Presentation of Financial Instruments	IAS 32
38	First Time Adoption of Accounting Standards for Business Enterprises	IFRS 1

Sumber: <http://www.iasplus.com>

Berdasarkan tabel tersebut diatas, tidak ada CASs yang ekuivalen dengan IFRS 5, Non Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations dan IAS 29, Financial Accounting in Hyperinflationary Economies.

Departemen Keuangan juga mengeluarkan 48 standar auditing yang hampir sama dengan standar auditing internasional yang dikeluarkan International

Universitas Indonesia

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Setelah petunjuk implementasinya keluar, standar akuntansi dan auditing baru tersebut mulai efektif berlaku untuk perusahaan yang terdaftar di lantai bursa per tanggal 1 Januari 2007 dan didukung oleh CSRC (the China Securities Regulatory Commission) sebagai otoritas pasar modal Cina. Sedangkan perusahaan lainnya akan diminta untuk mengadopsi standar baru tersebut. Tahun 2008, semua perusahaan negara yang dikendalikan oleh pemerintah pusat Cina akan menggunakan CASs dan tahun 2009, semua perusahaan non publik berukuran besar dan sedang juga diwajibkan menggunakan CASs.

Bulan Nopember 2009, Departemen Keuangan mengeluarkan sebuah ED tentang Roadmap for Continuing and Full Convergence of ASBE with IFRSs. Dasar diterbitkannya roadmap adalah rencana IASB untuk mengamandemen/merevisi beberapa standar akuntansi internasional hingga tahun 2011 sebagai hasil kerjasama strategik antara IASB dan FASB dalam pengembangan standar akuntansi global. ASBE/CASs yang ada akan direvisi dan disesuaikan dengan standar terbaru yang dikeluarkan IASB. Roadmap menargetkan tahun 2011 semua ASBE/CASs konvergen dengan IFRSs dan pada tahun 2012, semua perusahaan, termasuk perusahaan non publik besar dan sedang, akan diminta untuk menggunakan standar akuntansi yang telah direvisi.

Konvergensi penuh CASs dengan IFRSs di Cina masih diragukan mengingat dalam CASs yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2007 terdapat beberapa perbedaan dengan IFRSs dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan dengan kondisi di Cina yang masih belum bisa dikategorikan sebagai negara maju dan belum mempunyai prosedur teknik penentuan harga pasar yang layak untuk instrumen non keuangan. Hal ini yang menjadi pertimbangan CASs untuk membatasi penggunaan nilai wajar pada *subsequent measurement* untuk *properties, plants* dan *equipment* (PPE) dan *intangible assets* serta melarang penggunaan teknik estimasi untuk menentukan nilai wajar pada *investments properties* dan *biological assets* dan justru menyarankan penggunaan model biaya. Selain itu agar mudah dipahami dan masuk dalam bahasa Cina, bahasa dalam IFRSs harus dimodifikasi.

Universitas Indonesia

Penggabungan usaha yang melibatkan beberapa perusahaan yang berada dibawah kendali pemerintah membuat transaksi tersebut dicatat menggunakan metode *pooling of interest*.

- b. Untuk mengurangi peluang dilakukannya manipulasi pendapatan melalui reklasifikasi atau revaluasi, CASs tidak mengizinkan dilakukannya transfer dari *inventories* dan *owner-occupied property* ke *investment property* dan melarang perubahan akuntansi dalam *investment property* dari metode nilai wajar ke model biaya.
- c. Terdapat permasalahan dalam praktek jika IFRSs diadopsi penuh seperti permasalahan implementasi nilai wajar sebagaimana tersebut diatas. Atas hal tersebut Cina meminta IASB untuk melakukan beberapa perubahan dalam ketentuan nilai wajar yang mengakibatkan banyak kesulitan terutama di negara-negara berkembang.

Apa yang terjadi di Cina menjadi tantangan besar bagi IASB yang menginginkan keseragaman standar akuntansi di dunia meskipun kedua belah pihak telah sepakat untuk bekerja sama dan saling membantu dalam penyusunan sebuah standar akuntansi internasional. Sikap tegas bahkan dinyatakan seorang pejabat Departemen Keuangan dalam konferensi tahunan akuntansi dan keuangan: *“convergence doesn't mean having our standards identical with the international standards word by word, rather it means the localization of structure, behavior, and wording of the international standards, so it's easier for Chinese accountant to accepts.”*

Mengingat lembaga penyusun standar akuntansi berada di bawah Departemen Keuangan dan sistem pelaporan pajak di Cina yang menganut sistem dependen, maka meskipun konvergensi IFRSs berdampak besar terhadap pelaporan pajak tetapi kebijakan baru dari otoritas perpajakan tidak sangat diperlukan untuk merespon dampak IFRSs. Otoritas kebijakan pajak sepenuhnya dipegang oleh Departemen Keuangan sedangkan State Administration of Taxation hanya sebagai otoritas pemungut pajak.

India

India merupakan negara dengan jumlah populasi terbesar kedua setelah Cina dan merupakan salah satu negara dengan jumlah etnik paling banyak di dunia. India juga rumah bagi ratusan bahasa dengan bahasa Hindi sebagai bahasa resminya. Meskipun demikian bahasa Inggris lebih sering digunakan di kancah pemerintahan, bisnis, sains dan pendidikan. Negara ini selama beberapa abad berada dibawah pengaruh kuat dan dikendalikan oleh Inggris Raya secara politik, militer dan ekonomi. Setelah memperoleh kemerdekaan, warisan Inggris Raya di India masih ada secara substansial, dalam sistem hukum legal, sistem pemerintahan parlementer dan perluasan penggunaan bahasa Inggris, termasuk juga dalam akuntansi.

Dua sumber utama standar akuntansi keuangan di India adalah lembaga hukum dan profesi akuntansi. Penetapan lembaga pertama diatur dalam undang-undang tahun 1857 dan lembaga kedua berhubungan dengan pembukuan dan pemeriksaan catatan akuntansi. Keduanya berlandaskan hukum Inggris Raya. Organisasi akuntan di India didirikan sejak tahun 1949 dengan nama the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) yang mengatur izin profesi akuntansi dan bertanggung jawab untuk mengembangkan standar akuntansi dan proses audit.

Tahun 1998 terjadi amandemen terhadap undang-undang perusahaan dimana perusahaan diwajibkan untuk taat pada standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh National Advisory Committee on Accounting Standards (NAC). Sepanjang NAC tidak menetapkan hal lain, perusahaan diwajibkan untuk mengikuti standar akuntansi yang dikeluarkan Accounting Standards Board of the Institute of Chartered Accountants of India (ASB). Sampai dengan bulan Oktober 2000, isi standar akuntansi India secara material banyak yang berkaitan dengan IAS yang dikeluarkan IASC, kecuali perihal *research and development*, *foreign exchange*, *borrowing costs* dan *business combinations*. Daftar lengkap Indian Accounting Standards per bulan Oktober 2000 dapat dilihat di Lampiran 15.

ASB mengeluarkan kebijakan untuk mendukung program harmonisasi IASC dengan tetap melanjutkan untuk mengambil IASs sebagai pedoman dalam mengembangkan standar akuntansi di India melalui pengintegrasian IASs ke

Universitas Indonesia

dalam standar baru yang akan dikeluarkan. Komitmen ini dipegang ASB saat mengeluarkan standar-standar baru maupun revisi atas standar sebelumnya.

Tabel 3.11
Indian Accounting Standards
Dikeluarkan Tahun 2001 - 2006

Tahun	Nomer	Nama Standar
2001	AS 20	Accounting Standard on Earnings Per Share (EPS)
2001	AS 21	Accounting Standard on Consolidated Financial Statements
2001	AS 22	Accounting Standard on Accounting for Taxes on Income
2001	AS 23	Accounting Standard on Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements
2002	AS 24	Accounting Standard on Discontinuing Operations
2002	AS 25	Accounting Standard on Interim Financial Reporting
2002	AS 26	Accounting Standard on Intangible Assets
2002	AS 27	Accounting Standard on Financial Reporting of Interests in Joint Ventures
2002	AS 28	Accounting Standard on Impairment of Assets
2002	AS 7 – A	Accounting Standard on Construction Contracts
2003	AS 11 – A	The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
2003	AS 13 – A	Accounting for Investments
2004	AS 28	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
2004	AS 26 – A	Accounting Standard on Intangible Assets
2005	AS 15 – A	Accounting Standard on Employee Benefits
2006	AS 15 – A	Accounting Standard on Employee Benefits

Sumber: <http://www.iasplus.com>

ASB membuat level pada entitas untuk menentukan tingkat pemakaian standar akuntansi, yaitu Level I, Level II dan Level III. Level I adalah entitas yang diwajibkan untuk taat secara penuh terhadap semua standar akuntansi. Sedangkan Level II dan Level III adalah entitas yang masuk klasifikasi sebagai perusahaan

Universitas Indonesia

menengah dan kecil. Meskipun demikian Level II dan Level III tetap diwajibkan menggunakan standar akuntansi dengan beberapa pengecualian dalam pengungkapan.

Entitas-entitas yang masuk dalam Level I yaitu: perusahaan yang sekuritas modal dan hutangnya terdaftar di India dan luar negeri, perusahaan yang sedang dalam proses *listing*, perbankan, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, semua perusahaan yang memiliki peredaran usaha diatas 500 juta rupee dan semua perusahaan yang memiliki simpanan diatas 100 juta rupee. Entitas-entitas yang masuk dalam Level II yaitu: semua perusahaan yang memiliki peredaran usaha diatas 4 juta rupee hingga 100 juta rupee dan semua perusahaan yang memiliki simpanan diatas 10 juta rupee hingga 100 juta rupee. Sedangkan entitas yang masuk dalam Level III yaitu: semua perusahaan yang tidak termasuk dalam Level I dan Level II.

Pada bulan Maret 2006, Perdana Menteri Manmohan Singh mengumumkan bahwa pemerintah akan mengeluarkan perundang-undangan baru bagi perusahaan yang diantaranya akan menyesuaikan standar akuntansi India dengan IFRSs yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi tata kelola perusahaan. Menindaklanjuti hal tersebut, ICAI membuat gugus tugas untuk mengeksplorasi kemungkinan bagi India untuk mengadopsi penuh IFRSs tanpa modifikasi. Hal ini menurut ICAI juga diperlukan karena banyak perusahaan asing yang akan berinvestasi ke India dan banyak perusahaan India yang akan berinvestasi ke luar negeri. Bagi ICAI, konvergensi standar akuntansi nasional ke IFRSs mutlak diperlukan. Tahun 2007 Dewan ICAI mengumumkan rencananya untuk melakukan konvergensi IFRSs yang dikeluarkan IASB ke standar akuntansi India. Meskipun demikian ICAI menekankan bahwa modifikasi terhadap IFRSs tetap diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi India. Standar baru yang sudah mengadopsi IFRSs direncanakan akan diterapkan untuk tahun buku yang dimulai tanggal 1 April 2011 dan akan diwajibkan untuk semua perusahaan yang terdaftar di bursa efek dan perbankan, perusahaan asuransi serta entitas besar. Rencana ini membutuhkan persetujuan dari pemerintah untuk kemudian dieksekusi.

India secara garis besar memiliki kendala pengadopsian IFRSs dalam hal:

Universitas Indonesia

- a. Menyesuaikan format penyajian laporan keuangan yang sebelumnya meliputi: neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, kebijakan akuntansi dan catatan.
- b. *Goodwill* yang timbul dari akuisisi, dimana menurut IFRSs harus dikapitalisasi dan diuji *impairment* sedangkan pada praktek sebelumnya *goodwill* selain harus dikapitalisasi dan diuji *impairment* juga bisa amortisasi.
- c. Penyusutan aset tetap di IFRSs berdasarkan manfaat ekonomik yang berbeda dengan praktek sebelumnya yang menggunakan metode FIFO dan rata-rata;
- d. Pencadangan untuk *income smoothing* tidak diperbolehkan di IFRSs sedangkan praktek di India sebelumnya diperkenankan.

Untuk menghadapi implikasi perpajakan dari konvergensi IFRSs, sejauh ini Department of Revenue sebagai otoritas perpajakan di India baru sebatas mendiskusikan implikasi perpajakan dengan ICAI. Tidak ada petunjuk yang dikeluarkan untuk wajib pajak dan belum ada kebijakan perpajakan yang dikeluarkan menyikapi rencana implementasi standar akuntansi berbasis IFRSs mulai 1 April 2011. Sistem pelaporan pajak di India sendiri adalah kuasi-dependen dimana untuk mendapatkan penghasilan kena pajak didapatkan dari rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi.

Malaysia

Malaysia adalah sebuah negara persemakmuran yang terletak di Asia Tenggara. Negara ini mempunyai dua kawasan utama yang terpisah oleh Laut China Selatan, yaitu Semenanjung Malaysia, berbatasan dengan Thailand di utara dan Singapura di selatan; dan Malaysia Timur, bagian utara pulau Kalimantan yang berbatasan dengan Indonesia di selatan dan Brunei di utara. Malaysia merdeka dari Inggris pada tahun 1957. Michael Backman menyebut Malaysia sebagai salah satu dari sedikit negara yang mencapai kemerdekaan dengan begitu banyak keunggulan dalam bentuk anugrah-anugrah penting, yaitu pasokan air yang cukup, lokasi yang strategis di jalur pelayaran internasional, persediaan kayu yang sangat besar, cadangan timah, minyak dan gas yang besar, proses pengembangan minyak tropis seperti minyak kelapa sawit, serta sistem hukum

Universitas Indonesia

yang berlandaskan hukum *tort* Inggris. Dengan modal berharga tersebut, pertumbuhan ekonomi Malaysia meningkat pesat dibawah kepemimpinan Mahathir Mohamad.

Setahun setelah Malaysia mendapat kedaulatan dari Inggris, sekitar 20 (dua puluh) orang akuntan lokal membuat Malayan Association of Certified Public Accountant (MACPA) yang kemudian berubah menjadi Malaysia Institute of Certified Public Accountant (MICPA). Kerjasama dari para akuntan berhasil mendirikan sebuah institusi pada tahun 1967 yaitu Malaysia Institute of Accountant (MIA). MIA memiliki tanggung jawab untuk mengatur praktek dan ketertarikan terhadap profesi akuntan. Tahun 1997, pemerintah membentuk sebuah badan untuk mengambil alih otoritas MIA dalam mengatur standar akuntansi di negara tersebut. MIA selanjutnya hanya berfungsi untuk menentukan syarat-syarat dari akuntan yang akan diterima menjadi anggota dan juga berdasarkan praktek regulasi profesi akuntan. The Malaysian Accounting Standards Board (MASB) kemudian menjadi badan yang berwenang untuk mengeluarkan standar akuntansi untuk pelaporan keuangan di Malaysia berdasarkan the Financial Reporting Act 1997.

Salah satu tujuan MASB adalah mengharmonisasikan konsep dan standar akuntansi MASB dengan konsep dan standar akuntansi internasional dari negara lain, terutama yang dikeluarkan oleh IASC. Dalam pengembangan awal standar akuntansi Malaysia, MASB mereview MASs (the Malaysia Accounting Standards) yang merupakan standar akuntansi produk lembaga profesi akuntan Malaysia sebelum MASB resmi berdiri, yaitu MIA dan MICPA. Selain itu MASB juga mereview standar yang dikeluarkan IASC/IASB dan praktek akuntansi yang sedang berlaku di Malaysia. Apabila sangat diperlukan MASB memodifikasi standar IASC/IASB atau mengembangkan teknik pengungkapan lainnya agar sesuai dengan kondisi di Malaysia. Sedangkan beberapa MASs yang tidak perlu direvisi, tetap diberlakukan sebagai standar.

Dari hasil review tersebut dihasilkan MASB standards yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2000, terdiri dari:

- MASB 1, Presentation of Financial Statements (revisi IAS 1),
- MASB 2, Inventories (revisi IAS 2),

Universitas Indonesia

- MASB 3, Net Profit or Loss for the Period, Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies (revisi IAS 8),
- MASB 4, Research & Development Costs (revisi IAS 9),
- MASB 5, Cash Flow Statement (revisi IAS 7),
- MASB 6, The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates (revisi IAS 21),
- MASB 7, Construction Contracts (revisi IAS 11),
- MASB 8, Related Party Disclosures (adopsi IAS 24),
- MASB 9, Revenue (revisi IAS 18),
- MASB 10, Leases (revisi IAS 17),
- MASB 11, Consolidated Financial Statements and Investments in Subsidiaries (adopsi IAS 27),
- MASB 12, Investments in Associates (adopsi IAS 28),
- MASB 13, Earnings Per Share (adopsi IAS 33).

Per tanggal 1 Juli 2000, MASB standards bertambah dengan dikeluarkannya:

- MASB 14, Depreciation Accounting (adopsi IAS 4),
- MASB 15, Property, Plant and Equipment (revisi IAS 16),
- MASB 16, Financial Reporting of Interests in Joint Ventures (adopsi IAS 31).

Beberapa standar MASB baru mulai efektif berlaku tanggal 1 Juli 2001, yaitu:

- MASB 17, General Insurance Business,
- MASB 18, Life Insurance Business,
- MASB 19, Events After The Balance Sheet Date (revisi IAS 10),
- MASB 20, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (adopsi IAS 37),
- MASB 21, Business Combinations (revisi IAS 22).

Per tanggal 1 Januari 2002 mulai efektif berlaku MASB standards:

- MASB 22, Segment Reporting (revisi IAS 14),
- MASB 23, Impairment of Assets (adopsi IAS 36),
- MASB 24, Financial Instruments: Disclosure and Presentation (revisi IAS 32).

Efektif mulai berlaku per tanggal 1 Juli 2002:

Universitas Indonesia

- MASB 25, Incomes Taxes (revisi IAS 12),
- MASB 26, Interim Financial Reporting (adopsi IAS 34),
- MASB 27, Borrowing Costs (revisi IAS 23).

Efektif mulai berlaku per tanggal 1 Januari 2003:

- MASB 28, Discontinuing Operations (adopsi IAS 35),
- MASB 29, Employee Benefits (revisi IAS 19),
- MASB 30, Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans (adopsi IAS 26 tahun 1994).

Efektif mulai berlaku per tanggal 1 Januari 2004:

- MASB 31, Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance (adopsi IAS 20 tahun 1994),
- MASB 32, Property Development Activities.

Selain standar akuntansi tersebut diatas, MASB juga mengeluarkan standar akuntansi syariah untuk perbankan yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Juli 2003 yaitu MASB i-1, Presentation of Financial Statements of Islamic Banks.

The Financial Reporting Act 1997 pada tahun 2004 diamandemen untuk mengizinkan perusahaan-perusahaan asing yang terdaftar di the Malaysian Stock Exchange untuk menggunakan IFRSs dalam menyajikan laporan keuangan mereka. Dalam rangka kebijakan konvergensi dengan IFRSs, MASB kembali mereview standar akuntansi yang mereka keluarkan untuk direvisi sesuai dengan IASs yang dikeluarkan IASB. Revisi standar akan sangat disesuaikan dengan IASs kecuali jika perbedaan tersebut sangat diperlukan demi ketaatan terhadap peraturan dan hukum lokal.

Tahun 2005, MASB mengubah nama standar akuntansi yang mereka keluarkan menjadi Financial Reporting Standards (FRSs) yang berlaku per tanggal 1 Januari 2005. Nomer dan nama baru digunakan sebagai dampak migrasi dari MASB ke FRSs dan konvergensi ke IFRSs.

Tabel 3.12
Migrasi ke Financial Reporting Standards

Nomer Baru	Nama	Nomer Lama
FRS 1	Firsttime Adoption of Fncial Rporting Standards	IFRS 1
FRS 2	Share-based Payment	IFRS 2
FRS 3	Business Combinations	IFRS 3
FRS 4	Insurance Contracts	IFRS 4
FRS 5	Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations	IFRS 5
FRS 101	Presentation of Financial Statements	MASB 1
FRS 102	Inventories	MASB 2
FRS 104	Depreciation Accounting	MASB 14
FRS 107	Cash Flow Statements	MASB 5
FRS 108	Net Profit or Loss for the Period, Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies	MASB 3
FRS 109	Research and Development Costs	MASB 4
FRS 110	Events after the Balance Sheet Date	MASB 19
FRS 111	Construction Contracts	MASB 7
FRS 112	Income Taxes	MASB 25
FRS 114	Segment Reporting	MASB 22
FRS 116	Property, Plant and Equipment	MASB 15
FRS 117	Leases	MASB 10
FRS 118	Revenue	MASB 9
FRS 119	Employee Benefits	MASB 29
FRS 120	Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance	MASB 31
FRS 121	The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates	MASB 6
FRS 122	Business Combinations	MASB 21
FRS 123	Borrowing Costs	MASB 27
FRS 124	Related Party Disclosures	MASB 8
FRS 125	Accounting for Investments	IAS 25

Universitas Indonesia

FRS 126	Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans	MASB 30
FRS 127	Consolidated Financial Statements and Investments in Subsidiaries	MASB 11
FRS 128	Investments in Associates	MASB 12
FRS 129	Financial Reporting in Hyperinflationary Economies	IAS 29
FRS 130	Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions	IAS 30
FRS 131	Financial Reporting of Interests in Joint Ventures	MASB 16
FRS 132	Financial Instruments: Disclosure and Presentation	MASB 24
FRS 133	Earnings Per Share	MASB 13
FRS 134	Interim Financial Reporting	MASB 26
FRS 135	Discontinuing Operations	MASB 28
FRS 136	Impairment of Assets	MASB 23
FRS 137	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets	MASB 20
FRS 138	Intangible Assets	IAS 38
FRS 139	Financial Instruments: Recognition & Measurement	IAS 39
FRS 140	Investment Property	IAS 40
FRS 141	Agriculture	IAS 41
FRS 201	Property Development Activities	MASB 32
FRS 202	General Insurance Business	MASB 17
FRS 204	Accounting for Aquaculture	MAS 5
FRS i-1	Presentation of Financial Statements for Islamic Financial Institutions	MASB i-1

Sumber: <http://www.iasplus.com>

Khusus FRS 201, 202, 204 dan i-1 adalah standar akuntansi yang dikembangkan secara lokal oleh MASB karena belum ada standar akuntansi internasional yang mengaturnya. Setelah migrasi tersebut diatas, MASB tetap terus mengeluarkan ED untuk merevisi FRSs yang belum sesuai dengan IFRSs atau menetapkan standar akuntansi dan interpretasi baru sesuai IFRSs, termasuk IFRS 7, Financial Instruments: Disclosures dan IAS 39, Financial Instruments:

Universitas Indonesia

Recognition and Measurement yang sudah efektif berlaku di Malaysia per tanggal 1 Januari 2010.

Perubahan besar terjadi mulai tanggal 1 Januari 2006 setelah MASB mengumumkan bahwa *private entities* diijinkan untuk memilih menggunakan standar akuntansi lama yaitu MASB standards. Dampaknya sejak saat itu terdapat dua standar akuntansi di Malaysia yaitu:

- a. FRSs yang harus digunakan oleh perusahaan berakuntabilitas publik dalam menyajikan laporan keuangan yang didukung oleh peraturan dari Securities Commission atau the Bank Negara Malaysia, atau induk dari perusahaan yang bersangkutan
- b. Private Entity Reporting Standards (PERSS) yang merupakan MASB standards sebelum direvisi ke IFRSs, dapat digunakan oleh semua perusahaan di Malaysia kecuali perusahaan berakuntabilitas publik

Tanggal 1 Agustus 2008, MASB mengeluarkan pernyataan resmi yang menetapkan target konvergensi penuh Malaysian GAAP ke IFRSs per tanggal 1 Januari 2012 setelah menyelesaikan semua revisi FRSs sesuai dengan IFRSs. Semua perusahaan termasuk *private entities* dan perusahaan asing yang terdaftar di bursa efek Malaysia diijinkan untuk menggunakan Malaysian GAAP yang akan berkonvergensi penuh ke IFRSs. Selain itu MASB mulai mengadopsi IFRSs untuk perusahaan kecil dan menengah (IFRS for SME) dengan mengeluarkan ED-72 (Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities). Malaysia mengharapkan langkah ini dapat membantu perusahaan-perusahaan Malaysia dan pasar modal dan keuangan mereka mendapat pengakuan. Kalender adopsi yang dibuat MASB sebagai waktu adopsi tentatif untuk IFRSs yang dikeluarkan IASB sampai dengan Maret 2009 dapat dilihat di Lampiran 16.

Menghadapi konvergensi IFRSs, Inland Revenue Board sebagai otoritas pajak di Malaysia mengisyaratkan untuk mempertimbangkan konvergensi parsial standar akuntansi untuk hal-hal tertentu. Diskusi intensif telah dilakukan dengan MIA untuk mengurangi perbedaan antara pajak dan akuntansi dan menghasilkan transisi yang mulus menuju implementasi IFRSs di tahun 2012. Tetapi sejauh ini

belum ada kebijakan pajak yang khusus dikeluarkan untuk merespon implikasi pajak dari IFRSs.

Filipina

Sebagaimana halnya Indonesia, Filipina adalah sebuah negara kepulauan berbentuk republik. Setelah selama lebih dari tiga abad dikuasai Spanyol, tahun 1898 Filipina dikuasai Amerika Serikat setelah negara adidaya tersebut mengalahkan Spanyol dalam perang. Filipina akhirnya memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1946. Meskipun begitu pengaruh Amerika Serikat masih sangat kuat dalam sistem politik, ekonomi dan pertahanan dan keamanan Filipina, termasuk dalam hal praktek akuntansi dan peraturan pasar modal.

Di Filipina yang menjadi *accounting standard setter* adalah the Accounting Standards Council (PASC) of the Philippines Institute of Certified Public Accountants (PICPA). Sebelum diberlakukan, standar akuntansi di Filipina yaitu Statement of Financial Accounting Standards (SFASs) harus diakui oleh the Philippine SEC dan Central Bank of Philippines dan disetujui oleh the Board of Accountancy and the Professional Regulation Commission, sebuah badan pemerintah setempat.

Tahun 2000, PASC mengeluarkan kebijakan baru untuk mereview SFASs dan mengadopsi standar akuntansi baru yang dikeluarkan IASC sebagai standar akuntansi Filipina. Kebijakan ini juga berarti pernyataan ketaatan Philippine GAAPs terhadap IASC *standards*. Hal ini merupakan langkah besar mengingat standar akuntansi Filipina sebelumnya lebih banyak berkiblat ke Amerika Serikat.

Dari hasil review tersebut dihasilkan SFASs berbasis IASs yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2001, terdiri dari:

- a. Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements (berbasis the IASC Framework), merevisi SFAS No. 1, Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements of Business Enterprises,
- b. SFAS No. 1, Presentation of Financial Statements (berbasis IAS 1 – 1997), merevisi SFAS No. 1, Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements of Business Enterprises; SFAS No. 2, Summary of

GAAP on Cash; SFAS No. 3, Summary of GAAP on Receivables; SFAS No. 5, Summary of GAAP on Liabilities; dan SFAS No. 15, Disclosure of Accounting Policies,

- c. SFAS No. 4, Inventories (berbasis IAS 2 – 1992), merevisi SFAS No. 4, Summary of Generally Accepted Accounting Principles on Inventories,
- d. SFAS No. 13, Net Income or Loss for the Period, Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies (berbasis IAS 8 – 1993), merevisi SFAS No. 13, Reporting the Effects of a Disposal of a Segment of a Business and of Extraordinary Items and Prior Period Adjustments on the Results of Operations of an Enterprise, dan SFAS No. 17, Accounting Changes,
- e. SFAS No. 22, Statement of Cash Flows (berbasis IAS 7 – 1992), merevisi SFAS No. 22, Statement of Cash Flows,
- f. SFAS No. 30, Interim Financial Reporting (berbasis IAS 34), merevisi PICPA Accounting Principles Bulletin No. 21, Interim Financial Reporting, yang dikeluarkan pada bulan Maret 1981,
- g. SFAS No. 31, Segment Reporting (berbasis IAS 14).

Hingga bulan Oktober 2003, adopsi IASs ke dalam SFASs telah menunjukkan perkembangan yang positif.

Tabel 3.13
Adopsi IASs ke SFAS

Nama Standar Akuntansi	No. IAS	No. SFAS	Efektif Berlaku
Construction Contracts	11	26	sebelum 2001
Revenues	18	18	sebelum 2001
Borrowing Costs	23	25	sebelum 2001
Earnings Per Share	33	29	sebelum 2001
Framework			sejak 2001
Presentation of Financial Statements	1	1	sejak 2001
Inventories	2	4	sejak 2001
Cash Flow Statements	7	22	sejak 2001

Universitas Indonesia

Net Profit, Fundamental Errors and Accounting Changes	8	13	sejak 2001
Segment Reporting	14	31	sejak 2001
Interim Financial Statements	34	30	sejak 2001
Property, Plant and Equipment	16	16	sejak 2002
Related Party Disclosure	24	24	sejak 2002
Consolidated Financial Statements	27	27	sejak 2002
Investments in Associates	28	28	sejak 2002
Financial Interests in Joint Ventures	31	31	sejak 2002
Discontinuing Operations	35	35	sejak 2002
Impairment of Assets	36	36	sejak 2002
Events After Balance Sheet	10	10	sejak 2003
Business Combinations	22	22	sejak 2003
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets	37	37	sejak 2003
Intangible Assets	38	38	sejak 2003
Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance	20	20	sejak 2003
Leases	17	17	*) sejak 2004
Effects of Changes in Foreign Exchange Rates	21	21	*) sejak 2005

Sumber: <http://www.iasplus.com>

Tabel 3.14
Outstanding Exposure Draft

Nama Exposure Draft	No. IAS	No. SFAS
Income Taxes	12	52
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans	26	53
Financial Instruments: Disclosure and Presentation	32	54
Financial Instruments: Recognition and Measurement	39	55
Investment Property	40	56

Universitas Indonesia

Employee Benefits	19	57
-------------------	----	----

Sumber: <http://www.iasplus.com>

Hingga bulan Oktober 2003, ED yang belum dikeluarkan adalah adopsi terhadap IAS 15 (Information Reflecting on Effects of Changing Prices), IAS 30 (Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions) dan IAS 41 (Agriculture). Sehingga saat itu tinggal 2 (dua) SFAS yang tidak berbasis IAS yaitu SFAS No. 8A, Deferred Foreign Exchange Differences dan SFAS No. 19A, Accounting for Investment in Debt and Marketable Securities of Banks. Tetapi setelah pada bulan Januari 2004 dikeluarkan ED No. 59, Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions (berbasis IAS 30) dengan proyeksi efektif Januari 2005 maka bisa dikatakan semua IASs yang berlaku pada saat itu telah diadopsi sebagai Philippine Statements of Financial Accounting Standards dengan sebagian diantaranya masih menunggu pengesahan pemberlakuan. Saat IASB mengeluarkan IFRS 1, 2, 3, 4 dan 5, Filipina mengadopsinya dan efektif berlaku pada tahun 2005.

Filipina telah mengadopsi semua IFRSs pada tahun 2005 dengan tanpa melakukan modifikasi standar akuntansi. Standar yang berbasis IFRSs ini diterapkan untuk semua entitas dengan akuntabilitas publik. Termasuk diantaranya sekuritas yang terdaftar di pasar modal atau yang dalam proses *listing*, semua institusi keuangan termasuk perbankan, perusahaan asuransi, broker sekuritas, dana pensiun, *mutual fund* dan entitas bank investasi, perusahaan pelayanan publik; dan entitas lain yang signifikan secara ekonomi, dengan total assets pada tahun 2004 minimal sebesar 250 juta peso atau 5 juta dollar Amerika atau total liabilities minimal sebesar 150 juta peso atau 3 juta dollar Amerika. Untuk mengidentikkan standar akuntansi mereka dengan standar yang dikeluarkan IASB, PASC mengubah nama SFASs menjadi Philippine Accounting Standards (PASs) dan Philippine Financial Reporting Standards (PFRSs) sesuai dengan nama IASs dan IFRSs sebagai produk IASB.

Untuk perusahaan non-publik terutama perusahaan kecil dan menengah, pada bulan Desember 2005, PASC menyetujui pemakaian sementara PAS 101, Financial Reporting Standards For Non-Publicly Accountable Entities (NPAEs)

Universitas Indonesia

yang dikeluarkan oleh the Philippines SEC. Perusahaan non publik juga masih diijinkan untuk menggunakan PASs sebelum berbasis IFRSs. Mereka diberikan waktu dua tahun (2005 – 2007) untuk melakukan transisi ke PASs/PFRSs. Perusahaan asuransi juga diberikan pengecualian oleh the Philippines SEC untuk menggunakan beberapa standar PASs/PFRSs.

Tetapi sejak tahun 2006, PASC dengan persetujuan the Philippines SEC melakukan beberapa modifikasi dan amandemen terhadap PASs/PFRSs agar sesuai dengan kondisi lokal, yaitu: mengurangi segmen laporan pengungkapan, beberapa instrumen keuangan yang spesifik dikecualikan dari penerapan ketentuan, kontrak derivatif komoditas dari perusahaan pertambangan dikecualikan dari ketentuan, perusahaan asuransi diperbolehkan untuk menggunakan PFRSs, untuk bank, kerugian dari penjualan *non-performing assets* diperbolehkan untuk diamortisasi selama masa manfaat dan beberapa perubahan tambahan lain pada ketentuan IASB mengenai dana pensiun, kurs valuta asing dan *leasing*. Untuk menggantikan PAS 101 yang sementara diberlakukan, per tanggal 1 Januari 2010 efektif berlaku PFRS for SMEs yang merupakan adopsi dari IFRS for SMEs bagi perusahaan kecil dan menengah. Standar akuntansi ini wajib digunakan perusahaan non publik dengan total assets dari 3 juta peso hingga 350 juta peso (70 ribu – 8 juta dollar Amerika) atau total liabilities dari 3 juta peso hingga 250 juta peso (70 ribu – 5,5 juta dollar Amerika). Perusahaan non publik yang berada dibawah standar minimal atau disebut *micro entities* diijinkan menggunakan PFRS for SMEs atau standar akuntansi lain yang dapat diterima.

Meskipun sistem pelaporan pajak di Filipina adalah independen, tetapi Bureau of Internal Revenue (BIR) sebagai otoritas pajak di Filipina telah melakukan berbagai kegiatan untuk mempelajari implementasi pajak dari IFRSs. Pada tahun 2006 dengan didukung USAID, BIR sudah mengadakan pelatihan mengenai IFRSs beserta dampak perpajakannya kepada para pegawainya. Tahun 2007, BIR mengadakan diskusi internal untuk kembali mereview IFRSs dan dampak perpajakannya. Sejauh ini belum ada kebijakan perpajakan untuk merespon dampak IFRSs yang dikeluarkan.

BAB 4

KONVERGENSI IFRSs DI INDONESIA

4.1 Kondisi Perekonomian di Indonesia

Dibandingkan dengan negara-negara lain yang sama-sama terkena krisis moneter sejak tahun 1997, Indonesia adalah negara yang paling lambat melakukan koreksi dan pemulihan. Sementara negara lain sudah mulai pulih beberapa tahun setelah krisis, Indonesia masih saja berjuang. Sebelum krisis perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata 7 (tujuh) persen per tahun. Tetapi begitu krisis yang dimulai sejak bulan Juli 1997, pertumbuhan Indonesia mengalami kontraksi besar sekali, yaitu hingga menyentuh minus 13 persen pada tahun 1998. Hal tersebut terkait dengan tingkat depresiasi nilai tukar yang melonjak drastis juga. Pada bulan Juni 1997, nilai dollar Amerika masih dihargai sekitar 2.700 rupiah, namun pada akhir 1997 dan awal 1998, nilai dollar Amerika melonjak menjadi sekitar 14.000 rupiah.

Hingga saat ini tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata pada masa setelah krisis belum bisa menyamai tingkat pertumbuhan sebelum krisis. Negara lainnya dapat lebih cepat pulih dari Indonesia disebabkan oleh struktur ekonomi dan politik yang lebih baik dan kokoh daripada Indonesia. Claessens, Djankov dan Lang (1999) sebagaimana dikutip Prasetyantoko (2008) menyebutkan bahwa Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang sistem hukum, efisiensi peradilan dan korupsinya tinggi. Krisis di Indonesia begitu parah dan panjang karena faktor institusi yang buruk dan perilaku yang panik serta tidak sesuai aturan main. Kasus penyelewengan BLBI (bantuan likuiditas Bank Indonesia) menunjukkan betapa krisis justru mendorong perilaku korupsi.

Basri (2009) mengungkapkan fakta baru perekonomian Indonesia dimana terjadi berbagai perubahan mendasar yang telah merombak bangunan ekonomi Indonesia sedemikian rupa sehingga memunculkan masalah dan kerawanan baru. Apabila melihat Tabel 4.1 sepertinya tidak ada yang salah dengan perekonomian Indonesia karena indikator-indikator makro ekonomi menunjukkan pertumbuhan

yang cukup baik termasuk naiknya cadangan devisa, turunnya persentase utang pemerintah terhadap PDB, turunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Tabel 4.1
Data Makroekonomi Indonesia

Indikator	Sebelum Krisis (1993 - 96)	Puncak Krisis (1998)	Pasca Krisis		
			2001-06	2006	2009
Tingkat pertumbuhan ekonomi (PDB, %)	7,7	-13,1	4,8	5,5	4,5
Tingkat pertumbuhan investasi (%)	12,2	-33,0	6,7	2,9	3,3
Persentase investasi terhadap PDB (%)	28,0	25,4	21,4	24,0	24,9
Rata-rata kurs (Rp per US\$ 1)	2.210,0	10.013,0	9.322,0	9.141,0	10.300
Ekspor (milyar US\$)	43,0	48,8	72,1	100,7	116,5
Impor (milyar US\$)	36,0	27,3	43,3	61,0	96,8
Saldo neraca perdagangan (milyar US\$)	7,0	21,5	28,7	39,6	19,7
Cadangan devisa (US\$)	13,8	22,9	34,3	42,6	66,1
Tingkat inflasi (CPI, %)	8,7	58,5	9,6	6,6	2,78
Persentase saldo	1,2	-2,0	-1,3	-1,0	-

Universitas Indonesia

anggaran pada PDB (%)					
Persentase utang pemerintah terhadap PDB (%)	24,3	74,1	57,8	39,1	28,0
Tingkat pengangguran (%)	-	-	9,7	10,3	7,87
Tingkat kemiskinan (%)	17,6	23,4	17,2	17,8	14,2

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Biro Pusat Statistik, World Bank, Basri (2009) dan berbagai sumber lainnya

Tetapi terdapat berapa indikator yang belum menunjukkan kinerja seperti pada masa sebelum krisis moneter yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pertumbuhan investasi dan persentase nilai investasi terhadap PDB. Basri (2009) mencatat terdapat 4 (empat) masalah baru yang mencuat di Indonesia pasca krisis dan saling berkaitan satu sama lain yang secara aktual maupun potensial telah dan akan membebani perekonomian Indonesia, yaitu: (1) kemerosotan tingkat investasi riil/langsung; (2) perubahan saldo dan komposisi neraca transaksi berjalan; (3) kemerosotan daya saing nasional; dan (4) penurunan kualitas pertumbuhan ekonomi.

Kemerosotan tingkat investasi riil/langsung layak menjadi fokus utama karena jika investasi menurun maka kegiatan-kegiatan produksi secara nasional akan ikut menurun. Jika kegiatan produksi turun maka pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan akan merosot, baik dalam hal kuantitas yaitu persentase angka pertumbuhan maupun dalam hal kualitas pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Hal sama juga dialami beberapa negara Asia lainnya. Tingkat investasi di Korea Selatan turun tetapi tidak setajam yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara yang lemah dalam pemupukan *fixed investment* (investasi tetap) khususnya Indonesia. Pembentukan investasi tetap di Indonesia sampai tahun 2008 masih terus di bawah tingkatan yang ada pada masa sebelum krisis. Padahal investasi tetap ini secara langsung menentukan investasi riil atau *direct investment*

Universitas Indonesia

(investasi langsung), yaitu investasi yang secara langsung berkaitan dengan produksi berupa pendirian pabrik, pengadaan teknologi baru, pembukaan lahan baru, perekrutan tenaga kerja baru dan lain-lain, yang secara langsung akan menciptakan produksi baru atau menambah produksi yang sudah ada, baik oleh investor dalam maupun luar negeri.

Investasi langsung sendiri termasuk FDI yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dari berbagai negara, selama ini merupakan kekuatan utama yang menggerakkan perekonomian di Asia Pasifik termasuk Indonesia. Menurut World Bank (2005), keberadaan FDI di berbagai negara ternyata berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekspor dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di negara yang bersangkutan. Secara umum persaingan memperoleh dana FDI semakin sengit. Saat ini bermunculan sejumlah negara yang sangat menggiurkan sebagai tujuan FDI, dengan Cina sebagai primadonanya. Menurut majalah *The Economist* sebagaimana dikutip Basri (2009), negara-negara seperti Cina, Hongkong SAR, Rusia, India, Meksiko dan Brasil akan menjadi magnet-magnet raksasa penyedot sebagian besar FDI sedangkan Indonesia yang menerima 6,6 milyar dollar Amerika dari FDI hanya menempati peringkat 36 dari 82 negara yang disurvei. Posisi Indonesia jauh dibelakang negara kecil seperti Singapura yang berada di peringkat 15 dengan penerimaan 27,1 milyar dollar Amerika. Kondisi ini tidak memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Daftar proyeksi distribusi PMA tahunan dari beberapa negara tahun 2007 – 2011 dapat dilihat di Lampiran 17.

Investasi riil yang diterima Indonesia pada kenyataannya justru lebih rendah karena selain menerima investasi dari luar negeri, Indonesia ternyata juga melakukan investasi ke negara lain dan nilainya mencapai milyaran dollar. Investasi yang dilakukan Indonesia ke luar negeri ini lebih berbentuk seperti investasi portofolio karena yang diterima hanya laba, sementara penambahan *output*, fasilitas produksi termasuk infrastruktur, penciptaan lapangan kerja dan stimulus kegiatan ekonomi dinikmati oleh negara penerima investasi. Kondisi tersebut menjadikan porsi total akumulasi investasi di Indonesia sangat rendah. Data investasi masuk dan keluar Indonesia dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2008 dapat dilihat di Lampiran 18.

Universitas Indonesia

Selain itu rasio investasi terhadap GDP atau PDB di Indonesia hanya sebesar 5,2 persen yang notabene sangat rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara lainnya di dunia, bahkan apabila dibandingkan dengan negara-negara Asia Selatan sekalipun, seperti Bangladesh, Sri Lanka atau Pakistan. Di kawasan Asia Tenggara, rasio stok investasi Indonesia terhadap GDP notabene termasuk yang terendah berdasarkan laporan UNCTAD pada tahun 2008. Data rasio stok investasi terhadap GDP di sejumlah negara dapat dilihat di Lampiran 19.

Tabel 4.2
Rasio FDI Terhadap Pembentukan Investasi Tetap

Negara	Rasio FDI Terhadap Pembentukan Investasi Tetap (%)
Bangladesh	3,9
Sri Lanka	6,2
INDONESIA	6,4
Cina	8,0
India	8,7
Taiwan	10,3
Vietnam	12,5
Filipina	14,1
Thailand	16,5
Malaysia	20,1
Pakistan	24,1
Kamboja	38,9
Singapura	79,5
ASIA	12,9

Sumber: UNCTAD, World Investment Report (2007)

Tabel tersebut diatas menggambarkan rendahnya rasio FDI terhadap pembentukan investasi tetap di Indonesia. Posisi Indonesia hanya berada diatas dua negara Asia Selatan yaitu Bangladesh dan Sri Lanka. Bahkan apabila

Universitas Indonesia

dibandingkan dengan rata-rata negara Asia, rasio Indonesia masih jauh dibawah. Merosotnya investasi langsung menyebabkannya tidak lagi dapat menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi. Di berbagai negara seperti Indonesia, sumber pertumbuhan ekonomi yang utama telah bergeser ke konsumsi, belanja pemerintah dan ekspor neto. Jika investasi langsung dikatakan sebagai “makanan paling bergizi” maka tentu sumber-sumber pertumbuhan lain tidak sebaik investasi. Konsumsi meningkat dan semakin kuat pengaruhnya dalam menopang pertumbuhan ekonomi, demikian pula halnya dengan belanja pemerintah. Tapi karena konsumsi dan belanja pemerintah (di luar belanja investasi) tidak berhubungan langsung dengan *output* atau produksi, maka pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan juga tidak mencerminkan kenaikan kapasitas atau produksi riil dari ekonomi yang bersangkutan.

Situasi penurunan investasi langsung di seluruh kawasan menjadi lebih berbahaya karena dalam waktu bersamaan ternyata tingkat pertumbuhan tabungan domestik tidak mengalami banyak perubahan, meskipun kadang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini khususnya dialami oleh Indonesia dan negara-negara tetangga yang pernah dilanda krisis moneter. Dengan demikian berarti tabungan domestik lebih besar dan kian lebih besar daripada investasi yang disalurkan. Dengan kata lain, total jumlah tabungan masyarakat sebenarnya terus melebihi alokasi atau jumlah dana yang mengalir ke investasi produksi berkurang.

Selisih yang terus membesar tersebut dikarenakan aliran uang dari tabungan masyarakat lebih banyak mengalir ke investasi portofolio dalam beberapa tahun terakhir dan jumlahnya kian membesar. Wujud investasinya sangat bermacam-macam seperti saham, obligasi dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Bank-bank yang menerima tabungan atau dana masyarakat (tabungan, deposito berjangka dsb) bukannya menambah kredit sesuai dengan peningkatan kemampuan pendanaannya karena penambahan tabungan dana masyarakat yang mereka terima, melainkan justru lebih banyak lagi menyimpan dana masyarakat tersebut dalam bentuk (SBI) yang juga membuahakan bunga meskipun tidak terlalu banyak tetapi dijamin aman.

Sektor keuangan Indonesia mencatat perkembangan sangat pesat, seperti halnya negara lainnya di kawasan Asia Pasifik. Persentase nilai wajar dari saham-

saham perusahaan domestik yang terdaftar di bursa terhadap PDB meningkat tajam. Jika tahun 1997 dan 2005 baru mencapai 12,2 persen dan 28,9 persen maka di tahun 2009 telah mencapai 33 persen. Cina bahkan mencatat pertumbuhan sangat cepat, jika tahun 1997 dan 2005 baru mencapai 11,2 persen dan 17,8 persen, maka di tahun 2009 melesat menjadi 100,5 persen. Karena terlalu cepatnya, semakin lama sektor keuangan mulai meninggalkan sektor riil. Sejak beberapa dekade terakhir, sektor keuangan sudah menjadi bisnis tersendiri. Uang bukan cuma alat pembayaran, melainkan juga menjadi komoditas yang lazim diperdagangkan. Secara global, perubahan tersebut mulai terjadi di awal tahun 1970-an tidak lama setelah Amerika Serikat melepaskan jaminan emasnya terhadap dollar Amerika yang diedarkannya atau dikenal dengan peristiwa runtuhnya *the Bretton Woods System*. Sejak saat itu sektor keuangan tumbuh luar biasa dan besarnya sekian kali lipat lebih besar daripada sektor riil. Jika di tahun 1985 nilai perdagangan aset keuangan mencapai 150 milyar dollar Amerika per hari, maka pada akhir 1990 jumlahnya sudah lebih dari 1 trilyun dollar Amerika per hari dan di tahun 2007 sudah mendekati 3 trilyun dollar Amerika per hari. Fenomena *bubble economy* ini mudah pecah, melumpuhkan perekonomian dan merugikan banyak orang, karena perkembangannya di sektor keuangan memang tidak lagi mencerminkan dinamika masyarakat secara riil. Berdasarkan data Bank Indonesia (2008) yang dikutip Basri (2009) diketahui bahwa porsi FDI di Indonesia terus menurun dari tahun ke tahun, sedangkan nilai investasi portofolio justru semakin meningkat. Kondisi sektor keuangan dunia pada tahun 2009 dapat dilihat di Lampiran 20.

Ancaman perekonomian *bubble* terlihat jika melihat kenyataan bahwa pasar modal di Indonesia selama ini sangat didominasi oleh asing hingga mencapai porsi hampir dua per tiga dari total nilai kepemilikan saham di bursa efek. Meskipun jumlah akun investor lokal jauh lebih banyak dibandingkan investor asing, tetapi investor asing justru menguasai hampir dua per tiga nilai sekuritas yang diperdagangkan di bursa dengan nilai mencapai hampir 707 trilyun rupiah. Jika dana asing tersebut pindah ke tempat lain di luar Indonesia maka dapat dipastikan pasar modal di Indonesia akan terguncang. Hal ini menyebabkan

Bank Indonesia (BI) menaikkan bunga hanya untuk menaikkan tingkat kompetitif suku bunga dalam negeri untuk obligasi.

Tabel 4.3
Komposisi Kepemilikan Sekuritas
per bulan Juni 2008

Investor / Pemilik Akun Sekuritas	Jumlah Akun	Nilai (Milyar Rupiah)	Persentase Nilai
Investor Asing			
Reksa Dana	13	775,23	0,07
Lembaga Keuangan	1.593	277.503,92	25,06
Perusahaan	265	76.129,20	6,88
Perusahaan Efek	86	16.828,18	1,52
Perorangan	919	805,10	0,07
Lainnya	1.763	334.703,53	30,23
Sub Total	4.639	706.745,16	63,82
Investor Lokal			
Asuransi	189	28.434,80	2,57
Reksa Dana	206	42.082,76	3,80
Dana Pensiun	431	12.875,42	1,16
Lembaga Keuangan	67	3.968,80	0,36
Perusahaan	1.751	219.278,62	19,80
Perusahaan Efek	354	28.803,54	2,60
Yayasan	63	1.273,75	0,12
Perorangan	102.933	63.284,63	5,72
Lainnya	82	571,19	0,05
Sub Total	106.076	400.573,51	36,18
TOTAL	110.715	1.107.318,67	100,00

Sumber: Bapepam-LK

Meskipun demikian masih ada harapan bagi Indonesia untuk semakin menarik bagi FDI karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh International Institute for Management Development, dari tahun ke tahun posisi Indonesia terus

Universitas Indonesia

menerus menunjukkan peningkatan, dari posisi 54 pada tahun 2007 menjadi posisi 35 pada tahun 2010 dengan total negara yang disurvei adalah 58 negara. Di Asia Tenggara, posisi Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand, dan hanya berada di atas Filipina. Amerika Serikat, Singapura dan Hongkong SAR adalah 3 (tiga) negara yang terus menerus berada di peringkat teratas selama 4 (empat) tahun terakhir. Data urutan daya saing dari 58 negara dapat dilihat di Lampiran 21.

Tetapi kondisi Indonesia tidak menguntungkan apabila melihat hasil penilaian pengusaha Jepang tentang urutan prospek investasi di sejumlah negara. Hasil survei dalam Tabel 4.4 memperlihatkan bahwa urutan Indonesia semakin menurun dari tahun ke tahun. Kondisinya jauh dibandingkan saat Indonesia tepat sedang mengalami krisis moneter di tahun 1997. Pada saat itu posisi Indonesia masih paling tinggi daya tarik investasinya di mata pengusaha Jepang dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya.

Tabel 4.4
Penurunan Peringkat Penilaian Prospek Investasi di Indonesia
Di Kalangan Pengusaha Jepang

Peringkat	1997	2003	2004	2005	2006
1	Cina	Cina	Cina	Cina	Cina
2	Amerika	Thailand	Thailand	India	India
3	Indonesia	Amerika	India	Thailand	Vietnam
4	Thailand	Vietnam	Vietnam	Vietnam	Thailand
5	India	India	Amerika	Amerika	Amerika
6	Vietnam	Indonesia	Rusia	Rusia	Rusia
7	Filipina	Korea	Indonesia	Korea	Brasil
8	Malaysia	Taiwan	Korea	Indonesia	Korea
9	Brasil	Malaysia	Taiwan	Brasil	Indonesia
10	Taiwan	Rusia	Malaysia	Taiwan	Taiwan

Sumber: Basri (2009) dikutip dari International Institute for Management Development, World Competitiveness Yearbook dan JICA, berbagai edisi.

Penilaian berbagai lembaga internasional tentang kualitas perekonomian Indonesia sebagai tujuan investasi internasional ternyata juga tidak

Universitas Indonesia

menggembirakan. Berdasarkan kualifikasi yang ditetapkan oleh UNCTAD, klasifikasi Indonesia sebagai tujuan investasi masuk dalam kelompok terbawah yaitu kelompok negara yang kinerja maupun potensi investasinya sama-sama rendah.

Tabel 4.5
Pengelompokan Negara oleh UNCTAD
Berdasarkan Kualitas Kinerja dan Potensi Investasi

Potensi	Kinerja	Kinerja Investasi Tinggi	Kinerja Investasi Rendah
Potensi Investasi Tinggi		Kelompok Papan Atas: Brunei Darussalam, Cina, Hong Kong, Malaysia, Singapura	Di Bawah Rata-rata: Iran, Israel, Kuwait, Filipina, Taiwan, Thailand
Potensi Investasi Rendah		Di Atas Rata-rata: Azerbaijan, Tajikistan, Vietnam	Kelompok Paling Payah: Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka, Indonesia

Sumber: Basri (2009) dikutip dari UNCTAD (2006)

Pada gilirannya penurunan daya saing investasi mengakibatkan penurunan investasi sektor riil di Indonesia. Bukan hanya pengusaha asing yang enggan berinvestasi di Indonesia, pengusaha lokal pun akan mencari lahan investasi yang lebih menarik di luar negeri. Proses globalisasi menjadikan kompetisi di antara perusahaan-perusahaan internasional meningkat. Mereka akan mementingkan penghematan biaya-biaya tetap seperti infrastruktur daripada biaya variabel seperti harga bahan baku.

Meskipun mulai membaik tetapi berbagai perangkat hukum, prosedur baku dan transparansi pemberlakuan peraturan yang menyangkut dunia usaha di Indonesia masih dinilai buruk, ditambah dengan adanya korupsi. Kondisi infrastruktur bahkan dinilai sangat buruk dan secara umum dinilai tidak memadai untuk menopang perkembangan ekonomi Indonesia.

Universitas Indonesia

Tabel 4.6
Perkembangan Peringkat Indonesia dari 58 Negara
Berdasarkan Penilaian Elemen-elemen Daya Saing

Indikator	2007	2008	2009	2010
Peringkat Keseluruhan	54	51	42	35
Kinerja Ekonomi	55	52	41	27
Efisiensi Pemerintah	46	38	33	23
Efisiensi Bisnis	45	44	38	34
Kondisi Infrastruktur	54	53	55	55

Sumber: International Institute for Management Development, World Competitiveness Yearbook (2010)

Hal negatif lainnya yaitu buruknya pelaksanaan *good corporate governance* di Indonesia yang meliputi kaidah *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (tanggung jawab) dan *fairness* (kewajaran). Secara umum terdapat 3 (tiga) masalah yang menyebabkan pelaksanaan *good corporate governance* di Indonesia masih begitu lemah. Pertama, banyak perusahaan yang masih terbelakang atau belum dibentuk untuk memainkan peran penting di pasar. Kedua, pasar sendiri tidak bekerja secara optimal dan lingkungan bisnisnya tidak kompetitif. Ketiga, sistem hukum yang lemah dan lembaga-lembaga yang menangani dan menjalankan aturan main itu sendiri maupun keseluruhan penegakan peraturan administratif masih lemah, termasuk didalamnya penegakan peraturan di bursa efek atau standarisasi laporan akuntansi. Lemahnya elemen-elemen dasar penopang perekonomian dan buruknya *good corporate governance* mengakibatkan Indonesia harus menerima kenyataan bahwa negara ini semakin tidak menarik sebagai tujuan investasi langsung asing (FDI). Skor *corporate governance* di sejumlah negara Asia dapat dilihat di Lampiran 22.

Pemerintah Indonesia sendiri memandang sektor finansial sebagai indikator utama keberhasilan dan cerminan dari kepercayaan investor terhadap pemerintah. Tidak heran jika Presiden menyempatkan waktunya untuk membuka perdagangan di BEI dan mengunjungi New York Stock Exchange di sela kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat. Basri (2009) mengindikasikan hal ini sebagai bercokolnya sistem *financially driven capitalism* di Indonesia.

Universitas Indonesia

Perusahaan-perusahaan yang *listing* di BEI tidak mencerminkan struktur perekonomian. Sektor pertanian menyumbang 15 persen di dalam PDB, sedangkan bobot perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertanian dalam perhitungan IHSG (indeks harga saham gabungan) hanya 1,3 persen. Sebaliknya kontribusi sektor keuangan di dalam PDB relatif kecil yaitu 8,2 persen, tetapi bobot sektor tersebut dalam perhitungan IHSG sangat besar yaitu 28,3 persen. Sebagian besar dari mereka mungkin hanya berspekulasi untuk meraup keuntungan dari aksi jangka pendek jual beli saham, bukan investor sejati yang lebih mengutamakan ekspektasi jangka panjang.

Di sisi lain jumlah cadangan devisa Indonesia relatif sangat kecil jika dibandingkan dengan ukuran ekonomi Indonesia itu sendiri, sebesar 57,019 milyar dollar Amerika pada tahun 2008. Jumlah tersebut hanya mencapai sekitar 41,8 persen jumlah cadangan devisa Malaysia (136,543 milyar dollar Amerika) dan sekitar 22,6 persen dari jumlah cadangan devisa Singapura (252,180 milyar dollar Amerika). Dengan jumlah cadangan kecil, Indonesia justru menyimpan dana-dana milik asing, berupa hutang, saham dan obligasi, yang sangat besar. Dengan dana asing sebanyak 135,054 milyar pada tahun 2008, maka Indonesia menduduki peringkat keempat Asia dalam soal kepemilikan dana asing setelah Cina, Taiwan dan India. Dengan demikian, dana milik asing di Indonesia yang sewaktu-waktu bisa pergi mencapai 237 persen dari cadangan devisa yang tersedia. Hal ini sudah memperlihatkan rawannya posisi Indonesia, dibanding Cina, Taiwan dan India yang memiliki cadangan devisa lebih besar.

Tabel 4.7
Elemen Penentu Tingkat Kerawanan Eksternal
(Milyar US\$)

Negara	Utang Jangka Pendek	Saham Milik Asing	Obligasi Milik Asing	Total Dana Asing	Tingkat Kerawanan Ekstern (%)
INDONESIA	39,054	79,000	17,000	135,054	237
Korea	260,446	194,000	49,900	504,346	208
Filipina	17,497	18,500	0	35,997	97

Universitas Indonesia

Taiwan	85,223	162,000	1,480	248,703	88
Malaysia	25,427	39,000	32,100	96,527	71
India	36,617	140,000	5,000	181,617	59
Thailand	26,363	35,000	1,500	62,863	54
Vietnam	2,000	6,000	0	8,000	34
Cina	262,572	20,000	0	289,572	16

Catatan: Data saham dan obligasi Vietnam dan Cina tidak dipisahkan sehingga data sahamnya mencakup pula obligasi

Sumber: Basri (2009) dikutip dari CITI's Asia Macro Views, "Measuring Asia's External Vulnerability", 8 Oktober 2008.

4.2 Sejarah Standar Akuntansi di Indonesia

Ketika Orde Baru meraih kekuasaan di Indonesia pada tahun 1965, Indonesia berada dalam krisis ekonomi terburuk sejak memproklamasikan kemerdekaannya di tahun 1945. Antara tahun 1961 hingga 1965, kondisi ekonomi semakin menurun. Nilai ekspor menurun tajam dari 750 juta dollar Amerika menjadi 450 juta dollar Amerika. Tahun 1960 tingkat inflasi mencapai 20 persen per tahun tetapi pada tahun 1965 meningkat tajam hingga mencapai 600 persen. Para teknokrat yang dipimpin Emil Salim kemudian menjadi sosok paling berpengaruh dalam pengambilan kebijakan ekonomi oleh pemerintah. Presiden Suharto mengakui bahwa kelangsungan hidup pemerintahannya akan tergantung dari kemampuan untuk merenegosiasi hutang, mengamankan bantuan asing, mempromosikan investasi ke Indonesia dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Tujuan-tujuan tersebut tidak dapat tercapai selama pemerintahannya tidak dapat menarik modal asing kembali ke Indonesia dan mendapatkan dukungan dari IMF, World Bank dan lembaga donor internasional lainnya. Langkah ini membuat perilaku pemerintah Indonesia berubah dari kebijakan radikal populis dan nasionalis intervensionis menjadi kebijakan berbasis teknokrat.

Untuk dapat menarik modal asing tersebut, pemerintah memberikan perhatiannya kepada reformasi akuntansi dengan tujuan menghidupkan kembali pasar modal di Indonesia (Rosser, 1999). Hal ini disebabkan pada masa Presiden Sukarno, pemerintah menasionalisasi semua perusahaan Belanda di tahun 1958 dan menghentikan perdagangan saham di perusahaan-perusahaan Belanda pada

Universitas Indonesia

tahun 1960 yang secara efektif membuat pasar modal di Indonesia tidak mampu bertahan dan akhirnya tutup pada tahun 1968. Para teknokrat menyadari Indonesia membutuhkan pasar modal yang mampu berfungsi dengan baik untuk menarik modal asing kembali masuk ke Indonesia. Praktik akuntansi di Indonesia saat itu masih berpegang pada apa yang disebut *goed koopman's gebruik* atau adat kebiasaan pedagang yang baik (Kartikahadi, 2010).

Sebagai langkah awal untuk membangkitkan kembali pasar modal di Indonesia, mereka mendirikan Tim Penyiapan Pasar Modal dan Uang dibawah koordinasi Gubernur BI untuk membuat rekomendasi kepada bank sentral mengenai kebijakan pasar modal dan uang. Tahun 1970 dan 1972, para teknokrat mendirikan 2 (dua) badan lain, kembali di bawah Gubernur BI, untuk memulai proses pengaktifan kembali pasar modal sekaligus untuk mengawasi aktivitas tersebut. Sebagai bagian dari tugas badan tersebut, mereka bertanggung jawab untuk menghasilkan seperangkat standar akuntansi keuangan dan audit pada tahun 1973 bekerja sama dengan IAI. Standar akuntansi tersebut akhirnya tersusun pada tahun 1973 dan disebut dengan nama PAI yang merupakan kumpulan dari prinsip dasar, praktik, metode dan teknik akuntansi. Secara formal, PAI dikeluarkan oleh Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (KPAI) IAI. Dengan berbasis pada studi penelitian AICPA pada tahun 1965 berjudul "Inventory of Generally Accepted Accounting Principles for Business", PAI lebih ditekankan kepada isu-isu akuntansi secara umum daripada menyediakan petunjuk detail tentang praktek akuntansi. Isi PAI sangat sederhana, terdiri dari Pendahuluan dan 5 (lima) Bab yaitu Laporan Keuangan, Pendapatan dan Biaya, Aktiva, Hutang dan Kewajiban, Modal Sendiri, serta dilengkapi Daftar Istilah (Kartikahadi, 2010).

Kehadiran PAI dalam prakteknya tidak mendapat dukungan perundang-undangan. Undang-undang perseroan Indonesia yang banyak mengambil hukum Belanda hanya meminta pembukuan dibuat dan disimpan dengan akun-akun yang cukup memadai. Tidak ada permintaan spesifik bahwa pelaporan keuangan harus disusun sesuai dengan PAI atau seperangkat standar lain. Karena alasan tersebut dan diijinkannya perusahaan oleh PAI untuk mengacu standar akuntansi dari negara lain jika sebuah praktik akuntansi belum diatur di PAI, mengakibatkan

banyak perusahaan masih dengan bebas melakukan pembukuan dengan cara yang bervariasi.

Meskipun PAI banyak memiliki kelemahan teknik, pemerintah tidak melakukan satu tindakan pun untuk melakukan proses reformasi akuntansi hingga satu dekade ke depan. Alasan utama dari hal tersebut adalah karena pada era tahun 1970-an terjadi *the oil boom* dimana terjadi peningkatan harga minyak yang luar biasa antara tahun 1973-1974 dan kemudian terjadi lagi antara tahun 1979-1981. Dampaknya nilai ekspor minyak dan gas bumi Indonesia meningkat tajam dari 1,6 milyar dollar Amerika (50,1 persen dari total nilai ekspor) di tahun 1973 menjadi 18,4 milyar dollar Amerika (82,6 persen dari total nilai ekspor) di tahun 1982. Pada saat yang sama pendapatan pemerintah dari minyak dan gas bumi juga meningkat dari 382 milyar rupiah (39,5 persen dari total pendapatan pemerintah) di tahun 1973/1974 menjadi 8,6 trilyun rupiah (lebih dari 70 persen dari total pendapatan pemerintah) di tahun 1981/1982. Kondisi ini menyebabkan rencana pemerintah untuk terus melakukan reformasi akuntansi menjadi menguap. Dengan limpahan *petrodollar* yang terus mengalir ke kas pemerintah membuat pemerintah merasa tidak perlu untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan pasar modal untuk menarik modal asing masuk ke Indonesia.

Situasi *boom* minyak ini juga mengakibatkan kaum birokrat politik mengambil alih kendali pemerintahan dari kaum teknokrat dalam berbagai kebijakan ekonomi, termasuk menghilangkan rencana reformasi akuntansi dari agenda. Bahkan saat Indonesia kembali mendirikan pasar modal di tahun 1977, tidak diikuti dengan reformasi akuntansi. Tujuan utama pendirian kembali pasar modal juga telah berubah dari rencana semula. Pada pertengahan tahun 1970-an banyak terjadi demonstrasi mahasiswa dan kritik dari berbagai kelompok yang menghendaki diakhirinya dominasi Cina dan asing dalam perekonomian Indonesia. Karena alasan ini, pemerintah memutuskan untuk mendirikan kembali pasar modal di Indonesia, bukan sebagai mekanisme untuk meningkatkan modal asing, tetapi lebih sebagai mekanisme untuk mendistribusikan kekayaan dari perusahaan-perusahaan besar (terutama asing) kepada orang Indonesia. Situasi ini membuat tidak ada kebutuhan dari pemerintah untuk melakukan reformasi akuntansi. Redistribusi kekayaan melalui pasar modal menghasilkan beberapa

Universitas Indonesia

regulasi yang justru mengurangi permintaan asing terhadap saham-saham Indonesia. Rendahnya permintaan terhadap saham Indonesia juga berdampak pada semakin rendahnya permintaan akan informasi akuntansi yang baik dan kebutuhan untuk melakukan reformasi akuntansi.

Jatuhnya harga minyak dunia pada pertengahan tahun 1980-an dan adanya banyak tekanan terhadap pemerintah, membuat rencana reformasi akuntansi kembali masuk dalam agenda pembahasan. Jatuhnya harga minyak dunia mengurangi nilai ekspor dan pendapatan pemerintah dari sektor minyak dan gas bumi. Tahun 1986 nilai ekspor minyak dan gas bumi Indonesia jatuh ke angka 8,3 milyar dollar Amerika. (56 persen dari total nilai ekspor) dan pendapatan pemerintah dari sektor minyak dan gas bumi turun ke angka 6,3 trilyun rupiah (39,3 persen dari total pendapatan pemerintah). Pemerintah tidak memiliki banyak pilihan kecuali untuk menghidupkan kembali pasar modal Indonesia. Selama ini pasar modal di Indonesia secara drastis melambat dari tahun 1977 hingga pertengahan tahun 1980-an. Hanya 24 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) hingga akhir tahun 1988. Kondisi negara yang sangat membutuhkan sumber baru dari dana investasi mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang mengizinkan masuknya modal asing melalui investasi portofolio ke Indonesia. Kebijakan ini dirancang oleh kaum teknokrat dengan menggunakan pendekatan strategi pasar modal untuk meningkatkan infrastruktur pasar modal, termasuk diantaranya melalui permintaan pelaporan keuangan yang berkualitas.

Tetapi dalam langkah selanjutnya pemerintah lebih fokus pada deregulasi pasar modal daripada reformasi akuntansi dan lembaga lainnya. Permintaan pelaporan keuangan yang berkualitas dikhawatirkan justru akan menurunkan niat para konglomerat untuk *go public*. PAI sendiri sebenarnya sudah direvisi di tahun 1983 menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di Amerika Serikat dimana APB beralih menjadi FASB yang berdampak perubahan signifikan pada US GAAP. Tujuan utama dari paket deregulasi pasar modal adalah untuk mengatur kembali pasar modal Indonesia dengan mengeliminasi batasan pada pergerakan harga saham, memberikan jaminan ijin kepada investor asing untuk membeli saham perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEJ, menyederhanakan prosedur

Universitas Indonesia

untuk *issuing* dan *listing* sekuritas, menyamakan perlakuan pajak untuk bunga dan dividen dan mengurangi peran perusahaan investasi yang dimiliki negara dalam pembelian dan penjualan saham, *underwriting* dan *operating mutual fund*.

Beberapa tahun kemudian, tekanan kepada pemerintah semakin kuat untuk melakukan proses reformasi akuntansi. World Bank mengkritik kebijakan akuntansi oleh pemerintah. Mereka berpendapat bahwa reformasi dalam akuntansi sangat diperlukan jika Indonesia ingin melanjutkan proses pembangunan ekonomi dan pengembangan pasar modalnya. Pada laporan tahun 1993 mengenai kondisi perekonomian Indonesia, World Bank menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan sistem akuntansi dan audit yang berkualitas untuk menegakkan kedisiplinan dalam pelaporan keuangan perusahaan. Pengaruh World Bank yang sangat besar dalam meningkatkan investasi dan bantuan asing sangat dibutuhkan oleh Indonesia, akibatnya pemerintah berada dibawah tekanan untuk segera melaksanakan saran dari World Bank. Kondisi lain yang memaksa pemerintah untuk segera melakukan reformasi akuntansi adalah munculnya beberapa skandal keuangan yang dilakukan beberapa perusahaan besar seperti Bank Duta, Plaza Indonesia Realty dan Barito Pacific Timber.

Meskipun jumlah perusahaan konglomerat yang *go public* di BEJ semakin berkembang sejak deregulasi, lebih dari 200 perusahaan terdaftar di BEJ pada pertengahan tahun 1990-an, tetapi mereka tidak mempunyai niat untuk menyajikan tingkat pengungkapan dan transparansi laporan keuangan yang dibutuhkan oleh investor. Hasilnya pasar modal di Indonesia berkembang menjadi pasar yang memiliki risiko sekuritas sangat tinggi dan menjadi tempat spekulasi arus modal. Tekanan World Bank, kondisi pasar modal dan beberapa skandal keuangan yang terjadi menjadi pendorong bagi pemerintah untuk segera melakukan perbaikan terhadap kualitas laporan keuangan di Indonesia dan mentransformasi pasar modal yang sebelumnya ibarat berbentuk kasino menjadi tempat untuk memobilisasi arus investasi jangka panjang.

Akhirnya pada tahun 1994, pemerintah memperkenalkan seperangkat standar akuntansi keuangan baru yang diberi nama SAK untuk menggantikan PAI. Meskipun secara formal dikeluarkan oleh DSAK IAI, standar baru tersebut dihasilkan dari proyek kerjasama beberapa lembaga dan organisasi, yaitu IAI,

Universitas Indonesia

Bapepam, Arthur Andersen dan World Bank sebagai penyandang dana proyek (Rosser, 1999). Berbeda dengan PAI yang berbasis US GAAP, SAK sebagian besar mengacu ke IASs yang dikeluarkan IASC sehingga menyediakan seperangkat aturan akuntansi yang lebih komprehensif dari PAI. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga meluncurkan proyek kerjasama dengan World Bank untuk pengembangan regulasi akuntansi Indonesia di masa depan termasuk melakukan pelatihan bagi para akuntan profesional. Proyek tersebut diberi nama "*Second Accountancy Development Project*" dan memakan biaya hingga 34 juta dollar Amerika selama 6 (enam) tahun pelaksanaan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan bagi pemerintah dan sektor swasta. Proyek tersebut diharapkan akan menghasilkan 40 standar akuntansi keuangan.

Kartikahadi (2010) menjelaskan pergantian nama PAI menjadi SAK untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan sosial, ekonomi dan bisnis serta peran laporan akuntansi keuangan di era globalisasi. PAI tidak membedakan prinsip dan konsep dasar dengan standar. Dalam PAI, prinsip, konsep dasar dan standar tercampur menjadi satu. Prinsip dan konsep dasar seharusnya secara relatif lebih bersifat baku dan tidak berubah-ubah mengikuti perubahan keadaan atau kebutuhan. Sedangkan standar sebagai pedoman aplikasi dan merupakan konsesus yang harus diikuti para praktisi, dapat berubah sesuai perkembangan keadaan. Pencantuman nama "Indonesia" dalam PAI selain tidak menguntungkan dan mempersempit jangkauan ruang dalam era globalisasi juga sangat mengaburkan makna, karena PAI sebenarnya berisikan standar terbatas bidang akuntansi keuangan dan tidak mengatur bidang akuntansi lain yang ada di Indonesia.

Meskipun SAK disusun berbasis IASs yang dikeluarkan IASC, tetap ada perbedaan antara keduanya. Pertama, beberapa IASs tidak diadopsi karena tidak sesuai dengan kondisi di Indonesia. Kedua, SAK mengatur hal tertentu yang belum diatur oleh IAS. Dan ketiga, beberapa PSAK sengaja disusun lain dari IASs karena pertimbangan hukum dan keadaan yang berbeda. Dengan demikian sebenarnya Indonesia sudah melakukan proses konvergensi ke standar akuntansi internasional sejak tahun 1994.

Pada bulan Maret 1995, pemerintah melanjutkan proses reformasi akuntansi dengan mengeluarkan undang-undang perseroan baru yang memasukkan persyaratan pelaporan keuangan berbasis SAK dalam beberapa pasalnya. Undang-undang baru tersebut mewajibkan kepada semua perusahaan untuk melakukan pembukuan dan menyiapkan laporan keuangan berdasarkan SAK, kecuali terdapat beberapa faktor yang membuat mereka tidak dapat melakukannya. Selain itu, undang-undang ini meminta kepada perusahaan yang terdaftar di bursa efek untuk melakukan audit eksternal dari akuntan publik terhadap laporan keuangan yang mereka sajikan. Direksi dan komisaris harus bertanggung jawab terhadap segala informasi yang disajikan dalam laporan keuangan termasuk apabila informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan sehingga merugikan pihak lain. Pengaturan akuntansi juga dimasukkan ke dalam perundang-undangan pasar modal Indonesia untuk mengatur format laporan keuangan dan mencegah perusahaan berakuntabilitas publik dari penyajian informasi keuangan yang tidak benar dan menyesatkan. Akuntan publik yang menemukan perusahaan yang melanggar hukum dan menilai perusahaan tersebut dalam krisis finansial, diwajibkan untuk melaporkan ke Bapepam. Direksi, komisaris dan pemegang saham diwajibkan untuk melaporkan peristiwa penting yang dapat mempengaruhi harga saham. Undang-undang pasar modal baru juga meminta *bond issuer* untuk melaporkan bagaimana dana yang mereka dapatkan dari masyarakat akan digunakan.

Saat krisis moneter menghantam Indonesia dan Asia Tenggara pada tahun 1997, banyak analis ekonomi yang menyebutkan lemahnya praktik akuntansi sebagai penyebab krisis. Alasannya banyak investor asing yang meragukan uang investasi yang ditanamnya telah dikelola dan dilaporkan dalam pembukuan sesuai dengan standar akuntansi internasional (Rosser, 1999). Alan Greenspan, Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat saat itu mengkritik praktik akuntansi di negara-negara Asia dan mengatakan kepada Kongres Amerika Serikat bahwa krisis tidak akan reda sampai negara-negara yang terkena krisis mengadopsi aturan akuntansi dan audit yang lebih baik dan lebih jelas. World Bank juga membuat pernyataan tentang krisis moneter yang berkaitan dengan praktik akuntansi dengan memanggil perwakilan kantor akuntan besar yang termasuk dalam *The Big Five*

Universitas Indonesia

yaitu PricewaterhouseCoopers, Deloitte and Touche, KPMG Peat Marwick, Ernst and Young dan Arthur Andersen, untuk tetap mempertahankan nama *brand* kantor jika afiliasi mereka di negara-negara berkembang tidak menyetujui penggunaan standar akuntansi dan auditing internasional. Keinginan negara untuk memperbaiki kepercayaan investor dan menarik bantuan asing, membuat pemerintah tidak memiliki pilihan lain selain memberi perhatian khusus terhadap kritik-kritik tersebut.

Untuk menanggapi berbagai kritik dari dunia internasional terhadap praktik akuntansi di Indonesia, tahun 1998 pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan semua perusahaan yang memiliki aset 50 milyar rupiah atau lebih untuk mempublikasikan laporan keuangannya dan diaudit oleh auditor eksternal. Seperangkat regulasi baru untuk tata kelola perusahaan diterapkan untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa efek. Perusahaan *go public* wajib memberikan 30 persen tempat di Dewan Direksi kepada pihak independen yang akan memimpin komite audit internal perusahaan. Pihak independen harus berasal dari individu yang tidak mempunyai hubungan dengan pemilik saham mayoritas, direksi dan perusahaan lain yang tergabung dalam grup perusahaan.

Sampai dengan tanggal 1 Januari 2007, DSAK IAI telah mengeluarkan 55 PSAK termasuk PSAK mengenai Akuntansi Perbankan Syariah. Sebagian PSAK tersebut mengambil referensi lokal dari peraturan pasar modal yang dikeluarkan Bapepam-LK dan peraturan pada bidang khusus lainnya yaitu dana pensiun, asuransi, koperasi, kerjasama operasi, migas, pertambangan, kehutanan, pertanahan, telekomunikasi, kerjasama jalan tol, reksa dana, sewa guna usaha dan perbankan. Referensi luar yang dipakai yaitu US GAAP dan terutama yaitu IASs yang memang telah mempengaruhi sebagian besar isi PSAK sejak 1994. Sejalan dengan tren konvergensi dan perkembangan dunia usaha, standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk sektor swasta kemudian berkembang dari *single standard* menjadi *triple standard* dengan memasukkan SAK yang berlaku untuk entitas dan transaksi syariah (SAK Syariah) dan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP).

Tabel 4.8
Daftar SAK Yang Berlaku
Per 1 Januari 2007

No.	SAK	Referensi
1.	PSAK 1 (Revisi 1998), Penyajian Laporan Keuangan	IAS 1 (Revised 1997), Presentation of Financial Statements
2.	PSAK 2 (1994), Laporan Arus (Reformat 2007)	IAS 7 (Revised 1992), Cash Flow Statements
3.	PSAK 3, Laporan Keuangan Interim (Reformat 2007)	APB Opinion No. 28 (1973), Interim Financial Statements
4.	PSAK 4, Laporan Keuangan Konsolidasi (Reformat 2007)	IAS 27 (1989), Consolidated and Separate Financial Statements
5.	PSAK 5 (Revisi 2000), Pelaporan Segmen	IAS 14 (Revised 1997), Segment Reporting
6.	PSAK 7, Hubungan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (Reformat 2007)	IAS 24 (1984), Related Party Disclosures
7.	PSAK 8 (Revisi 2003), Peristiwa Setelah Tanggal Neraca	IAS 10 (1978), Events after the Balance Sheet Date
8.	PSAK 10, Transaksi dalam Mata Uang Asing (Reformat 2007)	IAS 21 (Revised 1993), The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
9.	PSAK 11, Penjabaran Laporan keuangan Dalam Mata Uang Asing (Reformat 2007)	-
10.	PSAK 12, Pelaporan keuangan mengenai Bagian Partisipasi Dalam Pengendalian Bersama Operasi dan Aset	IAS 31 (Revised 1990), Financial Reporting of Interests in Joint Ventures
11.	PSAK 13, Properti Investasi	IAS 25 (1986), Accounting for Investments

Universitas Indonesia

12.	PSAK 14, Persediaan (Reformat 2007)	IAS 2 (Revised 1993), Inventories
13.	PSAK 15, Akuntansi Untuk Investasi Dalam Perusahaan Asosiasi (Reformat 2007)	IAS 28 (Revised 1989), Accounting for Investments in Associates
14.	PSAK 16, Aset Tetap	IAS 16 (Revised 1993), Property, Plant, and Equipment
15.	PSAK 18, Akuntansi Dana Pensiun	<ul style="list-style-type: none"> • IAS 26 (1987), Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans • Peraturan-peraturan tentang dana pensiun di Indonesia, terutama UU No. 11/1992)
16.	PSAK 19 (Revisi 2000), Aset Tidak Berwujud	IAS 38 (1998), Intangible Assets
17.	PSAK 21, Akuntansi Ekuitas	Peraturan-peraturan yang mengatur perseroan di Indonesia serta beberapa SFAS mengenai akuntansi ekuitas
18.	PSAK 22, Akuntansi Penggabungan Usaha (Reformat 2007)	IAS 22 (Revised 1993), Accounting for Business Combinations
19.	PSAK 23, Pendapatan (Reformat 2007)	IAS 18 (1993), Revenue
20.	PSAK 24 (Revisi 2004), Imbalan Kerja	IAS 19 (Revised 2000), Employee Benefits
21.	PSAK 25, Laba Atau Rugi Bersih Untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar dan Perubahan Kebijakan Akuntansi (Reformat 2007)	IAS 8 (Revised 1993), Net Profit or Loss for the Period, Fundamental Errors, and Changes in Accounting Policies

22.	PSAK 26 (Revisi 1997), Biaya Pinjaman (Reformat 2007)	IAS 23 (Revised 1993), Borrowing Costs
23.	PSAK 27 (Revisi 1998), Akuntansi Perkoperasian (Reformat 2007)	Peraturan-peraturan mengenai koperasi di Indonesia
24.	PSAK 28 (Revisi 1996), Akuntansi Asuransi dan Kerugian	<ul style="list-style-type: none"> • SFAS 60, 91, 97, 113, 120 • Peraturan-peraturan mengenai asuransi di Indonesia
25.	PSAK 29, Akuntansi Minyak dan Gas Bumi	<ul style="list-style-type: none"> • SFAS 19, 25, 69 • Peraturan-peraturan tentang migas di Indonesia
26.	PSAK 30, Sewa	<ul style="list-style-type: none"> • SFAS 13 • Peraturan-peraturan mengenai sewa guna di Indonesia
27.	PSAK 31 (Revisi 2000), Akuntansi Perbankan	<ul style="list-style-type: none"> • IAS 30 (1990), Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions • Bank for International Settlement (BIS) • Peraturan-peraturan mengenai perbankan di Indonesia
28.	PSAK 32, Akuntansi Kehutanan	Peraturan-peraturan mengenai kehutanan di Indonesia
29.	PSAK 33, Akuntansi Pertambangan Umum	Peraturan-peraturan mengenai pertambangan di Indonesia
30.	PSAK 34, Akuntansi kontrak Kontruksi	IAS 11 (Revised 1993), Accounting for Construction Contracts

Universitas Indonesia

31.	PSAK 35, Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi	Peraturan-peraturan mengenai telekomunikasi di Indonesia
32.	PSAK 36, Akuntansi Asuransi Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> • SFAS 60, 81, 91, 97, 113, 120 • Peraturan-peraturan mengenai asuransi jiwa di Indonesia
33.	PSAK 37, Akuntansi penyelenggaraan Jalan tol (Reformat 2007)	Peraturan-peraturan mengenai manajemen jalan tol di Indonesia
34.	PSAK 38 (Revisi 2004), Akuntansi Restrukturisasi Ekuitas Sepengendali	APB 16, 29
35.	PSAK 39, Akuntansi kerjasama Operasi (Reformat 2007)	Peraturan-peraturan mengenai kerjasama operasi di Indonesia
36.	PSAK 40, Akuntansi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan / Perusahaan Asosiasi	Beberapa prinsip akuntansi Amerika Serikat
37.	PSAK 41, Akuntansi Waran (Reformat 2007)	<ul style="list-style-type: none"> • APB Opinion No. 14 (1969), Accounting for Convertible Debt and Debt Issued with Stock Purchase Warrants • Peraturan-peraturan Bapepam-LK di Indonesia
38.	PSAK 42, Akuntansi Perusahaan Efek (Reformat 2007)	<ul style="list-style-type: none"> • SFAS 12 • Peraturan-peraturan Bapepam-LK di Indonesia
39.	PSAK 43, Akuntansi Anjak Piutang (Reformat 2007)	<ul style="list-style-type: none"> • SFAS 77, Reporting by Transferor for Transfers of Receivables with Recourse • Peraturan-peraturan Bapepam-

		LK di Indonesia
40.	PSAK 44, Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate (Reformat 2007)	SFAS 66, Accounting for Sales of Real Estate
41.	PSAK 45, Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Reformat 2007)	SFAS 117, Financial Statements of Not-for-Profit Organizations
42.	PSAK 46, Akuntansi Pajak Penghasilan (Reformat 2007)	IAS 12 (1996), Income Taxes
43.	PSAK 47, Akuntansi Tanah	Peraturan-peraturan pertanahan di Indonesia
44.	PSAK 48, Penurunan Nilai Aset	IAS 36 (1998), Impairment of Assets
45.	PSAK 49, Akuntansi Reksa Dana	Peraturan-peraturan mengenai reksa dana di Indonesia
46.	PSAK 50, Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan	SFAS No. 115, Accounting for Certain Investments in Debt and Equity Securities
47.	PSAK 51 (Revisi 2003), Akuntansi Kuasi-Reorganisasi	ARB 43, Ch. 7 Capital Accounts, Section A: Quasi Reorganizations or Corporate Readjustment
48.	PSAK 52, Mata Uang Pelaporan	SFAS No. 52, Foreign Currency Translation
49.	PSAK 53, Akuntansi Kompensasi Berbasis Saham	SFAS 123, Accounting for Stock-Based Compensation
50.	PSAK 54, Akuntansi Restrukturisasi Utang-Piutang Bermasalah	SFAS 15, Accounting by Debtors and Creditors for Troubled Debt Restructuring
51.	PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran	SFAS 133, Accounting for Derivatives Instruments and Hedging Activities

Universitas Indonesia

52.	PSAK 56, Laba Per Saham (LPS)	IAS 33 (1997), Earnings per Share
53.	PSAK 57, Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi dan Aset Kontijensi	IAS 37 (1998), Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
54.	PSAK 58, Operasi Dalam Penghentian	IAS 35 (1998), Discontinuing Operations
55.	PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Fatwa MUI • Rerangka Konseptual untuk Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan untuk Transaksi Syari'ah • Standar akuntansi yang diterbitkan oleh AAOFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic).

Sumber: diolah dari Deloitte and Touche (2007)

Ringkasan dari tabel diatas yaitu: 28 PSAK disusun dengan mengacu kepada IAS, 20 PSAK dikembangkan dengan mengacu kepada US GAAP, 8 PSAK dikembangkan sendiri oleh DSAK IAI, dan 1 PSAK tentang perbankan syari'ah mengacu kepada standar akuntansi yang diterbitkan oleh AAOFI serta peraturan-peraturan terkait yang berlaku di Indonesia.

4.3 Perkembangan SAK berbasis IFRSs

Peringatan ulang tahun IAI ke-51 pada bulan Desember 2008 dijadikan momentum untuk mendeklarasikan rencana Indonesia melakukan konvergensi IFRSs dalam pengaturan standar akuntansi keuangan. Pengaturan perlakuan akuntansi yang konvergen dengan IFRSs akan diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Sasaran konvergensi adalah merevisi SAK agar secara material sesuai dengan IFRSs versi 1 Januari 2009 dan akan dilakukan secara bertahap.

Berdasarkan proposal konvergensi yang dikeluarkan IAI, proses ini akan dibagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap adopsi, tahap persiapan dan tahap implementasi. Tahap adopsi dilakukan pada tahun 2008 - 2010 dengan mengadopsi seluruh IFRSs yang berlaku per tanggal 1 Januari 2009 ke dalam SAK. Tahap persiapan dilakukan pada tahun 2011 untuk menyiapkan seluruh infrastruktur pendukung untuk implementasi SAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRSs. Tahap implementasi dilaksanakan tahun 2012 dimana pada tahap ini dilakukan penerapan SAK yang telah mengadopsi seluruh IFRSs bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik. Arah pengembangan SAK dilakukan IAI dengan mengkategorikan PSAK yang sudah ada. PSAK yang tidak sama dengan IFRSs akan dilakukan revisi atau dibuat PSAK baru. PSAK yang mengatur industri khusus akan dihilangkan dan dibuat pedoman akuntansi. PSAK yang sudah sama dengan IFRSs akan dipertahankan. PSAK untuk hal yang belum atau tidak diatur dalam IFRSs akan tetap dikembangkan.

Meskipun program konvergensi IFRSs baru diluncurkan IAI pada bulan Desember 2008, proses konvergensi IASs/IFRSs ke dalam SAK sudah dimulai sebelum itu dengan dikeluarkannya PSAK 50 (Revisi 2006), PSAK 55 (Revisi 2006), PSAK 13 (Revisi 2007), PSAK 16 (Revisi 2007), PSAK 30 (Revisi 2007), PSAK 14 (Revisi 2008) dan PSAK 26 (Revisi 2008). Karena mempertimbangkan kesiapan institusi keuangan, penerapan PSAK 50 (Revisi 2006), PSAK 55 (Revisi 2006) dan PSAK 26 (Revisi 2008) berlaku mulai 1 Januari 2010. Sedangkan keempat PSAK revisi lainnya sudah berlaku mulai 1 Januari 2008 (kecuali PSAK 14 mulai 1 Januari 2009). PSAK 13 (Revisi 2007) mengenalkan model nilai wajar sebagai alternatif model biaya dalam pengukuran setelah pengakuan awal (*subsequent measurement*), PSAK 16 (Revisi 2007) mengizinkan model revaluasi selain model biaya untuk digunakan dalam pengukuran aset tetap karena sebelumnya revaluasi aset tetap dilarang kecuali apabila peraturan pemerintah mengizinkan. PSAK 30 (Revisi 2007) menekankan klasifikasi sewa guna usaha dengan prinsip *substance over form*. Sedangkan PSAK 14 (Revisi 2008) hanya mengizinkan metode FIFO dan *average* untuk mengukur persediaan dan mengizinkan penggunaan nilai wajar. Keempat hal tersebut membawa implikasi perpajakan baru yang menambah rumit rekonsiliasi fiskal yang harus dilakukan

Universitas Indonesia

wajib pajak pada laporan keuangannya. Sejauh ini DJP sebagai otoritas perpajakan baru pada tahap melakukan diskusi dan evaluasi terhadap perbedaan-perbedaan yang terjadi.

Tabel 4.9
SAK Revisi Berbasis IASs/IFRSs
Tahun 2006 - 2008

No.	SAK	Tgl Efektif	Referensi
1.	PSAK 50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan	1 Januari 2010	IAS 32, Financial Instruments: Presentation and Disclosure
2.	PSAK 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran	1 Januari 2010	IAS 39, Financial Instruments: Recognition and Measurement
3.	PSAK 13 (Revisi 2007), Properti Investasi	1 Januari 2008	IAS 40, Investment Property
4.	PSAK 16 (Revisi 2007), Aset Tetap	1 Januari 2008	IAS 16, Property, Plant and Equipment
5.	PSAK 30 (Revisi 2007), Sewa	1 Januari 2008	IAS 17, Leases
6.	PSAK 14 (Revisi 2008), Persediaan	1 Januari 2009	IAS 2, Inventories
7.	PSAK 26 (Revisi 2008), Biaya Pinjaman	1 Januari 2010	IAS 23, Borrowing Costs

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Gelombang kedua implementasi SAK revisi yang sudah mengadopsi IASs/IFRSs akan melanda Indonesia tanggal 1 Januari 2011 dimana saat itu 15 PSAK Revisi berbasis IASs/IFRSs akan mulai efektif berlaku.

Tabel 4.10
SAK Revisi Berbasis IASs/IFRSs
Tahun 2009 - 2010

No.	SAK	Tgl Efektif	Referensi
1.	PSAK 1 (Revisi 2009), Penyajian Laporan Keuangan	1 Januari 2011	IAS 1, Presentation of Financial Statements
2.	PSAK 2 (Revisi 2009), Laporan Arus Kas	1 Januari 2011	IAS 7, Cash Flow Statements
3.	PSAK 4 (Revisi 2009), Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri	1 Januari 2011	IAS 27, Consolidated and Separate Financial Statements
4.	PSAK 5 (Revisi 2009), Segmen Operasi	1 Januari 2011	IFRS 8, Operating Segments
5.	PSAK 12 (Revisi 2009), Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama	1 Januari 2011	IAS 31 Interests in Joint Ventures
6.	PSAK 15 (Revisi 2009), Investasi pada Entitas Asosiasi	1 Januari 2011	IAS 28, Investment in Associates
7.	PSAK 25 (Revisi 2009), Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan	1 Januari 2011	IAS 8, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
8.	PSAK 48 (Revisi 2009), Penurunan Nilai Aset	1 Januari 2011	IAS 36, Impairment of Assets
9.	PSAK 57 (Revisi	1 Januari 2011	IAS 37, Provisions,

Universitas Indonesia

	2009), Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi		Contingent Liabilities and Contingent Assets
10.	PSAK 58 (Revisi 2009), Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan	1 Januari 2011	IFRS 5, Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
11.	PSAK 7 (Revisi 2010), Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	1 Januari 2011	IAS 24, Related-Party Disclosures
12.	PSAK 10 (Revisi 2010), Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing	1 Januari 2012	IAS 21, The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
13.	PSAK 19 (Revisi 2010), Aset Tidak Berwujud	1 Januari 2011	IAS 38, Intangible assets
14.	PSAK 22 (Revisi 2010), Kombinasi Bisnis	1 Januari 2011	IFRS 3, Business Combinations
15.	PSAK 23 (Revisi 2010), Pendapatan	1 Januari 2011	IAS 18, Revenue
16.	PSAK ETAP	1 Januari 2011	IFRS for SME

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Farahmita (2010) mengidentifikasi beberapa penyesuaian atau perbedaan antara PSAK 1, Penyajian Laporan Keuangan dengan IAS 1, Presentation of Financial Statements. Hal ini berarti DSAK IAI tidak mengadopsi seluruh bagian IAS 1 ke dalam PSAK 1. Perbedaan tersebut yaitu:

Universitas Indonesia

- a. Entitas syariah tidak menggunakan PSAK 1, tetapi menggunakan SAK Syariah.
- b. Penerapan IAS 1 untuk entitas nirlaba dan entitas sektor publik dihilangkan karena entitas nirlaba diatur dalam PSAK 45, Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (berbasis US GAAP) dan entitas sektor publik menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah.
- c. Penerapan IAS 1 untuk reksa dana dan koperasi juga dihilangkan karena diatur di PSAK 49, Akuntansi Reksa Dana dan PSAK 27, Akuntansi Perkoperasian yang merupakan standar akuntansi pengembangan IAI sendiri.
- d. Dilakukan beberapa penyesuaian pada ilustrasi Laporan Posisi Keuangan.

Selama tahun 2010, IAI telah mengadakan 3 (tiga) kali *public hearing* untuk meminta tanggapan, saran dan masukan terkait dengan ED yang telah dikeluarkan oleh DSAK IAI sebelum menjadi SAK. Sesuai *roadmap* konvergensi IFRSs, kesepuluh ED diharapkan berlaku efektif sebagai SAK per tanggal 1 Januari 2012. Daftar lengkap ED PSAK Revisi Berbasis IASs/IFRSs yang dikeluarkan selama tahun 2010 dapat dilihat di Lampiran 23.

Dengan telah dikeluarkannya ED sebagaimana tersebut diatas, berarti hanya tinggal 7 (tujuh) IASs/IFRSs yang belum diadopsi oleh DSAK IAI hingga tanggal 30 Agustus 2010. Sebagian besar standar yang belum diadopsi tersebut mengatur sektor-sektor tertentu seperti asuransi, konstruksi, pertanian dan aset mineral. Asuransi selama ini diatur pada banyak PSAK yang terpisah, aset mineral diatur dalam PSAK 33, konstruksi dalam PSAK 34 dan pertanian dalam PSAK 14 dan PSAK 16. Khusus untuk laba per saham, PSAK 56 yang selama ini mengatur hal tersebut memiliki banyak kesamaan dengan IAS 33.

Tabel 4.11
Sisa IASs/IFRSs Yang Belum Diadopsi
Per 30 Agustus 2010

No.	Nama	Nama Standar
1	IFRS 1	First-time Adoption of International Financial Reporting Standards
2	IFRS 4	Insurance Contracts

Universitas Indonesia

3	IFRS 6	Exploration for and Evaluation of Mineral Assets
4	IFRS 9	Financial Instruments
5	IAS 11	Construction Contracts
6	IAS 33	Earnings Per Share
7	IAS 41	Agriculture

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Purba (2010) mengidentifikasi beberapa isu yang perlu mendapat perhatian dengan dikeluarkannya SAK berbasis IASs/IFRSs sebagai berikut:

- a. Revaluasi aset tetap tidak diakui sebagai laba melainkan sebagai bagian dari ekuitas. Revaluasi aset tetap tidak hanya menaikkan nilai aset tetapi juga dapat menurunkan nilai aktiva yang belum atau pernah direvaluasi.
- b. Laporan keuangan dapat dilaporkan dalam mata uang manapun. Tetapi akan lebih baik jika laporan keuangan dilaporkan dengan menggunakan mata uang fungsionalnya. Jika mata uang pelaporan berbeda dengan mata uang fungsional, maka manajemen wajib melakukan prosedur *remeasurement* untuk mengukur kembali saldo-saldo yang ada pada laporan keuangan tersebut ke dalam mata uang pelaporan.
- c. Pemegang saham dikelompokkan sebagai bagian dari pihak yang memiliki hubungan istimewa. pemegang saham BUMN adalah negara, sedangkan pemerintah adalah penyelenggara negara. Dalam kasus BUMN, harus bisa dibedakan saat kapan pemerintah bertindak sebagai pemegang saham mewakili negara dan saat kapan pemerintah bertindak sebagai regulator.
- d. Laporan keuangan interim harus disajikan dengan kualitas penyajian dan pengungkapan "*condensed financial statements*" atau laporan keuangan dengan penyajian yang dipadatkan.
- e. IASs/IFRSs harus diterapkan secara konsisten dengan berlandaskan pada *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements*.
- f. Sebagian besar standar akuntansi dan pelaporan keuangan di IASs/IFRSs menggunakan dasar nilai wajar sebagai basis penilaian atas aset, saham, obligasi dan lain-lain. Nilai wajar ditentukan dengan 3 (tiga) jenjang yaitu harga pasar resmi, harga pasar produk sejenis dan nilai wajar yang ditentukan

appraisal. Dalam menentukan nilai wajar, prioritas utama ditekankan pada penggunaan harga pasar resmi aset yang dinilai.

- g. Di Indonesia tidak terdapat lembaga *financial accounting standard setter* yang netral dan independen yang bertugas untuk menerbitkan dan melegitimasi suatu standar akuntansi dan pelaporan keuangan. Begitu juga dengan *due process* yang harus dilalui oleh suatu standar akuntansi dan pelaporan keuangan agar dapat dikatakan "*generally accepted accounting principles*" dianggap tidak lengkap.
- h. Di Indonesia saat ini diberlakukan dua sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yaitu sistem akuntansi keuangan konvensional dan sistem akuntansi syariah.
- i. Penerjemahan IFRSs menjadi SAK.
- j. Sumber daya manusia dan dunia pendidikan di Indonesia masih belum menunjukkan kesiapan menghadapi implementasi IFRSs di tahun 2012.

4.4 Promotor Konvergensi IFRSs di Indonesia

Di Indonesia selain DSAK IAI sebagai penyusun standar akuntansi, Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) dan BI adalah 2 (dua) motor utama penggerak konvergensi IFRSs di Indonesia. Meskipun pemerintah mendukung konvergensi IFRSs karena komitmennya kepada G-20 tetapi posisi ketiganya sebagai promotor tidak lepas dari keanggotaannya di lembaga atau organisasi internasional yang sangat mendukung tujuan IASB melakukan konvergensi IFRSs ke standar akuntansi nasional tiap negara. IAI anggota IFAC, Bapepam-LK anggota IOSCO dan BI anggota BIS.

Bapepam-LK menjadi anggota IOSCO sejak 1984 dan bahkan merupakan salah satu negara pertama diluar benua Amerika selain Perancis, Korea Selatan dan Inggris yang mendaftarkan diri sebagai anggota di organisasi yang semula dibentuk sebagai perkumpulan pengawas pasar modal di benua Amerika. Menurut Wulandari (2010), otoritas pasar modal Indonesia mendukung konvergensi IFRSs karena kebutuhan untuk melindungi investor terutama investor publik, mendukung kesepakatan forum negara-negara G-20, mematuhi rekomendasi ROSC (Report on the Observance of Standards and Codes) atas akuntansi,

Universitas Indonesia

auditing dan tata kelola perusahaan sebagai pelaksanaan Financial Sector Assessment Program (FSAP)⁵, komitmen terhadap skema ASEAN Capital Market Forum (ACMF)⁶ dan mengikuti 30 IOSCO *principles*.

Salah satu prinsip IOSCO mensyaratkan standar akuntansi dan auditing yang berkualitas tinggi dan diterima secara internasional serta mekanisme yang layak dalam menyusun dan menginterpretasikan standar akuntansi dan auditing berkualitas tinggi. Hasil ROSC tahun 2006 menyebutkan PSAK tidak *full converged* dengan IASs/IFRSs, SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) tidak *converged* ke ISA (International Standards of Auditing) dan peraturan tentang akuntan publik perlu disahkan. ROSC merekomendasikan arah kegiatan badan penyusun standar akuntansi di Indonesia seharusnya ditujukan untuk mencapai konvergensi penuh dengan IFRSs. Sedangkan ACMF dibentuk dengan tujuan untuk mendorong negara-negara ASEAN (Association of South East Asia Nations) untuk mengadopsi praktik akuntansi terbaik di internasional dalam standar transparansi dan telah bersepakat untuk mengadopsi IFRSs dan ISA sebagai standar yang digunakan untuk penyusunan dan audit atas laporan keuangan.

Pengguna SAK di pasar modal yang diwajibkan IFRSs yaitu emiten, reksa dana, perusahaan efek, manajer investasi dan SROs (Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia). Bagi pasar modal sendiri keuntungan konvergensi IFRSs adalah menghilangkan pembatas arus investasi antar negara, meningkatkan kualitas informasi keuangan sehingga lebih transparan, meminimalkan bias dan meningkatkan komparabilitas, memudahkan koordinasi pelaporan untuk kepentingan dalam dan luar negeri, mengurangi biaya operasi MNCs dan mendorong adanya *cross border offering*.

Untuk mendukung program konvergensi IFRSs di Indonesia, Bapepam-LK mendukung IAI dalam beberapa kegiatan, yaitu:

⁵ FSAP merupakan program kerjasama IMF dan World Bank untuk menilai stabilitas dan pengembangan sistem keuangan suatu negara dengan fokus pada kepatuhan terhadap peraturan dan untuk mendorong tercapainya stabilitas ekonomi makro dan stabilitas sistem keuangan domestik dan internasional.

⁶ ACMF merupakan forum regulator pasar modal yang fokus untuk melakukan harmonisasi peraturan dan regulasi dalam rangka mencapai integrasi pasar modal di lingkungan ASEAN.

- a. Membantu DSAK IAI dalam penerjemahan dan pengkajian IFRSs : IAS 1, Presentation of Financial Statements; IFRS 3, Business Combination; dan IFRS 2, Share Based Payment.
- b. Mengkaji dan memberikan tanggapan atas ED PSAK yang diterbitkan oleh DSAK IAI.
- c. Mengkaji dampak konvergensi IFRSs terhadap industri pasar modal seperti pencabutan PSAK berbasis industri (telekomunikasi, perbankan, dana pensiun dan lain-lain), PSAK 49, Akuntansi Reksa Dana dan pencabutan PSAK 42, Akuntansi Perusahaan Efek. Pencabutan ini membuat Bapepam-LK bersama DSAK IAI menyusun draft peraturan tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana berbentuk KIK dan merevisi Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE).

Dari sisi moneter, BI sebagai pemegang otoritas terkena dampak dari diterapkannya PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) mulai 1 Januari 2010. PSAK 50 (Revisi 2006) mengharuskan laporan keuangan menyajikan informasi yang memungkinkan pemakai laporan keuangan mengevaluasi sifat dan cakupan risiko yang berasal dari instrumen keuangan yang dimiliki oleh perusahaan pada tanggal pelaporan. Penyajian dilakukan baik atas informasi kualitatif maupun kuantitatif. Sedangkan PSAK 55 (Revisi 2006) memberikan pedoman pengakuan, pengukuran dan penghentian pengukuran aset keuangan dan kewajiban keuangan termasuk instrumen derivatif. Standar tersebut memberikan pedoman pengakuan dan pengukuran kontrak penjualan dan pembelian item keuangan. Pada saat pengakuan awal, aset dan kewajiban keuangan diukur dengan menggunakan nilai wajar.

Kedua PSAK revisi berbasis IASs/IFRSs tersebut akan mempengaruhi laporan keuangan bank yang diwajibkan memenuhi PKPM (Persyaratan Kecukupan Permodalan Minimum) Bank sesuai ketentuan Basel II Accord. Tidak heran jika Basel Committee on Banking Supervision atau BIS masuk sebagai peninjau dalam Monitoring Board of IASCF dan menjadi anggota IFRS Advisory Council. Penghitungan CAR (*current asset ratio*) dalam Basel II Accord dilakukan dengan membagi modal dengan total nilai aset tertimbang menurut

Universitas Indonesia

resiko (ATMR). Penilaian aset berupa instrumen keuangan berdasarkan nilai wajar dan risiko dari aset itu sendiri, berpengaruh langsung pada tinggi rendahnya CAR. BI yang merupakan anggota BIS harus menjaga kedisiplinan pelaksanaan PSAK 50 (revisi) dan PSAK 55 (revisi) sebagai penentu PKPM.

4.5 Motif Konvergensi IFRSs di Indonesia

Pembahasan motif konvergensi IFRSs di Indonesia akan dilihat dari teori ekonomi politik dari perspektif globalisasi ekonomi, terutama dengan pendekatan kapitalisme global; dan teori regulasi akuntansi keuangan dari perspektif pro-regulasi. Dari dua sudut pandang tersebut diharapkan dapat memperlihatkan bahwa fenomena konvergensi IFRSs yang berkembang ke seluruh dunia terutama bukan disebabkan oleh kualitas standar akuntansi global itu sendiri tetapi dikarenakan lemahnya posisi negara yang bersangkutan, termasuk Indonesia, menghadapi pihak eksternal yaitu lingkungan masyarakat global dan kepentingan investor global serta perusahaan multinasional yang menginginkan keseragaman praktik akuntansi dan penyajian pelaporan keuangan di dunia.

4.5.1 Perspektif Globalisasi Ekonomi: Pendekatan Kapitalisme Global

Sistem kapitalisme terlalu condong ke motif keuntungan dan persaingan tapi gagal melindungi kepentingan umum melalui pembuatan keputusan secara bersama-sama. Sistem ini memberi kekuasaan terlalu banyak pada negara-negara di pusat sistem ekonomi global. Kita hidup dalam ekonomi global yang tidak hanya bercirikan perdagangan bebas atas barang dan jasa tetapi lebih-lebih oleh pergerakan modal yang bebas. Angka suku bunga, angka nilai tukar dan harga saham di berbagai negara saling berkaitan erat dan pasar uang global sangat besar pengaruhnya pada kondisi ekonomi. Untuk peran menentukan yang dimainkan oleh modal uang internasional pada kesejahteraan masing-masing negara maka cukup tepat apabila Soros menyebutnya sebagai sistem kapitalisme global.

Sistem ini sangat menguntungkan modal uang yang bebas bergerak ke mana saja dan memberi keuntungan lebih banyak yang pada gilirannya mendatangkan pertumbuhan cepat bagi pasar uang global. Hasilnya adalah berupa sistem perputaran raksasa, yang menghisap modal ke lembaga-lembaga keuangan

Universitas Indonesia

dan pasar di pusat sistem ekonomi global kemudian mengalir keluar dari pusat sistem ekonomi global, baik secara langsung dalam bentuk kredit dan investasi portofolio ataupun secara tidak langsung melalui perusahaan-perusahaan multinasional. Modal mendatangkan banyak keuntungan, suatu peningkatan dalam kapasitas produksi, maupun perbaikan metode produksi dan berbagai inovasi lain. Hal ini membuat negara-negara saling bersaing menarik dan menahan modal, termasuk Indonesia, dan jika ingin sukses, mereka harus mendahulukan syarat-syarat modal internasional dengan menomor-duakan tujuan-tujuan lain.

Hubungan antara negara yang berada di pusat sistem ekonomi global dan di luar pusat sistem ekonomi global sangat timpang. Negara-negara di pusat tidak hanya lebih kaya tetapi juga lebih stabil karena mengontrol masa depannya sendiri. Pemilikan modal oleh pihak asing merampas otonomi negara-negara di luar pusat sistem dan sering menghambat perkembangan lembaga-lembaga demokrasi. Arus modal internasional sering diselengi "bencana". Akibatnya lebih sulit untuk mempertahankan modal di negara di luar pusat sistem dibanding negara di pusat sistem, dan kaum kapitalis di negara-negara di luar pusat sistem seperti Indonesia cenderung mengakumulasikan modalnya di luar negeri. Kesenjangan meningkat dan kerugian yang menimpa negara-negara di luar pusat sistem sebagai akibat keanggotaannya dalam sistem kapitalisme global terkadang melebihi keuntungan yang mereka dapatkan.

Sistem kapitalisme global sebenarnya bukan barang baru, bahkan tidak tergolong baru. Pendahulu-pendahulunya sudah ada sejak negara-negara kota (*city states*) Italia dan konfederasi Hanseatic League⁷ di Jerman menyatukan berbagai entitas politik dengan ikatan-ikatan bisnis dan keuangan. Kapitalisme menjadi dominan dalam abad ke-19 dan tetap demikian sampai kemudian runtuh oleh Perang Dunia I. Rezim yang berkuasa sekarang mempunyai beberapa ciri yang membedakannya dari wujud sebelumnya. Ciri pembeda kapitalisme global saat ini adalah gerakan modal yang bebas. Perdagangan internasional di bidang barang dan jasa belum cukup menciptakan ekonomi global. Faktor-faktor produksi pun

⁷ Hanseatic League dicetuskan oleh Duke Henry the Lion of Saxony pada tahun 1159 di Lubeck, Jerman Utara untuk menciptakan aliansi ekonomi dan perdagangan antara kota-kota di Jerman dalam rangka menghapus batasan atau penghalang yang sering menghambat perdagangan.

harus dapat saling dipertukarkan. Tanah dan sumber-sumber daya alam lainnya tidak bergerak dan penduduk tidak mudah bergerak, sehingga mobilitas modal dan informasi yang berperan dalam integritas ekonomi.

Oleh karena modal uang lebih bebas dan fleksibel dibanding investasi fisik, maka modal uang menempati posisi yang istimewa. Modal tersebut dapat menghindari negara-negara yang pajak atau peraturannya terlalu berat. Sedangkan dalam investasi fisik, begitu sebuah pabrik dibangun, sulit untuk memindahkannya. Meskipun perusahaan multinasional menikmati fleksibilitas dalam penentuan harga transfer dan dapat melakukan tekanan-tekanan pada saat membuat keputusan investasi modal, fleksibilitas tersebut tidak sebanding dengan kebebasan memilih yang dinikmati oleh para investor portofolio internasional. Peluang-peluang investasi yang dipilih biasanya lebih besar di pusat ekonomi global daripada di luar pusat ekonomi global. Semua faktor ini berpadu untuk menarik modal ke pusat-pusat uang dan mengalokasikannya melalui pasar uang. Itulah sebabnya mengapa pasar uang begitu dominan di dunia dewasa ini dan mengapa pengaruhnya meroket begitu cepatnya.

Gerakan modal yang bebas merupakan fenomena yang cukup hebat apabila melihat kondisi pada akhir Perang Dunia II dimana kebanyakan ekonomi negara bersifat nasional, perdagangan internasional sedang dalam keadaan surut dan baik investasi langsung maupun transaksi uang praktis terhenti. Lembaga-lembaga Bretton Woods, IMF dan World Bank, kemudian didesain untuk membuat perdagangan internasional berkembang di dunia yang pada saat itu sepi dari pergerakan modal internasional. World Bank dimaksudkan untuk mengisi kekurangan kredit finansial yang dapat menutup ketidakseimbangan neraca perdagangan. Modal internasional mengalir ke negara-negara berkembang untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Beberapa negara lebih memilih menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing daripada mendorong pertumbuhan investasi asing. Nasionalisasi industri-industri strategis marak pula terjadi di Eropa. Sebagian besar investasi di negara-negara berkembang berbentuk G to G (*government to government* atau pemerintah ke pemerintah). Perdagangan internasional akhirnya beranjak pulih yang kemudian diikuti berkembangnya investasi langsung. Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat pindah ke Eropa,

Universitas Indonesia

kemudian ke bagian-bagian dunia yang lain. Perusahaan-perusahaan yang berasal dari negara lain menyusul. Banyak industri, seperti mobil, obat-obatan dan komputer, mulai didominasi oleh perusahaan multinasional. Sedangkan pasar uang internasional berkembang lebih lambat karena banyak mata uang yang belum sepenuhnya dapat dipertukarkan dan banyak negara bertahan mengendalikan sendiri transaksi modalnya. Pengendalian modal baru dihapus secara bertahap.

Maraknya pasar kapitalisme global sebenarnya berawal dari peristiwa di tahun 1970-an. Saat itu, negara-negara penghasil minyak yang tergabung dalam OPEC menaikkan harga minyak pada tahun 1973 dari 1,90 menjadi 9,76 dollar Amerika per barel. Negara-negara pengekspor minyak, termasuk Indonesia, saat itu menikmati surplus besar-besaran secara tiba-tiba (dikenal dengan *oil boom*). Kemudian pada tahun 1979, karena perang Iran-Irak, harga minyak naik lagi dari 12,70 menjadi 28,76 dollar Amerika per barel. Akibatnya negara-negara pengimpor minyak harus menanggung defisit besar. Yang menarik, surplus dana negara-negara pengekspor minyak justru dialirkan ke bank-bank komersial di Amerika dan Eropa atas desakan atau bujukan pemerintah-pemerintah Barat untuk mendaur ulang surplus dana tersebut. *Euro-dollar* pun akhirnya ditemukan dan pasar-pasar uang di luar negeri semakin berkembang pesat.

Perkembangan pasar uang internasional mendapat dorongan kemajuan besar pada tahun 1980-an, ketika Margareth Thatcher dan Ronald Reagan memegang kekuasaan di Inggris Raya dan Amerika Serikat dengan program memisahkan pemerintahan dari ekonomi dan memberi kesempatan pada mekanisme pasar untuk bekerja. Ini berarti pemberlakuan disiplin moneter ketat, yang pada mulanya berdampak menjebloskan dunia dalam resesi dan mempercepat terjadinya krisis utang internasional. Ekonomi dunia memerlukan beberapa tahun untuk memulihkan diri. Sejak saat itu, ekonomi global menikmati periode panjang ekspansi yang dapat dikatakan tanpa interupsi. Sekalipun terjadi krisis-krisis periodik, perkembangan pasar uang internasional telah berakselerasi mencapai titik yang dapat disebut benar-benar global. Pergerakan nilai tukar valuta, tingkat suku bunga dan indeks harga saham di berbagai negara sangat erat berkaitan. Bukan suatu kebetulan jika pada pertengahan tahun 1980-an, Indonesia

Universitas Indonesia

kembali mengaktifkan kembali pasar modalnya dengan beberapa deregulasi keuangan yang dikeluarkan untuk mendukung hal tersebut.

Jika demikian, kapan sebenarnya rezim kapitalisme global yang ada sekarang ini dimulai? Apakah di tahun 1970-an, ketika pasar uang luar negeri ditetapkan dalam *euro-dollar*? Apakah di awal tahun 1980-an ketika Thatcher dan Reagan memegang tampuk pimpinan di negara mereka? Atau di tahun 1989 saat Uni Soviet bubar dan kapitalisme menjadi benar-benar bebas untuk bergerak mengglobal? Saya berpendapat rezim kapitalisme global dimulai pada awal tahun 1980-an karena pada saat itulah fundamentalisme pasar menjadi sangat dominan di negara-negara Barat.

Dalam kapitalisme global, keseimbangan keuntungan sangat berpihak kepada pemilik modal, sehingga sering dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional dan pasar uang internasional dengan suatu cara telah menggeser kedaulatan negara. Hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Negara-negara masih tetap bisa mempertahankan kedaulatannya dan melancarkan otoritas hukum dan otoritas penegakannya yang tidak mungkin dimiliki oleh individu atau perusahaan. Tetapi memang terdapat 'kekuatan besar' yang menggerogoti kedaulatan negara secara lebih halus.

Meskipun pemerintah mempertahankan kekuasaannya untuk campur tangan dalam ekonomi, tetapi mereka semakin tunduk pada kekuatan persaingan global. Jika pemerintah suatu negara membuat kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan bagi modal, maka modal tersebut akan lari ke luar dari negara tersebut. Sebaliknya jika pemerintah tetap menjaga kondisi positif seperti menaikkan tingkat suku bunga atau pemberian insentif bagi perdagangan yang diharapkan, justru dapat memupuk akumulasi modal. Jadi sistem kapitalisme global sebenarnya adalah sebuah sistem yang terdiri dari banyak negara berdaulat dimana masing-masing berjalan dengan kebijakannya sendiri, tetapi setiap negara akan tunduk pada kompetisi global, tidak hanya perdagangan tetapi juga dalam lalu-lintas modal. Hal inilah yang membuat sistem kapitalisme global begitu rumit. Meskipun kita dapat mengidentifikasi suatu rezim kapitalisme global dalam urusan ekonomi dan keuangan, tetapi tidak ada rezim tersebut dalam urusan politik karena masing-masing negara mempertahankan rezimnya sendiri. Di

Universitas Indonesia

negara-negara demokrasi yang sudah mapan, kekuatan pemaksa berada dalam kontrol masyarakat sipil, tetapi di bagian-bagian dunia lain, kondisinya tidak demikian. Tidak ada yang baru sebenarnya dalam kombinasi ekonomi global dengan tatanan politik yang didasarkan pada kedaulatan negara. Keadaan yang sama juga terjadi satu abad yang lalu. Perbedaannya adalah bahwa setelah satu abad berlalu, baik negara maupun pasar telah mengalami perubahan. Satu abad yang lalu koloni-koloni bermunculan dimana-mana, saat ini kolonialisme tidak dapat diterima lagi.

Kapitalisme global memiliki kelemahan karena berat sebelah, terlalu menitikberatkan pada pengejaran profit dan kesuksesan ekonomi, tapi mengabaikan pertimbangan sosial dan politik. Hal ini terlihat dalam arena ekonomi global. Meskipun demikian terdapat anggapan bahwa kapitalisme bagaimanapun juga terkait dengan demokrasi dan politik. Fakta yang diajukan adalah bahwa negara-negara di pusat sistem ekonomi global bersifat demokratis, tetapi tidak demikian halnya dengan negara-negara di luar pusat sistem. Tetapi fakta yang dilupakan adalah bahwa negara-negara demokratis yang berada di pusat sistem ekonomi global justru tidak menggunakan prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan-keputusan di banyak lembaga internasional seperti IMF, World Bank atau IASB dalam penentuan standar akuntansi internasional. Sedangkan keputusan-keputusan itu sendiri berdampak pada banyak negara di dunia, tidak hanya yang berada di pusat sistem ekonomi global tetapi juga negara-negara di luar pusat sistem. Selama ini lembaga-lembaga internasional dalam pengambilan keputusannya lebih menekankan prinsip kekuatan ekonomi atau prinsip modal daripada prinsip demokrasi yang diagungkan negara-negara Barat.

Yang menarik dari sistem kapitalisme global adalah adanya prinsip pemersatu yang bernama uang. Uang bukanlah suatu prinsip yang diperkenalkan demi simplifikasi, tetapi uang benar-benar sebuah prinsip yang dominan. Dalam penafsiran umum, uang adalah sarana mencapai sasaran bukan sasaran itu sendiri. Uang mewakili nilai tukar, bukan nilai yang instrinsik pada dirinya sendiri. Maksudnya, nilai uang hanya tergantung pada nilai barang dan jasa yang dapat dipertukarkan dengannya Tetapi kemudian dengan berkembangnya sistem

kapitalisme global, uang memiliki nilai instrinsik yang diperoleh dari sebuah kegiatan perdagangan finansial.

Sistem kapitalisme global menekankan persaingan dan mengukur keberhasilan dalam terminologi uang. Nilai instrinsik uang telah menggeser perannya sebagai nilai tukar dan pasar semakin mendominasi kehidupan ekonomi. Saya menganggap sebagai fakta bahwa nilai dominan dalam sistem kapitalisme global adalah mengejar uang. Alasannya terdapat agen-agen ekonomi yang sasaran tunggalnya adalah menghasilkan uang dan semakin mendominasi kehidupan ekonomi dewasa ini. Perusahaan-perusahaan *go public* dikelola oleh kaum profesional yang menerapkan teknik-teknik manajemen modern dengan tujuan tunggal yaitu memaksimalkan *profit*. Teknik-teknik ini dapat diterapkan secara universal ke segala bidang dan memaksa para manajer untuk membeli dan menjual bisnis, tak ubahnya seperti manajer portofolio membeli dan menjual saham. Perusahaan-perusahaan tersebut akhirnya dimiliki oleh manajer portofolio internasional yang bertujuan tunggal memiliki sekuritas yang dapat menghimpun uang.

Uang juga sangat berkaitan erat dengan kredit. Kredit sendiri merupakan fenomena refleksi dimana perolehan kredit diberikan berdasarkan jaminan dan nilai jaminan dipengaruhi oleh ketersediaan kredit. Dalam pemberian pinjaman internasional, kelayakan kredit negara peminjam diukur dengan rasio tertentu, utang sebagai persentase PDB, bunga utang sebagai persentase ekspor dan sebagainya. Tindakan ini sebuah refleksi karena kemakmuran negara tergantung pada kemampuannya dalam meminjam, tetapi hubungan refleksi ini sering diabaikan. Itulah yang terjadi dalam *boom* besar pemberian pinjaman internasional di tahun 1970-an. Setelah krisis 1982, orang kemudian cenderung berpikir bahwa pemberian pinjaman yang berlebihan tidak akan terjadi lagi. Tetapi ternyata hal itu kembali terjadi di Meksiko pada tahun 1984 dan di Korea Selatan, Indonesia serta Rusia pada tahun 1997.

Dalam sistem kapitalisme global, deregulasi dan globalisasi pasar uang bergandengan tangan. Jika sebelumnya peraturan beruang lingkup nasional sangat banyak jumlahnya, maka globalisasi pasar berarti berkurangnya peraturan yang berlingkup nasional. Ketika peraturan-peraturan nasional semakin menyusut,

Universitas Indonesia

beberapa regulasi internasional baru diperkenalkan. Dua lembaga *Bretton Woods*, IMF dan World Bank, beradaptasi dengan kondisi ekonomi global yang sering berubah dan menjadi lebih aktif sebagai pengawas ekonomi global. Otoritas keuangan negara-negara industri terkemuka membangun saluran-saluran kerjasama dan mengeluarkan beberapa regulasi yang berdampak global, termasuk penggunaan standar akuntansi yang dapat diterima secara internasional. Sejak tahun 1980-an, IMF dan World Bank telah aktif menekan negara-negara berkembang termasuk Indonesia untuk mempunyai sebuah standar akuntansi berkualitas tinggi yang diakui secara internasional. Selain itu persyaratan-persyaratan modal untuk bank-bank komersial ditetapkan dibawah pengawasan BIS di Basel sejak tahun 1988.

Sistem kapitalisme global ditopang oleh sebuah ideologi yang berakar dari teori persaingan sempurna. Setiap hambatan pada persaingan bebas akan mengganggu efisiensi mekanisme pasar, oleh karena itu hambatan tersebut harus dilawan. Ideologi yang disebut fundamentalisme pasar ini mengimplikasikan keyakinan akan kesempurnaan atau kemutlakan. Sebuah keyakinan bahwa setiap masalah pasti ada solusinya karena terdapat *invisible hand* yang bekerja. Fundamentalisme pasar memiliki peran menentukan dalam sistem kapitalisme global karena memberikan ideologi yang tidak hanya memotivasi banyak pelaku pasar untuk berhasil, tetapi juga dapat mempengaruhi sebuah kebijakan. Trend ini sudah dimulai sejak dua krisis minyak terjadi di tahun 1970-an dan terbentuknya pasar luar negeri dengan mata uang negara-negara Eropa dan Amerika Serikat

Persaingan global tentang modal telah memberikan puncak kekuasaan kepada modal uang. Negara-negara saling bersaing untuk menarik dan mempertahankan modal. Sedangkan para investor global saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan atau modal di berbagai pasar modal dunia. Tren ini terjadi di Amerika Serikat dimana perusahaan yang *listing* di bursa efek semakin bertambah jumlahnya dan minat masyarakat menjadi pemegang saham semakin meningkat pesat. Kegiatan merger dan akuisisi juga semakin meningkat sementara industri-industri semakin terkonsolidasi atas dasar global. Transaksi lintas batas menjadi hal yang biasa. Di wilayah lain, penetapan Euro sebagai mata uang tunggal mendorong terwujudnya konsolidasi yang meliputi seluruh Eropa.

Universitas Indonesia

Penataan kembali perusahaan-perusahaan menjadi lebih cepat. Monopoli dan oligopoli global mulai bermunculan seperti Microsoft dan Intel atau tersisanya 4 (empat) kantor akuntan utama di dunia saat ini, yaitu PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG dan Ernst & Young.

Sistem kapitalisme global dapat diibaratkan sebagai “sel-sel kanker yang berupaya menyembunyikan diri dari sistem kekebalan tubuh dengan jalan menyamarkan diri sebagai sel-sel yang sehat”. Para kapitalis akan berupaya menyembunyikan diri dari sistem kekebalan masyarakat dengan jalan memakai “topeng” sebagai agen dari suatu ekonomi pasar yang sehat. Para kapitalis telah menjadi sedemikian ahlinya dalam “penipuan” ini sehingga sekarang kita dapat melihat para pemimpin ekonomi dan politik telah melibatkan diri dalam kebijakan-kebijakan yang mengabdikan pada “penyakit” dengan jalan merugikan “tubuh yang sehat”. Untuk mengembalikan “kesehatan”, kita seharusnya mengenali “sel-sel yang sakit” itu sebagaimana adanya dan memperbaiki “DNA” yang rusak dengan cara langsung menghancurkan dan menghalangi “gizi tubuh yang memberi makan” padanya. Tetapi hal tersebut hanya akan menjadi *utopia* apabila kita sendiri adalah pelaku dalam lingkungan masyarakat global yang terikat dengan berbagai aturan atau komitmen dari organisasi atau lembaga internasional. Hal maksimal yang mungkin dapat dicapai adalah *win-win solution* antara kepentingan negara dan kepentingan kapitalis.

Tabel berikut mengidentifikasi beberapa “penyakit” dalam sebuah sistem kapitalisme global yang sesungguhnya bertentangan dengan sebuah sistem pasar yang sehat sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith.

Tabel 4.12
Kapitalisme Global vs Pasar Yang Sehat

Uraian	Kapitalisme Global	Pasar Yang Sehat
Daya tarik dominan	Uang	Kehidupan
Tujuan yang menentukan	Gunakan uang untuk membuat uang bagi orang yang memiliki uang	Gunakan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi semua

Universitas Indonesia

Ukuran perusahaan	Sangat besar	Ukuran kecil dan sedang
Biaya	Diekstermalkan terhadap publik	Diinternalkan oleh pemakai
Pemilik	Bukan pribadi	Pribadi
Modal keuangan	Global tanpa tapal batas	Lokal/nasional dengan tapal batas
Tujuan investasi	Memaksimalkan laba pribadi	Menambah hasil yang berguna
Peranan laba	Tujuan yang dimaksimalkan	Insetif investasi produktif
Mekanisme koordinasi	Rencana terpusat oleh perusahaan raksasa	Pasar dan jaringan yang mengatur diri sendiri
Kerja sama	Di kalangan pesaing untuk menghindari disiplin persaingan	Di kalangan rakyat dan masyarakat untuk memajukan kebaikan bersama
Tujuan persaingan	Menghilangkan yang tidak kuat bersaing	Mendorong yang efisiensi dan kuat bersaing
Peranan pemerintah	Menjaga kepentingan hak milik	Memajukan kepentingan manusia
Perdagangan	Bebas	Adil dan seimbang
Orientasi politik	Elitis, demokrasi dollar	Populis, demokrasi orang

Pasar modal menjadi wahana dari mengalirnya arus modal lintas batas dalam kapitalisme global. Semua mengalir lewat penawaran dan pembelian sekuritas internasional seperti saham, obligasi dan bentuk investasi portofolio lainnya yang dilakukan di pasar modal. Banyak perusahaan terdaftar di bursa efek untuk berlomba-lomba mendapatkan modal segar bagi kegiatan operasinya. Pasar

Universitas Indonesia

modal diarahkan untuk menarik minat para investor global yang makin menuntut keterbukaan pasar dalam segala segi dan makin menuntut tata kelola perusahaan yang baik untuk menumbuhkan kepercayaan mereka dalam berinvestasi. Regulator nasional dan bursa efek saling berkompetisi dalam pencatatan saham dan volume perdagangan, yang merupakan hal penting bagi sebuah bursa efek yang berkeinginan untuk menjadi atau mempertahankan posisi sebagai pemimpin global. Sebagai respon, bursa efek dan regulator pasar modal bekerja untuk membuat akses masuk yang lebih cepat dan lebih murah bagi perusahaan penerbit sekuritas dan pada saat yang bersamaan meningkatkan kredibilitas mereka.

Kebutuhan untuk mendapatkan ataupun mencari modal lintas batas inilah yang kemudian mendorong kebutuhan akan bahasa akuntansi yang sama di dunia. Entitas global bisa mendapatkan kemudahan ketika memutuskan di mana mereka akan meningkatkan jumlah modal atau mencatatkan sahamnya sekaligus mendapat kepercayaan yang lebih dari laporan keuangan yang mereka sajikan. Sebaliknya investor global juga akan mendapat kemudahan dalam membaca laporan keuangan (sekaligus meningkatkan kepercayaan mereka terhadap kualitas laporan keuangan) ketika mereka akan mengalirkan modal yang mereka miliki baik secara langsung dalam bentuk kredit dan investasi portofolio ataupun tidak langsung melalui perusahaan multinasional. Dengan demikian keseragaman bahasa akuntansi di dunia yang diwujudkan dalam standar akuntansi global (yang disyaratkan berkualitas tinggi) adalah salah satu alat atau wahana dalam sistem kapitalisme global. Sehingga tidak mengherankan apabila konvergensi IFRSs di dunia sangat didukung oleh negara-negara yang berada di pusat sistem ekonomi global dan banyak lembaga atau organisasi internasional, terutama mereka yang memacu terjadinya globalisasi pasar finansial dan deregulasi di pasar-pasar domestik.

Posisi Indonesia dalam Sistem Kapitalisme Global

Naiknya Suharto menjadi Presiden Indonesia sekaligus dimulainya era Orde Baru menjadi tonggak kembali masuknya investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia setelah sebelumnya pada masa Presiden Sukarno beberapa perusahaan asing terutama di bidang minyak dan gas alam dinasionalisasi. FDI sangat

Universitas Indonesia

dibutuhkan bagi negara yang sedang membangun perekonomiannya seperti Indonesia. Ketika pemerintah tak punya cukup modal untuk kebutuhan investasi, terjadi selisih kebutuhan investasi dan ketersediaan modal dalam negeri atau yang disebut dengan kesenjangan pembiayaan (*financing/saving gap*). Untuk menutupi kekurangan modal tersebut, diperlukan beberapa sumber modal luar negeri. Sumber modal luar negeri itu, diantaranya berupa pinjaman atau hutang luar negeri dan penanaman modal asing (FDI) yang dapat dijadikan alternatif. FDI inilah yang dirasakan lebih potensial dibandingkan pinjaman luar negeri yang oleh banyak pengamat ekonomi berdampak tidak baik bagi perekonomian. FDI lebih diharapkan daripada pinjaman luar negeri karena membawa transfer teknologi yang bermanfaat bagi perkembangan industri nasional.

Banyak pengamat maupun pelaku ekonomi termasuk pemerintah mengatakan bahwa pembiayaan swasta asing melalui FDI menjadi sumber terbesar untuk dana pembangunan. Karena itu pemerintah sering menggemborkan perlunya iklim yang kondusif untuk masuknya investasi asing. Besarnya perhatian pemerintah terhadap aliran FDI dikarenakan hal tersebut dianggap sebagai salah satu jalan keluar dari kesulitan ekonomi dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Maksudnya, masuknya FDI dapat memberi kontribusi positif pada indikator-indikator ekonomi nasional seperti PDB dan saldo pembayaran. Selain itu FDI dianggap dapat menjadi sumber tumbuhnya teknologi, proses produksi, sistem organisasi dan ketrampilan manajemen yang baru, termasuk membuka pasar dan jalur pemasaran baru bagi perusahaan.

Bagi para investor global dan perusahaan multinasional, investasi langsung memang menjadi pilihan dibanding investasi portofolio karena ketidakpercayaan mereka terhadap *corporate governance* di Indonesia dan tidak kondusifnya infrastruktur pasar modal Indonesia di tahun 1970-an. Pada era tersebut perbaikan pasar modal menjadi pilihan kesekian mengingat Indonesia mendapatkan keuntungan melimpah dari *oil boom* karena peristiwa pemboikotan OPEC dan Perang Irak-Iran. Tetapi anjloknya harga minyak di tahun 1980-an mengubah "kecuelakan" pemerintah akan pentingnya pasar modal yang baik.

Lantas dimana sebenarnya posisi Indonesia dalam sistem ekonomi global? Indonesia berada di luar pusat sistem ekonomi global. Dengan statusnya sebagai

Universitas Indonesia

negara berkembang dan melihat indikator-indikator sebagai tersebut dalam beberapa tabel sebelumnya, posisi Indonesia lebih tepatnya berada di wilayah *periphery* atau negara pinggiran dalam sistem ekonomi global. Sebagai *periphery* dalam sistem ekonomi global maka posisi Indonesia dalam sistem kapitalisme global hanyalah sebagai negara *dependen* karena tidak bisa mengontrol sepenuhnya masa depannya sendiri akibat besarnya pengaruh aliran deras modal asing dari pusat sistem yang mengalir ke perekonomian Indonesia. Kerugian yang diderita Indonesia sebagai negara *periphery* akibat keanggotaan dan aktifitas dalam sistem kapitalisme global mungkin melebihi keuntungan yang bisa didapatkan. Keanggotaan Indonesia dalam sistem kapitalisme global tidak bisa dielakkan karena negara kita beraktifitas dalam sebuah era dimana sebagian besar kehidupan ekonomi dunia sangat ditentukan oleh proses-proses global. Konsekuensi yang dijalankan, Indonesia faktanya mendukung globalisasi dengan mendukung usaha menghilangkan hambatan-hambatan terhadap keuangan atau perdagangan internasional, sehingga memudahkan arus perdagangan, investasi, mata uang dan informasi secara bebas melintasi batas-batas nasional.

Di saat Indonesia harus melepas ketergantungannya kepada komoditi ekspor migas sebagai sumber pendapatannya, sistem kapitalisme global justru lahir dengan membawa fundamentalisme pasar. Unikny sistem kapitalisme global lahir sebagai respon terhadap *oil boom* yang justru menguntungkan bagi Indonesia yang pada saat itu masih berstatus sebagai negara eksportir migas utama. Jatuhnya harga minyak dan menurunnya produksi minyak Indonesia memaksa pencarian sumber dana lain, termasuk dari investasi portofolio yang secara langsung meleburkan Indonesia dalam sistem kapitalisme global. Deregulasi pasar modal pada akhir tahun 1980-an menjadi titik tolak mengalirnya dana asing melalui investasi portofolio ke Indonesia.

Meskipun Indonesia masih berada di peringkat papan bawah negara-negara tujuan investasi, para investor portofolio mulai mempercayai *corporation governance* di Indonesia apalagi sejak pemerintah, dalam hal ini Bapepam-LK, semakin memperkuat infrastruktur pasar modal dan *compliance* dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi-organisasi internasional termasuk dikeluarkannya SAK pada tahun 1994 yang berbasis standar akuntansi yang diakui secara

Universitas Indonesia

internasional yaitu IASs. Sebaliknya pertumbuhan FDI justru melambat dikarenakan semakin buruknya kondisi infrastruktur atau efisiensi bisnis di Indonesia. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih kalah bersaing dengan Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam dalam menarik minat FDI. Sebenarnya investasi langsung masih menjadi pilihan utama investor asing di Indonesia karena tingkat *good corporate governance* yang masih rendah. Tetapi banyaknya kendala bisnis dan infrastruktur di Indonesia akhirnya membuat pilihan tersebut menjadi tereliminasi.

Karakteristik fleksibilitas pergerakan modal dalam investasi portofolio membuat jenis investasi ini semakin berkembang di Indonesia dibanding investasi fisik yang terikat dengan modal tidak bergerak. Sebuah kondisi yang tidak menguntungkan bagi perekonomian Indonesia mengingat investasi yang dilakukan secara langsung justru yang lebih dibutuhkan oleh Indonesia karena berkaitan dengan produksi berupa pendirian pabrik, pengadaan teknologi baru, pembukaan lahan baru, perekrutan tenaga kerja baru, yang secara langsung menciptakan produksi baru atau menambah produksi yang ada. Sedangkan investasi portofolio justru membuat posisi Indonesia rentan terhadap krisis keuangan apalagi jika investasi tersebut berkarakteristik *hot money* (uang panas). *Hot money* adalah dana investasi jangka pendek dengan mobilitas tinggi yang masuk ke pasar keuangan. Umumnya investasi jenis ini adalah uang milik spekulator yang ditanamkan ke saham, obligasi atau SBI. Karena investasi portofolio memiliki mobilitas tinggi yang berbeda karakter dengan FDI yang merupakan investasi jangka panjang, maka uang bisa masuk dalam jumlah besar dengan cepat. Tetapi uang juga bisa keluar cepat karena diambil sekaligus dalam jumlah yang tak terbatas. Dampaknya bisa memperlemah mata uang rupiah, sehingga semakin besar jumlah *hot money* yang diinvestasikan di Indonesia, maka akan semakin rentan posisi mata uang rupiah terhadap aksi spekulator. Celakanya, ketergantungan Indonesia dengan investor portofolio justru semakin membesar sehingga ada asumsi bahwa jika BI menurunkan tingkat suku bunga, maka *hot money* yang ada di Indonesia bisa segera ditarik dan investor akan kabur ke luar negeri. Jika sudah begitu, BI harus mengintervensi pasar dengan menjual

Universitas Indonesia

cadangan dollar Amerika dan membeli rupiah karena melemahnya nilai rupiah akibat aksi jual investor.

Bicara mengenai fenomena globalisasi, memang tidak lepas dari kontroversi dan perdebatan panjang tak berujung. Ada kelompok yang meyakini bahwa globalisasi bakal mendorong pertumbuhan sembari mendatangkan kemakmuran bagi peradaban. Tapi di sisi lain ada kelompok yang meyakini bahwa globalisasi tidak lebih dari proses tipu daya dan rekayasa negara-negara kaya untuk melanggengkan dominasi dan kekuasaannya atas negara-negara miskin. Tapi pelan tapi pasti perdebatan tersebut akan berakhir, karena suka tidak suka, tidak ada satu pun negara yang bisa menolak dahsyatnya gempuran globalisasi termasuk Indonesia. Mau tidak mau, siap atau tidak siap, Indonesia harus menghadapi sistem kapitalisme global dengan segala daya dan kemampuannya. Bagi negara yang siap dengan sumber daya ekonomi, manusia dan teknologi tentu memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan kompetisi global. Globalisasi yang diiringi persaingan ketat ini memaksa Indonesia bertarung dengan pesaing yang tidak pada levelnya. Dengan segala carut marut kehidupan dalam negeri dan keterbatasannya, Indonesia harus bisa berkompetisi dengan negara-negara maju. Tanpa aturan main yang jelas, tentu saja, hal ini bukan sebuah kompetisi yang adil bagi Indonesia.

Kendati memiliki wajah multidimensi, globalisasi ekonomi senantiasa tampil paling dominan. Ini terjadi karena globalisasi ekonomi memiliki dampak yang nyata dan signifikan terhadap mekanisme tata kelola pada level negara dibanding bentuk globalisasi non ekonomi. Struktur dan aktor globalisasi ekonomi tentu tak lepas dari kiprah lembaga-lembaga keuangan internasional seperti World Bank, IMF dan WTO yang sangat berpengaruh. Mereka mengibarkan semangat liberalisasi keuangan dan finansial di seluruh dunia. Kelompok inilah yang menurut saya bisa disebut sebagai penggerogot kedaulatan negara secara halus. Dari luar Indonesia kita lihat bisa mempertahankan kedaulatannya tapi dari dalam kita melihat sisi yang berbeda. Institusi supranasional yang dikendalikan negara-negara maju, yaitu Amerika Serikat dan sekutunya, memiliki pengaruh besar bagi negara-negara di dunia, terutama dalam mengintervensi kebijakan yang harus diambil negara berkembang dan negara miskin.

Universitas Indonesia

World Bank dan IMF adalah pemain utama dalam tata kelola sistem kapitalisme global melalui pengaturan, proses dan aspek prosedural dalam kaitannya dengan aspek keuangan. Lembaga-lembaga tersebut pada dasarnya merupakan institusi publik yang bekerja untuk kepentingan rakyat negara-negara anggotanya. Tapi ada persoalan akut yang terus dilanggengkan dalam pengelolaan lembaga keuangan internasional tersebut seperti representasi, alokasi suara dalam pengambilan keputusan, struktur, transparansi dan akuntabilitas. Representasi negara-negara berkembang seperti Indonesia kurang terwakili. Sistem yang diperlakukan pun tidak demokratis dan tidak transparan, menganut sistem usang dan tidak relevan.

Sistem pengambilan suara di Bank Dunia dan IMF diatur sedemikian rupa sehingga selalu dalam dominasi Amerika Serikat dan sekutunya. Negara-negara maju menguasai mayoritas suara, sementara negara berkembang tidak berdaya dalam berunding dengan negara-negara adidaya. Selama negara berkembang tidak memiliki suara yang kuat, maka kepentingannya akan selalu tidak terakomodasi dan terpinggirkan. Ketimpangan mekanisme pengambilan keputusan di lembaga keuangan internasional berdampak pada berbagai kebijakan yang direkomendasikan kepada negara berkembang seperti Indonesia, senantiasa hanya menguntungkan negara kaya.

Keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan World Bank sarat dengan kepentingan ideologi dan politik dibandingkan dengan upaya memperbaiki serta mempercepat pertumbuhan dan stabilitas ekonomi negara berkembang. Negara maju yang berkuasa menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan tertentu. Problem tata kelola terefleksi dalam proses dan pemilihan pemimpin. Seolah ada konvensi tak tertulis bahwa World Bank selalu dipimpin oleh Amerika Serikat dan IMF menjadi jatah Uni Eropa. IMF dan World Bank juga menggunakan besaran ekonomi sebagai patokan alokasi hak suara dalam lembaga multilateral dengan asumsi negara yang memiliki besaran ekonomi tinggi merupakan pengguna potensial atas sumber dayanya. Dengan kepentingan itu, mereka memiliki hak atas pengambilan keputusan yang besar pula.

Ibarat istilah di situs *microbloging* twitter, status Indonesia hanya sebagai "*follower*" negara-negara maju dengan tanpa adanya *feed back* dari negara-negara

Universitas Indonesia

maju untuk “*follow back*” Indonesia. Tidak bisa dipungkiri hutang luar negeri yang dimiliki Indonesia terhadap lembaga-lembaga internasional dan besarnya pengaruh lembaga-lembaga tersebut untuk menggiatkan investasi baik FDI atau portofolio ke negara-negara berkembang, membuat Indonesia berada di bawah tekanan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dari sistem kapitalisme global. Masa *boom* minyak memang sempat “menyelamatkan” Indonesia dari sistem tersebut, tetapi dengan berakhirnya masa keemasan minyak bumi sebagai sumber pendapatan negara, tekanan-tekanan tersebut tidak dapat terelakkan.

Globalisasi ekonomi yang menghasilkan sistem kapitalisme global dengan demikian bukanlah proses alamiah melainkan pilihan politik melalui kebijakan yang dikeluarkan baik oleh negara, lembaga keuangan internasional maupun perusahaan multinasional dan investor global. Di dalamnya terdapat pertarungan kepentingan dengan aturan main dan pengelolaan yang hanya menguntungkan negara maju. Indonesia dapat mengikuti langkah Cina dan India yang berhasil memanfaatkan peluang pasar global sehingga mampu mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Menurut Rodrik (2007) Cina dan India meskipun pro globalisasi, seringkali melanggar aturan main. Saat liberalisasi dan deregulasi menjadi “mantra” ampuh, Cina tidak melakukan liberalisasi seluruh sektor perdagangannya dan baru bergabung dengan WTO pada tahun 2001. Yuan baru bergabung dengan pasar internasional pada tahun 1994 dan hingga kini masih menolak untuk meliberalisasi sektor finansial. Salah satu kunci kesuksesan Cina adalah kemampuan mereka untuk menarik minat FDI dalam jumlah besar.

Standar akuntansi global dikampanyekan dalam sistem kapitalisme global untuk menghilangkan rintangan bagi arus modal internasional sehingga uang investasi portofolio bebas mengalir tanpa batas ke seluruh penjuru dunia. Rintangan tersebut berupa ketidaksetaraan bahasa akuntansi dan ketidakpercayaan pada pelaporan keuangan. Bagi perusahaan Indonesia, standar akuntansi global diharapkan mempermudah mereka untuk mencari sumber-sumber investasi dengan cara *listing* di pasar modal Indonesia maupun di luar negeri. Di luar negeri, dengan pelaporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang diakui internasional mereka tidak perlu melakukan banyak penyesuaian terhadap laporan keuangan saat *listing* dan di dalam negeri karena laporan keuangan telah disusun

Universitas Indonesia

sesuai dengan standar akuntansi berkualitas tinggi yang diakui internasional maka akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan investasi ke perusahaan mereka. Hanya saja jumlah perusahaan *listing* di Bursa Efek Indonesia sangat sedikit apabila dibandingkan dengan negara-negara maju bahkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Tidak banyak pula jumlah perusahaan Indonesia yang melakukan *listing* ke pasar modal di luar negeri seperti yang dilakukan PT Telkom Tbk. Fleksibilitas investasi portofolio juga menjadikan arus modal internasional tersebut tidak memberikan jaminan mapan menjadi investasi jangka panjang di perusahaan-perusahaan Indonesia.

Lantas bagaimana menyikapi motif konvergensi IFRSs di Indonesia yang jelas-jelas merupakan alat sistem kapitalisme global untuk mengalirkan arus modal uang internasional dengan tanpa rintangan. Seperti halnya globalisasi yang mau tidak mau memang harus diterima Indonesia, maka IFRSs juga menjadi sebuah produk yang suka tidak suka, mau tidak mau, harus diterima oleh Indonesia. IFRSs adalah suatu keharusan akibat perkembangan aktivitas kapitalisme global yang semakin tanpa batas (*borderless*). IASB memang tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menekan sebuah negara mengadopsi IFRSs. Tetapi pemerintah dan lembaga-lembaga yang berkait dengan praktik akuntansi seperti IAI dan Bapepam-LK terikat dengan komitmen kuat untuk mewujudkan standar akuntansi global dengan lembaga, organisasi atau forum internasional seperti World Bank, IMF, IFAC, IOSCO dan G-20. Keuntungan utama dan langsung yang didapat oleh para investor global dari penggunaan IFRSs (bahkan dibanding manfaat ekonomi yang diperoleh negara) tidak dapat dipungkiri, tapi sisi positif dari IFRSs sebagai standar akuntansi global yang mampu meningkatkan kualitas, efisiensi penyusunan, transparansi, komparabilitas dan kredibilitas pelaporan keuangan tentu harus diambil oleh Indonesia. Namun demikian efek dari penggunaan IFRSs tetap harus diwaspadai sebagai sebuah risiko kerentanan yang akan mengancam pembangunan ekonomi di Indonesia. Pengadopsian IFRSs seharusnya tetap memperhatikan keadaan, kebutuhan dan kendala di dalam negeri. Penguatan ekonomi makro dan mikro, termasuk penguatan cadangan devisa negara dan usaha peningkatan daya saing untuk meningkatkan FDI ke Indonesia, seharusnya tetap dilakukan untuk mencegah

Universitas Indonesia

kerentanan yang ditimbulkan dari semakin berkembangnya investasi portofolio sebagai dampak dari konvergensi IFRSs di Indonesia.

4.5.2 Teori Regulasi Akuntansi Keuangan: Perspektif Pro-Regulasi

Tahun 1959, Jacob Kraayenhof, mantan Presiden the Netherlands Institute of Accountant, pada pidatonya di pertemuan tahunan AICPA di Amerika Serikat mengatakan perlunya usaha untuk mendorong pembuatan sebuah standar akuntansi internasional. Tetapi ajakan ini sepi dari respon mengingat saat itu terdapat banyak praktik dan standar akuntansi yang berbeda di tiap negara serta banyak faktor penghambat seperti sistem hukum dan perpajakan. Tetapi berkembangnya aktivitas finansial dunia di tahun 1960-an mendorong perwakilan lembaga-lembaga profesional akuntansi yang berasal dari Amerika Serikat, Inggris Raya dan Kanada membentuk AISG pada tahun 1966 yang bertujuan melakukan kajian terhadap kemungkinan melakukan harmonisasi standar akuntansi dan auditing di ketiga negara tersebut.

Pada kongres profesi akuntan sedunia di Sidney, Australia pada tahun 1972, para perwakilan AISG ini bertemu kembali dan membahas proposal pembentukan IASC. Akhirnya sepuluh organisasi akuntan profesional yang berasal Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Jepang, Meksiko, Belanda, Inggris Raya, Irlandia dan Amerika Serikat melakukan negosiasi atas ide pembentukan IASC yang kemudian terbentuk pada tanggal 29 Juni 1973 dengan IASs sebagai produknya. Organisasi akuntan profesional akhirnya dibentuk sendiri pada tahun 1977 dengan nama IFAC dan menyetujui penyusunan standar akuntansi sepenuhnya menjadi otonomi IASC. Organisasi ini kemudian menjalankan program harmonisasi standar akuntansi untuk menyelaraskan pencatatan dan pelaporan akuntansi di negara-negara anggotanya. Namun program ini tidak mengharuskan adanya kesamaan pengaturan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi usaha entitas antar negara. Meskipun demikian sejak pendiriannya, IASC mendapat dukungan dari banyak organisasi dan lembaga internasional, PBB, Uni Eropa, IMF, World Bank, Basel Accord, OECD, IOSCO, SEC dan forum negara-negara maju G-7. Dukungan ini membuat banyak negara mulai

mengadaptasi IASs sebagai standar akuntansi, termasuk yang dilakukan Indonesia pada SAK di tahun 1994.

Tahun 2001, IASC melakukan restrukturisasi kelembagaan dengan dibentuknya IASCF yang membawahi IASB sebagai badan penyusun standar beserta IFRSs Interpretation Committee sebagai komite interpretasi dan IFRSs Advisory Council sebagai dewan penasehat. IASB kemudian mengeluarkan IFRSs sebagai standar akuntansi dan pelaporan keuangan baru yang diberlakukan di samping IASs yang sudah ada, sekaligus diusahakan menjadi standar akuntansi global bagi seluruh entitas di dunia. Tujuan IASB antara lain untuk mengembangkan standar akuntansi global berkualitas tinggi untuk membantu para pelaku di berbagai pasar modal di dunia dan pengguna informasi lainnya dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi serta mendorong konvergensi standar akuntansi nasional dan IFRSs.

Dengan demikian apabila kita melihat proses sejarah terbentuknya IASB sebagai penyusun IFRSs saat ini, maka memang sudah sejak awal badan penyusun standar internasional ini dibentuk dengan maksud untuk menciptakan standar akuntansi global yang diterima oleh setiap negara. Dimulai dengan diskusi oleh badan akuntan profesional yaitu Amerika Serikat, Inggris Raya dan Kanada, pembahasan tersebut akhirnya mengajak badan akuntan profesional dari negara lain yaitu Irlandia, Perancis, Jerman, Belanda, Australia, Jepang dan Meksiko. Tahap pertama menuju standar akuntansi global dimulai tahun 1973 dengan pembentukan IASC yang mengusung program harmonisasi standar akuntansi internasional. Tahap kedua diluncurkan tahun 2001 dengan pembentukan IASB hasil restrukturisasi yang mengusung program konvergensi IFRSs dan standar akuntansi nasional sekaligus menegaskan tujuan mereka untuk membantu para pelaku di pasar modal yang merupakan sebuah wahana bagi berjalannya sistem kapitalisme global.

Bukan sebuah kebetulan jika negara-negara tempat badan akuntan profesional yang mendirikan IASC berada adalah negara-negara maju yang mendominasi struktur perdagangan dan keuangan dunia. Faktor ini mempengaruhi permasalahan tata kelola dalam IASB karena sebagaimana di lembaga-lembaga keuangan internasional, struktur di IASB juga didominasi oleh negara-negara

Universitas Indonesia

maju dan negara-negara berkembang dengan kekuatan GDP besar dan beraktivitas tinggi di sektor keuangan, seperti Cina dan India.

Dalam struktur IASCF *trustee*, hanya 2 (dua) orang atau negara dari 22 anggota yang tidak memiliki aktivitas sangat tinggi dalam sektor keuangan yaitu Italia dan Polandia. Brasil yang mewakili Amerika Latin, Cina dan India yang mewakili Asia dan Afrika Selatan yang mewakili Afrika, meskipun belum termasuk kategori negara maju tetapi aktivitas keuangan mereka bersaing dengan negara-negara maju. Dewan inilah yang akan memilih anggota-anggota IASB yang terdiri dari 15 orang dan tidak merepresentasikan wilayah dunia. Sama seperti halnya IASCF *trustee*, dari 15 orang anggota IASB hanya satu orang yang berasal dari negara yang tidak memiliki aktivitas sangat tinggi dalam sektor keuangan, yaitu Swedia. Negara-negara berkembang beraktivitas sangat tinggi dalam sektor keuangan seperti Cina, India, Afrika Selatan dan Brasil tetap mendapat tempat di keanggotaan IASB. Anggota-anggota IASB ini yang akan menyetujui tidaknya sebuah standar atau interpretasi dimana harus membutuhkan minimal 9 orang anggota untuk menyetujui pengesahan suatu standar atau interpretasi. Hal yang sama juga terjadi di keanggotaan Interpretation Committee. Semua anggota semua berlatar belakang akuntan profesional serta eksekutif dari perusahaan multinasional dan finansial besar di dunia.

Advisory Council atau dewan penasehat IFRSs diisi oleh perwakilan lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi internasional yang mendukung dan berkepentingan dengan konvergensi IFRSs. Dari IMF, World Bank, Uni Eropa, IOSCO, IFAC, Basel Committee, "The Big Four" kantor akuntan dunia hingga asosiasi-asosiasi profesi dari beberapa wilayah dunia. Beberapa negara berkembang memiliki perwakilan khusus yaitu Cina, Korea Selatan, India, Singapura, Brasil dan Afrika Selatan. Sedangkan Indonesia tidak memiliki perwakilan khusus di dewan penasehat. Posisi Indonesia secara tidak langsung hanya terwakili oleh lembaga atau organisasi internasional seperti IMF, IFAC atau World Bank.

Dari segi pendanaan, "The Big Four" kantor akuntan dunia menyumbang dana terbesar hingga 34,31 persen dari total sumber dana IASCF. "The Big Four" kantor akuntan dunia yang semuanya berpusat di Amerika Serikat tidak bisa

Universitas Indonesia

dipungkiri memainkan peranan penting sebagai lembaga yang dominan memasok budaya dan keahlian akuntansi ke berbagai perusahaan multinasional. Mereka juga memiliki jaringan berupa kerjasama lisensi dengan kantor akuntan lokal di berbagai negara dunia. Menyusul kemudian dibelakang, Amerika Serikat dengan persentase 11,13 persen, Jepang 10,47 persen, Jerman 7,44 persen, Perancis 5,36 persen, Inggris Raya 4,82 persen dan Cina dengan 4,52 persen. Dana yang mengalir dari Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Cina dan Korea Selatan, termasuk yang berasal dari perusahaan-perusahaan multinasional dan finansial besar dunia.

Dengan melihat sejarah terbentuknya IASB, tata kelola dan pendanaannya, saya berpendapat proses regulasi akuntansi keuangan dalam perspektif pro-regulasi termasuk penerjemahan dari *interest group theory* dimana keberadaan badan standar akuntansi internasional ini adalah atas keinginan beberapa kelompok akuntan profesional dari beberapa negara maju yang akan selalu berusaha mempengaruhi regulasi akuntansi keuangan. Tata kelola dan pendanaan menyiratkan pengaruh besar akuntan profesional dalam badan penyusun standar yang didukung oleh perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan keuangan dan organisasi atau lembaga internasional yang berpengaruh besar di dunia. *Interest group theory* disini juga bisa diartikan adanya *symbiosis mutualisme* antara kelompok akuntan profesional dunia dengan perusahaan-perusahaan multinasional dan para investor global untuk mewujudkan tujuan masing-masing individu.

Tidak ada bukti adanya permintaan publik yang mendasari *public interest theory* dan tidak terdapat bukti langsung bahwa keberadaan badan standar berawal dari upaya negara-negara untuk memecahkan masalah *information asymmetries* yang dapat berujung *profit skimming* walaupun kemudian bias karena masuknya kelompok-kelompok kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan entitasnya. Yang justru terjadi dalam proses ini adalah kepentingan yang semula didengungkan oleh para akuntan profesional untuk mendukung pergerakan investor global dan perusahaan multinasional dalam sistem kapitalisme global yang akhirnya kemudian bersenyawa dengan kepentingan unifikasi Eropa dan misi lembaga-lembaga internasional untuk meliberalisasi keuangan dan perdagangan.

Universitas Indonesia

IAI sebagai organisasi akuntan profesional yang juga bertanggung jawab dalam penyusunan standar akuntansi melalui DSAK, jelas tidak mempunyai opsi lain selain melaksanakan konvergensi IFRSs sebagai wujud ketaatan komitmen kepada IFAC, implementasi komitmen pemerintah Indonesia dalam forum negara-negara G-20, dampak keanggotaan Indonesia dalam lembaga keuangan internasional dan keanggotaan Bapepam-LK dalam IOSCO. Negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Filipina juga telah melakukan langkah konvergensi IFRSs. Bedanya Malaysia memberlakukan dua standar akuntansi yaitu FRSS berbasis IFRSs untuk perusahaan berakuntabilitas publik dan PERSs untuk perusahaan non-akuntabilitas publik yang merupakan standar akuntansi Malaysia sebelum direvisi ke IFRSs. Sedangkan Filipina sudah sejak tahun 2005 mengadopsi semua IFRSs/IASs dengan tanpa modifikasi. Perusahaan non-akuntabilitas diberikan waktu 2 (dua) tahun masa transisi sedangkan perusahaan kecil dan menengah diijinkan menggunakan standar akuntansi berbasis IFRS for SME.

Hal lain yang tidak bisa dipungkiri adalah baik Indonesia atau Malaysia dan Filipina tidak mempunyai lobi yang kuat dalam penyusunan standar akuntansi internasional sebagaimana yang dimiliki Cina, India atau Singapura karena keanggotaannya mereka dalam struktur organisasi IASCF dan IASB. Meskipun demikian kehadiran Cina dan India dalam IASB masih belum mampu mematahkan dominasi negara-negara maju yang menguasai mayoritas suara IASB. Dampaknya selama negara-negara berkembang seperti Indonesia tidak memiliki suara yang kuat, maka kepentingannya akan selalu tidak terakomodasi dan terpinggirkan dalam penyusunan standar akuntansi. Selama mereka tidak memiliki *bargaining position* yang kuat seperti Cina dan India, negara-negara berkembang hanya akan bisa menerima dan melakukan konvergensi penuh ke standar akuntansi lokal.

4.6 Perspektif Intelijen Stratejik

Berdasarkan teori intelijen, IFRSs tidak bisa dikatakan sebagai sebuah ancaman karena kehadirannya bukan lagi berbentuk sebuah potensi yang akan melakukan aksi atau tindakan untuk menyerang kerentanan atau kerapuhan

kondisi yang dimiliki Indonesia. IFRSs sudah berwujud nyata di Indonesia dalam bentuk konvergensi IFRSs oleh DSAK IAI dan implementasi dari sebagian PSAK yang telah berbasis IFRSs. Kehadiran IFRSs bukan lagi berwujud sebuah "kemungkinan" tetapi sebuah kepastian yang tidak bisa dihindari Indonesia. Oleh karena itu kehadiran IFRSs di Indonesia harus dilihat dari sudut pandang risiko mengenai kemungkinan dampak berbahaya yang dihasilkan dari kehadiran IFRSs yang dapat menyerang sisi kerentanan atau kerapuhan kondisi ekonomi Indonesia. Dalam hal ini penilaian risiko layak dibutuhkan dan berarti bagi pembuat kebijakan untuk mengambil aksi atau tindakan dalam mengantisipasi dampak terburuk dari kehadiran IFRSs.

Untuk menilai risiko dan mengetahui kerentanan atau kerapuhan ekonomi apa yang dimiliki Indonesia yang dapat dieksploitasi oleh kehadiran IFRSs, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya motif kehadiran IFRSs di Indonesia yang masuk melalui proses konvergensi. Berdasarkan analisis melalui teori ekonomi politik dalam perspektif globalisasi ekonomi dengan pendekatan kapitalisme global dan teori regulasi akuntansi keuangan dalam perspektif pro-regulasi diketahui bagaimana latar belakang dan proses konvergensi IFRSs di dunia berdampak besar kepada motif keikutsertaan Indonesia dalam fenomena tersebut. Bahwa perekonomian dunia semakin bergeser menuju era hegemoni finansial akibat terjadinya globalisasi pasar finansial, deregulasi pasar domestik, inovasi produk-produk finansial pada level perusahaan dan adanya revolusi di tingkat mikro yaitu perusahaan dimana terjadi pemisahan antara hak kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.

Dominasi sektor finansial dalam perekonomian global berawal dari fenomena penurunan produktivitas kapital saat Amerika Serikat mengalami krisis pada tahun 1970-an. Kondisi tersebut menyebabkan para pemilik modal ramai-ramai memperluas investasinya di pasar finansial sebagai solusi untuk memecahkan masalah menurunnya produktivitas di sektor riil. Dan sejak tahun 1980-an, di seluruh dunia terjadi gejala besar yang bernama liberalisasi di sektor finansial di tingkat global dan deregulasi di tingkat nasional yang memberikan kesempatan pada investor global untuk secara lebih leluasa memperoleh laba dari peningkatan produktivitas kapital yang dimilikinya. Globalisasi yang ditopang

Universitas Indonesia

oleh liberalisasi dan deregulasi di sektor finansial digerakkan oleh para investor global yang dengan kekuatannya mampu mempengaruhi berbagai regulasi dan sistem, sehingga memberi ruang gerak yang lebih besar pada mereka untuk memperoleh keuntungan dari peningkatan kinerja kapital yang mereka miliki.

Perkembangan sektor finansial menandakan ekonomi global tidak hanya dicirikan oleh perdagangan bebas barang dan jasa tetapi juga oleh pergerakan modal yang bebas. Tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang dan indeks harga saham antar negara saling berkaitan erat dan pasar finansial global semakin berpengaruh pada kondisi ekonomi. Kondisi ini menandai peran menentukan yang dimainkan oleh modal uang internasional pada kesejahteraan masing-masing negara yang merupakan inti dari sistem kapitalisme global. Karakteristik modal uang yang lebih fleksibel daripada investasi fisik membuat mereka dapat menghindari negara-negara yang menerapkan kebijakan yang tidak menguntungkan bagi mereka dan mengincar negara-negara yang bisa memberikan keuntungan besar yang aman bagi investasi portofolio mereka.

Sejarah menunjukkan saat sistem finansial semakin besar, maka risiko terjadinya gejolak dan krisis juga semakin tinggi, sehingga bisa dikatakan bahwa sektor finansial menjadi pemicu paling efektif untuk memunculkan gejolak dan krisis. Meskipun begitu, sumber dari krisis tidak selalu harus dimulai dari suatu masalah di pasar finansial itu sendiri. Jika krisis masih terisolasi pada sektor finansial saja, maka bisa dikatakan situasi belum sampai menjalar pada krisis ekonomi. Saat gejolak di sektor finansial telah mengganggu kinerja makro ekonomi seperti inflasi yang parah, pertumbuhan yang melambat dan lain sebagainya, maka kondisi tersebut boleh dikatakan telah merembet pada situasi krisis ekonomi. Krisis finansial pada umumnya ditandai dengan terjadinya depresiasi nilai tukar yang tajam

Perkembangan sistem kapitalisme global dan keinginan investor global untuk semakin melancarkan arus modal lintas batas masih terganggu oleh keragaman bahasa akuntansi di dunia. Sedangkan informasi laporan keuangan yang dihasilkan dari praktik akuntansi merupakan sumber informasi penting bagi para investor global, baik individu maupun perusahaan, untuk menentukan keputusan ekonomi. Keefektifan pasar di era globalisasi tergantung pada

Universitas Indonesia

ketepatan waktu dari informasi keuangan yang transparan, dapat dibandingkan dan relevan. *Stakeholder* di era kompetisi global tidak hanya ingin mengetahui informasi keuangan dari satu perusahaan saja, melainkan dari banyak perusahaan dari seluruh dunia, untuk tujuan *benchmarking*. Hal tersebut bisa dicapai jika perusahaan-perusahaan di dunia tidak memakai tata cara, bentuk dan prinsip pelaporan keuangan yang berbeda-beda. Di sisi lain akibat krisis finansial global, dunia semakin membutuhkan standar akuntansi berkualitas tinggi yang dapat menyajikan informasi keuangan yang akuntabel dan transparan bagi semua pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah. Tetapi kebutuhan untuk mendapatkan ataupun mencari modal lintas batas inilah yang paling mendorong kebutuhan akan bahasa akuntansi yang sama di dunia. Entitas global bisa mendapatkan kemudahan ketika memutuskan di mana mereka akan meningkatkan jumlah modal atau mencatatkan sahamnya sekaligus mendapat kepercayaan yang lebih dari laporan keuangan yang mereka sajikan. Sebaliknya investor global juga akan mendapat kemudahan dalam membaca laporan keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan mereka terhadap kualitas laporan keuangan ketika mereka akan mengalirkan modal yang mereka miliki baik secara langsung dalam bentuk kredit dan investasi portofolio ataupun tidak langsung melalui perusahaan multinasional.

Keinginan untuk mencapai bahasa akuntansi yang sama telah disuarakan oleh para akuntan profesional negara-negara maju yang banyak bekerja di perusahaan finansial, perusahaan multinasional dan kantor akuntan besar dunia sejak akhir tahun 1950-an. Berkembangnya aktivitas finansial dunia mendorong perwakilan lembaga-lembaga akuntan profesional dari negara-negara maju bertemu untuk mengkaji dilakukannya harmonisasi standar akuntansi dan auditing. Dominasi sektor finansial dalam perekonomian dunia, langkah pembentukan IASC sebagai badan penyusun standar akuntansi internasional, reorganisasi IASC menjadi IASB, beberapa krisis finansial dan dukungan berbagai lembaga/organisasi internasional dunia yang menjadi motor liberalisasi dan deregulasi di sektor finansial akhirnya berhasil menghasilkan kekuatan besar untuk mengubah proses harmonisasi standar akuntansi menjadi konvergensi IFRSs ke tiap standar akuntansi nasional.

Universitas Indonesia

Konvergensi IFRSs menjadi sebuah kenyataan global yang tidak bisa dihindari oleh negara-negara yang terlibat dalam transaksi ekonomi global termasuk Indonesia. Negara kita adalah pelaku dan hidup dalam lingkungan masyarakat ekonomi global yang bercirikan perdagangan bebas barang dan jasa dan terutama pergerakan modal finansial yang lebih bebas bergerak daripada faktor produksi dan bentuk modal lainnya. Kondisi ini menyebabkan keseragaman standar akuntansi menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindarkan dan bukan sebuah opsi bagi Indonesia sebagai pendukung sekaligus pelaku liberalisasi perdagangan dan finansial. Melawan arus berarti sebuah "ketertinggalan dan keterbelakangan" bagi Indonesia dalam persaingan ekonomi global.

Hidup dalam sebuah lingkungan masyarakat ekonomi global dan kebutuhan akan dana bagi pembangunan juga mendorong Indonesia untuk menjadi anggota dari berbagai lembaga atau organisasi internasional seperti PBB, World Bank, IMF, WTO, IOSCO atau IFAC dan forum-forum kerjasama ekonomi seperti APEC dan G-20. Konsekuensi dari keanggotaan tersebut adalah Indonesia memenuhi komitmennya untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang dibuat termasuk diantaranya keputusan untuk mengadopsi standar akuntansi global ke dalam standar akuntansi lokal. IASB memang tidak mempunyai legitimasi untuk mewajibkan negara-negara di dunia mengadopsi IFRSs sebagai standar akuntansi global. Tetapi legitimasi "perintah" tersebut datang dari lembaga/organisasi/forum internasional yang sudah mengikat anggotanya dengan komitmen tertulis ataupun tidak tertulis. Faktor ini menjadi penentu terjadinya gelombang konvergensi IFRSs di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Tapi di sisi lain, Indonesia adalah negara berkembang dimana investasi fisik yaitu FDI lebih dibutuhkan daripada investasi portofolio karena perannya sebagai sumber pertumbuhan bagi organisme perekonomian dan tidak berdampak signifikan terhadap munculnya krisis finansial. Dari analisis World Bank bahkan diketahui bahwa keberadaan FDI di berbagai negara ternyata berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekspor dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di negara atau kawasan yang bersangkutan (Basri, 2009). Hal sebaliknya terdapat dalam karakteristik investasi portofolio yang justru rentan

menghasilkan krisis finansial pada suatu negara dimana jenis investasi inilah yang paling diuntungkan dari konvergensi IFRSs di berbagai negara di dunia.

Tren hegemoni finansial di berbagai kawasan perekonomian dunia juga melanda Indonesia dimana nilai investasi portofolio berkembang lebih pesat dibanding nilai investasi fisik langsung. Pada medio Januari – September 2010 nilai investasi portofolio mendominasi nilai investasi masuk dengan nilai 13,3 milyar dollar Amerika. Sedangkan pada medio yang sama nilai penanaman modal asing langsung hanya sebesar 6,8 milyar dollar Amerika. Celaknya jumlah cadangan devisa Indonesia relatif sangat kecil jika dibandingkan dengan ukuran ekonomi Indonesia itu sendiri, sebesar 57,019 milyar dollar Amerika pada tahun 2008. Jumlah tersebut hanya mencapai sekitar 41,8 persen jumlah cadangan devisa Malaysia (136,543 milyar dollar Amerika) dan sekitar 22,6 persen dari jumlah cadangan devisa Singapura (252,180 milyar dollar Amerika) pada tahun yang sama. Dengan kecilnya jumlah cadangan devisa, Indonesia justru menyimpan dana-dana milik asing, berupa hutang, saham dan obligasi, dalam jumlah yang sangat besar. Dengan dana asing senilai 135,054 milyar dollar Amerika pada tahun 2008, Indonesia menduduki peringkat keempat Asia dalam soal kepemilikan dana asing setelah Cina, Taiwan dan India. Dengan demikian, dana milik asing di Indonesia yang sewaktu-waktu bisa pergi mencapai 237 persen dari cadangan devisa yang tersedia. Hal ini sudah memperlihatkan rawannya posisi Indonesia dibanding Cina, Taiwan dan India yang memiliki nilai cadangan devisa jauh lebih besar.

Kondisi lain yang mencemaskan bagi perekonomian adalah perilaku lembaga perbankan Indonesia yang semakin mengarah ke kapitalisme global. Ibaratnya perekonomian mempunyai dua jantung yaitu (1) sektor keuangan dan (2) pemerintah. Keduanya menyedot dana dari masyarakat dan mengalirkan dana ke masyarakat. Perekonomian akan sehat jika daya sedot dan daya alir terhadap dana masyarakat seimbang. Jika yang disedot jauh lebih banyak dari yang dialirkan, dana masyarakat di sektor keuangan dan pemerintah akan membengkak. Jika dana membengkak terlalu lama, maka perekonomian akan rentan terhadap serangan tiba-tiba. Membengkaknya dana masyarakat di sektor keuangan dan pemerintah menandakan mereka tidak bisa mengalirkan dana secara merata ke

Universitas Indonesia

seluruh tubuh perekonomian. Beberapa organ perekonomian (*tradable*) tidak mendapat pasokan dana yang memadai sehingga menjadi lemah aktifitasnya, beberapa organ lainnya (*non tradable*) justru kebanjiran dana. Organ-organ perekonomian yang kelebihan dana melimpahkan dana tersebut ke organ tetangga terdekat yaitu sesama sektor finansial sehingga mereka akan semakin berkembang. Fakta ini terjadi di Indonesia dimana bunga deposito turun tapi deposito individu justru naik tajam. Oleh bank dana itu dibelikan SBI dan bukan disalurkan sebagai kredit produktif.

Financial Times sebagaimana dikutip Harian Kompas tanggal 22 Oktober 2010 meramalkan tahun 2010 ini total arus modal asing yang mengalir ke negara-negara berkembang Asia akan mencapai 270 milyar dollar Amerika dan semakin meningkat di tahun 2011. Untuk Indonesia, dari bulan Januari hingga September 2010, total modal asing yang mengalir masuk ke Indonesia bernilai 115 trilyun rupiah yang terdiri dari instrumen SBI 20,5 trilyun rupiah, Surat Utang Negara (SUN) 74 trilyun rupiah dan saham 21 trilyun rupiah. Sedangkan sampai dengan akhir September 2010, modal asing yang masih bertahan dari tahun lalu terdiri dari SBI sebesar 64 trilyun rupiah atau 25 persen dari total SBI tahun lalu dan SUN sebesar 182 trilyun rupiah atau 30 persen dari total dana SUN tahun lalu. Kondisi ini menyebabkan nilai tukar Rupiah semakin menguat dan indeks harga saham gabungan di BEI terus mencetak rekor baru.

Menurut Rahmat Waluyanto, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, sebagaimana dikutip tempointeraktif.com, terdapat beberapa faktor mengapa pada tahun 2010 Indonesia semakin diminati investor asing, yaitu:

- a. Prospek fundamental ekonomi Indonesia dinilai bagus. Bankir dan pelaku pasar keuangan internasional memperkirakan peringkat utang luar negeri Indonesia akan menjadi *investment grade* atau peringkat investasi sebelum tahun 2012. Beberapa lembaga internasional juga menunjukkan sentimen positif terhadap Indonesia, diantaranya:
 - OECD menyebutkan dalam laporannya tentang aturan investasi negara-negara G-20 pada bulan Juli 2010, menyebut Indonesia bersama 7 (tujuh) negara lainnya di G-20 yaitu Australia, Kanada, Brasil, Afrika Selatan,

Universitas Indonesia

Cina, India dan Arab Saudi, sebagai negara yang telah menerapkan regulasi investasi yang menuju tren liberalisasi arus modal asing atau kejelasan peraturan yang lebih baik.

- Investor Dashboard Survey oleh ING pada bulan Juli 2010, menyebutkan terjadi kenaikan sentimen dari 133 pada Triwulan I-2010 menjadi 140 di Triwulan II-2010 yang menunjukkan terjaganya kepercayaan investor di Indonesia.
 - Kenaikan ranking daya saing Indonesia dari posisi ke-54 (2009) ke posisi ke-44 (2010) menurut Global Competitiveness Index bulan September 2010.
 - United Kingdom Trade and Investment menaikkan ranking Indonesia sebagai negara tujuan investasi selain negara-negara BRIC (Brasil Rusia, India, Cina) dari posisi ke-6 menjadi posisi ke-2.
- b. *Yield* obligasi Indonesia lebih menarik dibandingkan Amerika Serikat dikarenakan bank sentral Amerika masih menahan suku bunga pada tingkat yang rendah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang dinilai lambat.
- c. Investor global masih mempunyai eksese/kelebihan likuiditas karena selama krisis global dan terakhir krisis utang zona Eropa, mereka menunda investasi portofolionya.

Tapi sekali lagi, mengalir derasnya modal asing dan lemahnya kebijakan untuk mengelola hal tersebut memunculkan risiko bagi stabilitas makro ekonomi dan bisa memunculkan krisis moneter sebagaimana terjadi di tahun 1990-an dimana aliran keluar *hot money* telah menghancurkan mata uang lokal. Sejauh ini efek yang paling dikhawatirkan dari besarnya *capital inflow* ini adalah terjadinya pembalikan modal secara tiba-tiba atau *sudden reversal*. Dengan demikian untuk mencegah risiko krisis keuangan ini adalah dengan melakukan mitigasi terhadap *capital inflow* yang sewaktu-waktu bisa lari ke luar negeri.

John Maynard Keynes, sebagai salah satu arsitek lembaga keuangan internasional, memandang *capital control* sebagai komponen utama untuk menciptakan stabilitas keuangan global (Modenesi, 2006; Deliarnov, 2009).

Universitas Indonesia

Menurut Keynes, *control of capital movement* baik arus keluar maupun arus masuk, seharusnya menjadi tindakan permanen dalam *the post-war system*. Tetapi sejak era Reagan-Thatcher yang akhirnya menghasilkan the Washington Consensus, *capital control* justru ditinggalkan. Alasannya dengan meninggalkan *capital control* justru akan meningkatkan aktivitas pasar serta meningkatkan akses kredit dan investasi yang pada akhirnya akan menciptakan kestabilan dan pertumbuhan. *Capital control* dapat berupa alat penangkal seperti pajak atas obligasi jangka pendek atau larangan terhadap segala bentuk kegiatan spekulatif modal. Tujuan dari *capital control*, yang dilakukan saat arus modal asing terlalu banyak dan kemudian dihentikan saat stabilitas telah muncul, adalah untuk mencegah masuknya *hot money* dalam skala besar, yang dapat mempengaruhi apresiasi nilai tukar mata uang lokal dan mengancam stabilitas keuangan. Dengan demikian *capital control* merupakan alat yang *legitimate* bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk mencegah dan mengendalikan krisis finansial.

IMF lebih menyarankan Indonesia untuk memilih cara menyerap *capital inflow* melalui instrumen moneter jangka menengah dan jangka panjang (Media Indonesia, 21 Oktober 2010). Mengeliminir efek dari *short term investment* dengan memanfaatkan sekaligus menyalurkan kelebihan likuiditas yang terjadi ke infrastruktur dan investasi berjangka panjang. Sejauh ini BI sebagai otoritas moneter di Indonesia menetapkan periode kepemilikan SBI minimal ditahan selama satu bulan (*one month holding*) dan menerapkan kebijakan kenaikan giro wajib minimum (GWM) perbankan yang khusus untuk menyerap banjir likuiditas di pasar. BI juga menilai sinyal yang dilempar ke pasar terkait kondisi cadangan devisa juga cukup untuk meyakinkan publik atas kemampuan untuk memitigasi *sudden reversal*. Tetapi BI tetap harus mewaspadaai situasi terburuk dari munculnya *shock* berupa pembalikan modal atau *reversal*. BI harus melihat pengelolaan likuiditas perekonomian merupakan sebuah hal yang sangat penting. BI juga seharusnya mencermati tekanan inflasi di tengah masih derasnya arus modal asing yang masuk dan kondisi eksès likuiditas yang masih cukup besar. Saat ini BI sedang mengkaji kemungkinan kebijakan baru untuk meminimalisir efek negatif *sudden reversal* sekaligus menjaga sistem dari

Universitas Indonesia

guncangan. Ini berarti kebijakan *one month holding* dan kecukupan cadangan devisa memang dirasakan belum cukup untuk mengantisipasi *sudden reversal* di masa depan. Pada akhirnya, kebijakan BI harus bisa mengkombinasikan 4 (empat) tujuan yaitu menjaga fleksibilitas nilai tukar mata uang, menjaga akumulasi cadangan devisa, meredam arus modal *very short term* dan mengelola kelebihan likuiditas.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah menjaga pertumbuhan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang stabil akan membuat investor asing menanamkan modalnya dalam jangka panjang. Penyebab modal asing bisa keluar dari Indonesia adalah karena saat ini pemerintah belum menyiapkan skema yang tepat dalam upaya perbaikan iklim investasi. Stimulus sebenarnya bisa menjadi upaya perbaikan fasilitas di dalam negeri. Apalagi dalam hal infrastruktur, sektor riil secara tidak langsung bisa mendapatkan insentif. Permasalahan yang menjadi kelemahan stimulus infrastruktur adalah karena tidak adanya reformasi kebijakan dalam pengadaan barang. Dalam tender misalnya, butuh waktu hingga 8 (delapan) bulan untuk menentukan pemenang tender.

Derasnya arus modal asing ke Indonesia perlu diwaspadai oleh pemerintah dikarenakan arus modal tersebut didominasi oleh modal jangka pendek. Risikonya cukup besar karena dengan sistem devisa bebas yang dianut Indonesia, *short term capital inflow* tidak bisa ditahan. Otoritas moneter dan pasar modal harus terus waspada, jika perlu menerapkan *yellow alert* untuk mengantisipasi risiko *sudden reversal*. Jika perlindungan investor domestik ditingkatkan, mereka tidak akan cepat panik ketika terjadi *capital reversal* oleh investor asing. Mereka bisa bermain lebih jangka panjang sehingga bursa tidak terlalu merosot. Hal ini bisa mengurangi kedalaman dari dampak negatif *capital reversal*. Derasnya aliran modal asing bersifat jangka pendek juga seharusnya bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin, salah satu diantaranya yaitu untuk membiayai APBN melalui pembelian SUN dan pembiayaan modal saham sektor swasta dari IPO (*initial public offering* atau penawaran umum saham perdana), meskipun langkah ini tetap beresiko *capital reversal*.

Prospek pertumbuhan di negara-negara berkembang serta masih lemahnya pertumbuhan di negara maju dengan rezim suku bunga rendahnya menjadi dua

faktor yang bakal terus mendorong aliran modal masuk ke negara-negara berkembang. Arus modal ini sayangnya sebagian besar masuk ke instrumen investasi jangka pendek seperti saham dan obligasi yang dapat mendorong apresiasi nilai tukar. Dengan adanya fenomena perang kurs, maka semua negara harus mampu meningkatkan daya saing agar aliran dana tidak hanya masuk ke pasar finansial yang berpotensi menyebabkan *bubble*, tapi bisa masuk ke sektor riil. Negara-negara berkembang di Asia saat ini sudah mengalami *spillover* dari prospek perang mata uang dengan membanjirnya aliran masuk dana asing dari investor jangka pendek yang memanfaatkan kestabilan pertumbuhan dan tingkat suku bunga/imbalance regional yang tinggi. Para otoritas hendaknya ekstra hati-hati, meningkatkan pengawasan dan mempersiapkan perangkat efektif untuk menjaga penarikan kembali dana spekulatif secara mendadak.

Di sisi lain, konvergensi IFRSs juga dapat menimbulkan dampak meningkatnya investasi ke luar negeri yang dilakukan oleh warga negara Indonesia terutama dalam bentuk investasi portofolio. Tetapi kelemahannya sampai dengan saat ini tidak ada satu pun lembaga atau instansi di Indonesia, termasuk BI dan BKPM, yang memiliki catatan aliran investasi keluar tersebut. Sedangkan data tersebut bagi DJP sangat berguna untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak yang bersangkutan karena diduga banyak wajib pajak nakal yang melakukan pelarian modal terutama ke negara-negara bereputasi *tax haven* seperti Singapura misalnya. Kondisi tersebut membutuhkan dukungan kemauan keras dari pemerintah dan otoritas moneter untuk mencatat setiap aliran lalu lintas modal, baik masuk maupun keluar Indonesia.

Dengan demikian apabila dilihat dari perspektif intelijen strategik, konvergensi IFRSs di Indonesia tidak hanya dipandang sebagai sebuah proses untuk mewujudkan keseragaman bahasa akuntansi dalam sebuah standar akuntansi global berkualitas tinggi tetapi juga melihat risiko yang dapat ditimbulkan apabila dampak konvergensi IFRSs berupa mengalirnya modal asing melalui investasi portofolio “menyerang” kerentanan dan kerapuhan kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan langkah mitigasi melalui penilaian risiko terhadap arus masuk modal asing dan kemungkinan terjadinya *capital (sudden) reversal* serta pengawasan kepada arus modal keluar.

Universitas Indonesia

BAB 5

ASPEK PERPAJAKAN DI INDONESIA

Perbedaan antara akuntansi dan pajak adalah sesuatu yang wajar dalam praktik pembukuan karena secara bawaan keduanya memiliki konsep penghasilan, beban/biaya, kepentingan dan tujuan akhir yang berbeda. Akuntansi bertujuan untuk menghitung laba rugi bersih dan mengukur kinerja dari entitas berdasarkan standar akuntansi termasuk kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, sedangkan pajak menggunakan akuntansi untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang berdasarkan Undang-undang Perpajakan demi penerimaan negara. Oleh karena itu perbedaan tersebut difasilitasi khusus dalam berbagai standar akuntansi seperti dalam IAS 12 Incomes Taxes, SFAS 109 Accounting for Income Taxes atau PSAK 46 Akuntansi Pajak Penghasilan. IFRSs menggunakan istilah perbedaan temporer untuk mendefinisikan perbedaan antara jumlah tercatat aset dan liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan ini diselesaikan melalui pembentukan akun aset dan liabilitas pajak tangguhan dalam neraca dimana hal ini tidak terkait langsung dengan penghitungan pajak yang terhutang. Sedangkan perbedaan antara pengakuan penghasilan dan biaya dalam laporan laba rugi yang terkait langsung dengan penghitungan pajak yang terhutang, dalam praktik difasilitasi dengan rekonsiliasi fiskal.

5.1 Rekonsiliasi Fiskal

Menurut ketentuan perpajakan, tata cara pembukuan diatur di Pasal 28 beserta penjelasannya dalam Undang-undang Nomer 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomer 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Ketentuan penyelenggaraan pembukuan menurut pajak tidak mengatur standar akuntansi yang harus dianut, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun beban sehingga dapat menimbulkan perbedaan antara jumlah laba rugi komersial dengan penghasilan kena pajak. Meskipun demikian

dijelaskan bahwa pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan SAK, kecuali peraturan perundang-undang perpajakan menentukan lain. Selain SAK juga terdapat SAK Syariah dan SAK ETAP yang digunakan entitas di Indonesia dalam menyusun laporan keuangannya.

Pasal 4 ayat (4) UU KUP meminta semua wajib pajak badan yang wajib menyelenggarakan pembukuan dan wajib pajak orang pribadi yang wajib dan tidak wajib tetapi memilih menyelenggarakan pembukuan, untuk melengkapi SPT PPh dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Wajib pajak dapat menyusun laporan keuangan komersial dan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial. Dalam praktek yang sering dilakukan, laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan laba rugi yang semula disusun berdasarkan kebiasaan dan praktik akuntansi komersial yang kemudian disusun kembali sesuai dengan ketentuan perpajakan melalui rekonsiliasi fiskal. Sedangkan neraca, dimana terdapat pengakuan pajak tangguhan, tetap mengikuti SAK karena terkait dengan relevansi dan kepercayaan atau kebenaran suatu keadaan entitas. Rekonsiliasi fiskal dan pengakuan pajak tangguhan menjadi konsekuensi dari pendekatan kuasi-dependen yang diterapkan di Indonesia. Rekonsiliasi fiskal akan menjadi tidak dibutuhkan jika negara menggunakan pendekatan independen dan dependen.

Tujuan utama dari laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal adalah untuk menyajikan informasi sebagai dasar untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal lebih ditujukan untuk pemenuhan ketentuan perpajakan yang diwarnai oleh kebijakan tertentu sehingga netralitas laporan terhadap para pengguna laporan keuangan kurang jelas. Daya banding laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal lebih merujuk kepada derajat keterbandingan antar wajib pajak dengan usaha sejenis. Laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal harus benar sesuai dengan peraturan perpajakan, bebas dari kesalahan material dan lengkap, dalam arti mencerminkan keadaan usaha dan kegiatan wajib pajak sepenuhnya dan luput dari kekurangan material.

Universitas Indonesia

Rekonsiliasi fiskal dilakukan setiap akhir tahun pajak karena terdapat perbedaan pengakuan penghasilan dan beban antara akuntansi dan pajak yang menimbulkan perbedaan antara laporan laba rugi komersial dan laba rugi rekonsiliasi fiskal dalam menghitung penghasilan kena pajak dan PPh. Perbedaan tersebut timbul karena perbedaan kepentingan antara akuntansi yang mendasarkan laba rugi pada konsep *matching cost against revenue*⁸ dengan konsep dasar pajak yang tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Perbedaan antara laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap (*permanent differences*) dan perbedaan sementara (*temporary differences*). Perbedaan tetap timbul karena perpajakan dengan kewenangannya telah mengatur ketentuan yang bertentangan dengan SAK, yaitu penghasilan yang dikecualikan dari obyek pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh), penghasilan tertentu yang dikenakan PPh Final (Pasal 4 ayat (2) UU PPh) dan biaya-biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan (Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh). Perbedaan tetap baik positif maupun negatif langsung dikoreksi dalam akun-akun laporan laba rugi. Sedangkan perbedaan sementara terjadi karena terdapat ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan biaya antara peraturan perpajakan dengan SAK seperti yang terjadi dalam penyusutan/amortisasi, selisih kurs, hasil revaluasi aset tetap atau beban sewa lebih dari satu tahun. Perbedaan sementara diakomodir SAK dengan pembuatan akun pajak tangguhan (*deferred tax asset/liability*) yang dicantumkan di dalam neraca.

Dalam sistem perpajakan, negara memiliki instrumen untuk mencapai dua tujuan utama yaitu menutup kebutuhan finansial dan mempengaruhi kehidupan sosial-ekonomi nasional dengan perangkat disinsentif dan insentif. Secara *budgetair* pajak merupakan alat untuk mentransfer sumber daya dari sektor swasta kepada sektor publik. Laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal memiliki motif untuk mempersempit erosi potensi pengenaan pajak dan pemberian dorongan realokasi atau pengendalian investasi. Akibat penyimpangan laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal terhadap ketentuan perpajakan adalah sanksi di bidang perpajakan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sedangkan laporan keuangan komersial

⁸ Konsep *matching cost against revenue* atau penandingan beban dengan pendapatan menekankan pada perlunya untuk menghubungkan beban biaya dengan pendapatan yang diakui pada periode yang sama.

pada umumnya disusun untuk kepentingan berbagai pengguna yang terutama berkepentingan dengan kinerja ekonomi dan kondisi finansial perusahaan sebagaimana terpapar dalam laporan keuangan, seperti manajemen, pemegang saham, investor, kreditor, *supplier*, *customer*, karyawan atau badan regulator. Akibat penyimpangan laporan keuangan komersial terhadap SAK adalah pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh manajemen dan opini yang buruk terhadap laporan keuangan dari *stakeholder*.

Kerumitan pembukuan atau rekonsiliasi fiskal sekaligus administrasi yang ditimbulkan dari perbedaan akuntansi dan pajak, sudah sejak lama mendorong dilakukannya harmonisasi untuk mengeliminasi perbedaan antara keduanya. Harmonisasi antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan adalah sebuah usaha yang dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi bagi entitas sebagai wajib pajak sekaligus meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan fiskus untuk melakukan koreksi fiskal terhadap laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal. Tetapi usaha harmonisasi tersebut dalam prakteknya sulit untuk dilaksanakan sepenuhnya karena sebagaimana telah dijelaskan, konsep tujuan dan manfaat pelaporan keuangan berdasarkan SAK dan Undang-undang Perpajakan sangat berbeda satu sama lain. Sehingga merupakan suatu hal yang wajar dalam praktik apabila terjadi perbedaan perlakuan terhadap transaksi antara akuntansi dan pajak.

5.2 Perbedaan Ketentuan Perpajakan dan SAK Berbasis IFRSs

Akuntansi dan pelaporan keuangan telah menjadi bagian dari regulasi pasar modal. Tujuannya adalah untuk memberikan investor dan *stakeholders* sebuah informasi yang akurat dan dapat digunakan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini dan masa depan tentang situasi finansial dari sebuah entitas ekonomi. Prinsip yang dijadikan acuan yaitu penyajian yang wajar atau *true and fair view*. Sebagai konsekuensinya, saat ini ketentuan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan lebih banyak berpegang kepada *substance over form*, *fair value measurement* dan larangan terhadap *hidden reverse*. Sedangkan ketentuan perpajakan dalam laporan keuangan dimaksudkan untuk menghitung laba kena pajak. Tujuannya adalah menetapkan kewajiban pajak dari entitas kepada administrasi pajak selama satu tahun pajak. Karakter sebagai sumber penerimaan

negara menyebabkan pajak membutuhkan informasi yang andal dan mudah diverifikasi. Sebagai konsekuensinya, ketentuan perpajakan lebih banyak berpegang kepada *form over substance* dan *historical cost measurement*.

SAK dan Undang-undang Perpajakan telah memiliki banyak perbedaan jauh sebelum IFRSs diadopsi dalam standar akuntansi lokal. Tetapi motivasi IFRSs untuk melancarkan arus modal global di pasar modal dunia membuat standar akuntansi internasional banyak berubah ke karakteristik relevansi dan transparansi untuk mengakomodasi kepentingan para investor modal dalam menentukan keputusan ekonominya. Meskipun tidak banyak menambah kuantitas perbedaan antara SAK dan Undang-undang Perpajakan, tetapi kondisi ini semakin menambah kualitas perbedaan diantara keduanya dan semakin membuat rekonsiliasi fiskal yang dilakukan wajib pajak menjauh dari segi efektif dan efisien.

Yunirwansyah (2010) dari DJP menjelaskan beberapa perbedaan prinsip antara ketentuan perpajakan dan SAK berbasis IFRSs sebagai berikut:

a. Mata uang pelaporan

Pasal 28 ayat (4) UU KUP menyebutkan pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah, ini berarti mata uang pelaporan utama dalam pembukuan entitas di Indonesia adalah Rupiah. Meskipun demikian dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomer 196 Tahun 2007 (PMK 196/2007) entitas dapat menyelenggarakan pembukuan dengan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat setelah mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan. Sebaliknya PSAK 10 (Revisi 2010), Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing, mengizinkan entitas untuk menggunakan mata uang fungsional, bisa dalam mata uang apapun dan tidak hanya Rupiah dan Dollar Amerika Serikat, dalam pembukuannya.

b. Basis pengakuan dan pengukuran aset

Dalam hal terjadi transaksi perolehan atau penjualan harta, Pasal 10 ayat (1) UU PPh menjelaskan harga perolehan atau harga penjualan adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima untuk transaksi yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa dan jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima untuk transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Hal ini juga

Universitas Indonesia

berarti nilai perolehan aset berdasarkan ketentuan perpajakan dihitung berdasarkan nilai perolehan (*historical cost*). Sedangkan PSAK 16 (Revisi 2007), Aset Tetap, menambahkan estimasi biaya pembongkaran dan pemindahan aset dan restorasi dalam komponen biaya perolehan pada pengukuran awal. Standar akuntansi juga menyediakan pilihan *fair value measurement* atau model revaluasi selain model biaya sebagaimana diatur dalam PSAK 13 (Revisi 2007), Properti Investasi; PSAK 16 (Revisi 2007), Aset Tetap; PSAK 19 (Revisi 2010), Aset Tidak Berwujud; PSAK 50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan; dan PSAK 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

Penyusutan menurut pajak akan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Meskipun demikian dengan persetujuan Dirjen Pajak, penyusutan dapat dimulai pada bulan harta digunakan. Sedangkan standar akuntansi mengatur bahwa penyusutan dimulai saat aset siap untuk digunakan yaitu pada saat aset berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

c. Status legal sewa guna usaha

Keputusan Menteri Keuangan Nomer 1169/KMK.01/1991 (KMK-1169/1991) sebagai ketentuan perpajakan yang mengatur kegiatan sewa guna usaha (*leasing*) menekankan kepada *form over substance* dengan mengklasifikasikan definisi *leasing* menjadi sewa guna usaha dengan hak opsi dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, sedangkan PSAK 30 (Revisi 2007), Sewa lebih menekankan kepada *substance over form* dengan mengklasifikasikan definisi *leasing* menjadi sewa pembiayaan (*capital lease*) dan sewa operasi (*operating lease*).

d. Prosedur revaluasi aset

Ketentuan perpajakan telah mengatur prosedur revaluasi jauh sebelum SAK mengizinkan model revaluasi digunakan sebagai hasil pengadopsian IFRSs. Sebelumnya SAK hanya mengizinkan revaluasi atas aset tetap sepanjang revaluasi tersebut dilakukan dengan mengikuti peraturan pemerintah, dalam

hal ini adalah peraturan perpajakan. Prosedur revaluasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomer 79/PMK.03/2008 (PMK-79/2008) tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan. Menurut peraturan tersebut, revaluasi dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Dirjen Pajak dan diterapkan terhadap semua aset tetap berwujud yang hasilnya berupa kenaikan nilai aset tetap. Kenaikan tersebut akan dicatat sebagai selisih lebih di neraca yang dicatat sebagai "Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Tanggal...." Revaluasi tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali aset tetap terakhir dilakukan. Sedangkan menurut SAK berbasis IFRSs, metode revaluasi dapat digunakan sebagai penilaian aset tetap diatur dalam PSAK 16 (Revisi 2007), Aset Tetap; aset tidak berwujud diatur dalam PSAK 19 (Revisi 2010), Aset Tidak Berwujud; properti investasi diatur dalam PSAK 13 (Revisi 2007), Properti Investasi; dan instrumen keuangan diatur dalam PSAK 50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan dan PSAK 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengukuran dan Pengukuran. Revaluasi menurut SAK tidak memerlukan persetujuan dari Dirjen Pajak dan tidak harus dilakukan terhadap keseluruhan aset karena dapat dilakukan untuk kelompok aset tertentu saja atau secara bergantian antara kelompok aset yang berbeda. Hasil revaluasi dapat berupa kenaikan atau penurunan nilai aset. Kenaikan nilai aset dicatat di neraca dengan mengkredit ekuitas pada surplus revaluasi dan di laporan laba rugi dengan mengakui kenaikan nilai aset hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset dari hasil revaluasi sebelumnya. Penurunan nilai aset dicatat di neraca dengan mendebit ekuitas pada surplus revaluasi selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi aset dan di laporan laba rugi dengan mengakui semua penurunan nilai aset.

e. Masa manfaat aset tidak berwujud

Sesuai Pasal 11A ayat (2) UU PPh, aset tidak berwujud memiliki masa manfaat maksimal selama 20 tahun yang masuk dalam Kelompok 4. Sedangkan menurut PSAK 19 (Revisi 2010), Aset Tidak Berwujud, masa manfaat aset tidak berwujud dapat dikelompokkan menjadi terbatas atau tidak

terbatas atau dengan kata lain dapat memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perpajakan.

f. Konsep materialitas

General audit diperlukan untuk menilai kewajaran dari penyajian informasi di dalam laporan keuangan. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dan dapat mengakibatkan perubahan atas suatu pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut. Berdasarkan konsep materialitas tersebut maka auditor dapat atau tidak dapat memberikan jaminan bagi pemakai laporan keuangan bahwa laporan keuangan yang diaudit adalah akurat. Sedangkan dalam pajak tidak dikenal konsep materialitas. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomer 199/PMK.03/2007 (PMK-199/2007), pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan atas pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lainnya dan tidak mengambil dasar konsep materialitas.

Diadopsinya IFRSs ke dalam SAK semakin menambah kompleksitas rekonsiliasi fiskal sebagai konsekuensi dari pendekatan kuasi-dependen yang banyak digunakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia. Berikut adalah isu-isu penting yang menyebabkan “benturan” antara pajak dan akuntansi akan menjadi semakin rumit daripada sebelumnya pasca diadopsinya IFRSs:

a. Nilai wajar

Diadopsinya IFRSs mengakibatkan SAK banyak mengadopsi nilai wajar sebagai dasar pilihan pengukuran aset setelah pengakuan awal, diantaranya yaitu mengatur aset tetap, aset tidak berwujud, properti investasi, persediaan, instrumen keuangan dan aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Konsekuensi dari penggunaan nilai wajar ini adalah pemakaian model revaluasi untuk mengukur atau menyesuaikan nilai aset yang nilai wajar maupun masa manfaatnya diperkirakan berubah, baik meningkat maupun menurun. Konsekuensi lanjutan dari model revaluasi adalah perihal jumlah penyusutan baru yang bisa diakui per tahunnya sebagai hasil revaluasi yang mengubah nilai aset dan masa manfaatnya.

Universitas Indonesia

Karena revaluasi berdasarkan SAK tidak mensyaratkan ijin dari Dirjen Pajak maka hasil dari revaluasi berupa kenaikan ataupun penurunan aset akan menyebabkan perbedaan temporer dengan pajak. Tanpa ijin dari Dirjen Pajak untuk melakukan revaluasi, maka biaya penyusutan aset tetap diukur berdasarkan harga perolehan atau model biaya. Dampaknya akan terjadi koreksi positif atau negatif pada biaya penyusutan aset dalam laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal tergantung dari hasil revaluasi, apakah aset dinilai naik atau turun. Kondisi ini menambah kompleksitas rekonsiliasi fiskal pada biaya penyusutan aset karena koreksi akibat perbedaan temporer lainnya tetap muncul sepanjang entitas menggunakan metode penyusutan selain yang ditentukan oleh ketentuan perpajakan yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun dan/atau terjadi perbedaan pada waktu dimulainya penyusutan. Apabila entitas memilih menggunakan nilai wajar maka akan terlihat perbedaan cukup besar dalam laporan keuangan yang disajikan sebagai lampiran SPT Tahunan PPh. Neraca akan tetap disajikan sama seperti versi komersial dengan menggunakan metode nilai wajar. Berdasarkan ED PSAK 46 yang berbasis IFRS, perbedaan jumlah tercatat (nilai wajar) aset dan liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya akan diakui di dalam neraca sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan. Sedangkan laporan laba rugi menyajikan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan laba rugi versi komersial untuk menghitung penghasilan kena pajak dimana terjadi koreksi biaya penyusutan berdasarkan nilai historis. Rincian daftar aset sebagai lampiran SPT Tahunan PPh menjadi krusial untuk menguji kebenaran rekonsiliasi fiskal yang dilakukan.

Kenaikan dan penurunan aset sebagai hasil revaluasi tidak bisa diakui dalam laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal untuk menentukan penghasilan kena pajak. Koreksi kenaikan aset dalam rekonsiliasi fiskal akan sedikit terjadi karena pengakuan kenaikan aset hasil revaluasi dalam laporan laba rugi mensyaratkan adanya penurunan nilai aset sebagai hasil revaluasi yang sudah pernah diakui pada laporan laba rugi sebelumnya. Penurunan aset tidak dapat diakui dalam laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal karena ketentuan perpajakan tidak mengenal adanya penurunan aset sebagai hasil revaluasi.

Untuk properti investasi dan aset tidak berwujud, revaluasi terhadapnya akan menghasilkan perbedaan permanen karena ketentuan perpajakan tidak mengenal revaluasi terhadap properti investasi dan aset tidak berwujud. Selain itu biaya penyusutan properti investasi berupa tanah dan/atau bangunan dikoreksi dalam laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal karena atas penjualannya dikenakan PPh Final.

b. Nilai Tukar Valuta Asing

Menurut IAS 21 yang menjadi basis bagi PSAK 10 (Revisi 2010), Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing, laporan keuangan dapat dilaporkan dalam mata uang manapun. Tetapi akan lebih baik jika laporan keuangan dilaporkan dengan menggunakan mata uang fungsionalnya. Jika mata uang pelaporan berbeda dengan mata uang fungsionalnya, maka manajemen wajib melakukan prosedur *remeasurement* untuk mengukur kembali saldo-saldo yang ada pada laporan keuangan tersebut ke dalam mata uang pelaporan. Mata uang fungsional adalah mata uang yang mempengaruhi harga jual, dari negara yang kekuatan persaingan dan undang-undangnya menentukan harga jual. Mata uang ini sangat mempengaruhi biaya tenaga kerja, material dan biaya lain pengadaan barang/jasa dan merupakan mata uang tempat aktivitas pendanaan dilakukan. Mata uang fungsional juga merupakan mata uang dari penerimaan aktivitas operasi yang pada umumnya ditahan (Martani, 2010). Ketentuan perpajakan hanya mengizinkan dua mata uang sebagai mata uang fungsional dalam pembukuan yaitu Rupiah dan Dollar Amerika Serikat dan terbatas pada beberapa entitas yaitu: merupakan perusahaan modal asing yang beroperasi berdasarkan undang-undang penanaman modal asing, kontrak karya pertambangan, kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi, bentuk usaha tetap sesuai UU PPh dan P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda), wajib pajak yang mendaftarkan sahamnya di luar negeri, kontrak investasi kolektif yang menerbitkan reksadana dalam denominasi Dollar Amerika Serikat dan wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan induk di luar negeri. Kecuali kontrak karya pertambangan dan kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi, pemakaian mata uang Dollar Amerika Serikat dalam pembukuan harus mendapat ijin / persetujuan dari Menteri Keuangan.

Universitas Indonesia

Kerumitan akan terjadi apabila entitas menggunakan mata uang fungsional selain Rupiah dan Dollar Amerika Serikat (dijinkan). Entitas harus membuat pembukuan dan laporan keuangan dalam dua mata uang yaitu mata uang pelaporan pajak Rupiah/Dollar Amerika Serikat dan mata uang fungsional yang mereka gunakan. Hal ini akan menambah biaya dan waktu. Karena mata uang fungsional tidak diakui sebagai mata uang pelaporan pajak maka kerugian atau keuntungan selisih kurs mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi kurs terhadap kurs mata uang fungsional, dapat menimbulkan perbedaan tetap dalam laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal. Koreksi dalam rekonsiliasi fiskal disebabkan kerugian atau keuntungan selisih kurs mata uang asing dihitung kembali berdasarkan fluktuasi kurs terhadap kurs mata uang pelaporan pajak.

c. Sewa guna usaha

Aktivitas sewa pembiayaan (*capital lease*) dikapitalisasi apabila kontrak sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi (*operating lease*) jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset atau tidak satu pun memenuhi kriteria-kriteria: (1) *lessor* mengalihkan kepemilikan aset kepada *lessee* pada akhir masa sewa; (2) *lessee* memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewa guna usahakan pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang cukup rendah jika dibandingkan dengan nilai wajar aset tersebut pada saat opsi dilaksanakan; (3) masa sewa meliputi sebagian besar umur ekonomis aktiva; (4) pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aktiva; dan (5) aset sewa bersifat khusus dimana hanya *lessee* yang menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material. Sebaliknya pajak menggolongkan sewa guna usaha tanpa hak opsi apabila memenuhi kriteria: (1) jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan ditambah keuntungan yang diperlukan oleh *lessor*; dan (2) perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*.

Perbedaan klasifikasi akan menimbulkan perbedaan tetap pada penghasilan *lessor* dan biaya penyusutan *lessee* karena jika sewa diklasifikasikan sebagai *capital lease* maka *lessor* akan mencatatnya sebagai penjualan aset dan *lessee* akan mencatat biaya penyusutan sebagai konsekuensi pengakuan aset. Sedangkan pajak tetap mengklasifikasikannya sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi sehingga tidak ada penjualan oleh *lessor* dan penyusutan oleh *lessee* yang dapat diakui. Demikian juga jika terjadi transaksi *sale and lease back*, menurut ketentuan perpajakan penjualan dari *lessee* kepada *lessor* harus diakui sebagai penghasilan dan selanjutnya biaya penyusutan dicatat oleh *lessor* meskipun sewa guna usaha tersebut menggunakan hak opsi.

d. Instrumen Keuangan

Berdasarkan standar akuntansi keuangan revisi terakhir, instrumen keuangan terdiri dari *financial asset*, *financial liability* dan *equity instrument*. Aset keuangan terbagi lagi ke dalam *fundamental financial asset*, *derivatives* dan *hedging instruments*. Nilai wajar menjadi pengukuran paling relevan bagi instrumen keuangan karena mencerminkan kinerja entitas dan harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Jika instrumen keuangan harus diukur dengan biaya perolehan maka harus dibuat catatan mengapa instrumen keuangan tidak dapat diukur menggunakan nilai wajar. Konsekuensi pengukuran pada nilai wajar mengakibatkan nilai instrumen keuangan bisa mengakibatkan keuntungan atau kerugian tergantung dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan. Dari sudut pandang pajak, nilai wajar pada instrumen keuangan akan menghasilkan perbedaan tetap karena keuntungan atau kerugian akan dikoreksi dalam laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal karena penghasilan dari instrumen keuangan dikenakan PPh Final.

Tetapi berbeda apabila transaksi instrumen keuangan dilakukan diluar bursa efek atau bursa berjangka karena penghasilan dari instrumen keuangan akan dikenakan PPh tarif umum sesuai Pasal 17 UU PPh. Instrumen derivatif menjadi perhatian karena 99,88 persen transaksi derivatif justru dilakukan di luar bursa efek atau bursa berjangka atau disebut *over the counter* (OTC). Padahal selama ini transaksi derivatif di perdagangan komoditas berjangka yang bisa dimonitor oleh pemerintah hanya transaksi yang dilakukan di bursa.

Universitas Indonesia

Transaksi derivatif adalah kontrak transaksi antara dua belah pihak untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu (*underlying assets*) di masa yang akan datang berdasarkan harga yang disepakati pada saat kontrak dibuat. Aset tertentu yang akan diperjual-belikan biasanya berupa valuta asing, saham, komoditi, dan tingkat suku bunga. Artinya nilai kontrak derivatif tergantung dari pergerakan nilai dari aset yang akan diperjual-belikan tersebut (*underlying assets*). Bentuk umum kontrak derivatif berupa *option*, *future*, *forward*, dan *swap*. Transaksi derivatif dapat dipergunakan untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) atas nilai wajar aset atau kewajiban perusahaan maupun untuk arus kas perusahaan di masa yang akan datang (*hedged item*). Selain itu, transaksi derivatif dapat dipakai untuk tujuan spekulasi. Transaksi derivatif untuk tujuan spekulasi ini semata-mata dimaksudkan untuk memaksimalkan keuntungan dan tidak dalam rangka melindungi aset atau kewajiban perusahaan. Atas hal tersebut Darussalam dan Septriadi (2009) mempertanyakan apakah rugi derivatif untuk tujuan spekulasi dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dalam praktik, perdebatan ini terus berlangsung yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Apalagi belum ada ketentuan dalam peraturan perpajakan yang secara tegas mengatur mengenai perlakuan perpajakan atas kerugian yang timbul dari instrumen derivatif yang transaksinya dilakukan diluar bursa efek atau berjangka. Dalam rangka memberikan solusi permasalahan, Darussalam dan Septriadi memberikan contoh peraturan pajak di negara lain sebagai bahan perbandingan. Di India, Pakistan, dan Rusia, rugi derivatif untuk tujuan spekulasi dikategorikan sebagai *extra ordinary loss*. Rugi derivatif yang masuk dalam *extra ordinary loss* hanya boleh dikurangkan (dibiayakan) terhadap *extra ordinary income*. Dengan demikian, rugi spekulasi hanya boleh sebagai pengurang dari laba spekulasi. Jadi, apabila tidak terdapat laba spekulasi dalam tahun terjadinya rugi spekulasi, maka rugi spekulasi dengan sendirinya tidak diperbolehkan sebagai unsur pengurang penghasilan kena pajak. Rugi spekulasi yang tidak dapat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tersebut dapat dikompensasikan terhadap laba spekulasi selama 6 tahun di Pakistan, 8 tahun di India, dan 10 tahun di Rusia. Permasalahan penting

Universitas Indonesia

yang harus menjadi perhatian disini adalah bagaimana merumuskan definisi rugi derivatif untuk tujuan spekulasi. India dan Pakistan mendefinisikannya sebagai: 1) penyelesaian kontrak derivatif dilakukan tidak dalam rangka untuk mendapatkan aset dasarnya (*underlying assets*) atau hanya diselesaikan secara *nett settlement*; 2) penyelesaian secara *nett settlement* tidak dianggap sebagai spekulasi jika dilakukan untuk menjamin pembelian bahan baku, atau jika kontrak derivatif tersebut dilakukan oleh anggota bursa. Sementara itu, Rusia mendefinisikan rugi derivatif sebagai kegiatan spekulasi (*non-quoted*) jika nilai dari aset dasarnya (*underlying asset*) tidak dapat diketahui dengan pasti seperti tidak diperdagangkan di bursa atau tidak dipublikasikan di media.

5.3 Respon Sementara DJP Terhadap Konvergensi IFRSs

Bagaimana respon DJP menanggapi proses konvergensi IFRSs oleh DSAK IAI dapat dilihat dari penjelasan 2 (dua) pejabat DJP yaitu Wahyu Karya Tumakaka sebagai Pejabat Pengkaji Hukum Perpajakan saat memberikan penjelasan mengenai aspek perpajakan implementasi IFRSs di Indonesia dan Yunirwansyah sebagai Kepala Sub Direktorat Peraturan PPh Badan saat memberikan penjelasan mengenai dampak penerapan PSAK terbaru terhadap perpajakan.⁹

Tumakaka melihat aspek perpajakan implementasi IFRSs di Indonesia dengan memandang IFRSs dari segi kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yaitu sebagai 4 (empat) aspek kebijakan publik yang terdiri dari aspek legal, aspek keekonomian, aspek administratif dan aspek sosio-politikal. Keempat aspek dalam perspektif kebijakan perpajakan nasional tersebut akan menjadi pertimbangan dasar perubahan regulasi di bidang perpajakan yang kompatibel dengan IFRSs.

Dilihat dari aspek legal, terdapat 4 (empat) hal yang menjadi fokus utama. Pertama, adanya perbedaan prinsip yang dianut oleh IFRSs yang tidak sejalan dengan ketentuan perpajakan yaitu mengenai asumsi dasar (*accrual basis, cash basis*), konsep dasar modal (*physical, nominal financial capital dan constant purchasing power*), metode pengukuran dan penilaian unsur-unsur laporan

⁹ Penjelasan keduanya sebagian besar didapat dari seminar IFRSs yang diikuti oleh penulis. Wahyu Karya Tumakaka saat ini menjabat sebagai Direktur KITSDA DJP dan merupakan salah satu anggota Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan IAI.

keuangan (*historical, current cost, realisable value*) dan laporan keuangan standar (laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal). Kedua, pengaruh IFRSs terhadap industri tertentu yang didasari kontrak dengan pemerintah, dimana praktik akunting menjadi klausa yang masuk dalam kontrak. Ketiga, penerapan IFRSs nantinya apakah bersifat *voluntary* (sukarela) atau *mandatory* (wajib). Keempat, fleksibilitas dan *time-frame* perubahan regulasi perpajakan. Seberapa fleksibelkah Undang-undang Perpajakan dapat diubah dan berkaitan dengan implementasi SAK berbasis IFRSs pada tahun 2012 apakah perubahan regulasi pajak juga harus berlaku pada tahun tersebut.

Aspek ekonomi melihatnya dari segi efisiensi dan biaya kepatuhan bagi wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan serta melaporkan SPT Tahunan PPh yang melampirkan laporan keuangan fiskal. Selain itu juga melihat bagaimana pengaruh perubahan pengukuran dan metode didalam regulasi perpajakan yang mengikuti PSAK berbasis IFRSs terhadap keseluruhan penerimaan pajak.

Aspek administratif memandang dari 3 (tiga) perspektif utama. Pertama, dengan adanya perbedaan antara standar pelaporan untuk tujuan pajak dengan standar laporan keuangan berdasarkan PSAK berbasis IFRSs, apakah akan memerlukan *setting* administratif perpajakan yang berbeda atau cukup dengan *setting* yang ada seperti perangkat pelaporan dan sebagainya. Kedua, apakah implementasi PSAK berbasis IFRSs memerlukan perubahan organisasi administrasi DJP. Ketiga, pengaruh implementasi IFRSs terhadap kapasitas sumber daya manusia DJP dan kompetensi administrator perpajakan.

Aspek sosio-politikal melihat pengaruh migrasi PSAK dari akuntansi konvensional menuju IFRSs terhadap besarnya laba kena pajak, akan mempengaruhi perilaku pajak dari perusahaan kearah motif laba, seperti *tax minimization*. Selain itu adanya peran legislatur dan politik dalam negeri serta NGO (*non government organization*) internasional untuk menekan *interest group* termasuk korporasi multinasional dan internasional yang aktif mendorong konvergensi IFRSs.

.Tumakaka menyadari bahwa IAI sebagai satu-satunya organisasi profesi di bidang akuntansi yang relevan dengan IASB tidak memiliki pilihan selain

mengambil peran dan inisiatif untuk mendorong dan mempercepat regulasi pemerintah agar ketentuan yang relevan di bidang perpajakan juga mampu mengatasi adopsi IFRSs dalam *time frame* IAI. Berkaitan dengan hal tersebut dibutuhkan suatu sosialisasi yang memadai bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan regulasi seperti DPR, Kementerian Keuangan, Bapepam-LK dan DJP sebagai pelaksana administrasi pajak. Dapat dipastikan bahwa penerapan IFRSs akan mempengaruhi besarnya dasar penghitungan PPh sebelum dilakukan rekonsiliasi fiskal. Keterlambatan dalam regulasi perpajakan dikhawatirkan akan menimbulkan komplikasi besar yang pada gilirannya akan sangat mempengaruhi kinerja perekonomian maupun mengganggu iklim berusaha akibat ketidakpastian investor dalam hal melakukan kalkulasi usahanya. DJP sebagai administrator perpajakan dituntut untuk mempersiapkan kapasitas organisasi, sistem dan prosedur serta kapasitas sumber daya manusianya untuk mengatasi adopsi IFRSs dan implementasinya.

Yunirwansyah memberikan latar belakang yang bersifat teknis berupa perbedaan antara PSAK berbasis IFRSs dengan ketentuan perpajakan beserta dampaknya sebagai dasar untuk menjelaskan alasan DJP dalam menyikapi perbedaan, persiapan yang sudah dilakukan dan pilihan yang akan diambil menghadapi konvergensi IFRSs. Beberapa PSAK berbasis IFRSs yang dianalisis yaitu:

a. PSAK 13 (Revisi 2007), Properti Investasi

Dampak perbedaan yang ditimbulkan dari PSAK 13 berbasis IFRSs yaitu adanya pilihan penggunaan model nilai wajar yang apabila dipilih oleh wajib pajak maka akan menimbulkan perbedaan tetap dalam laporan keuangan fiskal karena ketentuan perpajakan menggunakan faktor biaya sebagai dasar penyusutan dan tidak diperbolehkannya penurunan nilai wajar sebagai faktor pengurang laba rugi. Sedangkan apabila wajib pajak memilih model biaya maka perbedaan yang mungkin muncul yaitu perbedaan sementara apabila wajib pajak tidak menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun dalam melakukan penyusutan. Untuk properti investasi yang digunakan untuk sewa akan menimbulkan perbedaan tetap mengingat penghasilan berupa sewa atas tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh Final.

Universitas Indonesia

Sikap DJP dalam menyikapi perbedaan tersebut yaitu:

- melakukan diskusi lebih lanjut
- menganalisis apakah revaluasi perlu mendapat ijin dari DJP atau tidak, pilihan sementara yaitu revaluasi dapat dilakukan menurut PSAK dengan tanpa ijin DJP tetapi tidak akan diakui oleh DJP
- revaluasi apabila disetujui oleh DJP akan dikenakan PPh Final 10 persen
- menganalisis revaluasi atas aset yang dapat direvaluasi (sebagian/seluruhnya) dan dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun atau lebih cepat

b. PSAK 16 (Revisi 2007), Aset Tetap

Dampak perbedaan yang ditimbulkan dari PSAK 16 berbasis IFRSs akan terjadi baik di penggunaan model biaya maupun model nilai wajar. Perbedaan nilai aset tetap sebagai dasar penyusutan dalam model biaya terjadi apabila terdapat penambahan estimasi biaya pada nilai aset tetap yang diperoleh. Sedangkan apabila wajib pajak menggunakan model nilai wajar dan melakukan revaluasi maka akan menimbulkan perbedaan tetap karena ketentuan perpajakan menggunakan model biaya sebagai dasar biaya penyusutan. Selain itu penurunan nilai wajar sebagai hasil revaluasi tidak diperbolehkan sebagai faktor pengurang dalam laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal. Dalam menghitung besarnya biaya penyusutan, kemungkinan besar akan terjadi perbedaan sementara, selain karena wajib pajak tidak menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun sesuai UU PPh, tetapi juga disebabkan perbedaan saat dimulainya penyusutan. PSAK mengatur penyusutan dimulai saat aset tetap digunakan sedangkan UU PPh mengatur penyusutan dimulai pada bulan dilakukan pengeluaran.

Sikap DJP dalam menyikapi perbedaan tersebut yaitu:

- menganalisis kemungkinan terjadinya penambahan biaya saat dilakukan penilaian berdasarkan model nilai wajar yang kadang memerlukan penilai independen serta kemungkinan penilaian menggunakan estimasi dan *judgement* akan dapat menunjukkan nilai wajar yang sebenarnya

- memutuskan bahwa revaluasi untuk kepentingan pajak tetap harus mendapat ijin dari DJP dan dikenakan PPh Final dengan tarif 10 persen
- menganalisis kemungkinan revaluasi dilakukan dalam periode setiap 5 (lima) tahun atau periode yang lebih pendek
- mempertimbangkan DJP dapat memberikan ijin dimulainya penyusutan berdasarkan PSAK 16 yaitu saat aset tetap digunakan

c. PSAK 30 (Revisi 2007), Sewa

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomer 1169/KMK.01/1991 (KMK-1169/1991) tidak semua entitas dapat melakukan transaksi sewa guna usaha (*leasing*). Entitas yang dapat dikategorikan sebagai *lessor* yaitu perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha yang telah mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan *leasing*. KMK-1169/1991 menunjukkan bahwa ketentuan perpajakan dalam kegiatan *leasing* lebih sempit dibandingkan SAK karena terdapat batasan atas definisi *lessor*.

Perbedaan prinsip akuntansi yang menganut *substance over form* dengan pajak yang menganut *form over substance* menimbulkan perbedaan tetap biaya penyusutan apakah suatu sewa guna usaha termasuk *capital lease* atau *operating lease*. Perbedaan sementara biaya penyusutan ada apabila terjadi perbedaan metode penghitungan penyusutan.

Sikap DJP dalam menyikapi perbedaan tersebut yaitu:

- melakukan evaluasi lebih lanjut atas perbedaan-perbedaan yang terjadi

d. PSAK 10 (Revisi 2010), Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing

Peraturan Menteri Keuangan Nomer 196/PMK.03/2007 (PMK-196/2007) memperbolehkan beberapa entitas tertentu untuk menyelenggarakan pembukuan dengan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat setelah mendapat ijin dari Menteri Keuangan. Keharusan menentukan mata uang fungsional menyebabkan entitas yang tidak menggunakan mata uang fungsional Rupiah atau Dollar Amerika Serikat harus melakukan translasi dari mata uang fungsional ke dalam mata uang Rupiah atau Dollar Amerika Serikat. Ini berarti akan terdapat dua laporan keuangan menurut mata uang

fungsional dan menurut mata uang Rupiah atau Dollar Amerika Serikat. Dampaknya wajib pajak akan memerlukan tambahan biaya dan waktu dalam menyelenggarakan pembukuan dan menyusun laporan keuangan.

Sikap DJP dalam menyikapi perbedaan tersebut yaitu:

- melakukan kajian lebih lanjut atas PMK-196/2007

- e. PSAK 50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan dan PSAK 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran

Adanya perbedaan pengakuan keuntungan dan kerugian antara PSAK 50 dan PSAK 55 karena perubahan nilai wajar dengan ketentuan perpajakan yang hanya mengakui keuntungan dan kerugian dari nilai transaksi penjualan menimbulkan perbedaan signifikan dimana dapat terjadi di sisi akuntansi telah diakui sebagai keuntungan atau kerugian sedangkan di sisi perpajakan belum diakui mengingat belum terjadi realisasi.

Sikap DJP dalam menyikapi perbedaan tersebut yaitu:

- Membicarakan lebih lanjut mengenai perbedaan sebagaimana tersebut diatas

Dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Arah kebijakan DJP untuk menjalankan fungsi penerimaan (budgetair) dan fungsi mengatur (reguler), pengembangan sumber daya manusia dan tujuan efisiensi.
- b. Definisi pembukuan menurut Pasal 1 angka 29 UU KUP yaitu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
- c. Penjelasan Pasal 28 ayat 7 UU KUP yang menjelaskan bahwa pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan SAK kecuali peraturan perundang-undangan

perpajakan menentukan lain. Hal ini berarti pembukuan diselenggarakan sesuai SAK tetapi preferensi diberikan pada ketentuan perpajakan jika terdapat pengaturan yang tidak sejalan.

maka DJP memiliki 3 (tiga) pilihan dalam menghadapi konvergensi IFRSs, yaitu:

- a. Mengadopsi IFRSs dengan menyederhanakan pelaporan keuangan dan melakukan perubahan aturan perpajakan sesuai dengan PSAK berbasis IFRSs.
- b. Tidak mengadopsi IFRSs karena prinsip-prinsip IFRSs tidak dapat diterapkan dalam penghitungan pajak. Selain itu disebabkan DJP memiliki kewenangan untuk menerapkan ketentuan perpajakan dan selama ini perbedaan antara akuntansi dan pajak diakomodasi dalam laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal.
- c. Mengadopsi sebagian IFRSs dengan menyederhanakan pelaporan keuangan, melakukan perubahan aturan perpajakan untuk hal yang sangat penting dan tetap membutuhkan rekonsiliasi fiskal untuk mengakomodasi perbedaan akuntansi dan pajak.

Ketiga pilihan tersebut diatas menurut Yunirwansyah harus diambil atau ditentukan DJP setelah melalui simulasi dan penelitian komprehensif untuk mengetahui dampak secara menyeluruh dari konvergensi IFRSs. Dalam rangka persiapan menghadapi implementasi penuh PSAK berbasis IFRSs, DJP telah dan akan melakukan diskusi dengan IAI, institusi terkait seperti perguruan tinggi, kantor akuntan publik dan asosiasi, menganalisis peraturan perpajakan dan menyebarkan informasi serta melakukan pendidikan dan latihan kepada pegawai DJP.

5.4 Dampak Motif Konvergensi IFRSs di Indonesia Terhadap Kebijakan Perpajakan

Seperti telah diuraikan di bab-bab sebelumnya, negara-negara di dunia sedang menuju keseragaman standar akuntansi dengan mengadopsi IFRSs dalam standar akuntansi lokal. Dengan menggunakan IFRSs, maka semua bisnis di dunia berbicara dalam bahasa akuntansi yang sama. Kelak tidak ada lagi kerepotan yang dialami oleh perusahaan multinasional untuk mengkonsolidasi laporan keuangan dari anak-anak perusahaan di berbagai negara. Tidak ada lagi perusahaan yang

kesulitan jika harus *listing* di pasar modal negara lain karena harus menyesuaikan laporan keuangannya dengan standar akuntansi setempat. Dan yang paling utama adalah semakin bebasnya aliran modal atau dana dari para investor global mengalir ke berbagai sudut dunia sebagai pengukuhan era sistem kapitalisme global dimana modal uang internasional memainkan peran yang menentukan. Konvergensi IFRSs menjadi sebuah proses yang harus dilakukan Indonesia karena beraktifitas dalam sebuah lingkungan masyarakat ekonomi global yang bercirikan perdagangan bebas barang dan jasa serta terutama aliran modal uang lintas batas.

Bagaimana seharusnya respon DJP menghadapi konvergensi IFRSs? Wahyu Karya Tumakaka sebagai pejabat DJP sekaligus anggota Dewan Konsultatif SAK memberikan sinyal bahwa jika DJP harus mengeluarkan kebijakan maka hal tersebut harus menghasilkan perubahan regulasi di bidang perpajakan yang kompatibel dengan IFRSs. Sedangkan Yunirwansyah sebagai pejabat DJP yang berwenang dalam peraturan PPh mengemukakan 3 (tiga) pilihan kebijakan yang akan diambil DJP, yaitu mengadopsi, tidak mengadopsi atau mengadopsi sebagian IFRSs ke dalam peraturan perpajakan yang baru. Sebagaimana dijelaskan di bab pertama, meskipun DJP tidak mengeluarkan satu kebijakan pun untuk merespon konvergensi IFRSs, dalam teori kebijakan publik hal tersebut sudah dianggap sebagai kebijakan dari DJP. Sebagai otoritas perpajakan dan ujung tombak negara dalam mencari penerimaan maka sudah seharusnya kebijakan yang akan diambil DJP untuk merespon konvergensi IFRSs juga ditujukan untuk menunjang dan selaras dengan pembangunan ekonomi Indonesia dan bukan hanya tujuan sesaat untuk memudahkan rekonsiliasi fiskal atau pun pembukuan yang diselenggarakan oleh entitas.

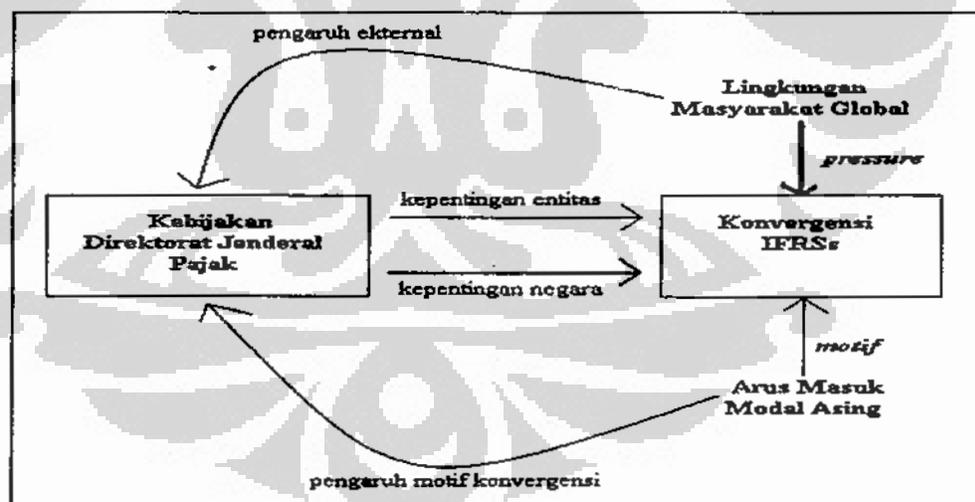
Standar akuntansi global sebagaimana disebut dalam tujuan IASB dikembangkan untuk membantu para pelaku di berbagai pasar modal. Hal ini dimaksudkan untuk melancarkan arus modal para investor global dalam mencari tempat-tempat berinvestasi sekaligus memudahkan entitas-entitas untuk mencari sumber pendanaan. Kondisi saat ini, tidak banyak perusahaan Indonesia yang *listing* di bursa efek di luar negeri dan semakin banyak jumlah arus modal asing yang masuk ke Indonesia melalui investasi portofolio. Sebaliknya jumlah investasi asing langsung yang lebih bermanfaat bagi Indonesia justru semakin

Universitas Indonesia

tertinggal perkembangannya dibanding investasi portofolio yang riskan menimbulkan krisis finansial. Di sisi lain, implementasi IFRSs di Indonesia pada tahun 2012 hanya akan berlaku bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik. Dengan kondisi tersebut, kebijakan DJP seharusnya bisa bertujuan untuk meminimalisasi dampak buruk dari mengalminya arus modal asing sebagai efek penggunaan standar akuntansi global dengan tetap tidak mengesampingkan tujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam menyelenggarakan pembukuan dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Meskipun demikian besarnya pengaruh eksternal dari lingkungan masyarakat global dan keanggotaan Indonesia (termasuk DJP) pada lembaga/organisasi/forum internasional yang mendukung konvergensi IFRSs dapat berdampak terhadap arah kebijakan DJP sebagai otoritas perpajakan di Indonesia. Apakah kondisi tersebut akan sangat mempengaruhi kebijakan DJP dalam merespon konvergensi IFRSs yang seharusnya bertujuan untuk menunjang dan selaras dengan pembangunan ekonomi Indonesia sekaligus untuk meningkatkan keefektifan dan keefisienan entitas dalam pelaporan pajak?

Gambar 5.1
Pengaruh Eksternal dan Motif Konvergensi IFRSs Terhadap Kebijakan DJP



Lingkungan masyarakat global sebagai pengaruh eksternal terhadap kebijakan DJP terdiri dari negara-negara di dunia terutama negara-negara maju dan negara-negara yang berada dalam kawasan regional yang sama dengan

Indonesia, dan lembaga, organisasi atau forum kerjasama internasional terutama dimana Indonesia aktif bekerjasama atau menjadi anggotanya baik itu langsung diwakili oleh DJP ataupun diwakili oleh lembaga pemerintah lainnya atau lembaga non-pemerintah. Sedangkan pengaruh motif konvergensi IFRSs terhadap kebijakan DJP akan membawa sudut pandang DJP terhadap risiko yang ditimbulkan dari arus masuk modal asing terhadap kondisi ekonomi Indonesia sehingga materi kebijakan yang diambil akan menunjang dan selaras dengan pembangunan ekonomi Indonesia.

Di dunia, organisasi yang aktif melakukan pertemuan dan diskusi pajak dalam skala internasional adalah OECD yang merupakan salah satu organisasi dunia yang mendukung konvergensi IFRSs. Hal tersebut ditunjukkan dengan langkah mereka untuk merevisi OECD Principles of Corporate Governance dalam rangka mengakomodasi prinsip mereka untuk mendukung pengadopsian standar akuntansi yang diakui secara internasional atau penggunaan standar akuntansi lokal yang konsisten dengan standar akuntansi internasional. OECD terdiri dari beberapa komite yang dibagi sesuai dengan bidang kerjasama ekonomi atau pembangunan dan khusus untuk bidang perpajakan berada di bawah CFA.

CFA menjadi forum bagi para pembuat kebijakan dan administrasi yang merepresentasikan Kementerian Keuangan dan otoritas perpajakan dari masing-masing negara anggota. Pembicaraan dalam forum tidak hanya fokus terhadap pajak internasional tetapi juga yang berhubungan dengan administrasi dan kebijakan pajak domestik. Tujuan dibentuknya CFA adalah untuk mengeliminasi *tax measures* yang menghambat arus investasi dan perdagangan, mencegah *double taxation*, memberantas *tax evasion* dan *tax avoidance* serta mempromosikan praktik yang baik dalam administrasi dan kebijakan perpajakan. Hal ini berarti komite bermaksud untuk meningkatkan pembicaraan antar pemerintah di bidang pajak melalui komunikasi, kerjasama dan pemberian bantuan yang berkaitan dengan praktik perpajakan.

Kerjasama yang dilakukan CFA tidak hanya untuk negara-negara anggota OECD tetapi juga dengan negara-negara bukan anggota OECD termasuk Indonesia. Kerjasama dengan Indonesia oleh CFA dimasukkan dalam kategori "dialog yang perlu diperkuat" bersama dengan Cina, Brasil, India dan Afrika

Selatan (Parry, 2007). Kerjasama dengan negara-negara bukan anggota OECD dilakukan karena pajak merupakan isu lintas batas dan permasalahan dalam pajak internasional membutuhkan juga skala internasional. Selain itu hal tersebut merupakan usaha OECD untuk membantu pengembangan sistem yang mampu membantu pemerintah meningkatkan penerimaan pajaknya secara terus menerus dan sekaligus menarik minat dari *foreign investment*. Kerjasama ini diakui oleh OECD akan menggunakan pendekatan bersama dengan organisasi/lembaga/forum internasional lainnya.

Bagi Indonesia usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak sekaligus menarik minat FDI justru menjadi benturan antara kepentingan investasi dengan kepentingan penarikan pajak. Seperti diketahui pemerintah Indonesia sejak tahun 1967 gencar menarik penanaman modal asing dimana salah satu syaratnya adalah pemerintah harus menyediakan iklim investasi yang kondusif termasuk di dalamnya insentif pajak. Dalam praktek, insentif pajak tersebut ditindaklanjuti dengan adanya P3B antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asing yang perusahaannya banyak berinvestasi di Indonesia seperti Jepang, Korea Selatan atau Amerika Serikat. Permasalahan yang terjadi posisi tawar menawar pemerintah Indonesia saat pembuatan perjanjian tersebut terkadang lemah sehingga penarikan pajak obyek tertentu terhadap perusahaan asing oleh otoritas pajak hampir sulit dilakukan.

CFA mengeluarkan OECD Model Tax Convention yang salah satunya menjadi pedoman dalam proses pembuatan *tax treaty* termasuk oleh DJP dan otoritas perpajakan di negara lainnya. *Tax treaty* atau P3B melalui ketentuan penghasilan dan *time test*-nya sebenarnya bisa menjadi salah satu jalan bagi DJP untuk meminimalisasi risiko terjadinya krisis finansial dari semakin mengalirnya arus modal asing dalam bentuk investasi portofolio yang dipermudah oleh penggunaan standar akuntansi global. Mengalir derasny modal asing yang didominasi modal jangka pendek dan lemahnya kebijakan untuk mengelola hal tersebut bisa memunculkan risiko bagi stabilitas makro ekonomi dan bisa memunculkan krisis moneter sebagaimana terjadi di tahun 1990-an dimana aliran *hot money* telah menghancurkan mata uang lokal. Sejauh ini efek yang paling

dikhawatirkan dari besarnya *capital inflow* ini adalah terjadinya pembalikan modal secara tiba-tiba atau *sudden reversal*.

Pajak terhadap *capital inflow* atau yang dikenal sebagai *capital import tax* telah diterapkan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, Brasil dan Thailand. IMF menghimbau Indonesia untuk tidak menempuh kebijakan pengenaan pajak kepada arus modal asing yang masuk (*capital inflow*) seperti sesama negara berkembang yaitu Brasil dan Thailand yang melakukannya dengan tujuan untuk mengerem arus modal keluar sekaligus menguntungkan pemerintah untuk menjaga kestabilan mata uang agar tidak mendadak terdepresiasi. Thailand telah mencabut pengecualian *withholding tax* 15 persen atas bunga obligasi yang diterima dari pemerintah, Bank of Thailand dan perusahaan negara, yang selama ini diterapkan pada investor asing. Bagi Thailand, kebijakan ini juga berarti tidak membedakan perlakuan terhadap investor lokal atau investor asing. Sedangkan Brasil menaikkan tarif pajak untuk modal asing di sekuritas dari 2 persen menjadi 4 persen. Korea Selatan saat ini sedang menjajaki kebijakan baru terhadap *capital inflow*, termasuk penerapan *withholding tax*, untuk menjaga kestabilan mata uang Won terhadap Dollar Amerika Serikat. Tetapi sebagai lembaga keuangan internasional dunia IMF justru lebih menyarankan Indonesia untuk memilih cara menyerap *capital inflow* melalui instrumen moneter jangka menengah dan jangka panjang. Mengeliminasi efek dari *short term investment* dengan memanfaatkan sekaligus menyalurkan kelebihan likuiditas yang terjadi ke infrastruktur dan investasi berjangka panjang.

Time test dapat digunakan sebagai salah satu perangkat efektif untuk menjaga penarikan kembali dana spekulatif secara mendadak karena berkaitan dengan konsep pengaturan waktu untuk menentukan hak pemajakan negara sumber atas penghasilan yang timbul dari wilayah yurisdiksinya. Keuntungan yang diperoleh investor asing dari penjualan investasi portofolio seperti saham atau obligasi tidak akan dikenakan pajak sepanjang belum memenuhi *time-test*. Misalnya dalam P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat disebutkan bahwa penduduk salah satu negara akan dikecualikan dari pengenaan pajak oleh negara pada P3B atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan, pertukaran, atau bentuk lain pengalihan *capital assets*, kecuali penerima keuntungan dari pengalihan harta

tersebut memiliki suatu bentuk usaha tetap atau tempat tetap di negara lainnya pada P3B dan harta yang menghasilkan keuntungan tersebut mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut atau penerima keuntungan dari pengalihan harta tersebut adalah orang pribadi yang berada di negara lainnya pada P3B untuk suatu masa atau masa-masa yang keseluruhannya berjumlah 120 (seratus dua puluh) hari atau lebih selama tahun pajak. Celah 120 hari ini dapat dimanfaatkan investor global yang memiliki investasi portofolio jangka pendek untuk terhindar dari pengenaan pajak di Indonesia.

ORI atau surat utang negara yang banyak diserbu investor global juga termasuk dalam kategori penghasilan bunga yang tidak dapat dikenakan pajak di Indonesia berdasarkan *tax treaty*. Bunga yang berasal dari suatu negara dan dibayarkan kepada penduduk negara lainnya sebenarnya dapat dikenakan pajak di negara lainnya tersebut.¹⁰ Namun demikian, bunga itu dapat juga dikenakan pajak di negara tempat asal bunga sesuai dengan perundang-undangan pajak negara itu, akan tetapi jika si penerima bunga adalah pemilik yang menikmati bunga tersebut, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10 persen dari jumlah kotor bunga itu. Tetapi terdapat ketentuan dibebaskan dari pengenaan pajak oleh negara tempat asal bunga diberikan sepanjang bunga tersebut berasal dari negara yang diterima oleh pemerintah negara lainnya termasuk pemerintah daerah atau lokal, bank sentral atau setiap lembaga keuangan milik pemerintah, atau yang diterima oleh setiap penduduk negara sehubungan dengan surat-surat hutang yang dijamin atau secara tidak langsung dibiayai oleh pemerintah negara lainnya itu termasuk pemerintah daerah atau lokal, bank sentral atau lembaga keuangan milik Pemerintah. Khusus untuk Indonesia istilah bank sentral dan lembaga keuangan milik pemerintah mengacu kepada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lainnya yang modalnya milik Pemerintah Republik Indonesia yang dimufakati dari waktu ke waktu antara kedua negara. Kondisi saat ini lebih banyak investor global yang

¹⁰ Bunga disini berarti pendapatan dari semua jenis tagihan hutang, baik yang dijamin dengan hipotik maupun tidak dan baik yang berhak ikut serta dalam bagian keuntungan sipeminjam atau tidak, dan khususnya pendapatan dari surat-surat hutang, termasuk premi dan hadiah yang terikat pada surat-surat perbendaharaan negara, obligasi atau surat-surat hutang tersebut diatas.

mengalir ke Indonesia dibandingkan investor Indonesia yang menanamkan modalnya di portofolio negara lain. Faktor penyebabnya adalah karena tingkat suku bunga yang ditawarkan negara-negara maju justru lebih rendah dibandingkan negara-negara berkembang.

Dengan demikian kondisi tersebut memerlukan renegotiasi dengan negara-negara mitra P3B. DJP sebenarnya sedang mengkaji kemungkinan dilakukannya renegotiasi dengan beberapa negara mitra P3B. Tetapi renegotiasi tersebut dilakukan lebih untuk menyesuaikan dengan kebijakan negara mitra P3B yang telah melakukan penyesuaian tarif pajak di dalam negeri dan khusus untuk pasal pertukaran informasi perpajakan yang mengacu kepada standar OECD atau PBB. Hal ini dilakukan bersama dengan Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR) yang merupakan organisasi institusi perpajakan se-Asia Pasifik yang terdiri dari Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Cina, Hongkong SAR, Makau SAR, Taiwan, Jepang dan Korea Selatan. Renegosiasi mengenai pasal penghasilan dari bunga yang berasal dari obligasi pemerintah dan *time test* atas keuntungan dari pengalihan modal tentu bukan sebuah hal yang mudah bagi Indonesia apalagi menghadapi negara mitra P3B yang berasal dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris Raya, Jerman atau Jepang yang merupakan sumber terbesar dari investor global. Ujung-ujungnya kebijakan perpajakan akan lebih diarahkan untuk mengeluarkan perubahan regulasi perpajakan yang kompatibel dengan IFRSs.

Sebagai negara yang menggunakan pendekatan kuasi-dependen, Indonesia sebenarnya dapat bersikap *status quo* terhadap pelaksanaan konvergensi IFRSs atau mengambil pilihan tidak mengadopsi IFRSs ke dalam ketentuan perpajakan. Servicio de Impuestos Internos sebagai otoritas pajak di Chili misalnya telah menyatakan bahwa adopsi IFRSs ke dalam penyelenggaraan pembukuan dan penyajian laporan keuangan seharusnya tidak berdampak langsung terhadap penghitungan *income tax*. Wajib pajak di Chili bahkan disarankan untuk menganalisa dan mengeliminasi penyesuaian kepada IFRSs dalam rekonsiliasi fiskal untuk menghitung laba kena pajak. Jerman yang menggunakan pendekatan kuasi-dependen juga menerapkan kebijakan yang sama. Otoritas perpajakan

Universitas Indonesia

disana menyatakan bahwa perubahan besar yang dihasilkan dari proses konvergensi IFRSs ke standar akuntansi lokal tidak akan mempengaruhi penghitungan laba kena pajak karena dapat dilakukan penyesuaian melalui mekanisme rekonsiliasi fiskal. Sikap tegas juga dinyatakan otoritas perpajakan Islandia yang menggunakan pendekatan kuasi-dependen. Penyesuaian dalam pembukuan akibat dampak dari adopsi IFRSs harus dihilangkan saat entitas menghitung penghasilan kena pajak.

Negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina dan Thailand menggunakan pendekatan independen yang justru memiliki dampak terkecil dari pengadopsian IFRSs. Meskipun demikian otoritas perpajakan di negara-negara tersebut justru mengeluarkan kebijakan atau menyatakan *statement* untuk menghadapi atau mengakomodasi proses konvergensi IFRSs. BIR sebagai otoritas pajak di Filipina dengan bantuan USAID bahkan sudah jauh-jauh hari melakukan berbagai kegiatan termasuk pelatihan IFRSs dan dampak perpajakannya kepada para fiskus. Inland Revenue Board sebagai otoritas pajak di Malaysia telah mengisyaratkan untuk mengakomodasi sebagian hasil konvergensi IFRSs untuk hal-hal tertentu dalam ketentuan pajak. Diskusi dilaksanakan dengan badan penyusun standar lokal untuk menghasilkan transisi yang mulus menuju implementasi IFRSs di tahun 2012. Sedangkan Thailand sejauh ini mendapat kesimpulan bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam standar lokal berbasis IFRSs yang harus diikuti dalam ketentuan perpajakan meskipun tetap menyatakan dengan pendekatan independen yang mereka terapkan seharusnya dampak dari konversi standar akuntansi ke IFRSs terhadap pelaporan pajak sangat sedikit.

Sebagai negara yang menggunakan pendekatan kuasi-dependen merupakan hal yang wajar apabila Indonesia menggunakan pilihan tidak mengadopsi prinsip-prinsip IFRSs ke dalam penghitungan laba kena pajak karena solusi perbedaan bisa dilakukan penyesuaian dalam rekonsiliasi fiskal dan pengakuan pajak tangguhan. Tetapi yang menjadi pertimbangan adalah apakah apabila keputusan tersebut diambil akan berpengaruh pada pembangunan ekonomi Indonesia dari penerimaan pajak dan kegiatan investasi asing langsung sebagai sumber pemacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Manfaat adopsi IFRSs adalah menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan bagi entitas termasuk

Universitas Indonesia

perusahaan-perusahaan multinasional. Sehingga apabila DJP menyatakan bahwa perubahan yang dihasilkan dari konvergensi IFRSs ke SAK tidak akan mempengaruhi penghitungan laba kena pajak karena dapat dilakukan penyesuaian melalui mekanisme rekonsiliasi fiskal dan pengakuan pajak tangguhan, hal tersebut justru dapat menimbulkan inefisiensi bagi entitas termasuk perusahaan-perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Mereka harus menghadapi kerumitan dalam menyelenggarakan pembukuan dan melakukan rekonsiliasi fiskal karena munculnya perbedaan-perbedaan yang jauh lebih kompleks antara akuntansi dan pajak. Konsekuensi yang bisa ditimbulkan adalah tidak menariknya Indonesia bagi investasi langsung bagi perusahaan-perusahaan asing karena permasalahan inefisiensi dalam pelaporan pajak, selain faktor infrastruktur yang selama ini masih menjadi kendala utama bagi investasi asing langsung. Sedangkan situasi yang terjadi saat ini, pertumbuhan FDI di Indonesia kalah cepat dari pertumbuhan investasi portofolio yang merupakan instrumen yang paling diuntungkan dari penggunaan IFRSs sebagai standar akuntansi global.

Sebaliknya apabila Indonesia memilih mengadopsi sebagian ketentuan PSAK berbasis IFRSs ke dalam ketentuan perpajakan juga merupakan hal yang wajar bagi negara yang menggunakan pendekatan kuasi-dependen. Pilihan ini untuk menyederhanakan pelaporan keuangan fiskal oleh wajib pajak dengan mengubah regulasi perpajakan untuk hal yang dianggap sangat penting dan tetap menggunakan media rekonsiliasi fiskal dan pengakuan pajak tangguhan. Sejauh ini DJP belum menyatakan hal-hal yang dianggap penting dalam PSAK berbasis IFRSs yang harus diakomodasi dalam regulasi perpajakan baru yang kompatibel dengan standar akuntansi. Sikap *status quo* juga banyak dianut oleh otoritas perpajakan di dunia. Mereka masih mengidentifikasi dan mendiskusikan hal-hal penting dalam IFRSs yang dapat diadopsi ke dalam ketentuan perpajakan. Portugal, Spanyol, Inggris Raya atau Irlandia merupakan contoh sedikit negara yang telah mengeluarkan kebijakan pajak untuk menyebar dampak IFRSs terhadap penurunan laba kena pajak selama beberapa periode. Penurunan laba kena pajak yang dialami oleh keempat negara Eropa yang menggunakan

pendekatan kuasi-dependen mengindikasikan bahwa IFRSs banyak diadopsi dalam regulasi perpajakan yang baru.

Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian khusus adalah kesiapan internal DJP menghadapi implementasi IFRSs di Indonesia pada tahun 2012. Pertama, dengan adanya perbedaan antara standar pelaporan untuk tujuan pajak dengan standar laporan keuangan berdasarkan PSAK berbasis IFRSs, apakah DJP akan memerlukan *setting* administratif perpajakan yang berbeda atau cukup dengan *setting* yang ada seperti perangkat pelaporan dan sebagainya. Kedua, apakah implementasi PSAK berbasis IFRSs memerlukan perubahan organisasi administrasi DJP. Ketiga, pengaruh implementasi IFRSs terhadap kapasitas sumber daya manusia DJP dan kompetensi administratur perpajakan. Konvergensi IFRSs dapat menjadi ancaman bagi DJP apabila sumber daya manusia otoritas perpajakan di Indonesia, terutama tenaga fungsional pemeriksa pajak, tidak memahami PSAK berbasis IFRSs. Dikabulkannya permohonan keberatan dan banding wajib pajak atas surat ketetapan pajak dapat meningkat karena ketidaktahuan pemeriksa tentang PSAK berbasis IFRSs. Menjadi sebuah hambatan sekaligus tantangan bagi DJP untuk menyiapkan sumber daya manusia yang paham dan mengerti tentang PSAK berbasis IFRSs. Kebijakan perpajakan yang mungkin dikeluarkan untuk merespon konvergensi IFRSs akan menuntut kualitas pejabat dan pelaksana penyusun regulasi yang paham akan IFRSs.

DJP sebagai otoritas perpajakan di Indonesia yang hidup dalam lingkungan masyarakat global dan menjadi bagian dari negara yang menjadi anggota beberapa lembaga/organisasi/forum kerja sama internasional tidak akan lepas dari "desakan" pilihan yang harus diambil menghadapi konvergensi IFRSs. Kerjasama dengan OECD dan keanggotaan di SGATAR adalah sebuah opsi yang harus diambil dalam pergaulan pajak internasional. Teori pilihan rasional menjadi pilihan yang "rasional" bagi kebijakan DJP untuk menyikapi konvergensi IFRSs di Indonesia. Teori pilihan rasional bertolak dari asumsi dasar bahwa setiap masyarakat terdiri dari individu-individu yang bertindak untuk mencapai dan memaksimalkan kepentingan sendiri. Para pengusaha bertindak menumpuk laba, begitu pula para birokrat atau politikus yang bekerja memperbesar kekuasaan masing-masing. Menurut teori pilihan rasional, kebijakan publik adalah hasil

Universitas Indonesia

interaksi politik diantara para pelaku rasional yang masing-masing bekerja memaksimalkan keuntungan pribadi. Dengan demikian, politik adalah panggung tempat semua pihak saling bersaing mengeruk berbagai sumber yang ada. Teori ini menjelaskan bahwa negara tidak diisi oleh kaum birokrat, politikus atau teknokrat yang bebas dari motif dan kepentingan pribadi.

Masing-masing mempunyai kepentingan dan tujuan. DJP memiliki kepentingan untuk mengeruk penerimaan pajak yang sebesar-besarnya untuk kepentingan negara. Mengamankan sumber penerimaan negara terbesar atau penerimaan pajak yang melebihi rencana/target penerimaan akan menjadi sebuah prestasi bagi otoritas pajak tersebut. Sebaliknya para entitas, dalam hal ini adalah investor global, perusahaan asing atau perusahaan lokal, berkeinginan untuk mengeruk profit sebesar-besarnya dengan cara usaha yang efektif dan seefisien mungkin, termasuk dalam penyelenggaraan pembukuan dan penyajian pelaporan keuangan. Teknokrat ekonomi juga memiliki kepentingan untuk mencari jalan agar perekonomian Indonesia dapat terus berkembang dengan jalan diantaranya melalui peningkatan investasi asing langsung ke Indonesia. Interaksi kepentingan birokrat, teknokrat dan pengusaha ini akan menghasilkan sebuah kebijakan yang akan diputuskan di panggung politik yang sarat dengan berbagai latar belakang kepentingan dari para politikus.

Kepentingan kekuatan globalisasi dan kepentingan kedaulatan negara seharusnya bisa diakomodir dalam sebuah kebijakan. Kita tidak bisa menerima jika kebijakan terbentuk karena tekanan kelompok-kelompok ekonomi yang memiliki kekuatan politik untuk mempengaruhi lahirnya sebuah kebijakan sebagaimana teori koalisi politik dan kepentingan ekonomi. Kita juga harus bersikap realitis karena dalam lingkungan masyarakat ekonomi global sulit jika harus berharap bahwa produk kebijakan adalah pantulan dari kepentingan negara sebagai pelaku di arena publik yang memiliki sifat dan pilihan sendiri. Sehingga mengakomodasi kepentingan kekuatan masyarakat ekonomi global yang dapat tercermin dari kepentingan pengusaha dan politikus dan kepentingan kedaulatan negara yang tercermin dari kepentingan birokrat, teknokrat dan juga politikus adalah sebuah pilihan realistik sebagai dasar pedoman dikeluarkannya kebijakan DJP menyikapi konvergensi IFRSs di Indonesia.

Universitas Indonesia

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sistem perekonomian dunia saat ini didominasi oleh sistem kapitalisme global yang bercirikan pergerakan modal uang yang bebas dan memberi keuntungan lebih banyak. Hasil dari sistem kapitalisme global adalah berupa sistem perputaran uang raksasa yang menghisap modal dari lembaga-lembaga keuangan dan pasar di pusat sistem ekonomi global dan kemudian mengalir lintas batas baik di dalam pusat sistem ekonomi global maupun keluar pusat sistem ekonomi global dalam bentuk investasi portofolio. Investasi tersebut semakin berkembang pesat di dunia karena lebih memiliki karakteristik fleksibilitas untuk menggerakkan modal dan kesederhanaan dalam prosedur berinvestasi daripada investasi langsung atau fisik. Kebutuhan untuk mengalirkan ataupun mendapatkan modal lintas batas inilah yang kemudian mendorong kebutuhan akan bahasa akuntansi yang sama di dunia. Investor global akan mendapat kemudahan dalam membaca laporan keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan mereka terhadap kualitas laporan keuangan ketika mereka akan mengalirkan modal yang mereka miliki dalam bentuk investasi portofolio. Sedangkan entitas global bisa mendapatkan kemudahan ketika memutuskan di mana mereka akan meningkatkan jumlah modal atau mencatatkan sahamnya sekaligus mendapat kepercayaan yang lebih dari laporan keuangan yang mereka sajikan. Kebutuhan akan satu bahasa akuntansi di dunia karena perkembangan pesat investasi global akhirnya mendorong proses konvergensi IFRSs di dunia yang didukung oleh berbagai lembaga/organisasi/forum kerja sama ekonomi internasional.
- b. Bagi Indonesia, konvergensi IFRSs merupakan sebuah kenyataan global yang tidak bisa dihindarkan dan bukan sebuah opsi karena Indonesia adalah pelaku dan hidup dalam lingkungan masyarakat ekonomi global yang bercirikan

pergerakan bebas dari barang, jasa dan modal uang. Melawan arus global akan menjadi sebuah "ketertinggalan dan keterbelakangan" bagi Indonesia dalam persaingan ekonomi global. Meskipun IFRSs memiliki beberapa manfaat positif bagi investasi dan kualitas laporan keuangan tetapi konvergensi IFRSs di Indonesia lebih merupakan konsekuensi dari keanggotaan Indonesia dalam lembaga/organisasi/forum kerja sama ekonomi internasional yang mendukung program konvergensi IFRSs di seluruh dunia. Karena investasi global merupakan pendorong konvergensi IFRSs di dunia maka investor global menjadi pihak yang paling diuntungkan dari proses konvergensi IFRSs di Indonesia karena dengan sifat akuntabilitas dan transparansi dari laporan keuangan berbasis IFRSs hal tersebut dapat menurunkan tingkat risiko investasi mereka di Indonesia. Dengan catatan tingkat suku bunga di Indonesia masih kompetitif, maka kondisi tersebut dapat semakin mengalirkan arus modal asing ke Indonesia.

- c. Kebijakan perpajakan untuk merespon konvergensi IFRSs akan dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi internal yaitu kesiapan DJP menghadapi implementasi IFRSs di tahun 2012 dari sisi sumber daya manusia, administrasi dan regulasi. Kondisi eksternal yaitu berupa lingkungan masyarakat global dan motif dilakukannya konvergensi IFRSs di Indonesia. DJP sebagai birokrat otoritas perpajakan akan menghadapi pengaruh besar dari kelompok ekonomi dan kelompok politik untuk menentukan pilihan kebijakannya, untuk kepentingan negara demi perekonomian nasional, penerimaan pajak dan masuknya penanaman modal asing, untuk kepentingan entitas demi keefektifan dan keefisienan pembukuan dan pemenuhan kewajiban perpajakan atau menyeimbangkan sekaligus mengakomodasi kedua kepentingan.

6.2 Saran

Beberapa saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam perspektif intelijen strategik, pengadopsian IFRSs seharusnya tetap memperhatikan keadaan, kebutuhan dan kendala di dalam negeri. Penguatan ekonomi makro dan mikro, termasuk penguatan cadangan devisa negara

sebagai komponen *balance of payment* dan peningkatan daya saing untuk meningkatkan FDI ke Indonesia sebagai komponen *gross domestic product*, seharusnya tetap dilakukan untuk mengatasi kerapuhan atau kerentanan dari ketahanan ekonomi yang ditimbulkan dari kemungkinan semakin meningkatnya aliran masuk modal asing sebagai dampak dari konvergensi IFRSs.

- b. Konvergensi IFRSs jangan dilihat sebagai ancaman terhadap negara karena merupakan kenyataan dan konsekuensi global yang tidak bisa dihindarkan oleh Indonesia, melainkan dipandang dari sisi risiko yang dapat ditimbulkan konvergensi IFRSs terhadap ketahanan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu di era globalisasi dimana lingkungan keamanan internasional menjadi semakin kompleks dan tidak menentu, harus dilakukan mitigasi risiko dan menganalisis kerentanan Indonesia untuk mengelola atau mencegah risiko terburuk yang mungkin terjadi dari implementasi PSAK berbasis IFRSs.

Karena konvergensi IFRSs dimungkinkan mengancam kerentanan Indonesia terhadap *capital inflow* yang berisiko menimbulkan krisis finansial apabila terjadi *sudden reversal*, maka mitigasi risiko dapat dilakukan melalui *capital control*. Tujuan dari *capital control*, yang dilakukan saat arus modal asing terlalu banyak dan kemudian dihentikan saat stabilitas telah muncul, adalah untuk mencegah masuknya *hot money* dalam skala sangat besar yang dapat mempengaruhi apresiasi nilai tukar mata uang lokal dan mengancam stabilitas keuangan. *Capital control* dapat berupa alat penangkal seperti pajak atas sekuritas jangka pendek, mengubah instrumen portofolio dari jangka pendek menjadi jangka menengah atau panjang, atau larangan terhadap segala bentuk kegiatan spekulatif modal. Selain itu untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi, daya tarik FDI harus ditingkatkan dengan terus memperbaiki infrastruktur dan menciptakan iklim prosedur investasi yang baik.

- c. Beberapa langkah harus disiapkan oleh DJP sebagai otoritas perpajakan di Indonesia untuk menghadapi konvergensi IFRSs:
- Meningkatkan kualitas pemahaman sumber daya manusia di DJP tentang PSAK berbasis IFRSs melalui *in house training* dan diskusi rutin, terutama mereka yang bertugas sebagai fungsional pemeriksa pajak dan penyusun

Universitas Indonesia

regulasi/peraturan perpajakan. Ketidaktahuan pemeriksa pajak dapat menyebabkan kerugian negara karena diterimanya permohonan keberatan atau banding akibat kesalahan koreksi fiskal sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak. Sedangkan minimnya pengetahuan penyusun regulasi perpajakan dapat menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak akibat diadopsinya praktik akuntansi yang baru dan bertambahnya kerumitan praktik perpajakan di lapangan.

- Semakin intensif untuk melakukan diskusi dengan lembaga atau pihak yang terkait atau *concern* dengan konvergensi IFRSs seperti IAI, Bapepam-LK, kantor akuntan dan perguruan tinggi. Hal ini untuk menambah *second opinion* atau bahan analisa DJP terhadap PSAK berbasis IFRSs dengan melihat kebijakan perpajakan untuk merespon konvergensi IFRSs dari aspek legal, ekonomi, administratif dan sosio-politikal sebagai pertimbangan dasar perubahan regulasi di bidang perpajakan yang kompatibel dengan PSAK berbasis IFRSs. Sebagai lembaga yang bertugas mengamankan penerimaan negara dari pajak, DJP harus memprioritaskan analisis penambahan/pengurangan potensi penerimaan pajak apabila mengadopsi PSAK berbasis IFRSs. Langkah ini dapat dilakukan dengan membuat matrik analisis penambahan/pengurangan potensi pajak untuk setiap PSAK berbasis IFRSs.
- Menganalisis peningkatan arus lalu lintas modal dari atau ke Indonesia dalam kepentingan menjaga ketahanan ekonomi nasional sekaligus melaksanakan fungsi utama dari pajak yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan mengatur (*regulerend*) perekonomian. Hal ini untuk mengukur kebutuhan pajak sebagai *capital control* untuk merespon besarnya arus masuk modal asing pada tingkat tertentu dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk merespon arus modal keluar dari asing atau domestik. Kerjasama penyediaan data dengan BI atau BKPM menjadi sangat dibutuhkan untuk mengawasi pelarian modal atas nama investasi.

GLOSSARY

AAPA	: American Association of Public Accountants
ACCA	: Association of Chartered Certified Accountants
ACMF	: ASEAN Capital Market Forum
AIA	: American Institute of Accountants
AICPA	: American Institute of Certified Public Accountants
AISG	: Accounting International Study Group
APB	: Accounting Principles Board
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APBOs	: Accounting Principles Board Opinions
APEC	: Asia Pasific Economic Cooperation
ARBs	: Accounting Research Bulletins
ARC	: Accounting Regulatory Committee
ASB	: Accounting Standards Board
ASBE	: Accounting Standards for Business Enterprise
ASEAN	: Association of South East Asia Nations
ASSE	: Accounting System for Small Enterprise
Bapepam-LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
BEI	: Bursa Efek Indonesia
BEJ	: Bursa Efek Jakarta
BI	: Bank Indonesia
BIR	: Bureau of Internal Revenue
BIS	: Bank for International Settlement
BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CACM	: Central American Common Market
CAFTA	: China ASEAN Free Trade Area
CAP	: Committee on Accounting Procedure
CAR	: Current Asset Ratio
CARICOM	: Carribean Community and Common Market
CASs	: Chinese Accounting Standards
CASC	: China Accounting Standards Committee
CFA	: Committee on Fiscal Affairs
CSRC	: China Securities Regulatory Commission
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DSAK	: Dewan Standar Akuntansi Keuangan
EC	: European Commission
ED	: Exposure Draft
EFRAG	: European Financial Reporting Advisory Group
EIU	: Economic Intelligence Unit
ETAP	: Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
EU	: European Union
FASB	: Financial Accounting Standards Board
FDI	: Foreign Direct Investment
FIFO	: First In First Out
FRSs	: Financial Reporting Standards

FSAP	: Financial Sector Assessment Program
GAAPs	: Generally Accepted Accounting Principles
GATT	: General Agreement on Tariff and Trade
GDP	: Gross Domestic Product
GNP	: Gross National Product
GWM	: Giro Wajib Minimum
IAASB	: International Auditing and Assurance Standards Board
IAI	: Ikatan Akuntan Indonesia
IASs	: International Accounting Standards
IASB	: International Accounting Standards Board
IASC	: International Accounting Standards Committee
IASCF	: International Accounting Standards Committee Foundation
IBRD	: International Bank for Reconstruction and Development
ICAEW	: Institute of Chartered Accountants in England and Wales
ICAI	: Institute of Chartered Accountants of India
ICCAP	: International Coordination Committee of The Accountancy Profession
IFAC	: International Federation of Accountants
IFRIC	: International Financial Reporting Interpretation Committee
IFRSs	: International Financial Reporting Standards
IHSG	: Indeks Harga Saham Gabungan
IMF	: International Monetary Fund
IOSCO	: International Organization of Securities Commission
IPO	: Initial Public Offering
IRS	: Inland Revenue Service
ISA	: International Standards of Auditing
KPAI	: Komite Prinsip Akuntansi Indonesia
KUP	: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
LAFTA	: Latin American Free Trade Area
LIFO	: Last In First Out
MACPA	: Malayan Association of Certified Public Accountant
MASs	: Malaysia Accounting Standards
MASB	: Malaysian Accounting Standards Board
MEE	: Masyarakat Ekonomi Eropa
MIA	: Malaysia Institute of Accountant
MICPA	: Malaysia Institute of Certified Public Accountant
MNCs	: Multinational Corporations
NAC	: National Advisory Committee on Accounting Standards
NAFTA	: North America Free Trade Area
NGO	: Non Government Organization
NPAEs	: Non-Publicly Accountable Entities
OECD	: Organization for Economic Co-operation and Development
OPEC	: Organization of the Petroleum Exporting Countries
OTC	: Over The Counter
P3B	: Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
PAPE	: Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek
PASs	: Philippines Accounting Standards
PASC	: Philippines Accounting Standards Council



PDB	: Produk Domestik Bruto
PERSs	: Private Entity Reporting Standards
PFRSs	: Philippines Financial Reporting Standards
PICPA	: Philippines Institute of Certified Public Accountants
PKPM	: Persyaratan Kecukupan Permodalan Minimum
PPE	: Properties, Plants and Equipment
PPh	: Pajak Penghasilan
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
ROSC	: Report on the Observance of Standards and Codes
SAK	: Standar Akuntansi Keuangan
SARG	: Standards Advice Review Group
SBI	: Sertifikat Bank Indonesia
SEC	: Securities and Exchange Commission
SFASs	: Statements of Financial Accounting Standards
SGATAR	: Study Group on Asian Tax Administration and Research
SMEs	: Small and Medium-sized Entities
SPAP	: Standar Profesional Akuntan Publik
SPT	: Surat Pemberitahuan
SUN	: Surat Utang Negara
PAI	: Prinsip Akuntansi Indonesia
TEG	: Technical Expert Group
UN	: United Nations
UNCTAD	: United Nations Conference on Trade and Development
VASs	: Vietnamese Accounting Standards
WCA	: World Congress Accountants
WTO	: World Trade Organization

DAFTAR REFERENSI

A. Buku/Literatur

- Alexander, David. & Archer, Simon. (2001). *European accounting guide*. San Diego, CA: Harcourt Brace.
- Amal, Ichlasul. (1992). "Globalisasi, demokrasi dan wawasan nusantara: Perspektif pembangunan jangka panjang." *Wawasan nusantara Indonesia menghadapi globalisasi*. Jakarta: Pusat Kajian Kebudayaan Universitas Bung Hatta.
- Backman, Michael. (2008). *Asia future shock* (Meda Satrio, Penerjemah.). Jakarta: Ufuk Press.
- Basir, Saleh., & Fakhrudin, Hendy M. (2005). *Aksi korporasi: Strategi untuk meningkatkan nilai saham melalui tindakan korporasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Basri, Faisal. (2009). *Catatan satu dekade krisis: Transformasi, masalah struktural, dan harapan ekonomi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Baswir, Revrisond. (2006). *Mafia berkeley dan krisis ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Belkaoui, Ahmed Riahi. (2000). *Accounting theory-4th edition* (Marwata, Harjanti Widiastuti, Kurniawan & Alia Ariessanti, Penerjemah.). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Belkaoui, Ahmed Riahi. (2001). *Accounting theory-4th edition* (Marwata, Harjanti Widiastuti, Kurniawan & Alia Ariessanti, Penerjemah.). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Binsarjono, Tugiman, et al., ed. (2007). *Grey area perpajakan*. Jakarta: PT Gemilang Gagasindo Handal.
- Bloomer, Carrie. (1999). *The IASC-US comparison project: A report on the similarities and differences between IASC standards and US GAAP*. Norwalk: Financial Accounting Standards Board.
- Bridgman, Peter., & Davis, Glyn. (2004). *The Australian policy handbook*. Crows Nest: Allen and Unwin.
- Cahyono, Imam, et al., ed. (2008). *Menjinakkan metakuasa global: Suara Indonesia untuk globalisasi yang lebih adil*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Capra, Fritjof. (2002). *Hidden connections*. New York: Anchor Books.

Universitas Indonesia

- Choi, Frederick D.S., & Meek, Gary K. (2005). *International accounting-5th edition* (Edward Tanujaya, Penerjemah.). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Choi, Frederick D.S., & Meek, Gary K. (2010). *International accounting-6th edition* (M. Yusuf Hamdan, Penerjemah.). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Chomsky, Noam. (2008). *Neo imperialisme Amerika Serikat* (Eko Prasetyo Darmawan, Penerjemah.). Yogyakarta: Resist Book.
- Deegan, Craig., & Unerman, Jeffrey. (2006). *Financial accounting theory*. Sidney: McGraw-Hill.
- Deliarnov. (2009). *Perkembangan pemikiran ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. (2010). *Economics Business & Accounting Review* (Volume III Nomor 1). Jakarta: Hans Kartikahadi, Jan Hoesadam Ersa Tri Wahyuni, Sahat Pardede, Aria Farahmita, Sylvia Veronica, Yulianti, Dwi Martani, Suhartono & Wishnu K. Armand.
- Donaldson, Lex. (1995). *American anti-management theories of organization: A critique of paradigm proliferation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dornbusch, Rudiger. (1997). *Macroeconomics*. New York: McGraw-Hill.
- Dumenil, Gerad., & Levy, Dominique. (2002). *Crises et renouveau de capitalisme le 20e siecle en perspective*. Quebec: Laval University Press.
- Dye, Thomas R. (2006). *Understanding public policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Edward III, George., & Sharkansky, Ira. (1984). *The policy predicament: Making and implementing public policy*. San Fransisco: W.H. Freeman and Company.
- Featherstone, Mike, et al., ed. (1994). *Global culture: Nationalism, globalization, modernity*. London: Sage.
- Friedman, Thomas L. (2006). *The world is flat* (P. Buntaran, Benyamin Molan, Jeremias Jena dkk, Penerjemah.). Jakarta: Dian Rakyat.
- Giddens, Anthony. (2001). *Runway world* (Adi Loka Sujono, Penerjemah.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gilpin, Robert. (2001). *Global political economy: Understanding the international economic order*. Priceton: Priceton University Press.
- Gilpin, Robert., & Gilpin, Millis Jean. (2002). *Tantangan kapitalisme global* (Haris Munandar & Dudy Priatna, Penerjemah.). Jakarta: Murai Kencana.

- Greenstein, Shane., & Khanna, Tarun. (1997). What does industry convergence mean? Dalam David Yoffie (Ed.). *Competing in an age of digital convergence* (p.201-226). Cambridge: Harvard University Press.
- Gunadi. (2006). *Akuntansi pajak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hardt, Michael., & Negri, Antonio. (2001). *Empire*. Cambridge: Harvard University Press.
- Hatmodjo, Jono. (2003). *Intelijen sebagai ilmu*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Heertz, Noreena. (2003). *Hidup dalam dunia material: Munculnya gelombang neoliberalisme* (Wibowo dan Francis Wahono, Penerjemah.). Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.
- Hirst, Paul., & Thompson, Grahame. (1996). *Globalization in question: The international economy and the possibilities of governance*. London: Polity Press.
- Hirst, Paul., & Thompson, Grahame. (2004). *Globalization in question: The international economy and the possibilities of governance*. London: Polity Press.
- Hofstede, Geert. (1980). *Cultures' consequences: International differences in work-related values*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Hutagaol, John, et al., ed. (2003). *Kapita selekta akuntansi: pajak*. Jakarta: Penerbit Kharisma.
- Hutagaol, John. (2007). *Perpajakan: Isu-isu kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Khor, Martin. (2002). *Globalisasi: Perangkap negara-negara selatan*. Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.
- Kindleberger, Charles P. (1973). *The world in depression*. London: Penguin.
- Korten, David C. (1997). *When corporations rule the world* (Aris Munandar, Penerjemah.). Yogyakarta: Professional Books.
- Korten, David C. (2002). *The post-corporate world* (A. Rahman Zainuddin, Penerjemah.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kwik Kian Gie. (2006). *Pikiran yang terkorupsi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Kwik Kian Gie. (2006). *Kebijakan ekonomi politik dan hilangnya nalar*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

- Lairson, Thomas D., & Skidmore, David. (1997). *International political economy: The struggle for power and wealth*. Forth Worth: Harcourt Brace College Publishers.
- Lodge, George C. (1991). Our paralyzing individualism. Dalam Clyde V. Prestowitz Jr. (ed.). *Powernomics: Economics and strategy after the cold war, 192-195*. Washington, D.C.: Madison Books.
- Lumbantorani, Sopha. (2005). *Akuntansi pajak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mueller, Gerhard. (1967). *International accounting*. New York: MacMillan.
- Nobes, Christopher W. & Parker, Robert H. (2002). *An international view of true and fair accounting*. London: Routledge.
- Nobes, Christopher W. (2001). *Comparative international accounting*. New Jersey: Prentice Hall.
- Ohmae, Kenichi. (1995). *The end of nation state: The rise of regional economies*. London: Free Press.
- Perkins, John. (2007). *The secret history of the american empire*. (Wawan Eko Yulianto & Meda Satrio, Penerjemah.). Jakarta: Ufuk Press.
- Petras, James. & Veltmeyer, Henry. (2005). *Empire with imperialism*. London: Zed Books.
- Prasetyantoko, A. (2008). *Bencana finansial: Stabilitas sebagai barang publik*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Pricewaterhouse International. (1975). *International survey of accounting principles and reporting practices*.
- Purba, Marisi P. (2010). *International financial reporting standards: Konvergensi dan kendala aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Quiggin, Thomas. (2007). *Seeing the invisible: National security intelligence in an uncertain age*. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
- Richelson, Jeffrey T. (1995). *A century of spies: Intelligence in the twentieth century*. Oxford: Oxford University Press, Inc.
- Roberts, Clare., Weetman, Pauline., & Gordon, Paul. (2002). *International financial accounting: A comparative approach*. Essex, UK: Financial Times.

- Robinson, William. (1996). *Promoting polyarchy: Globalization, US intervention, and hegemony*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rodrik, Dani. (2007). *One economics many recipes: Globalization, institutions and economic growth*. New Jersey: Princeton University Press.
- Ross, Robert., & Trachte, Kent. (1990). *Global capitalism: The new leviathan*. Albany, New York: State University of New York Press.
- Salvatore, Dominic. (1993). The international trade system, trade blocks and US trade policy. Dalam Ingrid A. Rima (Ed.). *The political economy of global restructuring* (v. 2). London: Edward Elgar Publishing Limited.
- Santoso, Purwo, et al., ed. (2004). *Menembus ortodoksi kajian kebijakan publik*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Saronto, Y. Wahyu. (2008). *Intelijen: Teori, aplikasi dan modernisasi*. Jakarta: PT Multindo Mega Pratama.
- Scott, L.V., & Jackson, Peter, et al., ed. (2004). *Understanding intelligence in the twenty-first century*. New York: Routledge.
- Scott, William. (2000). *Financial accounting theory*. Ontario: University of Waterloo.
- Setiawan, Agus. (2006). *Rekonsiliasi & akuntansi PPh Badan*. Jakarta: T&A Software.
- Shulsky, Abram N., & Schmitt, Gary J. (2002). *Silent warfare: understanding the world of intelligence*. Virginia: Brassey's Inc.
- Soros, George. (2007). *Open society: Reforming global capitalism* (Pusat Penerjemahan Nasional UNAS, Penerjemah.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Spero, Joan Edelman. (1981). *The politics of international relations*, 2nd edition. New York: St. Martin Press.
- Steiner, George A., & Steiner, John F. (1994). *Business, government, and society: A managerial perspective*. New York: McGraw-Hill.
- Strange, Susan. (2000). The declining authority of states. Dalam David Held & Anthony McGrew (Ed.). *The global transformation*. Cambridge: Polity Press.
- Subarsono, A.G. (2008). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sudjijono, Budi. (2008). *Resesi dunia & ekonomi Indonesia*. Jakarta: Golden Terayon Press.
- Sugiono, Muhadi. (1999). *Kritik Antonio Gramsci terhadap pembangunan negara dunia ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syeirazi, M. Kholid. (2009). *Di bawah bendera asing: Liberalisasi industri migas di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Tarigan, Antonius. (2006). *Kajian dampak kebijakan publik dalam program penanggulangan kemiskinan*. Jakarta: URDI.
- Wahrish, Mark. (2001). *The evolution of international accounting systems*. Frankfurt: Peter Lang.
- Walton, P. (2003). European harmonization. Dalam Frederick D. S. Choi (Ed.). *International finance and accounting handbook* (p. 17). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Winarno, Budi. (2009). *Pertarungan negara vs pasar*. Jakarta: PT. Buku Kita.
- Wolk, Harry., Dodd, James., & Rozycki, John. (2007). *Accounting theory: Conceptual issues in a political and economic environment*. London: Sage Publications.
- Wulan, Alexandra Retno. (2006). Intelijen: Masa perang dan masa damai. Dalam Andi Widjanto (Ed.). *Negara, intel dan ketakutan* (p. 11-35). Jakarta: Pacivis UI.
- Yustika, Ahmad Erani. (2009). *Ekonomi politik: Kajian teoritis dan analisis empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zebua, F. (2008). *Akuntansi internasional*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

B. Publikasi Elektronik

- Abeysekera, Indra. (2005). *International harmonization of accounting imperialism: An Australian perspective*. Macquarie University, Department of Accounting and Finance. <http://www.accg.mq.edu.au/>
- Cristea, Stafana., & Lutitsky, Ivana. (2005). *A parallel in the evolution of the Croatian and Romanian accounting harmonization processes*. [http://crosbi.znanstvenici.hr/datoteka/282412.ivana i stefana final.doc](http://crosbi.znanstvenici.hr/datoteka/282412.ivana%20i%20stefana%20final.doc)
- Gaffikin, M. (2005). *Regulation as accounting theory*. September, 2005. University of Wollongong, Faculty of Commerce-Accounting & Finance Working Papers. <http://ro.uow.edu.au/accfinwp/50>

Universitas Indonesia

- Daske, Holger., Hail, Luzi., Leuz, Christian., & Verdi, Rodrigo. (2007). *Heterogeneity in the economic consequences of IFRS adoptions*. The University of Chicago Graduate School of Business, The Initiative on Global Markets-Working Paper No. 5. <http://faculty.chicagobooth.edu/>
- Karapinar, Aydin., Zaif Ayikoglu, Figen., & Bayirli, Ridvan. (2007). *Convergence and harmonization with international financial reporting standards: A perspective of Turkey*. Gazi University. <http://mufad.org/index2.php>
- Konigsgruber, Roland. (2007). *A political economy of accounting standard setting*. Juli, 2007. University of Graz, Center for Accounting Research. <http://www-classic.uni-graz.at/acce1www/>
- McMichael, Phillip. (1996). *Globalization: Myths and realities*. Journal of Rural Sociology Society. <http://onlinelibrary.wiley.com/athens>
- Modenesi, Andre de Melo. (2006). *Capital controls: A leftist proposal? Recent experience and the contribution of Keynes and others*. <http://www.ie.ufrj.br/moeda/pdfs/capitalcontrols.pdf>
- Organisation for Economic Co-operation and Development, *Measuring Globalisation*. OECD handbook on economic globalisation indicators. OECD 2005. <http://www.oecd.org/>
- Rosser, Andrew. (1999). *The political economy of accounting reform in developing countries: The case of Indonesia*. Murdoch University, Asia Research Centre-Working Paper No. 93. <http://wwwarc.murdoch.edu.au/wp/>
- Sawani, Assma. (2005). *The changing accounting environment: International accounting standards and US implementation*. Westminster College, Journal of Finance and Accountancy. <http://www.aabri.com/jfa.html>
- Sklair, Lesley. (1995). *Competing conception of globalization*. Journal of World System Research, Vol V, No. 2. <http://csf.colorado.edu/jwsr/>
- Stenka, Renata., & Ormrod, Phil. (2007). *The impact of IFRS adoption in the UK - Issues in group accounting*. Keele University and University of Liverpool, Working Paper for 30th EAA Congress in Lisbon. http://www.eurojournals.com/irjfe_38_12.pdf
- United Nations Conference on Trade and Development. UNCTAD handbook of statistics. UNCTAD 2008. <http://www.unctad.org/>
- United Nations Conference on Trade and Development. UNCTAD World Investment Report. UNCTAD 2007. <http://www.unctad.org/>

Woolley, R. (1998). *International accounting standards and economic growth, an empirical investigation of their relationship in Asia*. School of Accounting and Law, RMIT, Australia-Working Paper Series. <http://mams.rmit.edu.au/>

C. Jurnal/Serial

Abd-Elsalam, Omneya H., & Weetman, Pauline. (2003). Introducing international accounting standards to an emerging capital market: Relative familiarity and language effect in Egypt. *Journal of International Accounting, Auditing, and Taxation*, 12, 63-84.

Aisbitt, Sally. & Nobes, Christopher W. (2001). The true and fair view requirement in recent national implementations. *Accounting and Business Research*, 31 (2), 83-90.

Akisik, Orhan., & Pfeiffer, Ray. (2009). Globalization, US foreign investments, and accounting standards. *The Review of Accounting and Finance*, 8, 5-37.

Alexander, D. & Schwencke, H. R. (2003). Accounting changes in Norway. *The European Accounting Review*, 12 (3), 549-566.

Ampofo, Akwasi A., & Sellani, Robert J. (2005). Examining the difference between United States Generally Accepted Accounting Principles (U.S. GAAP) and International Accounting Standards (IAS): Implications for the harmonization of accounting standards. *Accounting Forum* 29, 2 (June), 219.

Bailey, D., Alver, J., Mackevicius, J., & Paupa, V. (1995). Accounting law reform in the Baltic states: The initial steps. *The European Accounting Review*, 4 (4), 685-711.

Boyer, Robert. (2005). Coherence, diversity, and the evolution of capitalisms-The institutional complementarity hypothesis. *Evolutionary and Institutional Economic Review*, 2 (1), 43-80.

Byman, Daniel. (2005). Strategic surprise and the September 11 attacks. *Annual Review of Political Science*, 8, 145-170.

Canibano, Leandro. & Mora, Araceli. (2000). Evaluating the statistical significance of de facto accounting harmonization: A study of European global players. *European Accounting Review, Taylor and Francis Journals*, 9 (3), 349-369.

Chen, C. J. P. (1999). A comparison of reported earnings under Chinese GAAP vs IAS: Evidence from the Shanghai stock exchange. *Accounting Horizons*, 13 (2), 91-110.

- Collett, Peter., Godfrey Jayne., & Hrasky, Sue. (2001). International harmonization: Cautions from the Australian experience. *Accounting Horizons*, 15 (2), 171-182.
- Daniel, Peter. (2001). The development of accounting in Slovakia. *The European Accounting Review*, 10 (2), 343-359.
- De Bruin, Eugene. (2000). Financial reporting-Hungarian GAAP v IASs-Closing the gap. *Accountancy*, Juni, 108.
- Di Maggio, Paul., & Powell, Walter. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48, 147-160.
- Ding, Yuan (2005). Why do national GAAP differ from IAS? The role of culture. *The International Journal of Accounting*, 40, 325-350.
- Don, Herman., & Thomas, W. (1995). Harmonization of accounting measurement practice in the European committee. *Accounting and Business Research*, 25, 100-254.
- Dutia, Traian. (1995). The restructuring of the system of accounting in Romania during period of transition to the market economy. *The European Accounting Review*, 4 (4), 739-748.
- Evans, Carolyn L. (2001). Home bias in trade: Location or foreign-ness? *Federal Reserve Bank of New York, Staff Reports*, Mei, Nomer 128.
- Evans, L. (2003). The true and fair view and the fair presentation override of IAS 1. *Accounting and Business Research*, 33 (4), 311-325.
- Farooque, Omar Al., Yarram, Subba Reddy., & Khandaker, S. (2009). International evidence on governance and foreign direct investment interactions. *Singapore Economic Review Conference*, Agustus.
- Graham, Cameron., & Neu, Dean. (2003). Accounting for globalization. *Accounting Forum*, 27 (4), 449-471.
- Gray, Sidney J. (1988). Towards a theory of cultural influence on the development of accounting systems internationally. *ABCUS*, May, 1-15.
- Haller, Axel. (2002). Financial accounting developments in the European Union: Past events and future prospects. *The European Accounting Review*, 11, 153-190.
- Hoarau, Christian. (1995). International accounting harmonization American hegemony or mutual recognition with benchmarks? *The European Accounting Review*, 4, 217-233.

- Homollee, S. (2003). From the theory of financial intermediation to segment reporting: The case of German banks. *Accounting Forum*, 27 (1), 60-83.
- Johnson, Loch K. (2003). Preface to a theory of strategic intelligence. *International Journal of Intelligence and Counterintelligence*, 16, 638-663.
- Jones, Stewart. & Wolnizer, Peter. (2003). Harmonization and the conceptual framework: An international perspective. *Abacus*, 39 (3), 375-387.
- Kaminsky., Lizondo, Graciela., & Reinhart, Carmen M. (1998). The twin crisis: The causes of banking and balance of payments problems. *The American Economic Review*, 89 (3), 473-500.
- King, N., Beattie, A., & Cristescu, A. M. (2001). Developing accounting and audit in transition economy: The Romanian experience. *The European Accounting Review*, 10 (1), 149-171.
- Konvergensi diputuskan tahun 2008. (2005, Juni). *Majalah Akuntansi*, p. 14-15.
- Kosmala-MacLulich, Katarzyna. (2003). The true and fair view construct in the context of the Polish transition economy: Some local insights. *The European Accounting Review*, 12 (3), 465-487.
- Kwok, Winston Chee Chiu, & Sharp, David. (2005). Power and international accounting standard setting: Evidence from segment reporting and intangible asset projects. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*, 18 (1), 74-99.
- Larson, Robert K. (1993). International accounting standards and economic growth: An empirical investigation of their relationship in Africa. *Research in Third World Accounting*, 2, 27-43.
- Larson, Robert K., & Kenny, S. Y. (1995). An empirical analysis of international accounting standards, equity markets and economic growth in developing countries. *The Journal of International Financial Management and Accounting*, 6 (2), 130-157.
- Larson, Robert K., & Kenny, Sara. (1998). Developing countries involvement in the IASC's standard-setting process. *Advances in Intenational Accounting*, Supplement 1, 17-41.
- Larson, Robert K. & Street, D. (2004). Convergence with IFRS in an expanding Europe: Progress and obstacles identified by large accounting firms' survey. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 13(2), 89-119.
- Lazonick, William, & O' Sullivan, Mary. (2000). Maximizing shareholder value: a new ideology for corporate governance. *Economic and Society*, 29 (1), 13-35.

- Leuz, Christian. (2003). IAS versus US GAAP: Information asymmetry-based evidence from Germany's new market. *Journal of Accounting Research*, 41 (3), 445.
- Mir, M. Z., & Rahaman, A.S. (2005). The adoption of international accounting standards in Bangladesh: An exploration of rationale and process. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 18 (6), 816-841.
- Nair, Raghavan D., & Frank, Werner G. (1975). The impact of disclosure and measurement practices on international accounting classifications. *The Accounting Review*, 55 (3), 426-450.
- Nobes, Christopher W. (1983). A judgemental international classification of financial reporting practices. *Journal of Business, Finance, and Accounting*, Spring, 1-19.
- Pacter, Paul. (2002). Financial reporting: IAS/US comparison-Global GAAPs. *Accountancy*, 130 (1311), 1.
- Pacter, Paul. (2005). What exactly is convergence? *International Journal Accounting, Auditing, and Performance Evaluation*, 2, 67-83.
- Paglietti, Paola. (2009). Investigating the effects of the EU mandatory adoption of IFRS on accounting quality: Evidence from Italy. *International Journal of Business and Management*, 4 (12), 3-18.
- Points, R. & Cunningham, R. (1998). The application of international accounting standards in transitional societies and developing countries. *Advances in International Accounting*, Supplement 1, 3-16.
- Sadjiarto, Arja. (1999). Akuntansi internasional: Harmonisasi versus standarisasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11, 144-161.
- Santoso, Amir. (1992). Analisa kebijakan publik: Suatu pengantar. *Jurnal Ilmu Politik*, 3, 4.
- Simmons, Beth. (2001). The international politics of harmonization: The case of capital market regulations. *International Organization*, 55 (3), 589-620.
- Solomons, David. (1978). The politicization of accounting. *Journal of Accountancy*, 146, 65-73.
- Solomons, David. (1983). The political implications of accounting and accounting standard setting. *Accounting and Business Research*, 13 (50), 107-118.
- Street, Dorna L., & Gray, Sidney J. (1999). How wide is the gap between IASC and US GAAP? Impact of the IASC comparability project and recent

international developments. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 8 (11), 33-64.

Street, Donna L. (2002). Large firms envision worldwide convergence of standards. *Accounting Horizons*, 16 (3), 215-218.

Tang, Yunwei. (2000). Bumpy road leading to internalization: A review of accounting development China. *Accounting Horizons*, 14 (1), 93-102.

Tarca, Ann. (2004). International convergence of accounting practices: Choosing between IAS and US GAAP. *Journal of International Financial Management & Accounting*, 15, 60-91.

Thorell, P., & Whittington, G. (1994). The harmonization of accounting within the EU – Problems, perspectives and strategies. *European Accounting Review*, 3 (2), 215-239.

Tinker, Anthony M. (1984). Theories of the state and the state of accounting: Economic reductionism and political voluntarism in accounting regulation theory. *Journal of Accounting and Public Policy*, 3, 55-74.

Wilson, John. (1969). The need for standardization of international accounting. *Touche Ross Tempo*, 16-31.

Zeff, Stephen A. (1998). International accounting-Similarities and differences- IAS, US GAAP and UK GAAP. *The International Journal of Accounting*, 33 (3), 401-402.

Zeff, Stephen A. (2002). Political lobbying on proposed standards: A challenge to the IASB. *Accounting Horizons*, 16 (1), 43-55.

D. Personal Web/Blog

Albrecht, David. (2010). *Economic consequences and the political nature of accounting standard setting*. Januari, 2010.
<http://profalbrecht.wordpress.com/2010/01/06/economic-consequences-and-the-political-nature-of-accounting-standard-setting/>

Daeli, Florus. (2009). *Mengenal dan menyikapi proses dan hasil harmonisasi standar akuntansi keuangan (SAK) vs IFRS*. Mei, 2009.
<http://konsultanakuntansikeuangan.wordpress.com/>

Darussalam., & Septriadi, Danny. (2009). *Rugi derivatif untuk tujuan spekulatif: Deductible or not?* Mei, 2009.
<http://www.dannydarussalam.com/dd15/publication/hot-issue/>

Muliawarman, Aji Dedi. (2009). *IFRS: Sekularisasi dan neoliberalisme akuntansi*. Nopember, 2009. <http://ajidedim.wordpress.com/2009/11/08/ifrs-sekularisasi-dan-neoliberalisme-akuntansi-bagian-1/>

Sunaryo, Tarko. (2008). *Revaluasi aset tetap: Suatu tinjauan dari aspek akuntansi dan aspek peraturan perpajakan*. Agustus, 2009. http://stan93.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=59

E. Situs Organisasi/Lembaga/Perusahaan

Badan Kebijakan Fiskal: <http://www.fiskal.depkeu.go.id/>

Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan: <http://www.bapepam.go.id>

Bank Indonesia: <http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/>

Deloitte: <http://www.deloitte.com>

Direktorat Jenderal Pajak: <http://www.pajak.go.id/>

Ernst & Young: <http://www.ey.com>

Global Accounting News: <http://www.iasplus.com/>

Ikatan Akuntan Indonesia: <http://iaiglobal.or.id/>

KPMG: <http://www.kpmg.com>

PricewaterhouseCoopers: <http://www.pwc.com>

Tempo Interaktif: <http://www.tempointeraktif.com>

The American Accounting Association: <http://aaahq.org/>

The International Accounting Standards Committee Foundation dan the International Accounting Standards Board: <http://www.ifrs.org/>

The International Federation of Accountants: <http://www.ifac.org/>

The International Monetary Fund: <http://www.imf.org/>

The International Organization of Securities Commission: <http://www.iosco.org/>

The United Nations of Conference on Trade and Development: <http://www.unctad.org/>

Universitas Indonesia

The World Bank Group: <http://www.worldbank.org/>

The Organisation for Economic Co-operation and Development:
<http://www.oecd.org/>

F. Lainnya

Deloitte Indonesia, Tim. (2010, Mei). *PSAK 50/55 (R2006) Accounting for financial instruments: Tax impact, it's not just about accounting*. Disampaikan dalam Seminar IFRS-Universitas Indonesia, di Jakarta.

Evans, Kimberly. (2002, Desember). *Foreign portfolio and direct investment: Complementarity, differences, and integration*. Paper dipresentasikan di OECD Global Forum on International Investment, Shanghai, Cina.

KPMG Indonesia, Tim. (2010, Mei). *Pengaruh PSAK 13, PSAK 16, PSAK 30, ISAK 8, ED PSAK 10 terhadap mekanisme perhitungan pajak*. Disampaikan dalam Seminar IFRS-Universitas Indonesia, di Jakarta.

Kompas, 22 Oktober 2010.

Kurniawan, Dudi M. (2010, Mei). *Adopsi IFRS di Indonesia: Perkembangan terkini*. Disampaikan dalam Seminar Ikanas untuk Indonesia, di Jakarta.

Lim, Michael. (2007, April). *Economic aspects of foreign direct investment*. Paper dipresentasikan kepada Virtual Institute-St Petersburg State University Study Tour, di Geneva, Swiss.

Martani, Dwi. (2010, Mei). *Akuntansi dan pajak: PSAK 13, 16, 10, 30 – Pandangan akademisi*. Disampaikan dalam Seminar IFRS-Universitas Indonesia, di Jakarta.

Media Indonesia, 21 Oktober 2010.

Parry, Richard. (2007, Oktober). *Recent developments in international tax work at the OECD*. Paper dipresentasikan di Center of Tax Policy and Administration-the Asian Development Bank, di Tokyo, Jepang.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

- Sinaga, Rosita Uli. (2010, Mei). *The road ahead: Understanding major changes of certain revised PSAKs*. Disampaikan dalam Seminar IFRS-Universitas Indonesia, di Jakarta.
- Tumakaka, Wahyu Karya. (2010, Mei). *Aspek perpajakan implementasi IFRS di Indonesia*. Disampaikan dalam Seminar Ikanas untuk Indonesia, di Jakarta.
- Widjajanto, Andi., & Wibisono, Ali. (2008). *Bahan mata kuliah: Intelligence strategic thinking*. Pascasarjana Kajian Stratejik Intelijen, Universitas Indonesia.
- Wulandari, Etty Retno. (2010, Mei). *IFRS-Kesiapan penerapan di pasar modal Indonesia*. Disampaikan dalam Seminar Ikanas untuk Indonesia, di Jakarta.
- Yunirwansyah. (2010, Mei). *Dampak penerapan PSAK terbaru terhadap perpajakan*. Disampaikan dalam Seminar IFRS-Universitas Indonesia, di Jakarta.



**Susunan IASCF Trustee
per 31 Desember 2009**

Nama	Negara Asal	Jabatan	Riwayat Pekerjaan
Gerrit Zalm	Belanda	Chairman	Mantan Deputy Perdana Menteri dan Menteri Keuangan
Philip A. Laskawy	Amerika Serikat	Vice-Chairman	Chairman Fannie Mae dan mantan Chairman Ernst & Young Int'l
Jeff van Rooyen	Afrika Selatan	Wakil Afrika	CEO Uranus Investment Holdings, mantan Vice-Chairman IOSCO dan mantan CEO South African Financial Services Board
Marvin Cheung	Hongkong SAR	Wakil Asia	Mantan Chairman KPMG Hongkong SAR
Tsuguoki Fujinuma	Jepang	Wakil Asia	Mantan Chairman dan Presiden Japanese Institute of CPA, mantan Presiden IFAC
Zhongli Liu	Cina	Wakil Asia	Presiden Chinese Institute of CPA dan mantan Menteri Keuangan
Noriaki Shimazaki	Jepang	Wakil Asia	Special Adviser, mantan CFO dan anggota Dewan Direksi Sumitomo Corporation

TV Mohandas Pai	India	Wakil Asia	Anggota Dewan Direksi Infosys Technologies Ltd dan Chairman Infosys BPO Ltd
Jeffrey Lucy AM	Australia	Wakil Oceania	Chairman the Australian Financial Reporting Council dan mantan Chairman the Australian Securities and Investments Commiission
Clemens Borsig	Jerman	Wakil Eropa	Chairman the Supervisory Board, Deutsche Bank
Bertrand Collomb	Perancis	Wakil Eropa	Chairman Kehormatan Lafarge
Oscar Fanjul	Spanyol	Wakil Eropa	Vice-Chairman Omega Capital, mantan Chairman, pendiri dan CEO Repsol
Alicja Kornasiewicz	Polandia	Wakil Eropa	Anggota Dewan Direksi CA IB Corporate Finance dan CEO, Chairman CA IB Group
Sir Bryan Nicholson GBE	Inggris Raya	Wakil Eropa	Mantan Chairman Financial Reporting Council
Luigi Spaventa	Italia	Wakil Eropa	Mantan Chairman Consob dan Menteri Anggaran
Antonio Vegezze	Swiss	Wakil Eropa	Presiden Capital Italia Fund, mantan Presiden

			dan Direktur Capital International
Samuel A. DiPiazza, Jr	Amerika Serikat	Wakil Amerika Utara	Mantan CEO PricewaterhouseCoopers International
Scott Evans	Amerika Serikat	Wakil Amerika Utara	Vice President Manajemen Aset TIAA-CREF dan CEO TIAA-CREF Investment Management
Robert Glauber	Amerika Serikat	Wakil Amerika Utara	Mantan Chairman dan CEO NASD Regulation dan mantan Under Secretary of the Treasury for Finance
David Sidwell	Amerika Serikat	Wakil Amerika Utara	Direktur UBS dan Fannie Mae, mantan CFO Morgan Stanley
Paul Tellier	Kanada	Wakil Amerika Utara	Mantan Presiden dan CEO Bombardier dan CN, Direktur Rio Tinto, Direktur McCain Foods, dan Chairman Global Container Terminals
Pedro Malan	Brasil	Wakil Amerika Selatan	Mantan Chairman Unibanco, mantan Menteri Keuangan dan Presiden Bank Sentral Brasil

Sumber: IASCF Annual Report 2009

**Susunan Anggota IASB
per 31 Desember 2009**

Nama	Negara Asal	Jabatan	Riwayat Pekerjaan
Sir David Tweedie	Inggris Raya	Chairman	KPMG, ASB
Stephen Cooper	Inggris Raya	Anggota	UBS Investment Rsrch.
Philippe Danjou	Perancis	Anggota	Arthur Andersen, AMF
Jan Engstrom	Swedia	Anggota	Volvo Group
Patrick Finnegan	Amerika Serikat	Anggota	CFA Institute
Robert P Garnett	Afrika Selatan	Anggota	Anglo American Corp, Peat Marwick, Arthur Andersen
Gilbert Gelard	Perancis	Anggota	KPMG, Arthur Andersen
Amaro Luiz de Oliveira Gomes	Brasil	Anggota	Central Bank of Brazil
Prabhakar Kalavacherla	India	Anggota	KPMG
James J Leisenring	Amerika Serikat	Anggota	FASB
Patricia McConnell	Amerika Serikat	Anggota	Bear Stearns
Warren J McGregor	Australia	Anggota	Australian Accounting Research Foundation
John T Smith	Amerika	Anggota	Deloitte, FASB
Tatsumi Yamada	Jepang	Anggota	PricewaterhouseCoopers
Wei GuoZhang	Cina	Anggota	Cina Accounting Standards Committee

Sumber: IASCF Annual Report 2009

**Susunan Anggota Interpretation Committee
per 31 Desember 2009**

Nama	Negara Asal	Jabatan	Riwayat Pekerjaan
Robert P Garnett	Afrika Selatan	Chairman (non-voting)	Anglo American Corp, Peat Marwick, Arthur Andersen
Luca Cencioni	Italia	Anggota	Eni S.p.A
Guido Fladt	Jerman	Anggota	PricewaterhouseCoopers
Bernd Hacker	Jerman	Anggota	Siemens
Sara York Kenny	Amerika Serikat	Anggota	International Finance Corporation
Jean-Louis Lebrun	Perancis	Anggota	Mazars & Guerard
Takatsugu Ochi	Jepang	Anggota	Sumitomo Corporation
Jean Pare	Kanada	Anggota	Bombardier
Joanna Perry	Selandia Baru	Anggota	Financial Reporting Standards Board
Ruth Picker	Australia	Anggota	Ernst & Young
Laurence Rivat	Perancis	Anggota	Deloitte & Associates
Darrel Scott	Afrika Selatan	Anggota	FirstRand Banking Group
Margaret M Smyth	Amerika Serikat	Anggota	United Technologies Corp
Scott Taub	Amerika Serikat	Anggota	Financial Reporting Advisors LLC, SEC
Andrew Vials	Inggris Raya	Anggota	KPMG

Sumber: IASCF Annual Report 2009

**Susunan Anggota Advisory Council
per 31 Desember 2009**

Nama	Jabatan	Perwakilan
Paul Cherry	Chairman	
Charles Macek	Vice-Chairman	
Patrice Marteau	Vice-Chairman	
Charles McDonough	Anggota	World Bank
Kenneth Sullivan	Anggota	IMF
Sophie Baranger	Anggota	IOSCO
Christoph Ernst	Anggota	IOSCO
Marcos Barbosa Pinto	Anggota	IOSCO
Jim Sylph	Anggota	IFAC
Sylvie Matherat	Anggota	Basel Committee on Banking Supervision
Will Widdowson	Anggota	Institute of International Finance
Francis Ruijgt	Anggota	International Actuarial Association
Hollis A Skaife	Anggota	International Association for Accounting Education & Research
Henning Goebel	Anggota	International Association of Insurance Supervisors
Gerben Everts	Anggota	International Corporate Governance Network
Andrew J Buchanan	Anggota	BDO International
Norbert Barth	Anggota	Corporate Reporting Users Forum (Internasional)
Dane Mott	Anggota	CFA Institute
Joel Osness	Anggota	Deloitte
Leo van der Tas	Anggota	Ernst & Young

Mark Vaessen	Anggota	KPMG
Richard Keys	Anggota	PricewaterhouseCoopers
April Mackenzie	Anggota	Grant Thornton
Mauro Grande	Anggota	European Central Bank
Stig Enevoldsen	Anggota	European Financial Reporting Advisory Group
Jacques Le Douit	Anggota	European Insurance and Reinsurance Federation
Christoph Hutten	Anggota	European Issuers/European Round Table of Industrialists
Richard Thorpe	Anggota	Committee of European Securities Regulators
Piero di Salvo	Anggota	Group of European national standard setters (Perancis, Jerman, Italia dan Inggris Raya)
Liz Murrall	Anggota	Association of British Insurers /Investment Management Association
Jerry M de St Paer	Anggota	Group of North American Insurance Enterprises
Gail L Hanson	Anggota	Council of Institutional Investors (Amerika Serikat)
Donald J Boteler	Anggota	Investment Company Institute (Amerika Serikat)
Neri Bukspan	Anggota	Investors Technical Advisory Committee (Amerika Serikat)
Jamie Miller	Anggota	Financial Executives International (Amerika Serikat)
Karyn Brooks	Anggota	Financial Executives International (Kanada)
Benoit Atangana Onana	Anggota	Federation Internationale des Experts-Comptables Francophones
Judith Downes	Anggota	Group of 100 (Australia)

Geraldo Toffanello	Anggota	Brazilian Association of Listed Companies
Moses Kgosana	Anggota	South Africa Accounting Practices Board
Shozo Yoneya	Anggota	Nippon Keidanren (Jepang)
Sei Ichi Kaneko	Anggota	Securities Analysts Association of Japan
Liu Yuting	Anggota	Ministry of Finance, Cina Accounting Standards Committee
PM Kam	Anggota	Hong Kong Institute of Certified Public Accountants
Chanhong Kim	Anggota	Korea Accounting Standards Board
Narendra Sarda	Anggota	Associated Chambers of Commerce of India, The Stock Exchange-Mumbai
Reyaz Mihular	Anggota	South Asian Federation of Accountants
Surya Subramania	Anggota	Association of Banks in Singapore

Sumber: IASCF Annual Report 2009

Daftar Donatur IASCF

No	Donatur	Pounds	Keterangan
	Non Negara:		
1	Deloitte & Touche	1.322.532	
	Ernst & Young	1.322.532	
	KPMG	1.322.532	
	Pricewaterhouse Coopers	1.322.532	
5	Grant Thornton	150.000	
6	Brussels Worldwide Services bvba	150.000	
7	Trustee	110.000	
8	Mazars	100.000	
9	Bank for International Settlements	68.404	
	Negara:		
1	Amerika Serikat	1.846.698	termasuk dari beberapa perusahaan
2	Jepang	1.736.875	termasuk dari beberapa perusahaan
3	Jerman	1.234.975	termasuk dari beberapa perusahaan
4	Perancis	888.099	
5	Inggris Raya	800.000	
6	Cina	750.105	termasuk dari beberapa perusahaan
7	Italia	683.683	
8	Australia	463.009	
9	Kanada	452.946	
10	Spanyol	440.373	
11	Belanda	354.506	

12	India	247.020	
13	Korea Selatan	182.028	termasuk dari beberapa perusahaan
14	Swiss	169.435	
15	Hongkong SAR	132.124	
16	Selandia Baru	87.690	
17	Norwegia	45.000	
18	Luksemburg	44.655	
19	Uni Eropa	34.202	
20	Rusia	18.203	
21	Portugal	17.659	
22	Yunani	15.169	
23	Singapura	10.509	
24	Armenia	9.635	
25	Uganda	7.064	
26	Slovakia	6.994	
	Arab Saudi	6.994	
28	Irlandia	6.729	
29	Kazakhstan	6.029	
	Malaysia	6.029	
31	Bulgaria	5.814	
32	Cyprus	4.761	
	TOTAL	16.583.544	

Sumber: diolah dari IASCF Annual Report 2009

Lampiran 6

Tingkat Pemakaian IFRS
Di Berbagai Yurisdiksi

Kode	Perusahaan Publik Domestik						Perusahaan Non-Publik Domestik
	Wilayah Yurisdiksi	IFRS Tidak Dijijinkan	IFRS Dijijinkan	IFRS Diwajibkan untuk Beberapa	IFRS Diwajibkan untuk Semua	Laporan Audit Menyatakan Ketaatan dengan IFRS	
AE	Abu Dhabi - Uni Emirat Arab				V	Ya	Pemakaian IFRS oleh Perusahaan Non-Publik
AL	Albania		Tidak ada bursa efek di Albania				IFRS tidak diijinkan
DZ	Aljazair		Tidak ada bursa efek di Aljazair				IFRS tidak diijinkan
AS	Samoa Amerika		Tidak ada bursa efek di Samoa Amerika				IFRS diijinkan
AI	Anguilla			V Salinan 12		Ya	
AG	Antigua dan Barbuda			V Salinan 15		Ya	IFRS untuk SMEs
AR	Argentina				V mulai 2012		IFRS tidak diijinkan
AM	Armenia				V	Ya	IFRS diwajibkan untuk semua
AW	Aruba		V			Ya	

Lampiran 6 (lanjutan)

AT	Austria			V ^{Catatan 1}	Tidak. IFRS sesuai yang diadopsi Uni Eropa	IFRS diijinkan untuk Laporan Konsolidasi, dilarang untuk Laporan Terpisah
AU	Australia			V ^{Catatan 2}	Ya	Australian IFRS equivalents diwajibkan untuk beberapa perusahaan non publik besar, diijinkan untuk lainnya
AZ	Azerbaijan		V		Ya	Laporan Keuangan Terpisah IFRS diwajibkan untuk bank (publik dan non publik) dan mulai 2008, untuk perusahaan BUMN besar Untuk lainnya, IFRS diijinkan.
BS	Bahamas			V	Ya	
BH	Bahrain			V	Ya	IFRS diwajibkan untuk semua
BD	Bangladesh		V			

Lampiran 6 (lanjutan)

BB	Barbados			V	Ya	Perusahaan bisa memilih antara IFRS atau IFRS untuk SMEs
BE	Belgia			V-Casual	Tidak. IFRS sesuai yang diadopsi Uni Eropa	IFRS diwajibkan untuk Laporan Konsolidasi pada bank non publik dan institusi kredit, diijinkan untuk perusahaan lainnya. IFRS tidak diijinkan untuk Laporan Keuangan Terpisah perusahaan.
BY	Belarus				Ya	IFRS diwajibkan untuk bank
BZ	Belize					Perusahaan non publik boleh menggunakan IFRS atau standar internasional lainnya yang diterima (misalnya US GAAP atau Canadian GAAP).

Lampiran 6 (lanjutan)

BJ	Benin	V					IFRS tidak diijinkan
BM	Bermuda		V			Ya	
BT	Bhutan	V					
BO	Bolivia		V			Ya	
BA	Bosnia Herzegovina			V (Semua large dan medium sized)		Ya	
BW	Botswana			V		Ya	IFRS diwajibkan untuk beberapa, diijinkan untuk lainnya
BR	Brasil			Semua perusahaan publik dan semua institusi keuangan mulai 2010. Pilihan untuk perusahaan publik sampai dengan 2010.	Ya, kecuali untuk lembaga perbankan non publik sebelum tahun 2010 karena untuk mereka, laporan keuangan komparatif IFRS tidak diwajibkan sebelum tahun 2010		IFRS tidak diijinkan
BN	Brunei Darussalam			Tidak ada bursa efek di Brunei			IFRS diijinkan tetapi tidak banyak digunakan

Lampiran 6 (lanjutan)

BG	Bulgaria			V ^{Catatan 1}	Tidak. IFRS sesuai yang diadopsi Uni Eropa	IFRS diwajibkan baik untuk Laporan Konsolidasi maupun Laporan Terpisah pada institusi keuangan dan semua perusahaan non publik besar. Perusahaan non publik lainnya diijinkan untuk menggunakan IFRS.
BF	Burkina Faso	V				IFRS tidak diijinkan
BI	Burundi		Tidak ada bursa efek di Burundi			IFRS tidak diijinkan
KH	Kamboja		Tidak ada bursa efek di Kamboja			IFRS diwajibkan untuk beberapa, diijinkan untuk lainnya
CA	Kanada			V (mulai 2011) ^{Catatan 2}	Ya	IFRS diijinkan (mulai 2011)
KY	Kepulauan Cayman		V		Ya	
CL	Cili			V (mulai 2009)	Ya	IFRS diwajibkan

Lampiran 6 (lanjutan)

CN	Cina	V ^{Catatan 14}					mulai 2009. IFRS tidak dijinkan
CI	Pantai Gading	V					IFRS tidak dijinkan
CO	Kolombia	V					IFRS tidak dijinkan
CR	Kosta Rika		V		Ya		IFRS diwajibkan untuk semua
HR	Kroasia		V		Ya		IFRS diwajibkan untuk semua institusi keuangan dan perusahaan non-publik besar, dijinkan untuk lainnya
CU	Kuba	V					IFRS tidak dijinkan
CY	Cyprus		V ^{Catatan 1}		Tidak. IFRS sesuai yang diadopsi Uni Eropa		IFRS diwajibkan untuk semua
CZ	Republik Ceko		V ^{Catatan 1}		Tidak. IFRS sesuai yang diadopsi Uni Eropa		IFRS diijinkan dalam Laporan Konsolidasi, dilarang dalam Laporan Terpisah
DK	Denmark		V ^{Catatan 1}		Tidak. IFRS		IFRS diijinkan

Lampiran 6 (lanjutan)

							sesuai yang diadopsi Uni Eropa	baik dalam Laporan Konsolidasi maupun Laporan Terpisah Perusahaan
DM	Dominika		V				Ya	
DO	Republik Dominika				V Catatan 20		Ya	IFRS diijinkan
AE	Dubai - Uni Emirate Arab				V		Ya	IFRS diwajibkan untuk semua bank.
EC	Ekuador				V mulai 2010-2012		Ya	IFRS diwajibkan untuk beberapa mulai 2011, semua mulai 2012
EG	Mesir				V		Ya	
SV	El Salvador		V				Ya	
ER	Eritrea		Tidak ada bursa efek di Eritrea					IFRS diwajibkan untuk perusahaan BUMN, perusahaan swasta besar, bank, dan perusahaan asuransi.
EE	Estonia				V-Catatan 1		Tidak. IFRS sesuai yang diadopsi Uni Eropa	IFRS diwajibkan baik dalam Laporan Konsolidasi

Lampiran 6 (lanjutan)

							maupun Laporan Terpisah pada institusi keuangan. IFRS diizinkan baik dalam Laporan Konsolidasi dan Laporan Terpisah untuk perusahaan lainnya.
FJ	Fiji			V	Ya		IFRS diwajibkan untuk perusahaan yang mayoritas dimiliki pemerintah, perbankan, institusi keuangan, perusahaan menengah dan besar, dan lainnya.
FI	Finlandia			V-Selatan I	Tidak. IFRS sesuai yang diadopsi Uni Eropa		IFRS diwajibkan baik dalam Laporan Konsolidasi maupun Laporan Terpisah perusahaan.
FR	Perancis			V-Selatan I	Tidak. IFRS		IFRS diizinkan

Lampiran 6 (lanjutan)

GM	Gambia		Tidak ada bursa efek di Gambia		sesuai yang diadopsi Uni Eropa	pada Laporan Konsolidasi, dilarang pada Laporan Terpisah perusahaan. IFRS diijinkan
DE	Jerman			V ^{Catatan 1}	Tidak. IFRS sesuai yang diadopsi Uni Eropa	IFRS diijinkan untuk Laporan Konsolidasi dan Terpisah . Statutory accounts yang sesuai dengan national GAAP juga diwajibkan.
GE	Georgia			V	Ya	IFRS diwajibkan untuk bank non-publik utilities, brokerage, asuransi, bisnis yang dimiliki pemerintah mulai 2007. IFRS akan diwajibkan untuk Semua perusahaan non-publik
GH	Ghana			V	Ya	

Lampiran 6 (lanjutan)

							lainnya mulai 2009.
GI	Gibraltar		V			Ya	IFRS diijinkan kecuali untuk beberapa perusahaan yang harus menggunakan UK GAAP.
GD	Grenada				V Catatan 12	Ya	
GR	Yunani				V Catatan 1	Tidak. IFRS sesuai yang diadopsi Uni Eropa	IFRS diijinkan dalam Laporan Konsolidasi dan Terpisah perusahaan yang diaudit.
GL	Greenland			Tidak ada bursa efek di Greenland			Standar akuntansi Denmark biasanya digunakan, tetapi IFRS diijinkan.
GU	Guam			Tidak ada bursa efek di Guam			IFRS tidak diijinkan, menggunakan US GAAP.
GT	Guatemala				V	Ya	IFRS diwajibkan untuk semua
GY	Guyana				V	Ya	Perusahaan bisa memilih

Lampiran 6 (lanjutan)

HT	Haiti	V					menggunakan full IFRS atau IFRS untuk SMEs
HN	Honduras			V		Ya	IFRS diijinkan untuk semua
HK	Hongkong				V ^{Catatan 3}	Ya untuk perusahaan dari luar Hongkong. Perusahaan dalam negeri menggunakan 'Hong Kong FRS'	IFRS diwajibkan untuk semua
HU	Hungaria					Tidak. IFRS sesuai yang diadopsi Uni Eropa	Hong Kong IFRS equivalents diijinkan
IS	Islandia				V ^{Catatan 1}	Tidak. IFRS sesuai yang	IFRS diijinkan baik dalam Laporan Konsolidasi maupun Laporan Terpisah perusahaan. Statutory accounts yang sesuai dengan national GAAP juga diwajibkan.
							IFRS diijinkan baik untuk

Lampiran 6 (lanjutan)

						diadopsi Uni Eropa	Laporan Konsolidasi maupun Laporan Terpisah perusahaan.
IN	India	V ^{Catatan 8}					IFRS tidak diijinkan
ID	Indonesia	V					IFRS tidak diijinkan
IR	Iran	V					IFRS tidak diijinkan
IQ	Irak		V		Ya		Semua bank termasuk yang non-publik
IE	Irlandia		V ^{Catatan 1}		Tidak. IFRS sesuai yang diadopsi Uni Eropa.		IFRS diijinkan baik dalam Laporan Konsolidasi maupun Laporan Terpisah perusahaan.
IL	Israel		V Semua kecuali bank		Ya		IFRS diijinkan (kecuali bank)
IT	Italia		V ^{Catatan 1}		Tidak. IFRS sesuai yang diadopsi Uni Eropa.		IFRS diijinkan dalam Laporan Konsolidasi kecuali untuk perusahaan yang

Lampiran 6 (Lanjutan)

JM	Jamaika				V	Ya	sangat kecil. IFRS diijinkan dalam Laporan Terpisah kecuali untuk perusahaan yang sangat kecil, perusahaan asuransi, dan beberapa perusahaan yang sudah diatur.
JP	Jepang		V Catatan 12			Tidak belum diumumkan	IFRS diwajibkan untuk Semua
JO	Yordania				V	Ya	IFRS tidak diijinkan
KZ	Kazakhstan				V	Ya	IFRS diwajibkan untuk semua bank, perusahaan joint stock, dan perusahaan ain yang mendapat perhatian dari publik, perusahaan industri ekstratif dan perusahaan yang dimiliki

Lampiran 6 (lanjutan)

									pemerintah.
KE	Kenya						V	Ya	IFRS diwajibkan untuk semua
KR	Korea Selatan		V Catatan 2					Tidak	IFRS tidak diijinkan
KW	Kuwait						V	Ya	IFRS diwajibkan untuk semua
KG	Kyrgyzstan						V	Ya	IFRS diwajibkan untuk semua
LA	Laos		V					Ya	
LV	Latvia						V Catatan 1	Tidak. IFRS sesuai yang diadopsi Uni Eropa.	IFRS diwajibkan untuk intitusi keuangan. Tidak diijinkan untuk lainnya.
LB	Lebanon						V	Ya	IFRS diwajibkan untuk institusi keuangan. Tidak diijinkan untuk lainnya.
LI	Liechtenstein						V Catatan 1	Tidak. IFRS sesuai yang diadopsi Uni Eropa.	IFRS diijinkan baik dalam Laporan Konsolidasi dan Laporan Terpisah perusahaan.
LS	Lesotho		V					Ya	
LT	Lithuania						V Catatan 1	Tidak. IFRS	IFRS diwajibkan

Lampiran 6 (lanjutan)

						sesuai yang diadopsi Uni Eropa.	untuk beberapa insitusi keuangan. Dijijinkan untuk lainnya.
LU	Luksemburg				V ^{Catatan 1}	Tidak. IFRS sesuai yang diadopsi Uni Eropa.	IFRS diijinkan, tapi memerlukan persetujuan untuk beberapa kasus ^{Catatan 22}
LY	Libya	V					IFRS tidak diijinkan
MO	Makau		Tidak ada bursa efek di Makau				IFRS diijinkan
MK	Makedonia				V	Ya	IFRS tidak diijinkan
MG	Madagaskar		Tidak ada bursa efek di Madagaskar				IFRS diwajibkan untuk beberapa
MW	Malawi				V	Ya	IFRS tidak diijinkan
MY	Malaysia	V ^{Catatan 16}					IFRS tidak diijinkan
MV	Maldives				V	Ya	IFRS diijinkan
ML	Mali	V					IFRS tidak diijinkan
MT	Malta				V ^{Catatan 1}	Tidak. IFRS sesuai yang diadopsi Uni Eropa.	IFRS diijinkan untuk semua

Lampiran 6 (lanjutan)

MR	Mauritania	Tidak ada bursa efek di Mauritania			IFRS tidak diijinkan
MU	Mauritius			V	Ya IFRS diwajibkan untuk beberapa, diijinkan untuk lainnya.
MX	Meksiko	V Catatan 17			IFRS tidak diijinkan
MD	Moldova	V			IFRS tidak diijinkan
MN	Mongolia			V	Ya IFRS diwajibkan untuk semua
ME	Montenegro			V	Ya IFRS diwajibkan untuk semua
MA	Maroko				Ya
MZ	Mozambik		V		Diwajibkan untuk bank (2007), perusahaan non-publik besar

V Bank/institusi keuangan harus menggunakan IFRS mulai 2008. Perusahaan publik lain selain bank dan institusi keuangan bisa memilih antara IFRS atau Moroccan GAAP.

Lampiran 6 (lanjutan)

MM	Myanmar	V				Ya	(mulai 2010), dan perusahaan non-publik menengah (mulai 2011)
NA	Namibia			V		Ya	
NL	Belanda				V ^{Catatan 1}	Tidak. IFRS sesuai yang diadopsi Uni Eropa.	IFRS diijinkan baik dalam Laporan Konsolidasi maupun Laporan Terpisah perusahaan.
AN	Antilles Belanda	V				Ya	
NP	Nepal				V	Ya	IFRS diwajibkan untuk semua New Zealand
NZ	Selandia Baru				V ^{Catatan 2}	Ya	IFRS equivalents diwajibkan untuk perusahaan non-publik besar, diijinkan untuk lainnya.
NI	Nikaragua				V	Ya	IFRS diwajibkan untuk semua
NE	Niger		V				IFRS tidak diijinkan

Lampiran 6 (lanjutan)

NG	Nigeria			V (mulai 2012) Catatan 21	Akan ditentukan Catatan 21	IFRS diijinkan baik dalam Laporan Konsolidasi maupun dalam Laporan Terpisah perusahaan.
NO	Norwegia			V Catatan 1	Tidak. IFRS sesuai yang diadopsi Uni Eropa.	IFRS diwajibkan untuk sel. u.a
OM	Oman			V	Ya	IFRS tidak diijinkan
PK	Pakistan	V				IFRS diwajibkan untuk semua. Tetapi hukum meminta IFRS untuk ditinjau secara hukum.
PA	Panama			V	Ya	
PG	Papua Nugini			V	Ya	
PY	Paraguay		V		Ya	
PE	Peru			V	Ya	
PH	Filipina	V Catatan 11				IFRS diijinkan
PL	Polandia			V Catatan 1	Tidak. IFRS sesuai yang diadopsi Uni Eropa.	IFRS diwajibkan untuk Laporan Konsolidasi bank, diijinkan dalam Laporan

Lampiran 6 (lanjutan)

<p>Konsolidasi / Terpisah perusahaan yang akan go public, atau yang perusahaan induknya menggunakan IFRS, dilarang untuk Laporan Keuangan Terpisah perusahaan lainnya.</p>						<p>PT</p>	<p>Portugal</p>
<p>IFRS div. ajikan dalam Laporan Konsolidasi bank dan lembaga keuangan, diijinkan untuk lainnya. IFRS diijinkan dalam Laporan Keuangan Terpisah perusahaan dalam kaitan Laporan Konsolidasi</p>	<p>Tidak. IFRS sesuai yang diadopsi Uni Eropa.</p>	<p>V^{Catatan 1}</p>					

Lampiran 6 (lanjutan)

QA	Qatar								Ya	induk yang menggunakan IFRS, tidak diijinkan untuk perusahaan lainnya.
RE	Reuni							Tidak ada bursa efek di Reuni	V	Reuni mengikuti system akuntansi Perancis. Hal ini berarti bahwa, untuk perusahaan non-public, IFRS diijinkan dalam Laporan Konsolidasi, dilarang dalam Laporan Terpisah perusahaan.
RO	Rumania								V-Catatan 1	IFRS diwajibkan untuk Laporan Konsolidasi bank, diijinkan dalam Laporan Konsolidasi / Terpisah perusahaan yang akan go public,

Lampiran 6 (lanjutan)

							atau yang induknya menggunakan IFRS, dilarang dalam Laporan Terpisah perusahaan lainnya.
RU	Rusia	V					Perusahaan non-publik boleh menyiapkan laporan keuangan berdasarkan IFRS sebagai tambahan laporan keuangan berdasarkan Russian GAAP.
WS	Samoa		Tidak ada bursa efek di Samoa				IFRS diijinkan
KN	St Kitts dan Nevis				V Catatan 12	Ya	
SA	Arab Saudi			V Catatan 6		Ya	IFRS tidak diijinkan
SN	Senegal	V					IFRS tidak diijinkan
RS	Serbia				V	Ya	IFRS diwajibkan untuk semua
SL	Sierra Leone				V	Ya	IFRS diwajibkan untuk beberapa,

Lampiran 6 (lanjutan)

								IFRS untuk SMEs untuk lainnya.
SG	Singapura	V _{Catatan.13}						Tidak. Singapore FRSS diwajibkan <small>Catatan.13</small>
SI	Slovenia				V _{Catatan.1}		Tidak. IFRS sesuai yang diadopsi Uni Eropa.	IFRS diwajibkan untuk lembaga keuangan, diijinkan untuk lainnya.
SK	Slovakia				V _{Catatan.1}		Tidak. IFRS sesuai yang diadopsi Uni Eropa	IFRS diwajibkan untuk semua
ZA	Afrika Selatan				V		Ya	IFRS diijinkan atau IFRS untuk SMEs
ES	Spanyol				V _{Catatan.1}		Tidak. IFRS sesuai yang diadopsi Uni Eropa	IFRS diijinkan untuk Laporan Konsolidasi, dilarang untuk Laporan Terpisah perusahaan.
LK	Sri Lanka			V			Ya	IFRS tidak diijinkan
SR	Suriname			V			Ya	IFRS diijinkan
SE	Swedia				V _{Catatan.1}		Tidak. IFRS sesuai yang	IFRS diijinkan dalam Laporan

Lampiran 6 (lanjutan)

							diadopsi Uni Eropa	Konsolidasi, dilarang dalam Laporan Terpisah perusahaan.
SY	Syria	V						IFRS tidak diijinkan
SZ	Swaziland		V				Ya	
CH	Swiss		V	Perusahaan multinasional main board bisa memilih menggunakan IFRS atau US GAAP mulai 2005			Ya	
TW	Taiwan	V ^{Selatan 18}						IFRS tidak diijinkan
TJ	Tajikistan					V	Ya	IFRS diwajibkan untuk semua
TZ	Tanzania					V	Ya	IFRS diwajibkan untuk perusahaan internasional.
TH	Thailand	V						IFRS tidak diijinkan
TG	Togo	V						IFRS tidak diijinkan
TT	Trinidad dan					V	Ya	IFRS diwajibkan

Lampiran 6 (lanjutan)

TN	Tobago								untuk semua IFRS tidak diijinkan
TR	Tunisia	V							
TM	Turki		V ^{Catatan 2}					Ya	
TM	Turkmenistan	V							
UG	Uganda		V					Ya	
UA	Ukraina			V				Ya	IFRS diwajibkan untuk semua
UK	Britania				V ^{Catatan 1}			Tidak: IFRS sesuai yang diadopsi Uni Eropa	IFRS diijinkan baik untuk Laporan Konsolidasi dan Laporan Terpisah perusahaan
US	Amerika Serikat	V ^{Catatan 10}							IFRS diijinkan
UY	Uruguay	V ^{Catatan 4}							
UZ	Uzbekistan	V							IFRS tidak diijinkan
VU	Vanuatu						Tidak ada bursa efek di Vanuatu		IFRS diijinkan
VE	Venezuela	V ^{Catatan 12}							Mulai 2004, IFRS diwajibkan mulai 2007.
VN	Vietnam	V							
VG	Kepulauan Virgin (Britania)			V				Ya	
VI	Kepulauan Virgin						Tidak ada bursa efek di Kepulauan Virgin (Amerika Serikat)		IFRS tidak diijinkan.

Lampiran 6 (lanjutan)

(Amerika Serikat)					Perusahaan non-publik menggunakan US GAAP.
PS	Palestina			V	Ya
YE	Yaman	Tidak ada bursa efek di Yaman			IFRS Dijinkan
ZM	Zambia			V	IFRS Dijinkan
ZW	Zimbabwe			V	Ya
Total untuk Perusahaan Publik					Total untuk Perusahaan Non-publik
Total : 173 yurisdiksi untuk perusahaan publik <ul style="list-style-type: none"> • IFRS Tidak Dijinkan — 31 yurisdiksi • IFRS Dijinkan — 26 yurisdiksi • IFRS Diwajibkan untuk Beberapa — 6 yurisdiksi • IFRS Diwajibkan untuk Semua — 91 yurisdiksi* • Tidak Ada Bursa Efek — 19 yurisdiksi * termasuk 30 negara anggota Uni Eropa (Catatan 1) and 5 yurisdiksi yang mengadopsi full IFRS equivalents (Catatan 2 3, and 7) 					Dari total 173 yurisdiksi dalam tabel untuk perusahaan non-publik: <ul style="list-style-type: none"> • IFRS Tidak Dijinkan — 38 yurisdiksi • IFRS Dijinkan untuk Semua atau Beberapa — 43 yurisdiksi • IFRS Diwajibkan untuk Beberapa — 26 yurisdiksi
Dari 123 yurisdiksi (26 + 6 + 91) yang mengijinkan atau meminta IFRS untuk perusahaan publik: <ul style="list-style-type: none"> • Di 89 yurisdiksi, laporan audit menyatakan ketaatan pada IFRS • Di 30 yurisdiksi, laporan audit menyatakan ketaatan pada IFRS yang diadopsi Uni Eropa • Di 1 yurisdiksi (KR) laporan audit berpedoman pada local GAAP • Di 1 yurisdiksi (HK) laporan audit untuk perusahaan local mengacu pada local GAAP dan untuk perusahaan asing mengacu pada IFRS 					

Lampiran 6 (lanjutan)

<ul style="list-style-type: none"> • Di 2 yurisdiksi (JP and NG) ketentuan pedoman laporan audit belum diumumkan 	<ul style="list-style-type: none"> • IFRS Diwajibkan untuk Semua — 25 yurisdiksi • Informasi Tidak Tersedia — 41 yurisdiksi
<p>Catatan 1</p> <p>Negara-negara ini adalah anggota Uni Eropa. Laporan audit dan penyajian laporan keuangan berpedoman kepada ketataan pada IFRS yang diadopsi Uni Eropa. Uni Eropa telah mengadopsi semua IFRS, meskipun ada beda waktu dalam mengadopsi IFRS terbaru dan satu aspek dalam IAS 39 yang dimodifikasi. Modifikasi ini berpengaruh kepada sekitar 50 bank di Uni Eropa yang menggunakan IFRS (yang diadopsi Uni Eropa). Uni Eropa juga mengizinkan pengeluaran Laporan Keuangan Terpisah perusahaan yang dinilai sebagai ketataan pada IFRS yang diadopsi Uni Eropa, yang bertentangan dengan IAS 27.</p>	<p>Catatan 2</p> <p>Australia dan Selandia Baru mengadopsi IFRS ke dalam standar nasional yang mereka deskripsikan sebagai IFRS-equivalents. Standar tersebut sudah termasuk permintaan dalam IAS 1.14 bahwa "sebuah entitas yang laporan keuangannya taat kepada IFRS harus membuat pernyataan ketataan secara eksplisit dalam sebuah catatan". Di kedua Negara pernyataan tersebut dibuat dalam laporan audit.</p>
<p>Catatan 3</p> <p>Hongkong menggunakan standar akuntansi yang mereka sebut identik dengan IFRS, termasuk semua pilihan pengukuran dan pengukuran, tetapi dalam beberapa kasus tanggal efektif dan transisi berbeda.. Perusahaan asing yang berkedudukan di Hongkong diizinkan menyajikan laporan keuangan berdasarkan IFRS daripada Hong Kong GAAP.</p>	<p>Catatan 4</p> <p>Secara hukum, semua perusahaan Uruguay harus menggunakan IFRS yang dikeluarkan sampa dengan tanggal 19 Mei 2004. Laporan audit tetap mengacu ketataan pada Uruguayan GAAP.</p>

<p>Catatan 5</p> <p>Perusahaan publik di Turki diijinkan untuk memilih menggunakan IFRS dari dua cara karena adanya jarak waktu penerjemahan IFRS ke dalam bahasa Turki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan publik dapat menggunakan IFRS yang dikeluarkan IASB dalam versi bahasa Inggris, dimana dalam laporan audit dan catatan laporan keuangan menyatakan secara eksplisit kepatuhan kepada International Financial Reporting Standards. • Perusahaan publik dapat menggunakan IFRS yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Turki. Karena adanya jarak waktu penerjemahan, perusahaan ini tidak dianggap taat kepada IFRS, dan laporan audit dan catatan laporan keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan taat kepada IFRS yang diadopsi untuk pemakaian di Turki.
<p>Catatan 6</p> <p>Semua bank dan perusahaan asuransi yang terdaftar di bursa efek Saudi harus menggunakan IFRS.</p>
<p>Catatan 7</p> <p>Canada berencana untuk mengadopsi penuh IFRS sebagai Canadian Financial Reporting Standards mulai tahun 2011. Perusahaan diijinkan untuk mulai menggunakan IFRS mulai awal 2008 dengan persetujuan pengatur pasar modal di negara tersebut.</p>
<p>Catatan 8</p> <p>India mengumumkan rencana untuk mulai mengadopsi IFRS sebagai Indian Financial Reporting Standards untuk perusahaan publik pada tahun 2012-2014.</p>
<p>Catatan 9</p> <p>Korea telah mengadopsi semua IFRS yang dikeluarkan IASB sebagai Korean Financial Reporting Standards dan mulai berlaku tahun 2011, dengan pemakaian lebih awal diijinkan mulai tahun 2009.</p>
<p>Catatan 10</p> <p>Pada tanggal 14 November 2008, the US SEC mengeluarkan beberapa pendapat atas pengajuan <i>Roadmap for the Potential Use of Financial Statements Prepared in Accordance with International Financial Reporting Standards by US Issuers</i>. Saat ini, perusahaan lokal</p>

<p>yang terdaftar di US SEC diwajibkan untuk menggunakan US GAAP dan tidak diijinkan untuk menggunakan IFRS.</p>
<p>Catatan 11</p> <p>Dalam mengadopsi IFRS sebagai Philippines Financial Reporting Standards (PFRSSs), beberapa modifikasi dibuat pada IFRS termasuk usaha transisi dibawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi segmen laporan pengungkapan • Beberapa instrumen keuangan yang spesifik dikecualikan dari penerapan ketentuan • Kontrak derivatif komoditas dari perusahaan pertambangan dikecualikan dari ketentuan • Perusahaan asuransi diijinkan untuk menggunakan seperangkat prinsip akuntansi lainnya (PFRSSs) • Untuk bank, kerugian dari penjualan non-performing assets diijinkan untuk diamortisasi selama periode tertentu • Beberapa perubahan tambahan lain untuk IASB's pension, foreign exchange, dan leases standards
<p>Catatan 12</p> <p>Pada tanggal 11 Desember 2009, the Financial Services Authority of Japan (FSA) mempublikasikan Cabinet Office Ordinances terakhir yang mengijinkan beberapa perusahaan publik Jepang untuk secara sukarela mulai menggunakan IFRS yang dirancang oleh the Commissioner of the FSA dalam Laporan Konsolidasi mereka mulai tahun fiskal yang berakhir tanggal 31 Maret 2010.</p>
<p>Catatan 13</p> <p>Singapura mengadopsi IFRS secara esensial kata per kata sebagai Singapore equivalents of IFRS. Meskipun demikian, mereka membuat perubahan pada prinsip pengakuan dan pengukuran di beberapa IFRS ketika mereka mengadopsinya sebagai standar Singapura, dan mereka tidak mengadopsi beberapa IFRS lainnya. Di bulan Mei 2009 pemerintah mengumumkan Singapore Financial Reporting Standards akan fully converged dengan IFRS di tahun 2012. The fully-converged standards akan diterapkan kepada semua perusahaan yang terdaftar di the Singapore Stock Exchange.</p>
<p>Catatan 14</p> <p>Sekitar 150 perusahaan Cima terdaftar di the Hong Kong Stock Exchange. Mereka diijinkan untuk menggunakan IFRS atau Hong Kong FRSS. Hongkong adalah wilayah administrasi khusus dari Cina.</p>

<p>Catatan 15</p> <p>The Eastern Caribbean Securities Exchange (ECSE) adalah pasar modal regional yang berlokasi di St Kitts. Dibentuk untuk memfasilitasi penjualan dan pembelian produk finansial – termasuk saham dan obligasi perusahaan dan sekuritas pemerintah – untuk delapan anggotanya yaitu Anguilla, Antigua dan Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, St. Kitts dan Nevis, St. Lucia, dan St. Vincent dan Grenadines.</p>
<p>Catatan 16</p> <p>Malaysia mengumumkan rencana untuk membawa Malaysian GAAP full convergence dengan IFRS efektif mulai 1 Januari 2012.</p>
<p>Catatan 17</p> <p>Pada tanggal 11 November 2008, the Mexican Securities and Exchange Commission (Comision Nacional Bancaria y de Valores, atau CNBV) mengumumkan bahwa semua perusahaan yang terdaftar di the Mexican Stock Exchange akan diwajibkan untuk menggunakan IFRS mulai 2012. Perusahaan public mempunyai pilihan untuk menggunakan IFRS lebih awal –mulai awal 2008 – setelah pemohonan disetujui oleh the CNBV.</p>
<p>Catatan 18</p> <p>Pada tanggal 14 Mei 2009, the Financial Supervisory Commission (FSC) of Taiwan mengumumkan rencana tahapan the full adoption of IFRS di Taiwan. Taiwan berencana mengadopsi IFRS dalam dua tahap. Tahap I perusahaan (perusahaan publik dan lembaga keuangan yang diatur oleh the FSC, kecuali untuk credit cooperatives, credit card companies, dan insurance intermediaries) akan diwajibkan untuk mengadopsi Taiwan-IFRS mulai 2013. Adopsi awal mulai 2012 menjadi pilihan bagi perusahaan yang telah mengeluarkan sekuritasnya ke seluruh dunia, atau terdaftar sebagai perusahaan yang mengeluarkan sekuritas asing di the FSC, atau memiliki market capitalisation lebih dari NT\$10 milyar . Tahap II perusahaan (perusahaan non-publik, credit cooperatives, dan credit card companies) akan diwajibkan untuk mengadopsi Taiwan-IFRS mulai 2015, dengan pilihan adopsi lebih awal mulai 2013.</p>
<p>Catatan 19</p> <p>Tahun 2004, the Venezuelan Federation of Certified Public Accountants mengadopsi IFRS tahun 2004 sebagai standar akuntansi Venezuela. Standar tersebut diwajibkan untuk perusahaan public mulai 2005, untuk perusahaan non-publik besar mulai 2006, dan untuk perusahaan lainnya mulai 2007. Saat ini, Venezuela tidak mengadopsi IFRS lainnya ataupun amandemen IASs yang dikeluarkan setelah tahun 2004.</p>

<p>Catatan 20</p> <p>Bulan Februari 2010, perubahan dalam the Institute of CPAs of the Dominican Republic dilakukan untuk mengimplementasikan sebagian IFRS untuk perusahaan publik, with beberapa standard wajib digunakan mulai 2010 sedangkan standar lain berlaku secara bertahap sampai dengan 2014.</p>
<p>Catatan 21</p> <p>Tanggal 28 Juli 2010, the Nigerian Federal Executive Council menyetujui tanggal 1 Januari 2012 sebagai tanggal efektif untuk konvergensi standar akuntansi nasional dengan International Financial Reporting Standards (IFRS). The Council yang mengatur the Nigerian Accounting Standards Board (NASB), berada di bawah pengawasan the Nigerian Federal Ministry of Commerce and Industry.</p>
<p>Catatan 22</p> <p>Lembaga kredit, perusahaan asuransi dan re-asuransi dapat memilih menggunakan IFRS yang diadopsi Uni Eropa atau prinsip akuntansi Luksemburg, baik dalam laporan keuangan konsolidasi maupun terpisah.</p> <p>Semua entitas lainnya perlu untuk mendapat persetujuan dari the Luxembourg Ministry of Justice untuk menyiapkan laporan keuangan terpisah atau konsolidasi sesuai dengan IFRS yang diadopsi Uni Eropa.</p> <p>Pada awal 2009, sebuah rancangan diperkenalkan oleh pemerintah Luksemburg, memperkenalkan IFRS untuk commercial companies. IFRS akan dimasukkan ke dalam the Luxembourg commercial law sebagai alternatif dari prinsip akuntansi Luksemburg.</p> <p>Sumber: diolah dari data PricewaterhouseCoopers dan Deloitte</p>

**50 Perusahaan Finansial Terbesar Dunia
Berdasarkan Geographical Spread Index (GSI) 2008**

Nama Perusahaan	Negara Asal	Nilai Aset (jutaan USD)	Jumlah Negara Afiliasi
Citigroup Inc	Amerika	1.938.470	75
Allianz SE	Jerman	1.367.062	52
ABN Amro Holding NV	Belanda	953.959	48
Generali Spa	Italia	549.269	41
HSBC Holdings PLC	Inggris Raya	2.527.465	54
Societe Generale	Perancis	1.616.599	53
Zurich Financial Service	Swiss	327.944	34
UBS AG	Swiss	1.926.209	35
Unicredito Italiano Spa	Italia	1.495.868	34
Axa	France	963.539	39
BNP Paribas	Perancis	2.969.315	48
Deutsche Bank AG	Jerman	3.150.820	36
AIG Inc	Amerika	860.418	45
Credit Suisse Group AG	Swiss	1.118.881	31
Swiss Reinsurance Co.	Swiss	229.328	26
Dexia	Belgia	931.339	26
Credit Agricole SA	Perancis	2.365.122	39
Natixis	Perancis	795.079	38
ING Groep NV	Belanda	1.905.097	38
Banco Santander SA	Spainyol	1.501.619	30
KBC Group NV	Belgia	508.322	22
Bank of Nova Scotia	Kanada	416.427	23
Barclays PLC	Inggris Raya	3.001.433	41
Fortis NV	Belgia	132.861	23

Royal Bank of Canada	Kanada	593.814	18
Merrill Lynch & Co. Inc	Amerika	667.543	26
Intesa Sanpaolo	Italia	910.062	26
Standard Chartered PLC	Inggris Raya	435.068	27
JP Morgan Chase & Co.	Amerika	2.175.052	27
Skandinaviska Banken	Swedia	326.489	20
Muenchener R, AG	Jerman	308.179	38
Morgan Stanley	Amerika	658.812	23
Goldman Sachs Group	Amerika	884.547	19
BBV Argentaria	Spanyol	776.323	21
Aviva PLC	Inggris Raya	518.365	22
Berkshire Hathaway	Amerika	267.399	32
Nordea Bank	Swedia	678.217	12
Mitsubishi UFJ Financial	Jepang	2.200.818	19
Bank of New York Mellon	Amerika	237.512	20
Nomura Holdings, Inc	Jepang	275.059	18
Royal Bank of Scotland	Inggris Raya	3.511.187	32
Manulife Financial Corp	Kanada	308.782	12
Hypo Real Estate Hold.	Jerman	600.363	15
DNB Nor ASA	Norwegia	263.592	10
Prudential PLC	Inggris Raya	315.120	22
Aegon NV	Belanda	410.957	14
Mizuho Financial Group	Jepang	1.691.286	14
Danske Bank	Denmark	680.095	10
Bank of Ireland PLC	Irlandia	277.705	13
Svenska Handelsbanken	Swedia	280.726	15

Catatan: GSI dihitung dari perkalian jumlah negara afiliasi dengan persentase jumlah cabang asing dari keseluruhan total cabang

Sumber: Diolah dari UNCTAD's World Investment Report 2009

**50 Perusahaan Non Finansial Terbesar Dunia
Berdasarkan Jumlah Aset 2007**

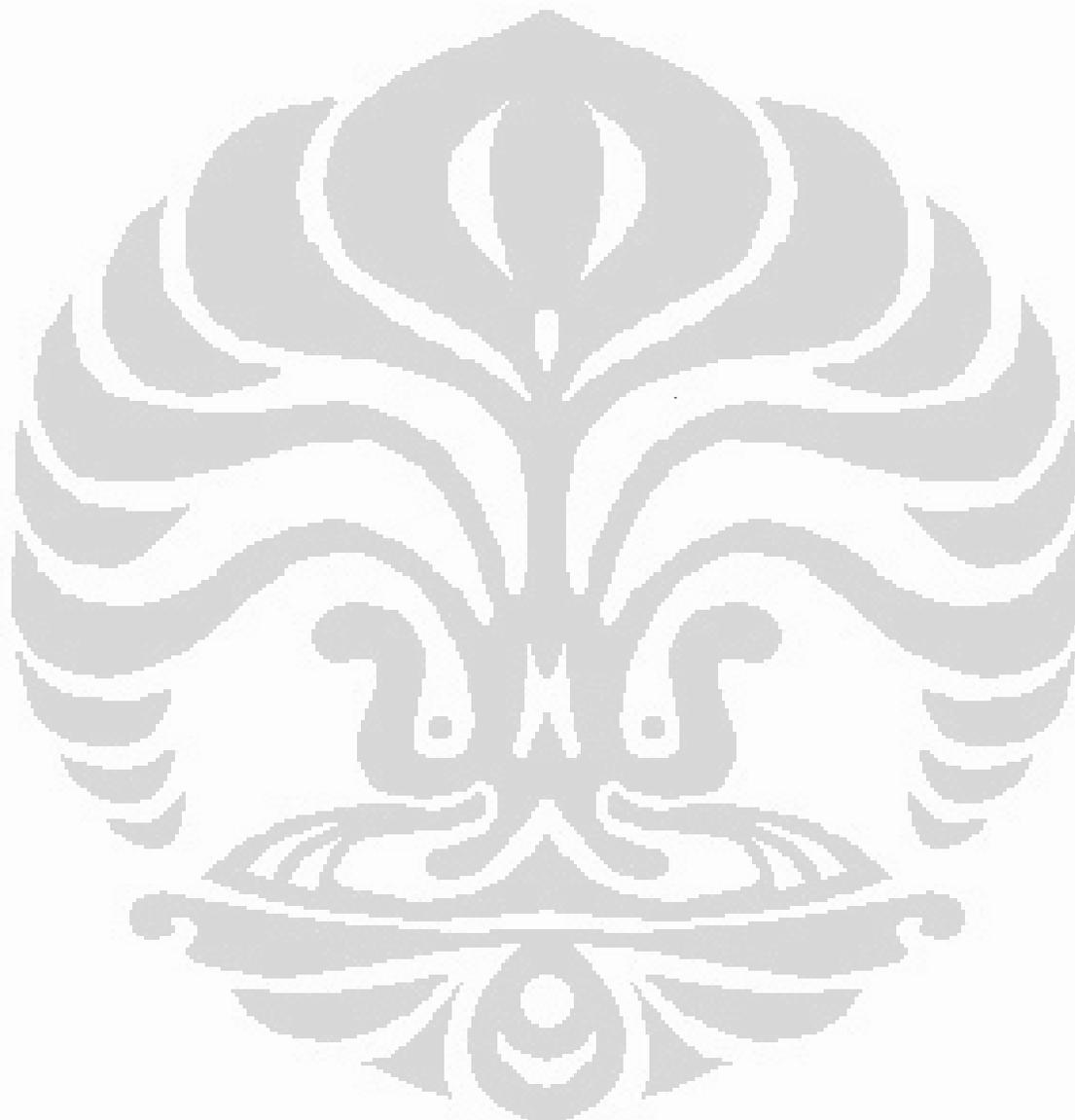
Nama Perusahaan	Negara Asal	Industri	Jumlah Aset (jutaan USD)
General Electric	Amerika	electrical & electronic equipment	795.337
Deutsche Post AG	Jerman	transport & storage	346.630
Toyota Motor Corporation	Jepang	motor vehicles	284.722
Ford Motor Company	Amerika	motor vehicles	276.459
Electricite De France	Perancis	electricity, gas & water	274.031
Royal Dutch/Shell Group	Belanda/ Inggris Raya	petroleum xploration/ ref/distribution	269.470
Vodafone Group Plc	Inggris Raya	telecommunications	254.948
ExxonMobil	Amerika	petroleum xploration/ ref/distribution	242.082
British Petroleum Company	Inggris Raya	petroleum xploration/ ref/distribution	236.076
Volkswagen Group	Jerman	motor vehicles	213.981
EON AG	Jerman	electricity, gas & water	202.111
DaimlerChrysler AG	Jerman/ Amerika	motor vehicles	198.872
China National	Cina	petroleum	191.185

Petroleum Corporation		xploration/ ref/distribution	
CITIC Group	Cina	diversified	180.945
ConocoPhilips	Amerika	petroleum xploration/ ref/distribution	177.757
Deutsche Telecom AG	Jerman	telecommunications	177.630
Total	Perancis	petroleum xploration/ ref/distribution	167.144
Wal-Mart Stores	Amerika	retail	163.514
Telefonica SA	Spanyol	telecommunications	155.856
Eni Group	Italia	petroleum xploration/ ref/distribution	149.360
France Telecom	Perancis	telecommunications	148.952
General Motors	Amerika	motor vehicles	148.883
Chevron Corporation	Amerika	petroleum xploration/ ref/distribution	148.786
Procter & Gamble	Amerika	diversified	143.992
Siemens AG	Jerman	electrical & electronic equipment	134.778
ArcelorMittal	Luxemburg	metals product	133.625
BMW AG	Jerman	motor vehicles	131.013
RWE Group	Jerman	electricity, gas & water	123.113
IBM	Amerika	electrical & electronic equipment	120.431
Endesa	Spanyol	electricity, gas &	120.244

		water	
Suez	Perancis	electricity, gas & water	116.483
Pfizer Inc	Amerika	pharmaceuticals	115.268
Eads	Belanda	aircraft & parts	111.079
Honda Motor Co Ltd	Jepang	motor vehicles	110.663
Sony Corporation	Jepang	electrical & electronic equipment	110.112
Sanofi-aventis	Perancis	pharmaceuticals	105.865
Nissan Motor Co Ltd	Jepang	motor vehicles	104.732
Mitsubishi Motors	Jepang	motor vehicles	103.109
Petronas Petroleum Bhd	Malaysia	petroleum exploration/ ref/distribution	102.616
Hutchison Whampoa	Hongkong	diversified	102.445
Nestle SA	Amerika	food, beverages & tobacco	101.874
Rio Tinto Plc	Australia / Inggris Raya	mining & quarrying	101.391
Renault SA	Perancis	motor vehicles	100.395
Samsung Electronics	Korea	electrical & electronic equipment	99.749
Hitachi Ltd	Jepang	electrical & electronic equipment	92.376
Hyundai Motor	Korea	motor vehicles	89.571
Statoil Asa	Norwegia	petroleum exploration/ ref/distribution	89.319

Hewlett-Packard	Amerika	electrical & electronic equipment	88.699
Fiat Spa	Italia	motor vehicles	88.526
Mitsui Co Ltd	Jepang	wholesale trade	85.008

Sumber: Diolah dari UNCTAD's World Investment Report 2009



**Daftar Investasi Saham Keluar Terbesar
Negara OECD 2005**

Negara Anggota OECD	Investasi Saham			
	Keluar		Masuk	
	Nilai (jutaan USD)	% total OECD	Nilai (jutaan USD)	% total OECD
Amerika Serikat	2.453.933	27,75	1.874.263	25,91
Inggris Raya	1.228.326	13,89	831.357	11,49
Perancis	882.287	9,98	627.931	8,68
Jerman	801.351	9,06	660.428	9,13
Belanda	629.941	7,12	447.121	6,18
Swiss	426.195	4,82	168.989	2,34
Kanada	394.681	4,46	350.030	4,84
Jepang	386.581	4,37	100.899	1,39
Spanyol	372.944	4,22	371.451	5,14
Italia	293.475	3,32	224.079	3,10
Swedia	208.836	2,36	171.768	2,37
Australia	178.335	2,02	206.348	2,85
Denmark	127.101	1,44	115.495	1,60
Irlandia	102.865	1,16	166.230	2,30
Norwegia *)	89.980	-	76.110	-
Finlandia	81.369	0,92	54.308	0,75
Austria	68.187	0,77	62.524	0,86
Portugal	44.072	0,50	65.598	0,91
Korea	38.638	0,44	104.879	1,45
Luksemburg	33.410	0,38	43.721	0,60
Meksiko	28.040	0,32	209.564	2,90
Yunani	13.602	0,15	29.189	0,40
Selandia Baru	12.592	0,14	49.997	0,69
Islandia	10.085	0,11	4.696	0,06

Turki	8.315	0,09	64.433	0,89
Hungaria	7.993	0,09	61.886	0,86
Polandia	6.439	0,07	89.544	1,24
Republik Ceko	3.610	0,04	60.662	0,84
Slovakia	617	0,01	15.796	0,22
Negara G-7	6.440.634	72,83	4.668.987	64,55
Total OECD	8.843.821	100,00	7.233.187	100,00

Catatan: *) data tahun 2004

Sumber: Diolah dari <http://www.oecd.org/daf/investment>



**Daftar Investasi Fisik Keluar Terbesar
Negara OECD 2006**

Negara Anggota OECD	Investasi Fisik			
	Keluar		Masuk	
	Nilai (jutaan USD)	% total OECD	Nilai (jutaan USD)	% total OECD
Amerika Serikat	248.856	22,05	183.571	19,36
Perancis	115.101	10,20	139.566	14,72
Spanyol	89.728	7,95	20.027	2,11
Luksemburg	81.552	7,23	97.013	10,23
Swiss	81.547	7,23	25.101	2,65
Inggris Raya	79.470	7,04	139.566	14,72
Jerman	79.466	7,04	42.891	4,52
Belgia	62.587	5,55	71.519	7,54
Jepang	50.244	4,45	(6.503)	(0,69)
Kanada	42.134	3,73	66.605	7,02
Italia	42.060	3,73	16.587	1,75
Swedia	24.146	2,14	27.837	2,94
Belanda	22.705	2,01	4.373	0,46
Irlandia	22.114	1,96	12.818	1,35
Australia	20.987	1,86	24.547	2,59
Norwegia	20.476	1,81	6.773	0,71
Denmark	8.195	0,73	7.033	0,74
Korea	7.129	0,63	36.456	3,84
Meksiko	5.758	0,51	19.037	2,01
Yunani	4.169	0,37	5.366	0,57
Islandia	4.160	0,37	3.233	0,34
Polandia	4.134	0,37	13.860	1,46
Austria	4.089	0,36	249	0,03
Portugal	3.509	0,31	7.375	0,77

Hungaria	3.015	0,27	6.097	0,64
Republik Ceko	1.345	0,12	5.963	0,63
Turki	934	0,08	20.165	2,13
Slovakia	369	0,03	4.232	0,45
Finlandia	9	0,00	3.708	0,39
Selandia Baru	(1.641)	(0,15)	1.570	0,17
Negara G-7	657.331	58,26	582.283	61,41
Negara Uni Eropa	638.901	56,62	537.482	56,68
Total OECD	1.128.349	100,00	948.191	100

Sumber: Diolah dari <http://www.oecd.org/daf/investment>



**Jumlah Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Dunia
Tahun 2005**

Nama Bursa	Perusahaan Terdaftar		
	Lokal	Asing	Total
Amerika			
American SE	495	100	595
Bermuda SE	19	37	56
Buenos Aires SE	100	4	104
Colombia SE	98	0	98
Lima SE	193	31	224
Mexican SE	150	176	326
NASDAQ	2.832	332	3.164
New York SE	1.818	452	2.270
Santiago SE	245	1	246
Sao Paulo SE	379	2	381
TMX Group Canada	3.719	39	3.758
Asia Pasifik			
Australian SE	1.643	71	1.714
Bombay SE	4.763	0	4.763
Bursa Malaysia	1.015	4	1.019
Colombo SE	239	0	239
Hong Kong SE	1.126	9	1.135
Jakarta SE	336	0	336
Korea Exchange	1.616	0	1.616
National SE India	1.034	0	1.034
New Zealand Exchange	153	32	185
Osaka SE	1.063	1	1.064
Philippine SE	235	2	237
Shanghai SE	833	0	833

Shenzhen SE	544	0	544
Singapore SE	564	122	686
Taiwan SE	691	5	696
Thailand SE	504	0	504
Tokyo SE	2.323	28	2.351
Eropa-Afrika-Timur Tengah			
Athens Exchange	302	2	304
Borsa Italiana	275	7	282
Budapest SE	44	0	44
Cairo SE	744	0	744
Cyprus SE	119	0	119
Deutsche Borse	648	116	764
Euronext	966	293	1.259
Irish SE	53	13	66
Istanbul SE	304	0	304
Johannesburg SE	348	25	373
Ljubljana SE	116	0	116
London SE	2.757	334	3.079
Luxembourg SE	39	206	245
Malta SE	13	0	13
Mauritius SE	30	0	30
OMX	656	22	678
Oslo Bors	191	28	219
Swiss Exchange	284	116	400
Tehran SE	408	0	408
Tel Aviv SE	NA	NA	584
Warsaw SE	234	7	241
Wiener Borse	92	19	111

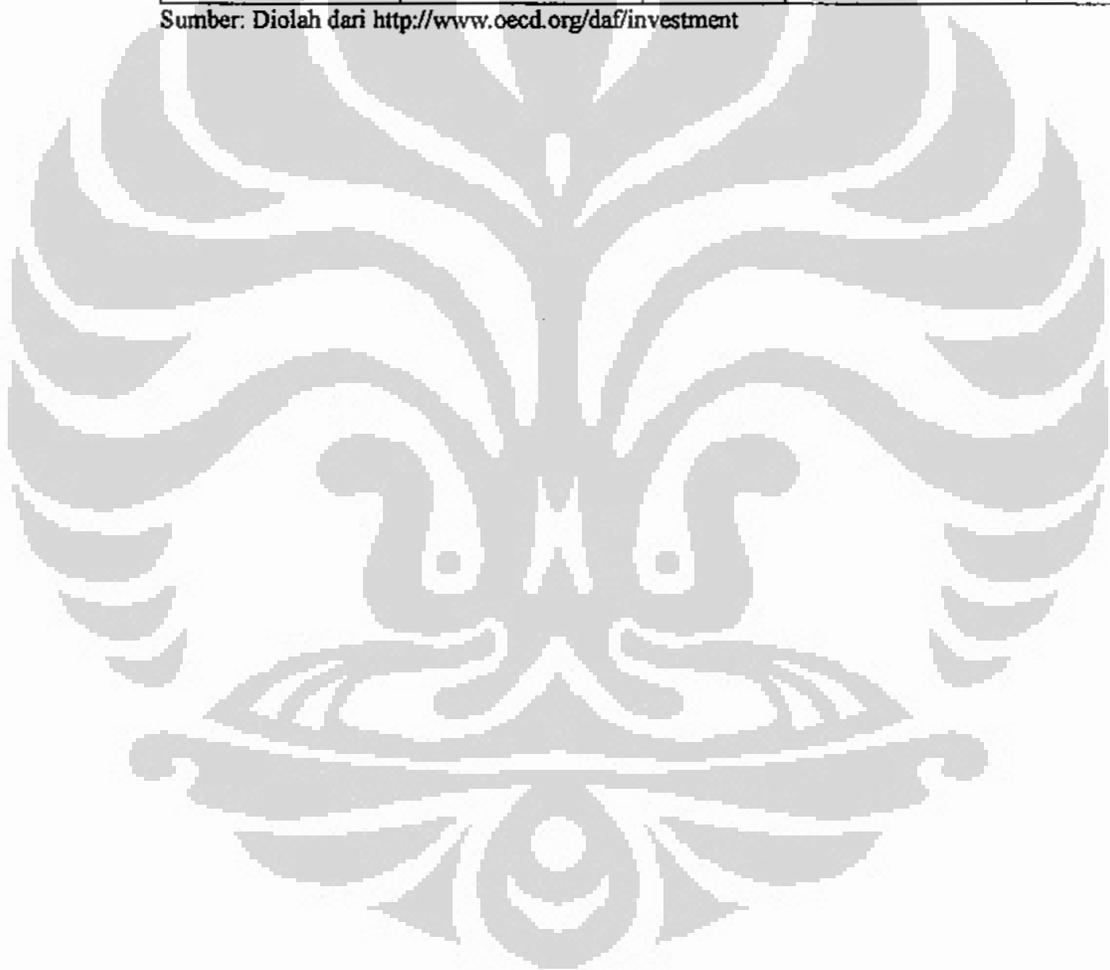
Sumber: Choi dan Meek (2005)

**Perdagangan Ekspor Barang
Negara OECD 2006**

Negara Anggota OECD	Perdagangan Barang-barang			
	Ekspor		Impor	
	Nilai (milyaran USD)	% total OECD	Nilai (milyaran USD)	% total OECD
Jerman	1.125,8	15,00	919,0	10,96
Amerika	1.037,0	13,82	1.919,0	22,90
Jepang	646,7	8,62	579,1	6,91
Perancis	479,0	6,38	529,9	6,32
Inggris Raya	444,4	5,92	606,4	7,23
Italia	400,6	5,34	405,7	4,84
Kanada	388,0	5,17	349,9	4,17
Belanda	370,3	4,93	331,5	3,96
Belgia	369,2	4,92	353,7	4,22
Korea	325,5	4,34	309,4	3,69
Meksiko	250,0	3,33	256,1	3,06
Spanyol	214,1	2,85	330,0	3,94
Swiss	147,9	1,97	141,4	1,69
Swedia	147,4	1,96	127,1	1,52
Austria	134,1	1,79	134,2	1,60
Australia	123,3	1,64	132,7	1,58
Norwegia	122,2	1,63	64,2	0,77
Polandia	109,3	1,46	125,6	1,50
Irlandia	108,9	1,45	76,4	0,91
Republik Ceko	95,1	1,27	93,4	1,11
Denmark	90,1	1,20	84,5	1,01
Turki	85,3	1,14	137,4	1,64
Finlandia	77,3	1,03	69,5	0,83
Hungaria	74,1	0,99	77,0	0,92

Portugal	42,1	0,56	65,9	0,79
Slovakia	41,7	0,56	44,4	0,53
Selandia Baru	22,4	0,30	26,4	0,31
Yunani	20,9	0,28	63,7	0,76
Luksemburg	13,6	0,18	19,5	0,23
Islandia	3,5	0,05	5,6	0,07
Negara G-7	4.521,5	60,24	5.309,0	63,34
Negara Uni Eropa	4.033,9	53,74	4.120,2	49,16
Total OECD	7.505,9	100	8.381,7	100

Sumber: Diolah dari <http://www.oecd.org/daf/investment>



**Tindakan Otoritas Pajak Dunia
Menghadapi Konvergensi IFRSs**

Negara	Sistem	Tindakan Otoritas Pajak
Amerika Utara		
Antigua dan Barbuda	Kuasi-dependen	-
Aruba	Kuasi-dependen	-
Bahamas	-	-
Barbados	Kuasi-dependen	-
Bermuda	-	-
Kanada	Independen	Otoritas pajak membuat komite penasehat yang anggotanya berasal dari regulator, industri dan perwakilan lembaga akuntan untuk mempertimbangkan dampak dari mengadopsi IFRSs.
Kepulauan Cayman	-	-
Kosta Rika	Kuasi-dependen	-
Republik Dominika	Kuasi-dependen	-
El Savador	Kuasi-dependen	-
Guatemala	Dependen	-
Honduras	Kuasi-dependen	-
Jamaika	Kuasi-dependen	-
Meksiko	Kuasi-dependen (Income Tax) dan Independen (Flat Tax)	-
Antilles Belanda	Kuasi-dependen	-
Nikaragua	-	-
Panama	Independen	-
St. Lucia	Kuasi-dependen	-

Trinidad dan Tobago	Kuasi-dependen	-
Amerika Serikat	Independen	Karena adopsi IFRSs dapat mempengaruhi posisi pajak perusahaan, otoritas pajak mengeluarkan petunjuk tentang hal tersebut.
Amerika Selatan		
Argentina	Kuasi-dependen	-
Bolivia	Kuasi-dependen	-
Brasil	Kuasi-dependen	Otoritas pajak mengeluarkan petunjuk yang memberikan informasi bahwa IFRSs tidak berdampak terhadap penghasilan kena pajak selama dua tahun pertama, jika memilih the Transitory Tax Regime (RTT). Dampak dari IFRSs setelah dua tahun pertama dan buat perusahaan yang tidak memilih RTT masih belum pasti.
Cili	Kuasi-dependen	Otoritas pajak menyatakan bahwa adopsi IFRSs untuk penyajian laporan keuangan seharusnya tidak berdampak langsung terhadap pajak penghasilan. Wajib pajak seharusnya menganalisa dan mengeliminasi penyesuaian IFRSs dalam menghitung laba kena pajak.
Kolombia	Kuasi-dependen	-
Ekuador	Kuasi-dependen	-
Paraguay	-	-

Peru	Kuasi-dependen	Perusahaan diminta untuk mengajukan restitusi pajak berdasarkan Peruvian GAAP. Ini berarti bahwa adopsi IFRSs mempunyai sedikit dampak terhadap pajak penghasilan. Tetapi ada wilayah dimana IFRSs mempengaruhi posisi pajak karena UU pajak belum secara spesifik mengaturnya.
Uruguay	Kuasi-dependen	-
Venezuela	Kuasi-dependen	Adopsi IFRSs dapat berdampak pada pajak penghasilan.
Eropa		
Albania	Kuasi-dependen	Tahun pertama adopsi IFRSs di tahun 2008 mungkin menyebabkan implikasi cash tax yang signifikan.
Austria	Kuasi-dependen	-
Belgia	Kuasi-dependen	Adopsi IFRSs untuk tujuan hukum perusahaan belum diantisipasi.
Bulgaria	Kuasi-dependen	-
Cyprus	Kuasi-dependen	Ada perbedaan perlakuan pajak atas transaksi dalam IFRS 2 dan IAS 39.
Republik Ceko	Kuasi-dependen	-
Denmark	Independen	-
Estonia	Independen	Laba dikenakan pajak berdasarkan distribusinya. Jumlah distribusi laba ditentukan berdasarkan prinsip dalam the Estonian GAAP yang secara umum sama dengan IFRSs.
Finlandia	Kuasi-	-

	independen	
Perancis	Kuasi-dependen	-
Georgia	Kuasi-dependen	-
Jerman	Kuasi-dependen	Otoritas pajak menyatakan bahwa perubahan besar yang dihasilkan dari peraturan akuntansi tidak akan meliputi penghitungan laba kena pajak.
Yunani	Kuasi-dependen	-
Hungaria	Kuasi-dependen	Perusahaan diminta untuk mengajukan restitusi pajak berdasarkan local GAAP. Ini berarti bahwa adopsi IFRSs mempunyai sedikit dampak terhadap laba kena pajak.
Islandia	Kuasi-dependen	Penyesuaian adopsi IFRSs dihilangkan saat menghitung penghasilan kena pajak saat tahun adopsi dilakukan.
Irlandia	Kuasi-dependen	Pengaturan transisi dilakukan untuk menyebar dampak pajak dalam rangka menghindari pengurangan ganda biaya atau pemajakan ganda penghasilan selama lima tahun periode.
Isle of Man	-	-
Italia	Kuasi-dependen	-
Lithuania	Kuasi-dependen	-
Luksemburg	Dependen	Adopsi IFRSs secara signifikan dapat berdampak pada posisi pajak. Ada usulan untuk menyebar dampak pajak tersebut dalam dua

		sampai lima tahun periode.
Makedonia	Kuasi-dependen	-
Malta	Kuasi-dependen	-
Moldova	Kuasi-dependen	-
Montenegro	-	-
Belanda	Kuasi-dependen	Dampak dari penyesuaian adopsi IFRSs dihilangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak saat tahun adopsi dilakukan, tetapi dapat mempengaruhi penghasilan kena pajak tergantung dari ketentuan pajak di tiap-tiap akun yang dilakukan penyesuaian.
Norwegia	Independen	Terdapat ketentuan pajak khusus yang mengeliminasi dampak dari perubahan akuntansi untuk hal-hal tertentu.
Polandia	Independen	-
Portugal	Kuasi-dependen	Dampak akan disebar selama lima tahun periode. Terdapat ketentuan pajak baru mulai 1 Januari 2010 untuk mengakomodasi IFRSs dan perubahan sistem akuntansi.
Rumania	Kuasi-dependen	-
Federasi Rusia	Independen	Perusahaan diminta menghitung beban pajak mereka dengan menyimpan pembukuan akuntansi pajak yang terpisah. Tetapi, dalam praktek, banyak perusahaan yang membuat pembukuan pajak berdasarkan pembukuan perusahaan dengan

		beberapa penyesuaian pajak.
Serbia	Kuasi-dependen	-
Republik Slovakia	Kuasi-dependen	Jika perusahaan IFRSs memilih IFRSs sebagai dasar, saat penyesuaian pertama seharusnya dimasukkan dalam menghitung pajak dengan beberapa penyesuaian khusus.
Slovenia	Kuasi-dependen	-
Spanyol	Kuasi-dependen	Ketentuan pajak baru dikeluarkan yang bertujuan untuk membuat tax neutral dalam masa transisi.
Swedia	Kuasi-dependen	-
Swiss	Kuasi-dependen	Draft ketentuan pajak baru akan mengizinkan IFRSs digunakan dalam pembukuan perusahaan yang akan mengubah dasar dari restitusi pajak bagi perusahaan. Dampak pajak akan disebar selama tiga tahun periode. Saat ini belum terdapat petunjuk dari otoritas pajak dan draft akan didiskusikan secara ekstensif sebelum diundangkan.
Ukraina	Kuasi-dependen	-
Inggris Raya	Kuasi-dependen	Setiap penyesuaian transisi IFRSs secara umum dikenakan pajak pada tahun dilakukan adopsi dengan beberapa pengecualian, yang dapat disebar selama sepuluh tahun periode. Saat ini terdapat perundang-

		undangan perpajakan yang mengatur konversi IFRSs dan berusaha menetralisasi perbedaan yang sering muncul karena proses adopsi. Meskipun demikian, beberapa perbedaan masih akan tetap muncul.
ASIA		
Afganistan	Kuasi-dependen	-
Armenia	Independen	Perusahaan diminta menghitung beban pajak mereka dengan menyimpan pembukuan akuntansi pajak yang terpisah. Tetapi, dalam praktek, banyak perusahaan yang membuat pembukuan pajak berdasarkan pembukuan perusahaan dengan beberapa penyesuaian pajak.
Azerbaijan	Kuasi-dependen	Untuk perusahaan yang mengadopsi IFRSs, beberapa penyesuaian diminta untuk menentukan laba kena pajak.
Cina	Dependen	-
Hongkong SAR	Kuasi-dependen	Penghasilan kena pajak berdasarkan pada local GAAP dengan beberapa penyesuaian diminta.
India	Kuasi-dependen	India masih dalam fase awal mendiskusikan IFRSs untuk keperluan pelaporan keuangan.
Indonesia	Kuasi-dependen	Tidak ada petunjuk dampak dari adopsi IFRSs yang dikeluarkan otoritas pajak.

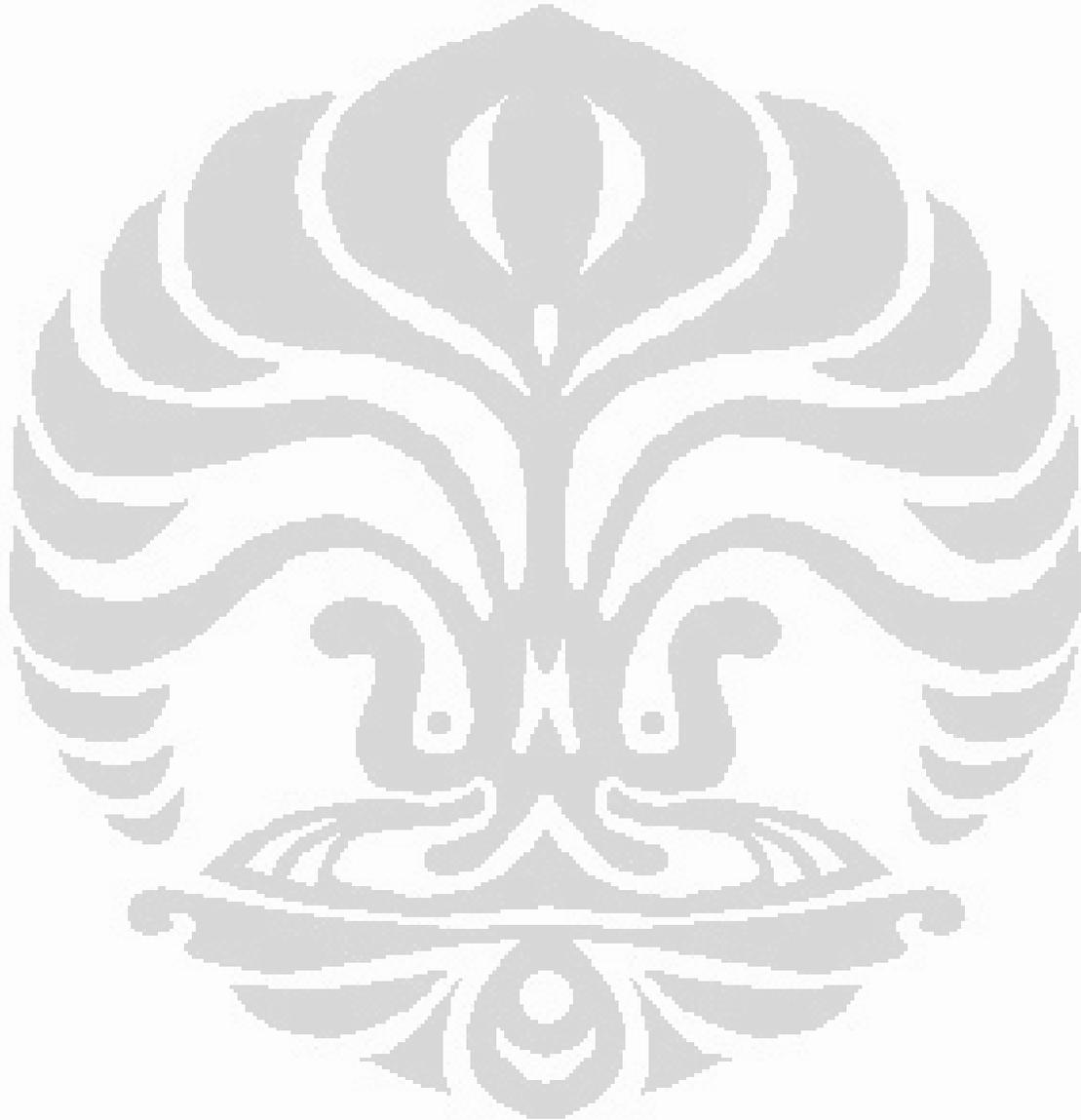
		Transaksi tertentu diperlakukan secara berbeda untuk keperluan perpajakan.
Israel	-	-
Jepang	Kuasi-dependen	-
Kazakhstan	Kuasi-dependen	-
Korea Selatan	Kuasi-dependen	Amendemen dan penyesuaian terhadap UU pajak.
Kyrgyztan	-	-
Libanon	Kuasi-dependen	-
Makao SAR	Dependen	-
Malaysia	Independen	Otoritas pajak mengindikasikan bahwa mereka mungkin akan mempertimbangkan konvergensi parsial standar akuntansi untuk hal-hal tertentu.
Pakistan	Kuasi-dependen	-
Filipina	Independen	Otoritas pajak melakukan pelatihan dan diskusi internal sejak tahun 2006
Qatar	Kuasi-dependen	Otoritas pajak meminta entitas untuk menyiapkan laporan keuangan berdasarkan IFRSs dalam restitusi pajak. Besarnya penyusutan yang digunakan untuk menghitung laba kena pajak adalah salah satu hal yang ditentukan oleh UU pajak dan terdapat beberapa biaya tertentu yang tidak diijinkan, yang tidak masuk dalam penghitungan penghasilan kena pajak sesuai UU

		pajak.
Arab Saudi	Kuasi-dependen	UU pajak Saudi tidak mengizinkan penggunaan IFRSs dan penyesuaian dilakukan dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan hukum Saudi. Tetapi IFRSs dapat mempengaruhi pembukuan dimana belum terdapat petunjuk yang mengatur dalam standar akuntansi lokal, yang dapat menghasilkan dampak perpajakan.
Singapura	Kuasi-dependen	-
Taiwan	Kuasi-dependen	-
Thailand	Independen	Dampak dari konversi IFRSs seharusnya sangat sedikit, meskipun demikian terdapat beberapa ketentuan dimana pajak mengikuti perlakuan akuntansi.
Turki	Dependen	Saat ini belum ada drat peraturan baru untuk merespon adopsi IFRSs.
Uzbekistan	Dependen	-
Vietnam	Kuasi-dependen	-
Palestina	Kuasi-dependen	-
AFRIKA		
Angola	-	-
Botswana	Kuasi-dependen	-
Kamerun	Kuasi-dependen	-
Pantai Gading	Kuasi-dependen	-
Demokratik Kongo	Kuasi-dependen	-
Mesir	Independen	-
Guinea	-	-
Gabon	Kuasi-dependen	-

Ghana	Dependen	-
Kenya	Dependen	-
Madagaskar	Kuasi-dependen	-
Malawi	Kuasi-Dependen	-
Mauritius	Kuasi-dependen	Dibuat beberapa penyesuaian yang diantaranya meliputi: beberapa <i>non-tax deductible item</i> , <i>fair value gains</i> dan <i>losses</i> , <i>non taxable/tax deductible</i> .
Maroko	Kuasi-dependen	-
Mozambik	Kuasi-dependen	-
Namibia	Kuasi-dependen	-
Nigeria	Kuasi-dependen	Adopsi IFRSs belum diantisipasi oleh otoritas pajak. Perusahaan di Nigeria masih diminta menyimpan pembukuan berdasarkan local GAAP.
Republik Kongo	-	-
Senegal	-	-
Afrika Selatan	Kuasi-dependen	Perundang-undangan perusahaan sedang diubah yang kemungkinan akan mempengaruhi pajak perusahaan.
Swaziland	Kuasi-dependen	-
Tanzania	Kuasi-dependen	-
Uganda	Kuasi-dependen	-
Zambia	-	-
Zimbabwe	Kuasi-dependen	-
OCEANIA		
Australia	Independen	Laba kena pajak didasarkan atas hukum pajak meskipun IFRSs

		mungkin berpengaruh pada beberapa penghitungan, dimana nilai dihitung berdasarkan standar akuntansi.
Selandia Baru	Kuasi-dependen	-

Sumber: diolah dari data IFRS *Adoption by Country* - PricewaterhouseCoopers



**Daftar Exposure Draft
Tahun 2005**

Tanggal Dikeluarkan	Nama Exposure Draft
1. 2 Juni 2005	Basic Standard
2. 22 Juni 2005	Foreign Currency Translation
3. 22 Juni 2005	Segment Reporting
4. 22 Juni 2005	Presentation of Financial Statements
5. 19 Juli 2005	Impairment of Assets
6. 19 Juli 2005	Business Combinations
7. 19 Juli 2005	Consolidated Financial Statements
8. 19 Juli 2005	Biological Assets (Agriculture)
9. 19 Juli 2005	Exploration for Oil and Natural Gas
10. 19 Juli 2005	Investment Property
11. 19 Juli 2005	Donation and Subsidies
12. 20 Agustus 2005	Insurance Contracts
13. 20 Agustus 2005	Reinsurance Contracts
14. 20 Agustus 2005	Employee Benefits
15. 20 Agustus 2005	Enterprise Annuity
16. 20 Agustus 2005	Earning per Share
17. 20 Agustus 2005	Income Tax
18. 23 September 2005	Recognition and Measurement of Financial Instruments
19. 23 September 2005	Transfer of Financial Assets
20. 23 September 2005	Hedge Accounting
21. 23 September 2005	Presentation and Disclosure of Financial Instruments

Sumber: <http://www.iasplus.com>

**Indian Accounting Standards
per bulan Oktober 2000**

Indian Accounting Standards		International Accounting Standards	
No.	Nama	No.	Nama
1	Disclosure of Accounting Policies	1	Presentation of Financial Statements
2	Valuation of Inventories	2	Inventories
6	Depreciation Accounting	4	Depreciation Accounting
3	Cash Flow Statements	7	Cash Flow Statements
5	Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies.	8	Net Profit or Loss for the Period, Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies
4	Contingencies and Events Occurring after the Balance Sheet Date	10	Events after the Balance Sheet Date
7	Accounting for Construction Contracts	11	Construction Contracts
17	Segment Reporting	14	Segment Reporting
10	Accounting for Fixed Assets	16	Property, Plant and Equipment
19	Leases	17	Leases
9	Revenue Recognition	18	Revenue
15	Accounting for Retirement Benefits in the Financial Statements of Employers	19	Employee Benefits
12	Accounting for Government Grants	20	Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
11	Accounting for the Effects of Changes in Foreign Exchange	21	The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

	Rates		
14	Accounting for Amalgamations	22	Business Combinations
16	Borrowing Costs	23	Borrowing Costs
18	Related Party Disclosures	24	Related Party Disclosures
13	Accounting for Investments	25	Accounting for Investments
8	Accounting for Research and Development	38	Intangible Asset

Sumber: <http://www.iasplus.com>



Kalender Adopsi IFRSs oleh MASB

Standar / Interpretasi	Tanggal Efektif IASB	Rencana Tanggal Efektif di Malaysia
IFRS 8 Operating Segments	1 Januari 2009	1 Juli 2009
IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement	1 Januari 2005	1 Januari 2010
IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures	1 Januari 2007	1 Januari 2010
IFRS 4 Insurance Contracts	1 Januari 2005	1 Januari 2010
IFRIC Interpretation 9 Reassessment of Embedded Derivatives	1 Juni 2006	1 Januari 2010
IFRIC Interpretation 10 Interim Financial Reporting and Impairment	1 Nopember 2006	1 Januari 2010
IAS 23 Borrowing Cost (revised)	1 Januari 2009	1 Januari 2010
Amendment to IFRS 2 Share-based Payment - Vesting Condition and Cancellations	1 Januari 2009	1 Januari 2010
IFRIC Interpretation 11 IFRS 2 – Group and Treasury Share Transactions	1 Maret 2007	1 Januari 2010
IFRIC Interpretation 12 Service Concession Agreements	1 Januari 2008	1 Januari 2010
IFRIC Interpretation 13 Customer Loyalty Programmes	1 Juli 2008	1 Januari 2010
IFRIC Interpretation 14 FRS 119 – The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction	1 Januari 2008	1 Januari 2010
IAS 1 Presentation of Financial Statements (revised)	1 Januari 2009	1 Januari 2010
Amendments to IFRS 1 and IAS 27 Cost	1 Januari 2009	1 Januari 2010

of an Investment in a Subsidiary, Jointly Controlled Entity or Associate		
Annual Improvements to IFRSs	1 Januari 2009	1 Januari 2010
Amendments to IAS 32 and IAS 1: Puttable Financial Instruments and Obligations arising on Liquidation	1 Januari 2009	1 Januari 2010
Amendments to IAS 39: Eligible Hedged Items	1 Juli 2009	1 Januari 2010
Amendments to IAS 39 and IFRS 7: Reclassification of Financial Assets	1 Juli 2008	1 Januari 2010
Amendments to IFRS 7 Improving Disclosures about Financial Instruments	1 Januari 2009	1 Januari 2010
Amendments to IFRIC 9 and IAS 39 Embedded Derivatives	30 Juni 2009	1 Januari 2010
IFRS 3 Business Combinations (revised)	1 Juli 2009	1 Juli 2010
IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements	1 Juli 2009	1 Juli 2010
IFRS 1 First-time Adoption of IFRS (revised)	1 Januari 2009	1 Juli 2010
IFRIC Interpretation 15 Agreements for the Construction of Real Estate	1 Januari 2009	1 Juli 2010
IFRIC Interpretation 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation	1 Oktober 2008	1 Juli 2010
IFRIC Interpretation 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners	1 Juli 2009	1 Juli 2010
IFRIC Interpretation 18 Transfers of Assets from Customers	1 Juli 2009	1 Juli 2010
IAS 41 Agriculture	1 Januari 2003	belum ada
IFRIC Interpretation 4 Determining whether an Arrangement Contains a Lease	1 Januari 2006	belum ada

Sumber: <http://www.iasplus.com>

Proyeksi Distribusi PMA Tahunan 2007 – 2011

Negara	Milyar US\$	Peringkat
Cina	86,8	3
Hongkong SAR	48,0	8
Rusia	31,4	13
Brasil	27,5	14
Singapura	27,1	15
Meksiko	22,7	17
India	20,4	18
Turki	20,0	20
Thailand	8,9	27
Korea Selatan	7,2	31
Taiwan	7,1	32
Malaysia	6,8	34
INDONESIA	6,6	36
Vietnam	6,5	38
Filipina	2,4	55
Kenya (urutan terbawah)	0,1	82

Sumber: Basri (2009) dikutip dari Economist Intelligence Unit

Investasi Masuk dan Keluar Indonesia

Tahun	Investasi Keluar Dari Indonesia	Investasi Masuk Ke Indonesia	Investasi Neto Indonesia
1998	-	- 241	- 241
1999	-	- 1,865	- 1,865
2000	-	- 4,551	- 4,551
2001	-	- 2,977	- 2,977
2002	-	145	145
2003	-	- 597	- 597
2004	- 3,408	1,896	- 1,512
2005	- 3,065	8,336	5,271
2006	- 2,703	4,914	2,211
2007	- 4,790	6,928	2,139
2008	- 5,900	7,919	2,019

Keterangan: dalam milyar dollar Amerika
Sumber: UNCTAD, World Investment Report (2009)

Rasio Stok Investasi terhadap GDP Sejumlah Negara

Negara	Rasio Stok Investasi Terhadap PDB (%)
INDONESIA	5,2
India	5,7
Bangladesh	6,3
Sri Lanka	10,9
Cina	11,1
Pakistan	11,4
Taiwan	14,2
Filipina	14,6
Peru	20,7
Brasil	20,8
Venezuela	25,0
Argentina	27,4
Thailand	33,0
Malaysia	36,0
Ekuador	39,9
Kamboja	41,6
Bolivia	44,6
Vietnam	54,8
Chili	55,4
Singapura	159,0
ASIA	24,9
AMERIKA SELATAN	26,0

Sumber: UNCTAD, World Investment Report (2007)

**Kondisi Sektor Keuangan Dunia
Tahun 2009**

Negara	Market capitalization of listed domestic companies		Portfolio Investment, Equity (BoP)	Stocks Traded, Total Value
	Milyar US\$	(% GDP)	Milyar US\$	(% GDP)
Amerika Serikat	15.077,300	105,8	160,534	327,8
Cina	5.007,650	100,5	28,161	179,7
Jepang	3.377,890	66,7	12,432	82,7
Inggris Raya	2.796,440	128,6	64,966	156,5
Hongkong SAR	2.291,580	-	4,123	-
Perancis	1.972,040	74,4	68,285	51,6
Kanada	1.680,960	125,8	23,349	92,8
Jerman	1.297,570	38,8	11,806	38,5
Spanyol	1.297,230	88,8	9,378	109,5
Australia	1.258,460	136,1	-	82,4
India	1.179,240	90,0	21,111	83,1
Brasil	1,167,330	74,3	37,071	41,3
Swiss	1.070,690	-	9,241	-
Afrika Selatan	704,822	246,5	9,357	119,8
Singapura	310,766	170,5	-	138,4
Malaysia	255,952	133,6	-	38,1
INDONESIA	178,191	33,0	0,787	21,3
Thailand	138,189	52,4	1,871	51,1
Filipina	80,132	49,9	-	10,7
Total Dunia	48.713,700	-	712,775	141,9

Catatan: Listed domestic companies tidak termasuk investment companies, mutual funds atau collective investment vehicles lainnya

Sumber: World Bank

Urutan Daya Saing 58 Negara

Negara	2007	2008	2009	2010
Singapura	2	2	3	1
Hongkong	3	3	2	2
Amerika Serikat	1	1	1	3
Australia	12	7	7	5
Taiwan	18	13	23	8
Malaysia	23	19	18	10
Cina	15	17	20	18
Korea Selatan	29	31	27	23
Thailand	33	27	26	26
Jepang	24	22	17	27
India	27	29	30	31
INDONESIA	54	51	42	35
Filipina	45	40	43	39
Venezuela	55	58	57	58

Sumber: International Institute for Management Development, World Competitiveness Yearbook (2010)

Skor Corporate Governance Sejumlah Negara Asia 2000 – 2003

Negara	2000	2001	2002	2003
Singapura	7.5	7.4	7.4	7.7
Hongkong	7.1	6.8	7.2	7.3
Taiwan	5.7	5.3	5.8	5.8
India	5.6	5.4	5.9	6.6
Korea Selatan	5.2	3.8	4.7	5.5
Malaysia	3.2	3.7	4.7	5.5
Cina	3.6	3.4	4.4	4.3
Thailand	2.8	3.7	3.8	4.6
Filipina	2.9	3.3	3.6	3.7
INDONESIA	2.9	3.2	2.9	3.2

Catatan: Skor yang digunakan 0 (terburuk) hingga 10 (terbaik)

Sumber: Basri (2009) dikutip dari CLSA

**ED PSAK Revisi Berbasis IASs/IFRSs
2010**

No.	Exposure Draft SAK	Public Hearing	Referensi
1.	PSAK 3 (Revisi 2010), Laporan Keuangan Interim	27 April 2010	IAS 34, Interim Financial Reporting
2.	PSAK 18 (Revisi 2010), Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya	27 April 2010	IAS 26, Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
3.	PSAK 24 (Revisi 2010), Imbalan Kerja	27 April 2010	IAS 19, Employee Benefits
4.	PSAK 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan	14 Juli 2010	IFRS 7, Financial Instruments: Disclosures
5.	PSAK 50 (Revisi 2010), Instrumen Keuangan: Penyajian	14 Juli 2010	IAS 32, Financial Instruments: Presentation
6.	PSAK 53 (Revisi 2010), Pembayaran Berbasis Saham	14 Juli 2010	IFRS 2, Share-based Payment
7.	PSAK 8 (Revisi 2010), Peristiwa Setelah Tanggal Neraca	14 Juli 2010	IAS 10, Events After the Reporting Period
8.	PSAK 46 (Revisi 2010), Pajak Penghasilan	30 Agust 2010	IAS 12, Income Taxes
9.	PSAK 61 (Revisi 2010), Akuntansi Hibah Pemerintah dan	30 Agust 2010	IAS 20, Accounting for Government Grants and Disclosure of Government

	Pengungkapan Bantuan Pemerintah		Assistance
10.	PSAK 63 (Revisi 2010), Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi	30 Agust 2010	IAS 29, Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

Sumber: diolah dari berbagai sumber

